



**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2023**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2020;

21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
24. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2023;

**Memperhatikan** : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 1/S-HP/XVIII.SBY/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juli 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juli 2023

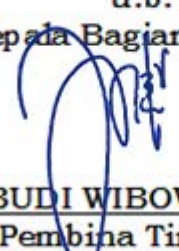
**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 30/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	7
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....	7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	9
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	9
2.2 Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022 .....	23
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	199
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	199
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	218
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	218
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	221
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	224
3.2.4 Kerangka Pendanaan 2023 .....	224
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	228
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	228
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....	231
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	258
BAB VI PENUTUP .....	527

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2021-2022 .....	9
Tabel 2. 2 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2022.....	11
Tabel 2. 3 IPM Kota Madiun Menurut Komponen.....	12
Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	15
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022 (%).....	17
Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2018-2022 .....	18
Tabel 2. 7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022 .....	20
Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	21
Tabel 2. 9 Profil Kemiskinan Tahun 2022 Kota Madiun .....	22
Tabel 2. 10 Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022 .....	23
Tabel 2. 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 .....	26
Tabel 2. 12 Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian/Lembaga .....	26
Tabel 2. 13 Capaian Komponen Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi .....	27
Tabel 2. 14 Hasil Penilaian Pemerintah Kota Madiun .....	31
Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Makro.....	33
Tabel 2. 16 Indeks Inovasi Daerah .....	39
Tabel 2. 17 Rekap Hasil Laporan IGA 2022.....	41
Tabel 2. 18 Capaian IGA Kota Madiun Tahun 2020-2022 .....	41
Tabel 2. 19 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022.....	48
Tabel 2. 20 IPM Kota Madiun .....	49
Tabel 2. 21 IPG Kota Madiun Tahun 2017-2022 .....	50
Tabel 2. 22 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2019-2022.....	69
Tabel 2. 23 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	72
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia 2023 .....	199
Tabel 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023.....	208
Tabel 3. 3 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Madiun 2023 .....	226
Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 .....	229
Tabel 4. 2 Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	230
Tabel 4. 3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024 .....	231
Tabel 4. 4 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat 2023.....	233
Tabel 4. 5 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 .....	234
Tabel 4. 6 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023.....	238
Tabel 4. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023.....	239
Tabel 4. 8 Pendanaan Per Prioritas Pembangunan .....	241
Tabel 4. 9 Anggaran Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.....	241
Tabel 4. 10 Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas, serta Pagu Indikatif Program Kota Madiun pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	255

Tabel 5. 1 Pagu Anggaran Perubahan per Urusan Pemerintahan 2023 .....	258
Tabel 5. 2 Pagu Anggaran Perubahan per Perangkat Daerah 2023.....	261
Tabel 5. 3 Perubahan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	263
Tabel 5. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	487



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun.....	11
Gambar 2. 2 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun Kota Madiun.....	13
Gambar 2. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun.....	14
Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Madiun.....	14
Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022.....	16
Gambar 2. 6 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2022.....	18
Gambar 2. 7 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun.....	19
Gambar 2. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	20
Gambar 2. 9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Ribuan Jiwa).....	22
Gambar 2. 10 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022.....	25
Gambar 2. 11 Realisasi Dashboard Manekin Tahun 2022.....	29
Gambar 2. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022.....	31
Gambar 2. 13 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	34
Gambar 2. 14 Indeks SPBE Kota Madiun.....	35
Gambar 2. 15 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	38
Gambar 2. 16 Indeks Kenyamanan Kota (Livable City).....	44
Gambar 2. 17 IPM Kota Madiun.....	49
Gambar 2. 18 Tingkat Kedudukan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.....	50
Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun.....	52
Gambar 2. 20 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun.....	52
Gambar 2. 21 Angka Harapan Hidup di Kota Madiun.....	53
Gambar 2. 22 IDG di Kota Madiun.....	55
Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019-2021.....	59
Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun Tahun 2018-2022.....	60
Gambar 2. 25 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.....	63
Gambar 2. 26 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban.....	66
Gambar 2. 27 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2018-2022.....	67
Gambar 2. 28 Angka Kemiskinan di Kota Madiun.....	68
Gambar 2. 29 Capaian Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2018-2022.....	71
Gambar 3. 1 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional.....	200
Gambar 3. 2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2023.....	203
Gambar 3. 3 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur.....	204
Gambar 3. 4 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur.....	205
Gambar 3. 5 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2023.....	208
Gambar 3. 6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan I tahun 2023.....	209
Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sampai Triwulan I tahun 2023.....	211
Gambar 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2022.....	212
Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.....	213

Gambar 3. 10 Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .....	214
Gambar 3. 11 Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.	214
Gambar 3. 12 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .....	215
Gambar 3. 13 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .....	215
Gambar 3. 14 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun .....	216
Gambar 3. 15 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	217
Gambar 4. 1 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024.....	228
Gambar 4. 2 Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2023 .....	234
Gambar 4. 3 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 .....	239

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen penting dan startegis Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2023.** RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2023. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

**Perubahan kebijakan anggaran perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.** Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2023 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2023. Sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2023. Demikian pula dengan kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap perubahan dalam pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.

**Perubahan terhadap RKPD perlu di lakukan sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan.** Dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023, yang meliputi : Perubahan Asumsi ekonomi Maro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2024, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah dalam bentuk perubahan RKPD.

**Penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.** Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343.

Berdasarkan regulasi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan tersebut diantaranya adalah 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

**Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada triwulan II dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun.** Jika terdapat perubahan dalam asumsi makro, kebijakan pemerintah, potensi pendapatan dan belanja daerah, maka penting untuk disusun dokumen Perubahan RKPD. Perubahan dalam dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, pergeseran (penambahan atau pengurangan) pagu indikatif pada masing-masing SKPD/urusan/prioritas beserta hal-hal yang mendasari perubahan tersebut. Tujuannya, agar tercipta kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

**Perubahan RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.** Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dokumen tersebut akan akan disepakati bersama antara Bupati engan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Madiun Tahun 2023 dilandasi oleh:

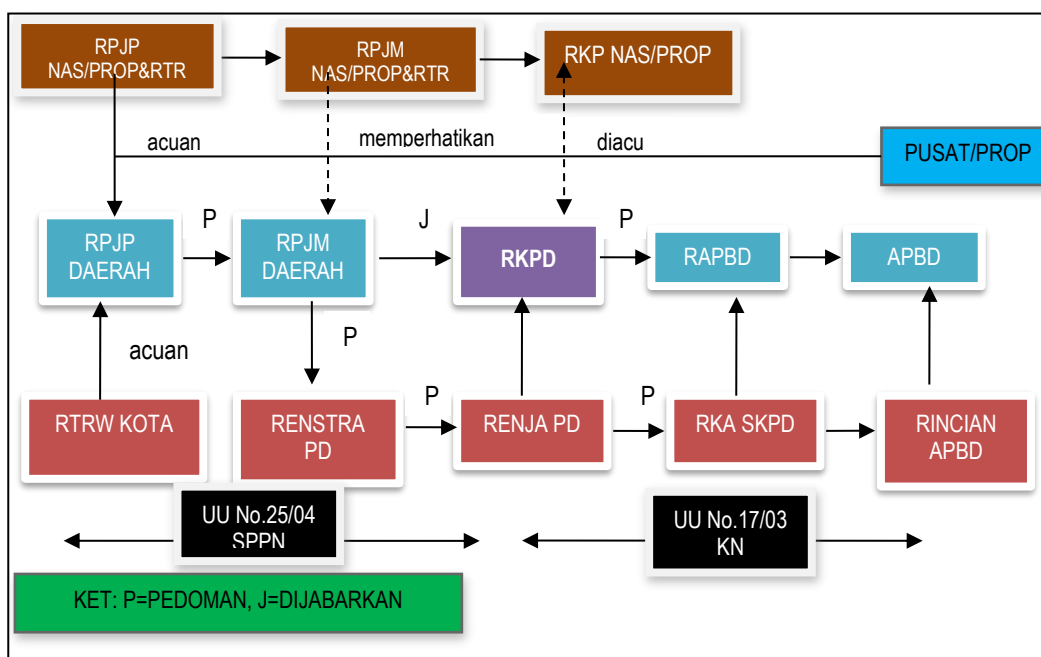
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rancana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari RKPD Kota Madiun Tahun 2023 serta penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Perubahan Renja perangkat daerah Tahun 2023 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

**Maksud dari penyusunan dokumen** Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023 **adalah sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas fiskal, serta kebijakan pada tahun berjalan.** Disamping itu, perubahan RKPD juga dimaksudkan untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, rincian tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

#### **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika dokumen.

##### **BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

##### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan perubahan tahun berjalan, yang antara lain mencakup perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah tersebut mencakup semua rencana Perubahan program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

### 2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada evaluasi dan pengukuran hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta efektivitas kinerja pemerintah daerah. Sebagai wujud implementasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan APBD Kota Madiun Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, sebagaimana capaian indikator kinerja tujuan berikut:

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja	2021	2022		2023
		Baseline	Target	Realisasi	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 66,26	(B) 68	(B) 69,26	(B) 69,26
2	Livable City	89,4	88,19	90,33	90,33
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,25	81,7	82,01	82,47
4	Indeks Pembangunan Gender	94,42	94,44	94,57	94,57
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87	6,4	6,87*	6,89
6	Indeks Ketentraman	78,74	77,05	81,25	81,25
7	Indeks Gini	0,345	0,332	0,398	0,329

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS, 2023

\*)angka sementara

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah:

1. Indeks reformasi birokrasi mengalami perbaikan dari tahun 2021 sebesar B (66,26) menjadi B (69,26) pada tahun 2022. Peningkatan tersebut juga telah mencapai target yang ditetapkan dan mengindikasikan kualitas birokrasi pemerintahan Kota Madiun telah mengalami perbaikan.
2. Kota layak huni atau *livable city* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-fisik. Kota layak huni tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan telah melibih dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah dengan kota yang relatif nyaman untuk beraktivitas.

3. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 (81,25) ke tahun 2022 (82,01). Indeks tersebut juga telah melebihi target (81,70) yang ditetapkan.
4. Seiring dengan peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Gender juga mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil. IPG Kota Madiun 2021 sebesar 94,42 meningkat menjadi 94,57 tahun 2022. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,44.
5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Madiun mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 6,87 menjadi 6,87\* pada tahun 2022 yang merupakan angka sementara pada Tahun 2022. Nilai IPEI Kota Madiun 2021 melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6,40.
6. Indeks ketentraman mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Tahun 2021 indeks ketentraman sebesar 78,74 meningkat menjadi 81,25 tahun 2022 dan sudah mencapai target yang ditetapkan (77,05)
7. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan menurun dari 5,09 persen tahun 2022 menjadi 4,76 persen tahun 2022. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 4,87 persen. Pencapaian target tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya tingkat pengangguran, disisi lain Tingkat Ketimpangan pendapatan/ Indeks Gini naik dari 0,345 pada tahun 2021 menjadi 0,398 pada tahun 2022 hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi standar pengupahan yang mereka peroleh, pengangguran turun yang berdampak kemiskinan turun akan tetapi pendapatan mereka di bawah standar yang ditetapkan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.

Kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel dibawah:

**Tabel 2. 2 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2022**

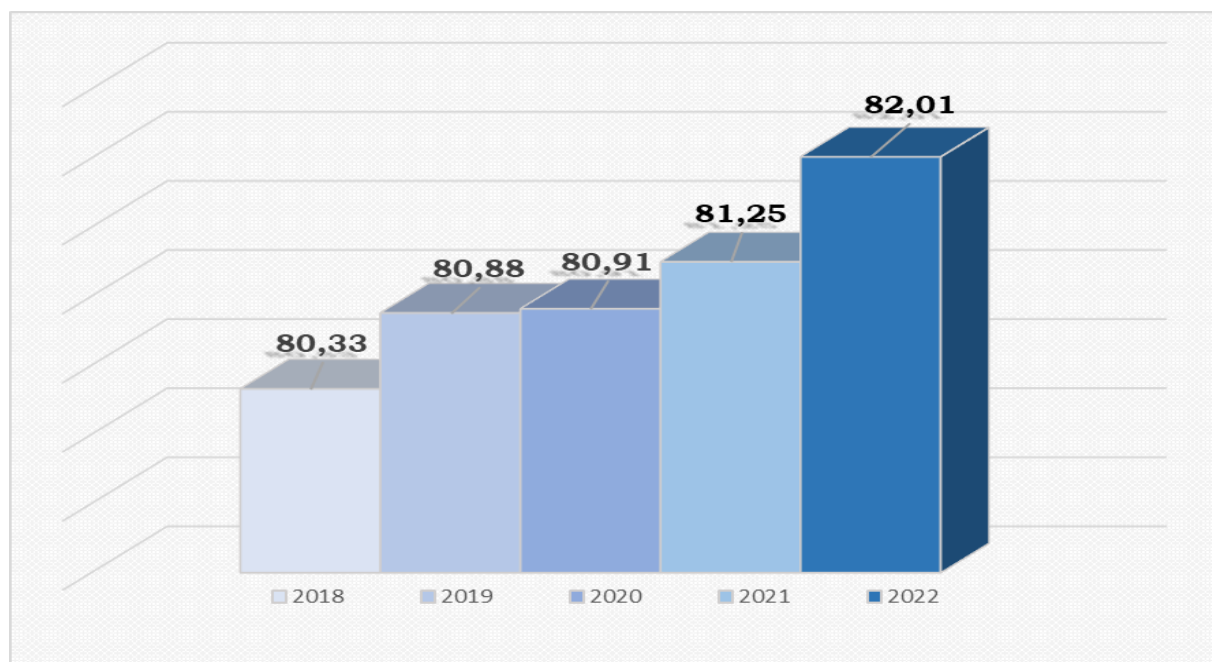
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,25	82,01
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,79	5,52
3	Inflasi	Persen	2,00	5,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,15	6,39
5	Angka Kemiskinan	Persen	5,09	4,76

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam periode lima tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. Hal ini tentu positif melihat dalam beberapa tahun ini Pandemi Covid-19 membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Kota Madiun. IPM tahun 2021 tercatat sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Setelah intensitas Pandemi Covid-19 berangsur menurun serta kegiatan perekonomian masyarakat meningkat yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022 mencapai 82,01 atau tumbuh sebesar 0,93 persen terhadap tahun 2021.



Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun**

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah

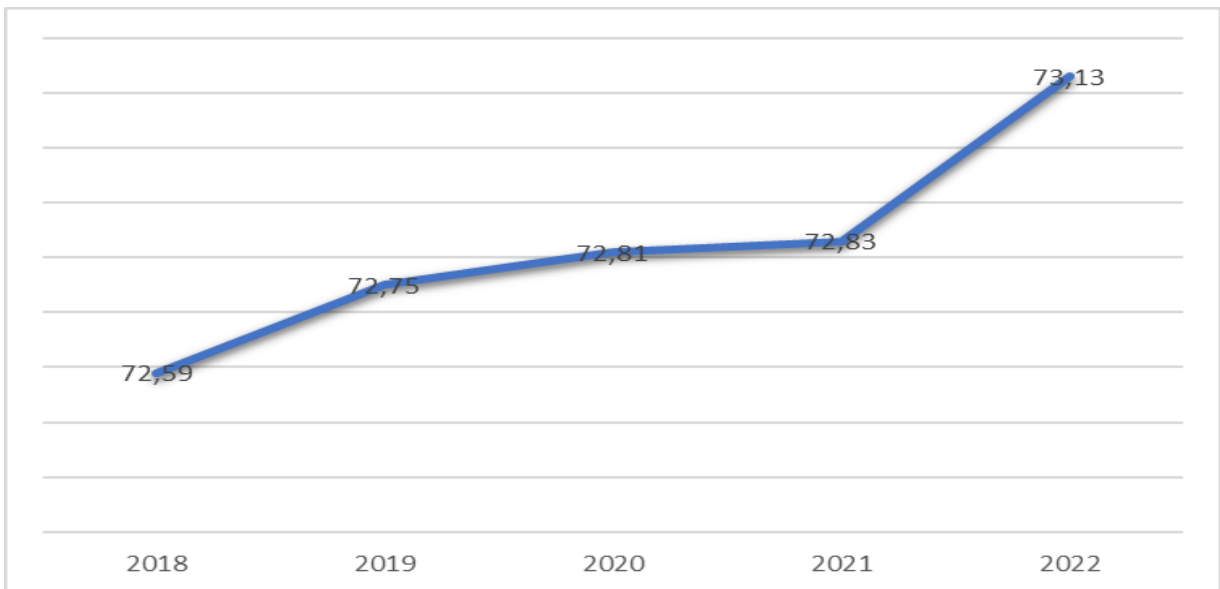
(RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel 2. 3 IPM Kota Madiun Menurut Komponen**

<b>Tahun</b>	<b>Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)</b>	<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>	<b>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</b>	<b>Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)</b>
<b>2018</b>	72,59	14,21	11,11	15.616
<b>2019</b>	72,75	14,39	11,13	16.040
<b>2020</b>	72,81	14,40	11,14	16.018
<b>2021</b>	72,83	14,41	11,37	16.095
<b>2022</b>	73,13	14,43	11,67	16.503

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022) atau naik sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun

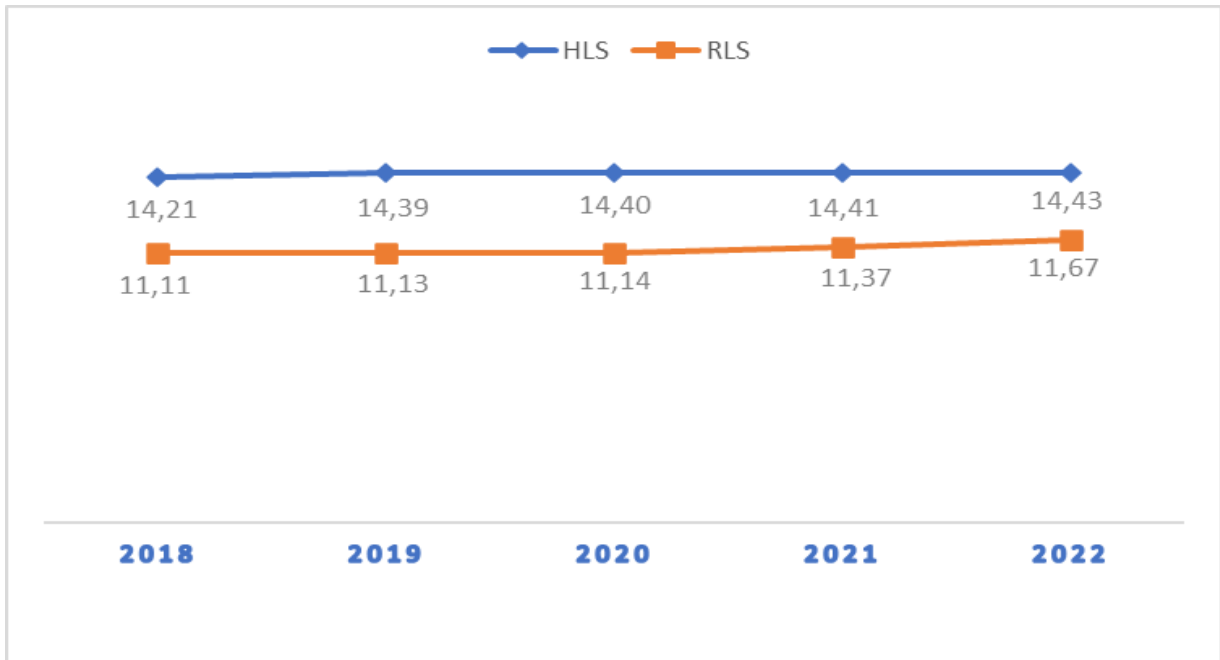


Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 2 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun Kota Madiun**

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar 0,22 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

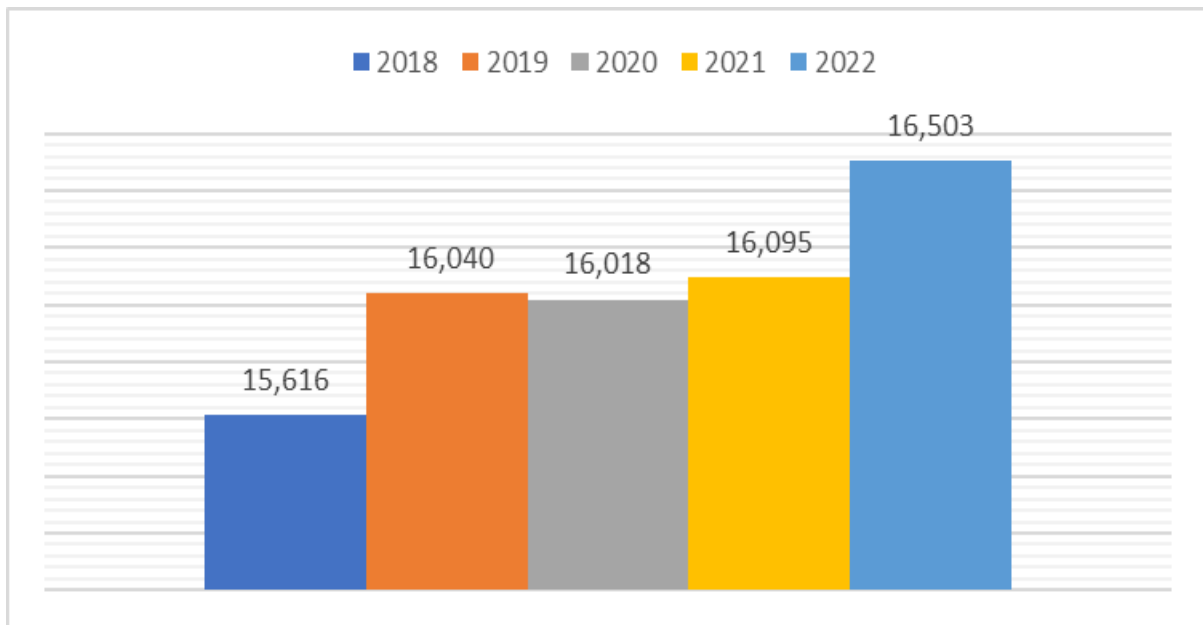
Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,11 tahun (2018) menjadi 11,67 tahun (2022) atau naik 0,56 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.



Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun**

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,503 juta per tahun, naik tipis 2,53 persen dibanding tahun 2021 lalu.



Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Madiun**



## Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

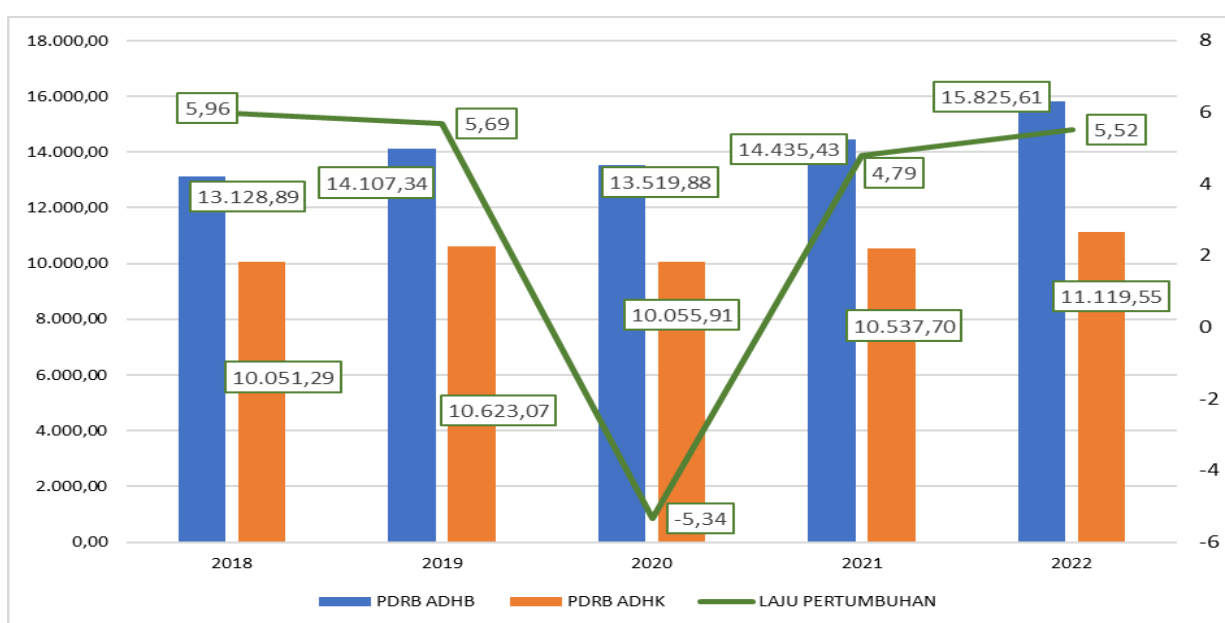
**Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2022	15.825,61	11.119,55
2021	14.435,43	10.537,70
2020	13.519,88	10.055,91
2019	14.107,34	10.623,07
2018	13.128,89	10.051,29

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2021 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai Rp 13,128 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,519 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 14,435 triliun dan tahun 2022 menjadi sebesar 15,825 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada tahun 2018 dari 10,051 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,055 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada periode tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 10,537 triliun dan tahun 2022 menjadi sebesar 11,119 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 2018-2022 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2018-2022 adalah sebesar 3,32%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 5,34%. Pada Gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat. Pada periode tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mulai membaik dan kembali positif naik dari sebesar 4,79 menjadi sebesar 5,52.



Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018-2022 (%)**

<b>Kategori</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	-0,94	11,57	-7,26	-5,67
B	Pertambangan dan Penggalian	1,07	2,41	-5,65	-4,12	-8,49
C	Industri Pengolahan	7,01	4,64	-23,84	7,10	2,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,69	1,98	2,95	7,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	4,52	4,86	6,28	3,50
F	Konstruksi	2,03	4,90	-4,71	-0,90	8,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	6,20	-11,18	10,16	7,98
H	Transportasi dan Pergudangan	8,48	9,11	-4,38	7,17	16,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,23	8,86	-7,98	3,21	9,96
J	Informasi dan Komunikasi	5,34	4,58	16,12	4,75	5,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,79	-0,66	0,47	0,32
L	Real Estate	3,57	5,96	0,33	1,19	5,09
M,N	Jasa Perusahaan	5,31	6,1	-3,18	0,77	5,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,48	3,85	-2,23	-0,99	-0,43
P	Jasa Pendidikan	4,21	7,65	1,97	0,54	0,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,38	7,52	9,98	5,46	3,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,74	6,92	-10,68	4,08	12,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,96</b>	<b>5,69</b>	<b>-5,34</b>	<b>4,79</b>	<b>5,52</b>

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2018-2021 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Pacitan sebesar 5,54. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

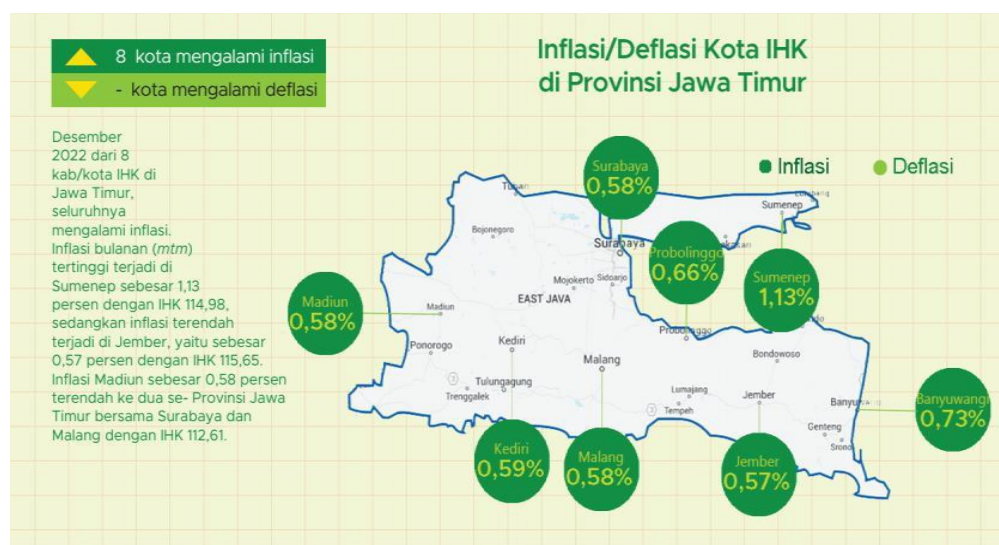
**Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kota Madiun</b>	<b>5,96</b>	<b>5,69</b>	<b>-5,34</b>	<b>4,79</b>	<b>5,52</b>
Madiun	5,10	5,42	-0,12	3,32	4,32
Magetan	5,25	5,04	-1,64	3,04	3,89
Ngawi	5,26	5,05	-1,69	2,55	3,19
Pacitan	5,51	5,08	-1,84	2,49	5,54
Ponorogo	5,31	5,01	-0,90	3,19	3,24

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

## Inflasi

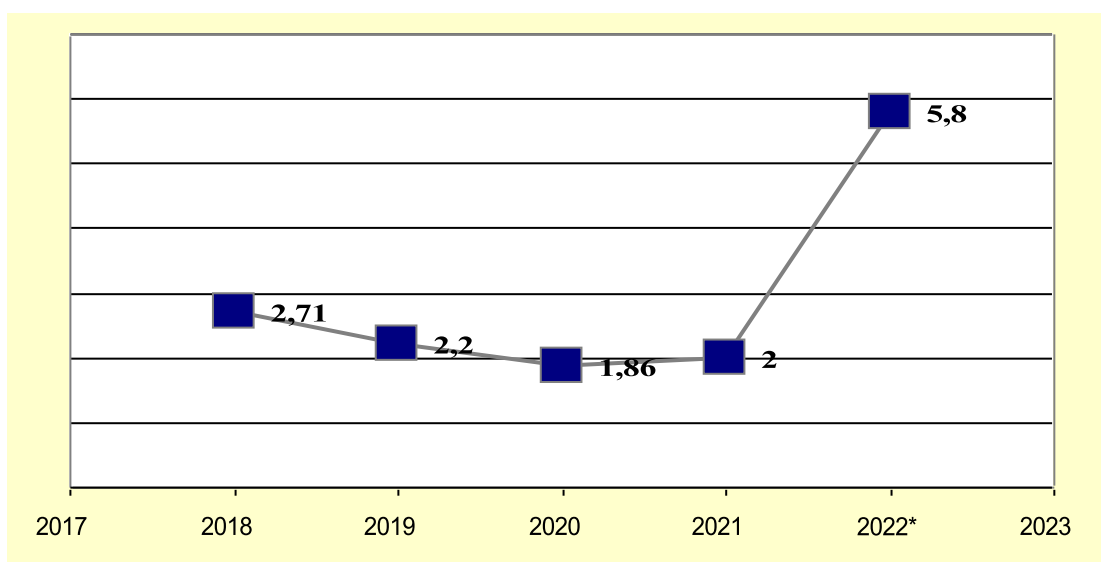
Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 6 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2022**

Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2022 terhadap 021 sebesar 5,80 persen. Adapun pada Bulan Desember 2022 sendiri terjadi inflasi sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jember sebesar 7,39 persen dengan IHK 115,65 dan inflasi terendah terjadi di Probolinggo sebesar 5,45 persen dengan IHK 112,18. Adapun secara umum Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 6,52 persen dan Nasional mengalami inflasi sebesar 5,51 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Nasional dari tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) masing-masing sebesar 5,51 persen.



Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

**Gambar 2. 7 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun**

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan harga dibandingkan pada Desember tahun lalu pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi yoy sebesar 6,42 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 9,87 persen; kelompok transportasi sebesar 16,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,32 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,73 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah satu satunya kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan atau deflasi dibandingkan pada Desember tahun lalu, yaitu sebesar 7,73 persen.

### **Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 144.820 ribu orang, naik sebanyak 601 orang dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 96.815 orang (66,85 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 90.627 orang penduduk yang bekerja dan 6.188 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 376 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatana sebanyak 2.047 orang dan pengangguran menurun sebanyak 1.671 orang.

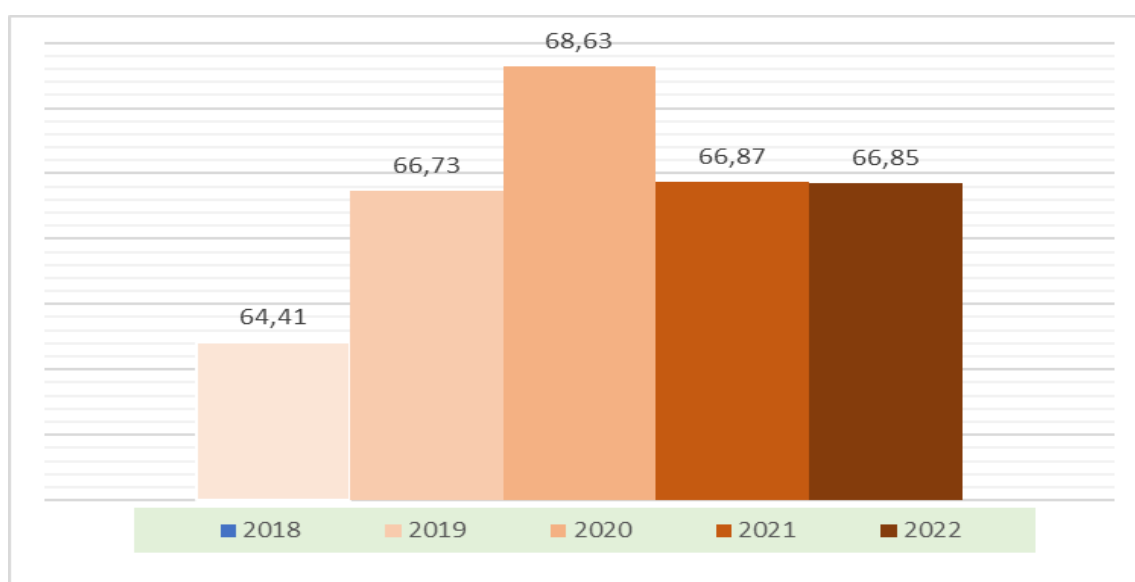
**Tabel 2. 7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agustus (2021-2022)	
	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	144.219	144.820	601	0,42
Angkatan Kerja	96.439	96.815	376	0,39
-Bekerja	88.580	90.627	2.047	2,31
-Pengangguran	7.859	6.188	-1.671	-21,26
Bukan Angkatan Kerja	47.780	48.005	-255	0,47
	Persen	Persen	Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,39	-1,76	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,87	66,85	-0,02	

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 66,85 persen, turun 0,02 persen poin dibanding Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,94 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 58,56 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,75 persen poin.



Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

**Gambar 2. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,76 poin dibandingkan Agustus 2021.

**Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

KEGIATAN	2021	2022
Angkatan Kerja	96.439	96.815
- Bekerja	88.580	90.627
- Pengangguran	7.859	6.188
Bukan Angkatan Kerja	47.780	48.005
Penduduk Usia Kerja	<b>144.219</b>	<b>144.820</b>

*Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023*

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masih merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, salah satu fenomenanya adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran masih tinggi. TPT laki-laki sebesar 9,85 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,30 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Agustus 2022 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2021, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,03 persen poin dan 3,92 persen poin.

### Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

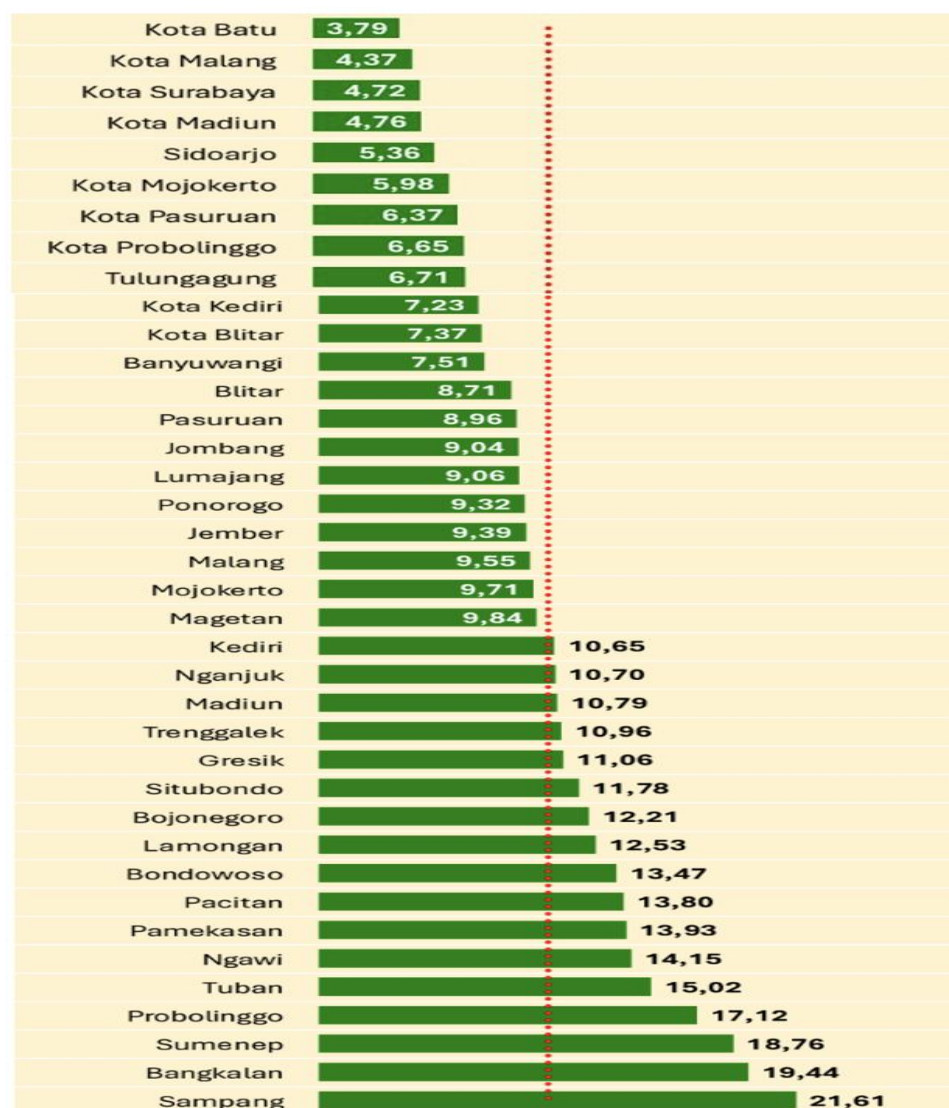
Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif masih dipicu oleh adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun 2022 sebesar 4,76 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan pada periode tahun 2021, maka terjadi penurunan sebesar 6,29 persen atau sekitar Rp 37.211,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2021 berada pada level Rp 514.409,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2022 mencapai Rp 551.620,00 perkapita perbulan.

**Tabel 2. 9 Profil Kemiskinan Tahun 2022 Kota Madiun**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2018	446.525,00	7.920	4,49
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021	514.409,00	9.060	5,09
2022	551.620,00	8.490	4,76

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kota Madiun yang mengalami penurunan.



Sumber : BPS Provinsi Jatim, data diolah, 2023

**Gambar 2. 9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Ribuan Jiwa)**



## 2.2 Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Secara umum terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen perubahan RPJMD 2019 – 2024. Tujuan pembangunan mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdapat empat tujuan menjadi lima tujuan dengan narasi yang berubah. Tambahan 1 tujuan tersebut adalah Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. Selanjutnya sasaran pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 sasaran. Perubahan tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini.

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

**Tabel 2. 10 Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022**

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun 2022		% Capaian	
					Target	Realisasi		
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>								
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 65,55	(B) 68	(B) 69,26	101,85%
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (70,01)	BB (71)	BB (77,15)	108,66%
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	3,3805 (sedang)	Tinggi	2,98 (sedang)	87,39%
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06	2,83 (baik)	2,86 (baik)	100,35%
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,456 (baik)	86,50 (baik)	86,964 (baik)	100,54% 100,54%
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,08	55,6	53,96	97,1%

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun 2022		% Capaian	
					Target	Realisasi		
<b>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>								
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Indeks	89,40	88,19	90,33	102,43%
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	97,99	98,25	98,27	100,01%
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99	57,77	58,13	100,62%
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>								
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,25	81,70	82,01	100,38%
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,42	94,44	94,57*	99,98%*
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,40	14,41	14,43	100,13%
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,39	11,67	104,66%
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,83	72,83	73,13	100,41%
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaa n Gender	Indeks	77,18	77,18	76,75*	99,44%*
<b>Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>								
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,69	6,40	6,87*	107,34%*
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS9.1	Tingkat Penganggura n Terbuka	%	8,15	5,74	6,39	88,67%
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	10,16	10,16	7,98**	78,54%**
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	11,32	11,32	21,57**	190,54%**
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentrama n	Indeks	78,74	77,05	81,25	105,45%
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,345	0,37	0,398	92,43%
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	5,09	5,07	4,76	106,11%
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,36 (Harmonis)	B skor 74,40 (Harmonis)	B skor 74,40 (Harmoni s)	101,72
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	81,00	76,2	82,18	107,84%

Sumber: Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah, 2023

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara IT : Indikator Tujuan

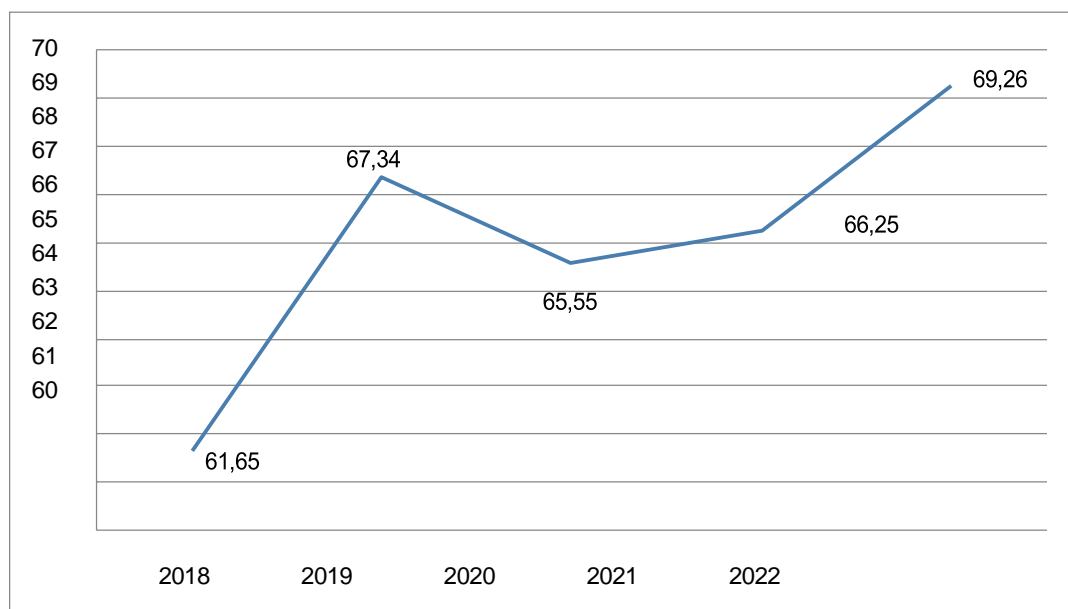
IS : Indikator Sasaran

**Tujuan 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities**

**IT 1.1 Indeks RB Kota Madiun**

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.



Sumber : Inspektorat Kota Madiun, Kementerian PANRB, 2022

**Gambar 2. 10 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Grafik 4.0 diatas Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi yaitu Faktor Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di tahun 2020 terdapat perubahan di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut:

- Mandatory (20%): poin-poin penilaian dalam *mandatory* adalah poin-poin penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu bobotnya 60% sekarang berubah menjadi 20%.

Kewajiban K/L (10%): adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh lembaga kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh Kemenkeu), Indeks Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh BPKP), Indeks SPIP (oleh BPKP), dsb.

1. Reform (30%): hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 69,26 kategori “B” dengan capaian kinerja sebesar 103,37%. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022**

No	Komponen Penilaian	Bobot	2022
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	<b>I. Pemenuhan</b>	20,00	13,61
	<b>II. Hasil Antara Area Perubahan</b>	10,00	6,79
	<b>III. Reform</b>	30,00	16,19
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>36,59</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,40
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,13
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,54
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,60
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,67</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>69,26</b>

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Sedangkan untuk Hasil Antara dari masing-masing *leading sector* adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 12 Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian/Lembaga**

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	130,50	266	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	47,39	48,33	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,06	2,86	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Penegelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	23,79	65,60	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,17	4,36	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	1	3	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	78,47	74,52	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	59,01	79,06	ANRI
10.	Reformasi Hukum	0-100	-	66,80	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara ditahun 2022 yaitu system merit, ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, dan Kualitas pengelolaan arsip. Meskipun Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (SPBE) dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Namun penilaian hasil antara Pemerintah Kota Madiun yaitu Reformasi Hukum menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai sebesar 66,80. Sehingga secara keseluruhan hasil antara Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian dari komponen hasil Pemerintah Kota Madiun adalah :

**Tabel 2. 13 Capaian Komponen Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi**

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	0-100	77,15	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,29	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	85,42	SPI Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	85,12	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
2. Kesamaan persepsi dan tujuanmulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

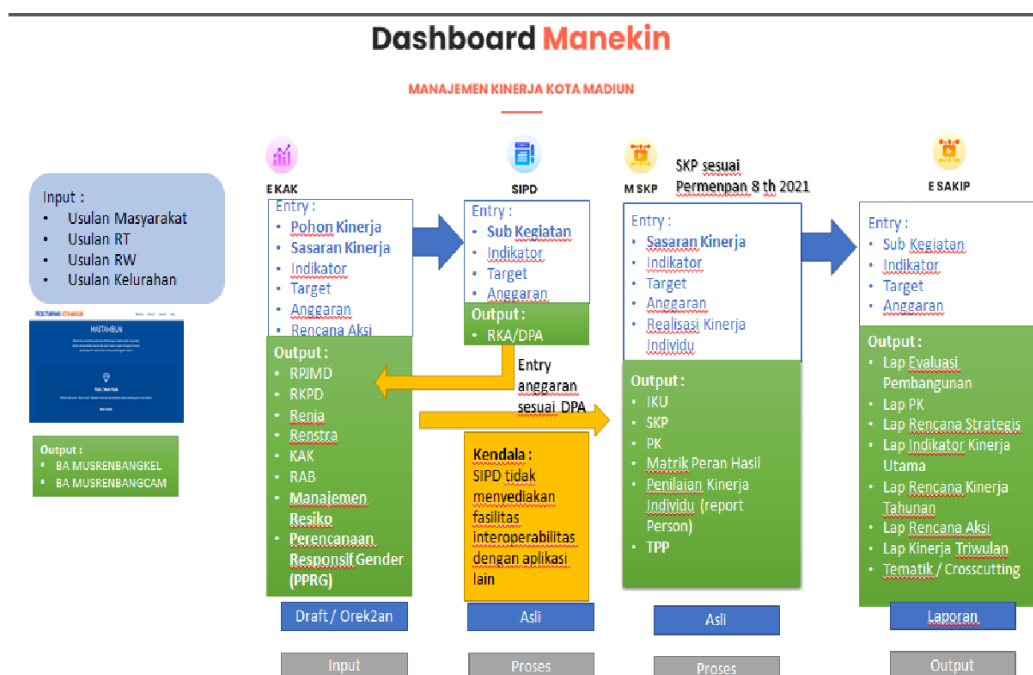
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan dengan optimal
2. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan *role model (agent of change)* di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan

3. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih rendah
4. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
5. Sistem pola karir (*career path*) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
6. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan di tahun 2022.
2. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah.
3. Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya dari tahun 2001 sampai dengan 2021.
4. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan pemetaan talenta pegawai.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
7. Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di tahun 2022.
8. Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit pelayanan publik.

9. Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
10. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik.
11. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan Dashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



Sumber : Aplikasi Manajemen Kinerja, 2023

**Gambar 2. 11 Realisasi Dashboard Manekin Tahun 2022**

12. Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
13. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
14. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## **Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### **IS 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 25%

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran terdapat beberapa penyesuaian target indikator salah satunya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun dimana dalam RPJMD dengan target 76 disesuaikan menjadi 71. Hal ini dilakukan dengan dasar berdasarkan kenaikan capaian atas nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 sebesar 0,96. Selain itu telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

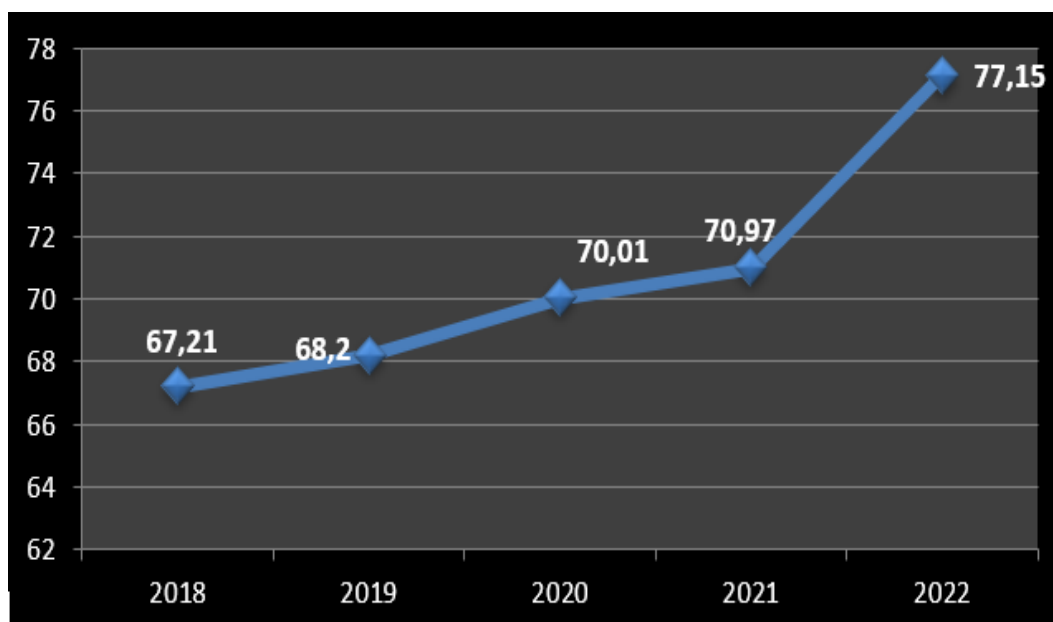


**Tabel 2. 14 Hasil Penilaian Pemerintah Kota Madiun**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,67
2	Pengukuran Kinerja	30	23,16
3	Pelaporan Kinerja	15	11,49
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,83
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>77,15</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 6 Desember 2022 Nomor : B/1071/AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 77,15 dengan Predikat BB tercapai 101,51% dari target RPJMD sebesar 76. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun – tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.



Sumber : Kemenpan RB, 2023

**Gambar 2. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD Perubahan dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan ;
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja ;
3. Melakukan pendampingan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 beserta dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah ;
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan 2019-2024 ;
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran ;
6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi skema dan esakip ;
7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilaporkan Tahun 2022, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah ;
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding ;
9. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan ashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## IS 1.2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

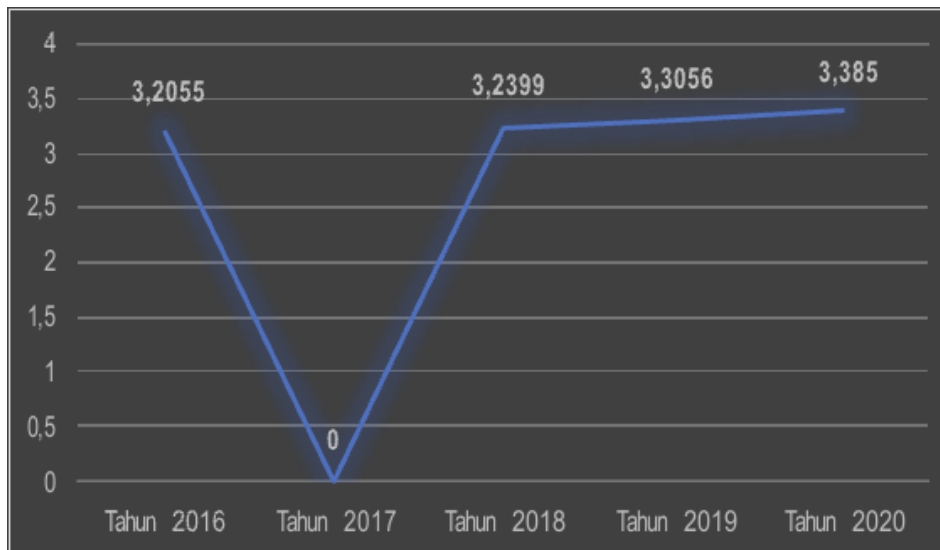
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Nilai EKPPD Tahun 2022 terhadap hasil LPPD tahun sebelumnya diumumkan terakhir kali pada tahun 2020, maka pada tahun 2021 dan 2022 data yang disajikan masih menggunakan data tahun 2020 yaitu memperoleh Status Kinerja **Sangat Tinggi** dengan **Skor 3,3805** akan tetapi jika dikonfersikan dengan perhitungan penilaian yang terbaru skor nilai 3,3805 mendapatkan kualifikasi kinerja Sedang yaitu di antara 2,610-3,400 dan untuk nilai tinggi berada diantara skor nilai 3,400-4,200 dan sekor sangat tinggi berada pada skor dengan nilai diatas 4,200. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

**Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Makro**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>	<b>BOBOT INDIKATOR</b>
<b>1</b>	Indeks Pembangunan Manusia	20%
<b>2</b>	Angka Kemiskinan	20%
<b>3</b>	Angka Pengangguran	15%
<b>4</b>	Pertumbuhan Ekonomi	10%
<b>5</b>	Pendapatan Perkapita	15%
<b>6</b>	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 105 IKK outcome, 488 IKK Output dan 18 IKK Fungsi Penunjang.



Sumber : Bappeda Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 13 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 Meraih nilai 3,3805 dengan predikat Sangat Tinggi (penilaian perhitungan lama). Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun 2016 skor 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari masyarakat.

### **IS 1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.



Sumber : Kemenkominfo, 2023

**Gambar 2. 14 Indeks SPBE Kota Madiun**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 2,86 dengan predikat BAIK. Nilai ini turun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang memperoleh nilai 3,06 (Baik). Sedangkan di Tahun 2019 yang memperoleh nilai 2,82 (baik) dan Tahun 2018 memperoleh nilai 3,16 (Sangat Baik). Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel
3. Tersedianya anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet Pemerintah Kota Madiun

4. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
5. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
6. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
7. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai

Faktor Penghambat :

1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
2. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)
3. Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan
4. Dengan adanya pemerataan akses jaringan internet di wilayah Kota Madiun diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan jaringan internet yang lebih optimal

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur
2. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK
4. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

Ketersediaan akses internet yang merata tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dalam rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan pemerataan penyediaan akses internet antara lain:

1. Menyediakan akses internet gratis pada Seluruh kantor pelayanan pemerintah Daerah Kota Madiun dan seluruh sekolah Negeri (SD-SMP) di wilayah Kota Madiun
2. Menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat, yang ditempatkan pada Poskamling, Ruang terbuka hijau, lapak UMKM, dan fasilitas umum (fasum) di lingkungan RT lainnya.

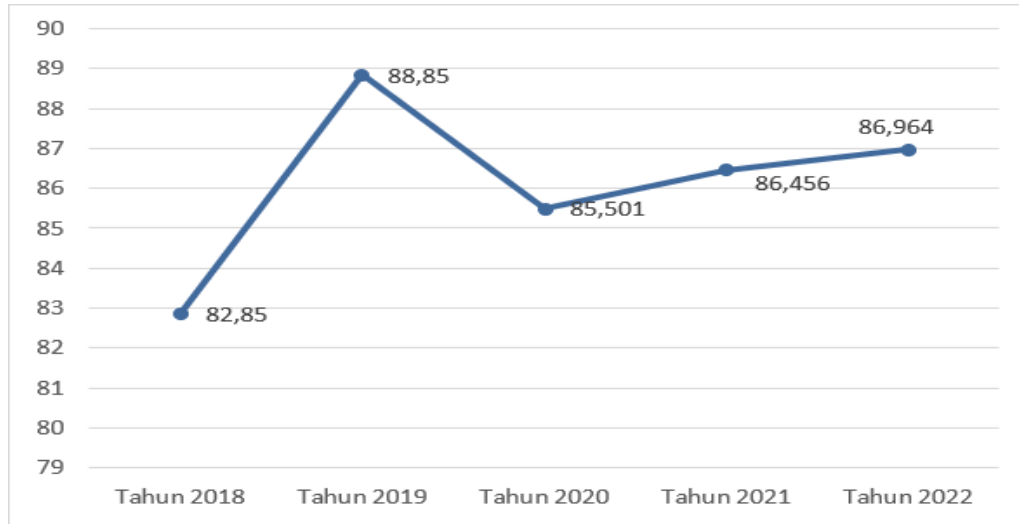
## **Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

### **IS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun**

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 83 disesuaikan menjadi 86,50. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2021.



Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kota Madiun, 2023

**Gambar 2. 15 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan system pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional ;
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi Auditee dan Atuditor dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor [80/6/401.011/2019](#) [02/BSN/MoU/IV/2019](#) tentang Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian) ;



6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat ;
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat ;
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2021 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

## IS 2.2 Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

**Tabel 2. 16 Indeks Inovasi Daerah**

<b>Kategori</b>	<b>Rentang Skor</b>
<b>Sangat Inovatif</b>	60,01 – 100,00
<b>Inovatif</b>	35,00 – 60,00
<b>Kurang Inovatif</b>	0.01 – 34,99
<b>Tidak Dapat Dinilai</b>	0

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

Bapelitbangda khususnya Sub Koordinator Inovasi dan Bangda Bidang Litbang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah/ IID yang dilakukan melalui input data inovasi pada SIM IGA Kemendagri. Dalam RPJMD-P 2019-2023 IID tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 2.086, namun dengan adanya perubahan perhitungan indeks sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, maka target tersebut dikonversikan menjadi 55,6. Berdasarkan Pedoman Umum pelaksanaan IGA 2022 Kemendagri, IID dinilai berdasarkan laporan inovasi yang di-input dan dilengkapi data dukung pada SIM IGA Kemendagri. Adapun penilaian IID 2022 dihitung dengan melalui tahapan penilaian dengan rumus :

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = \text{SPD} + \text{SID}$$

Keterangan :

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah Nomor Indikator

j adalah Nomor Inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintah Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38. Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut;
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

Setelah didapatkan nilai Skor Total selanjutnya perhitungan Indeks Inovasi Daerah dirumuskan dengan :

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan :

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)
- Skor Total Maksimum adalah 250
- Skala IID adalah 0 s.d 100

Dengan proporsi aspek sebagai berikut :

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:

1. 3 Variabel;
2. 15 Indikator; dan
3. Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20% dari 250).

- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:

1. 5 Variabel;
2. 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maksimal senilai 76 atau 30,40%); dan
3. Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80% dari 250).

Tahun 2022, dalam pelaksanaan IGA 2022, Bidang Litbang Kota Madiun selaku koordinator IGA 2022 di Kota Madiun melakukan beberapa hal seperti berikut:

- a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis IGA 2022, dilaksanakan pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari unsur :
  - Pemerintah Kota Madiun : Bp.Wali Kota Madiun;
  - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) : Adi Suhendra, M.Sosio;
  - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)/ Balitbang Kemendagri : Plh.Kepala BSKDN
- b. Desk dan pendampingan, dilaksanakan desk sekaligus pendampingan kepada Perangkat Daerah selama 3 hari di Bulan Agustus 2022.
- c. Input data dan pelaporan inovasi

Pada SIM IGA Kemendagri dilakukan input data baik data profil pemerintah Daerah (SPD) maupun Inovasi Daerah (SID) dengan hasil sebagaimana berikut :

**Tabel 2. 17 Rekap Hasil Laporan IGA 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>jumlah inovasi yang dilaporkan</b>	38
<b>jumlah video</b>	52
<b>rata2 kematangan</b>	106,39
<b>perangkat daerah yang melaporkan</b>	17
<b>Bentuk Inovasi</b>	
- tata kelola pemerintahan	4
- layanan publik	32
- inovasi lainnya	10
<b>total inovasi</b>	51

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Data diolah berdasarkan data yang termuat dalam <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> capaian IGA 2022 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersaji sebagaimana berikut :

**Tabel 2. 18 Capaian IGA Kota Madiun Tahun 2020-2022**

<b>PELAPORAN INOVASI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Inovasi Yang Dilaporkan</i>	30	24	38
<i>Jumlah Video</i>	21	24	52
<i>Rata-Rata Kematangan</i>	63	112	106,39
<i>Perangkat Daerah Yang Melaporkan</i>	13	12	17
<i>Total Inovasi</i>	43	48	51
<b>BENTUK INOVASI</b>			
<i>Tata Kelola Pemerintahan</i>	3	1	5
<i>Inovasi YANBLIK</i>	36	32	36
<i>Inovasi Lainnya</i>	4	15	10

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

## **Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**

### **IT 2.1 Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)**

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep livable city terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang livable.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep livable city bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat livability di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan livable dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar *livable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),

3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

### **Indikator Umum**

#### I. Sarana Prasarana

1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
3. Kondisi Jalan
4. Pedestrian
5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
9. Listrik
10. Ketersediaan Air Bersih
11. Kualitas Air Bersih
12. Telekomunikasi

#### II. Ekonomi

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

1. Biaya Hidup

#### III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan

1. Tata Kota
2. RTH
3. Kebersihan
4. Persampahan
5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air

#### IV. Kehidupan Sosial

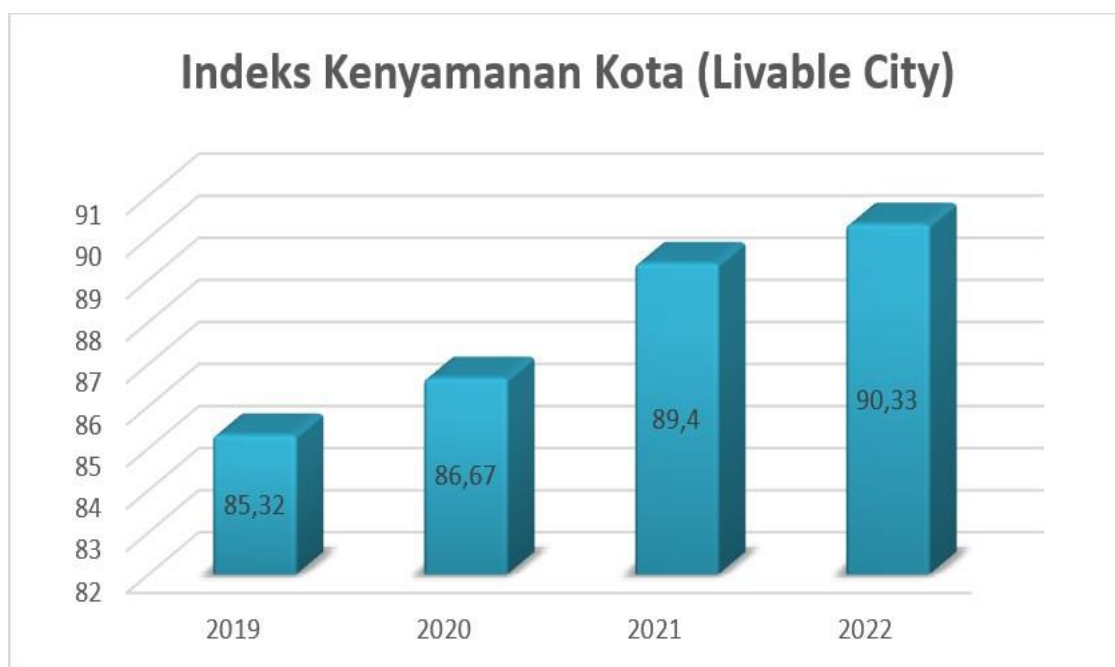
1. Kriminalitas
2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
4. Akses Informasi Pelayanan Publik
5. Keamanan

### **Indikator Khusus**

#### I. Sarana Prasarana

1. Kantong Parkir
2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)

3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
  4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
  5. Jaringan Internet (WIFI)
- II. Ekonomi
- III. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah
- IV. Kehidupan Sosial
1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
  2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
  3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
  4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
  5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
- V. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum
- VI. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
- VII. Kondisi Politik
- VIII. *Smart City*
- IX. Kualitas Hidup Penduduk



Sumber : Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023

**Gambar 2. 16 Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)**

*Livable City* Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 90,33 dengan target 88,19. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,43%. Sedangkan di tahun 2021 realisasinya sebesar 89,4 dengan capaian kinerja 101,85%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun

### **Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota IS 3.1 Indeks Infrastruktur**

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2021 sebesar 97,99%. Walaupun secara target Indeks Infrastruktur tidak tercapai, tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 96,85 maka mengalami kenaikan sebesar 1,14 poin.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong :

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.
- 7) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi sebagai penghasil limbah domestik;
- 8) Meningkatnya peran masyarakat pengurangan sampah dalam bentuk Bank Sampah dan *Zero Waste*.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak
- 3) Kesadaran pengusaha dalam pengolahan limbah domestik yang dihasilkan;

4) Belum adanya IPLT (Ijin Pengolahan Limbah Tinja).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/ mempertahankan indeks Infrastruktur adalah:

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
- 4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibatintensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

#### **Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IS 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2022 sebesar 58,13. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Tahun 2022 yaitu 50,00, IKU Tahun 2022 yaitu 84,17, sedangkan IKTL Tahun 2022 yaitu 23,94. Perhitungan IKLH Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan formula: baru sebagai berikut :



$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKTL})$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2021 yaitu 58,99 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2022 adalah 58,13, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena terdapat penurunan target IKLH sesuai RPJMN 2020 – 2024 akan tetapi jika angka tersebut melebihi target RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu 57,93. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2022 berada dalam posisi “sedang”. Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

- a. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
- b. Penambahan RTH yang menunjang peningkatan indeks kualitas lahan

Faktor penghambatnya yaitu :

- a. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- c. Pada awal tahun 2021 Kota Madiun mengalami banyak kegiatan pembaruan struktur yang menyebabkan adanya penebangan pohon lindung tepi jalan, sehingga nilai tutupan lahan karena tajuk vegetasi menjadi berkurang.
- d. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam Upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH oleh OPD terkait
- d. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait
- e. Optimalisasi pengelolaan sampah dan B3
- f. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
- g. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup

**Tabel 2. 19 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,22	63,87	60,15	58,99	58,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2023

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada tahun 2018-2022 menunjukkan terjadi penurunan setiap tahunnya, penurunan tersebut sebagai dampak kota madiun menjadi pusat perkembangan perekonomian, selain itu terbitnya surat Kementerian LHK S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang perubahan metodologi perhitungan yang menjelaskan perubahan metodologi lama dan metodologi baru, mengakibatkan semakin menurunkan nilai IKLH.

### **Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

#### **IT 3.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

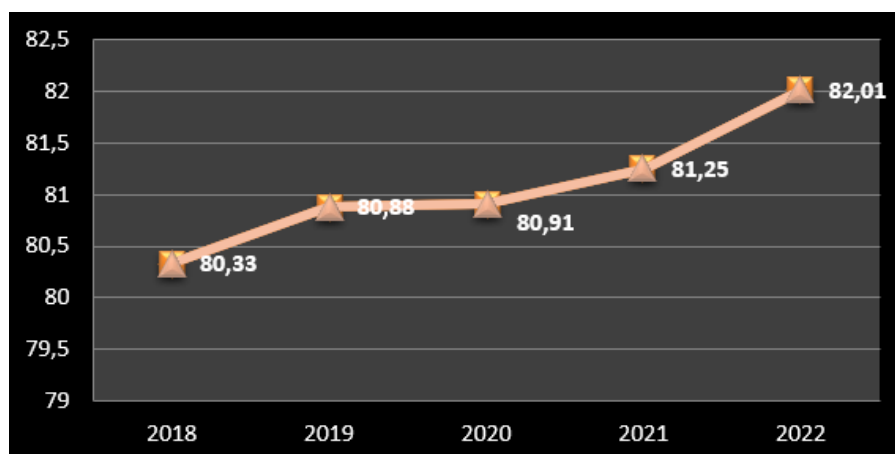
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel 2. 20 IPM Kota Madiun**

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI
2017	72,48	14,20	11,10	15.415
2018	72,59	14,21	11,11	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

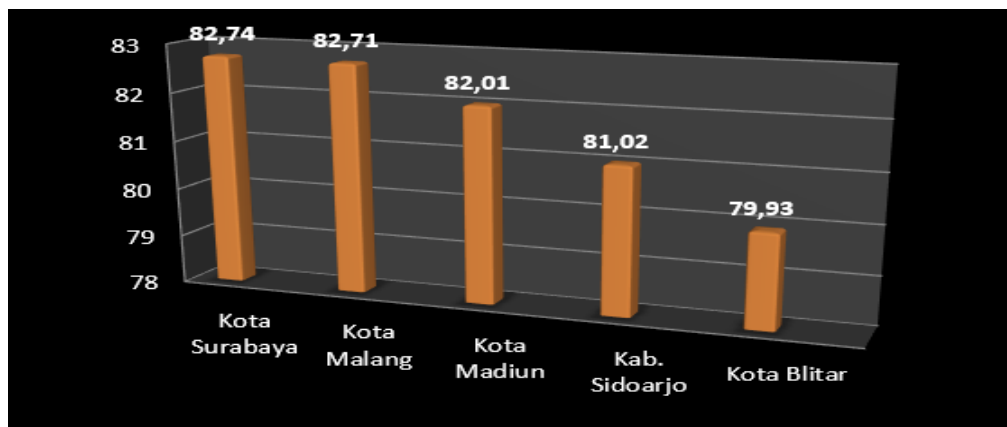
Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73,13 tahun, lebih lama 0,3 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2022 tercatat sebesar 14,43, lebih tinggi 0,13 persen dibanding sebelumnya yaitu 14,41, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2022 mencapai 11,67, atau meningkat 2,63 persen dibanding tahun lalu. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp. 16.503.000 atau meningkat 2,53 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 16.095.000.



**Gambar 2. 17 IPM Kota Madiun**

Selama 2018 hingga 2022, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021 dan 2022.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2022 sebesar 82,01 atau tumbuh 0,93 persen (meningkat 0,76 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



**Gambar 2. 18 Tingkat Kedudukan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Timur**

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2022 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 82,01. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2022 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya

### **IT 3.2 Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 21 IPG Kota Madiun Tahun 2017-2022**

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>INDEKS</b>
1.	Kota Madiun	2017	93,66
2.	Kota Madiun	2018	93,47
3.	Kota Madiun	2019	94,05
4.	Kota Madiun	2020	94,38
5.	Kota Madiun	2021	94,42
6.	Kota Madiun	2022	94,57

Sumber : Dinsos PP, PA Kota Madiun, data diolah, 2023

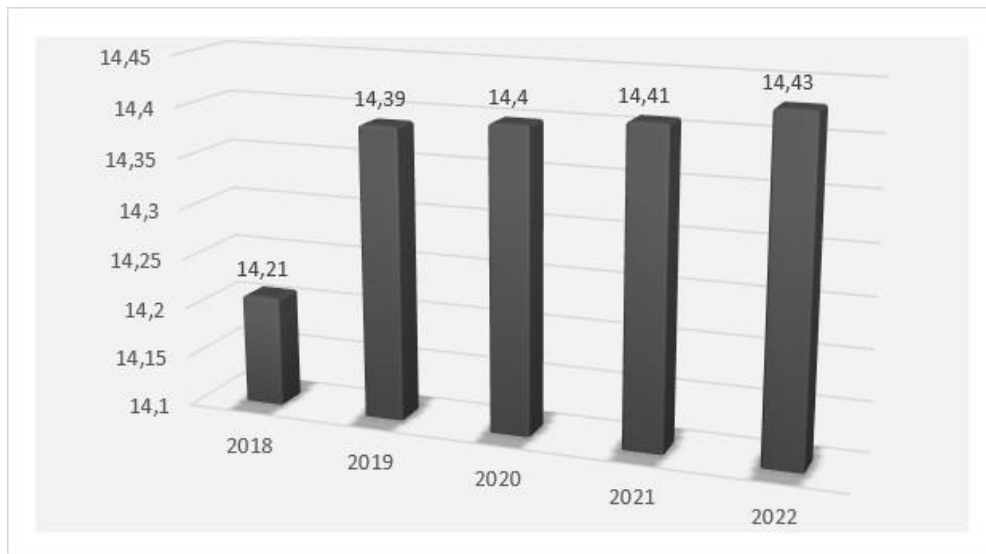
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 94,38. Pada tahun 2021 dan 2022, IPG terus menunjukkan peningkatan hingga sebesar masing -masing 94,42 dan 94,57. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

## **Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat**

### **IS 5.1 Harapan Lama Sekolah**

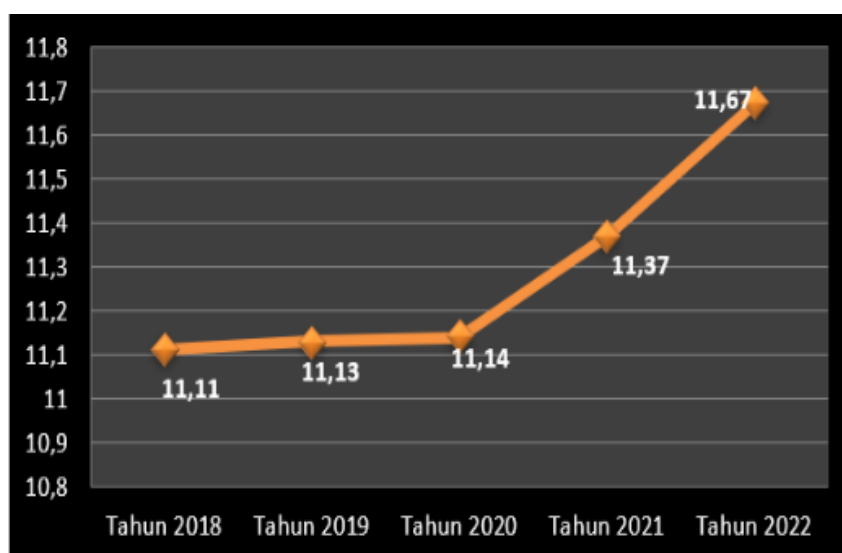
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,21 tahun (2018) menjadi 14,43 tahun (2022) atau naik sebesar 0,22 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.



**Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun**

### **IS 5.2 Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator sasaran rata-rata lama sekolah di Tahun 2022 terjadi penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 yang mana pada RPJMD-P target rata-rata lama sekolah sebesar 11,15 dan pada RKPD Perubahan telah disesuaikan menjadi sebesar 11,39. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi rata-rata lama sekolah dengan memperhatikan realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2021.



**Gambar 2. 20 Rata-rata Lama Sekolah ( RLS) Kota Madiun**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar

2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan Pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

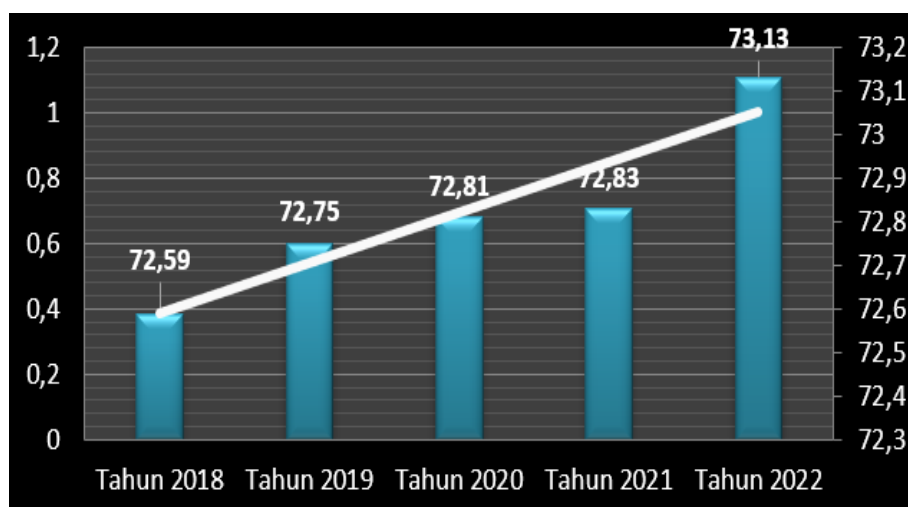
## **Sasaran 6 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat**

### **IS 6.1 Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2018 hingga 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,59 tahun (2018) menjadi 73,13 tahun (2022) atau naik sebesar 0,54 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun



**Gambar 2. 21 Angka Harapan Hidupo di Kota Madiun**

Dari grafik dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2018 ke Tahun 2022, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.
- d. Cakupan vaksinasi covid-19 di Kota Madiun yang tinggi pada tahun 2022 menyebabkan penyebaran covid-19 di Kota Madiun terkendali sehingga kematian akibat covid-19 juga mengalami penurunan.

Faktor penghambat peningkatan AHH di Kota Madiun pada tahun 2022 antara lain:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 1 orang ibu, sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun tahun 2022 sebesar 42,42 per 100.000 kelahiran hidup
2. Terdapat 10 kematian bayi dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,24 per 1.000 kelahiran hidup
3. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum berjalan optimal sehingga kasus DBD juga meningkat

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada tahun 2023 yaitu:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia.
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat



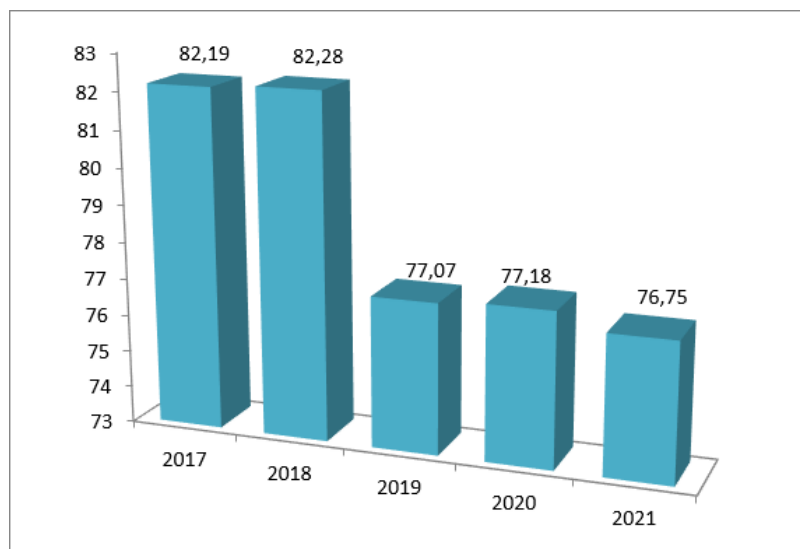
## **Sasaran 7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender**

### **IS 7.1 Indeks Pemberdayaan Gender**

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IDG di Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 82,28, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi 77,07 pada Tahun 2019. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun.

Pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 belum ada rilis resmi dari Badan Pusat Statistik baik dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah



**Gambar 2. 22 IDG di Kota Madiun**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

*Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha
- d. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

*Kedua*, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

*Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;

- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

#### **Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif**

##### **IT 4.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar tersebut yaitu :

##### 1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

##### a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita
- Share manufaktur terhadap PDRB
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

##### b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indicator :

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

2) PILAR 1 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Dengan indicator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indicator :

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 1 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

### b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

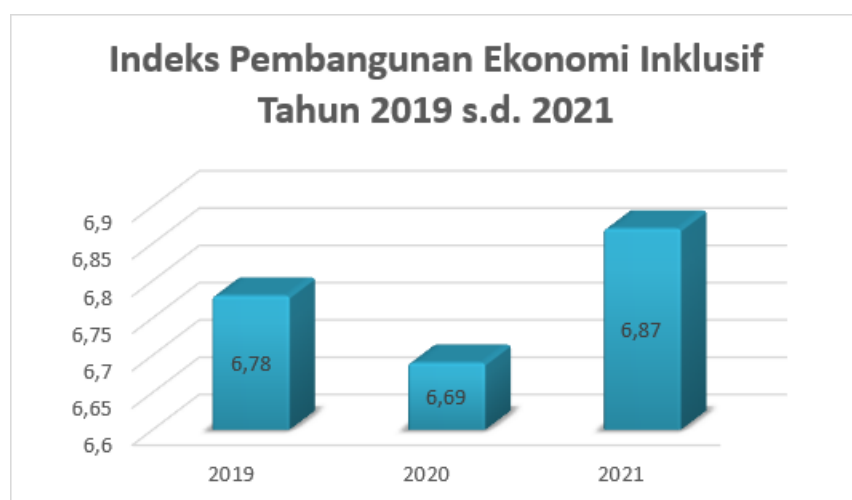
Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Dengan Indikator :

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

### c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM



**Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019-2021**

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di tahun 2022 sebesar 6,40, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2022 belum rilis dari Bappenas sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan. Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

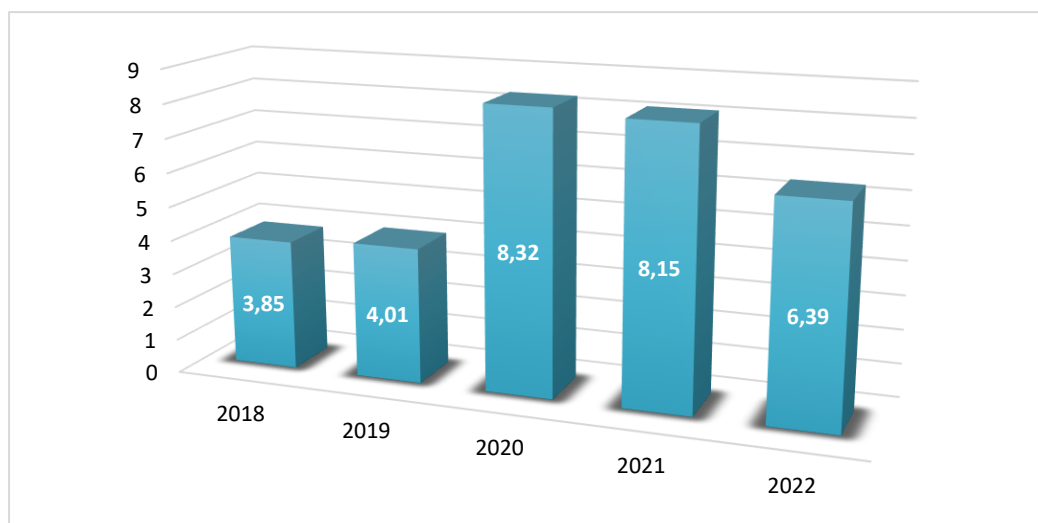
1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto)
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)

## Sasaran 8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

### IS 8.1 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.



**Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,76 poin persen dibandingkan Agustus 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebesar 6,39 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 6.188 orang dengan angkatan kerja sebesar 96.815 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 21,26 % dari TPT tahun 2021 yaitu sebesar 8,15 % atau 7.859 orang, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 1.671 orang.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,42 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 601 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 376 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2022 sebesar 8,26 %, realisasi TPT tahun 2022 sebesar 6,39 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

Faktor Pendorong Keberhasilan menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha.
3. Terjalannya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta penempatan para pencari kerja.

Faktor Penghambat yaitu :

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarang nya pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.

4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

Memperhatikan sejumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk lebih menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan *job fair*/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- i. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
- j. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun.

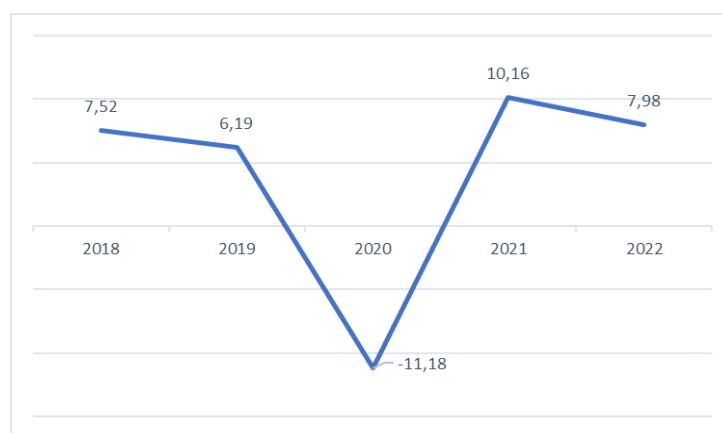
## **Sasaran 9 Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi**

### **IS 9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan**

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2022 adalah 7,98 dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,16. Pertumbuhan PDRB tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,18 poin. Sedangkan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada tahun 2019 sebesar 5.82. Untuk tahun 2020 prosentase pertumbuhan sebesar (-10.83) atau mengalami kenaikan sebesar 16,65. Faktor Penghambat penurunan dari 2019-2020 karena adanya pandemi global covid-19 dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan.



Di tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37 % dibandingkan dengan target tahun 2021. Untuk target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 2,44 disesuaikan menjadi 10,16 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun 2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang menggunakan data total item.



**Gambar 2. 25 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Faktor Penghambat:

1. Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya masyarakat yang berjualan dan tempat berjualan yang terbatas
2. Harga Bahan Pokok di pasaran yang terkadang kurang stabil dan mempengaruhi aktivitas perdagangan
3. Promosi Produk perdagangan yang belum optimal

Faktor Pendorong:

1. Diperbolehkannya aktivitas masyarakat secara new normal pasca pandemi Covid-19
2. Program dan kegiatan yang tepat sasaran
3. Infrastruktur dan Sarana prasarana pendukung yang memadai

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul
2. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat
3. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang
4. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku
5. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa

### **IS 9.2 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa**

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Untuk data series pertumbuhan PDRB sector jasa menurut BPS pada tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian sebesar 190,54% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 11,32. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,32 atau mengalami kenaikan sebesar 10,25 poin. Untuk target pada tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sector jasa sebesar 0,76 disesuaikan menjadi 11,32 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada tahun 2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang menggunakan data total item.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain :

- a) Pembangunan Infrastruktur kesehatan, pendidikan yang memadai
- b) Melakukan Promosi Produk Perdagangan
- c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- d) Melakukan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- e) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- f) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan
- g) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL

- h) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
- i) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
- j) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- k) Melakukan Promosi Pasar Rakyat
- l) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)
- m) Pembagunan jalur sepeda wisata penghubung lapak
- n) Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun

Faktor Penghambat:

1. Tenaga ahli bidang Kesehatan dan Pendidikan masih banyak dibutuhkan
2. Tingginya suku bunga kredit dari lembaga keuangan
3. Promosi daerah melalui event-event daerah masih perlu diperbanyak

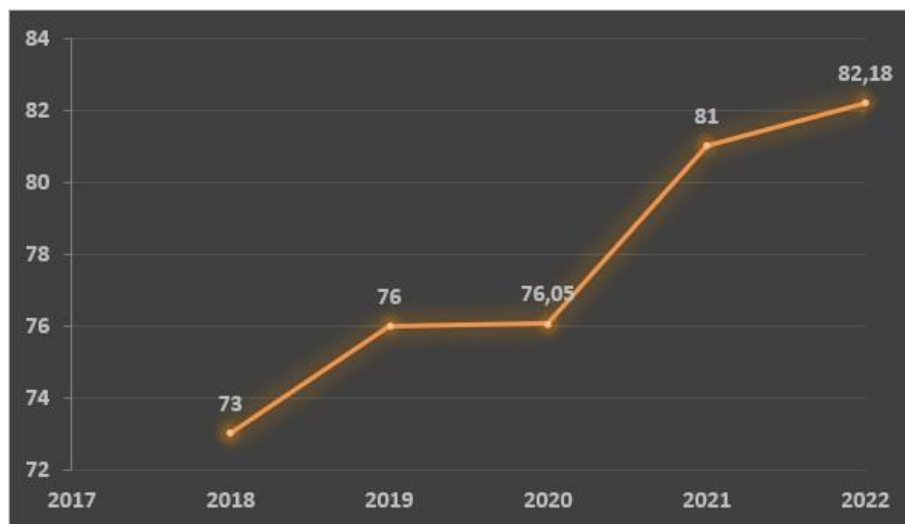
Faktor Pendorong:

1. Infrastruktur daerah yang memadai. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, jaringan telepon, dan sebagainya
2. Tingkat Inflasi daerah yang terkendali
3. Tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup meningkat  
Semakin tinggi usia harapan hidup masyarakat maka semakin panjang usia rata-rata hidup masyarakat, sehingga kesempatan masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan yang produktif dari segi ekonomi semakin panjang pula

## **Tujuan 5 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat**

### **IT 5.1 Indeks Ketentraman**

Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.



**Gambar 2. 26 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

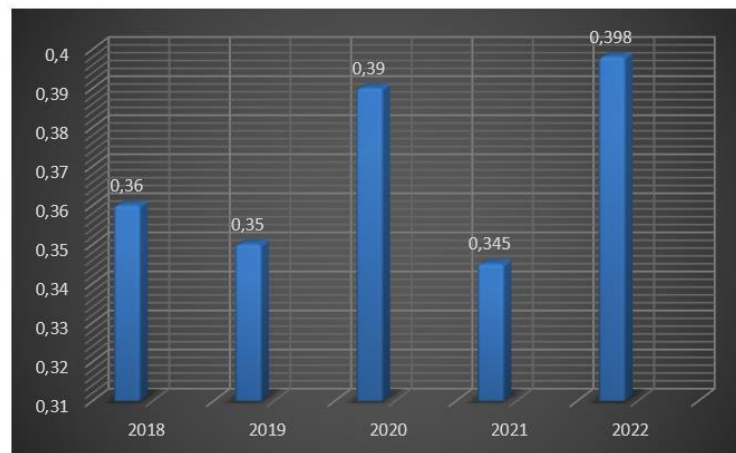
Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2022 adalah 82,18%, peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA. Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban :

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma- norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan kepada masyarakat (responden) bahwa penilaian persepsi pada setiap indikator disimpulkan rata-rata Nilai Persepsi Indeks Ketentraman Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2022 adalah Nilai Interval 3,25 atau Nilai Konversi 81,25 dengan peringkat “B” atau status/predikat “KONDUSIF” atau naik sebesar 2,51 poin jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 78,74. Sedangkan capaian tahun 2022 adalah sebesar 105,45% dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 yaitu sebesar 77,05.

## IT 5.2 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.



**Gambar 2. 27 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,35. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 0,39, penurunan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah. Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan membaik dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

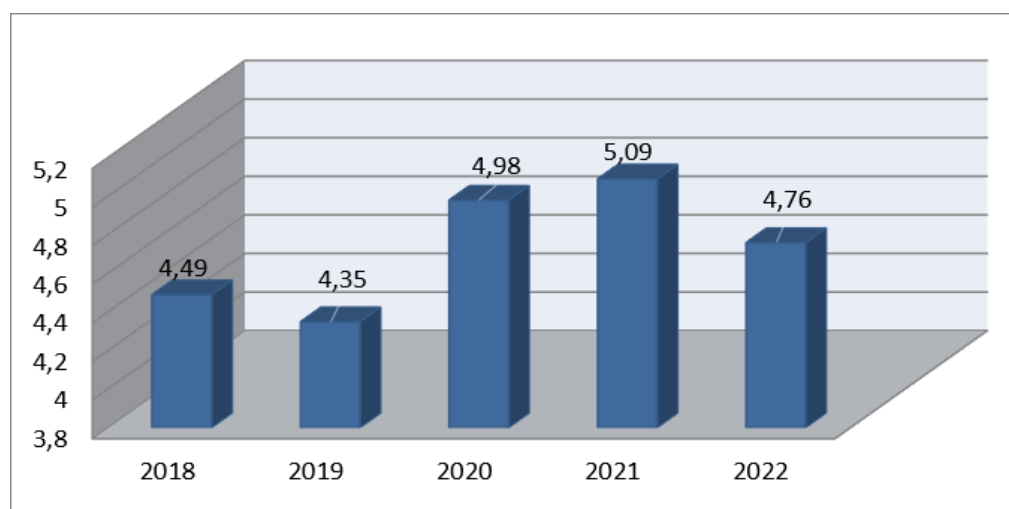
1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.

6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

## **Sasaran 10 Pengurangan Kemiskinan**

### **IS 10.1 Angka Kemiskinan**

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Wali kota Madiun Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 bahwa indikator sasaran pengurangan kemiskinan juga mengalami penyesuaian target sebagaimana tertuang pada RPJMD Perubahan, semula pada RPJMD-P target pengurangan kemiskinan sebesar 4,87 disesuaikan menjadi 5,07. Hal ini berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.



**Gambar 2. 28 Angka Kemiskinan di Kota Madiun**

Selama periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang sebanyak 0,57 ribu jiwa, dari 9,06 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 8,49 ribu jiwa pada Maret 2022 atau mengalami penurunan sebesar 6,29 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, dari 5,09 persen pada Maret 2021 menjadi 4,76 persen pada Maret 2022.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota Madiun miskin selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

- a. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih -0,13 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

b. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kota Madiun masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.
6. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

### **Sasaran 11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat IS 11.1**

#### **Indeks Kerukunan**

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2022 adalah 75,68 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,40 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,72 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,40 dengan kenaikan sebesar 1,28. Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

**Tabel 2. 22 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2019-2022**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>
1	2019	2,65	3,70 atau 73,95
2	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
3	2021	74,30	74,36
4	2022	74,40	75,68

*Sumber : Bangkesbangpol Kota Madiun, 2023*

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rakor Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sarasehan Bela Negara
4. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
5. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
6. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
7. Menyusun Peta Rawan Konflik
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

### **IS 11.2 Indeks Rasa Aman**

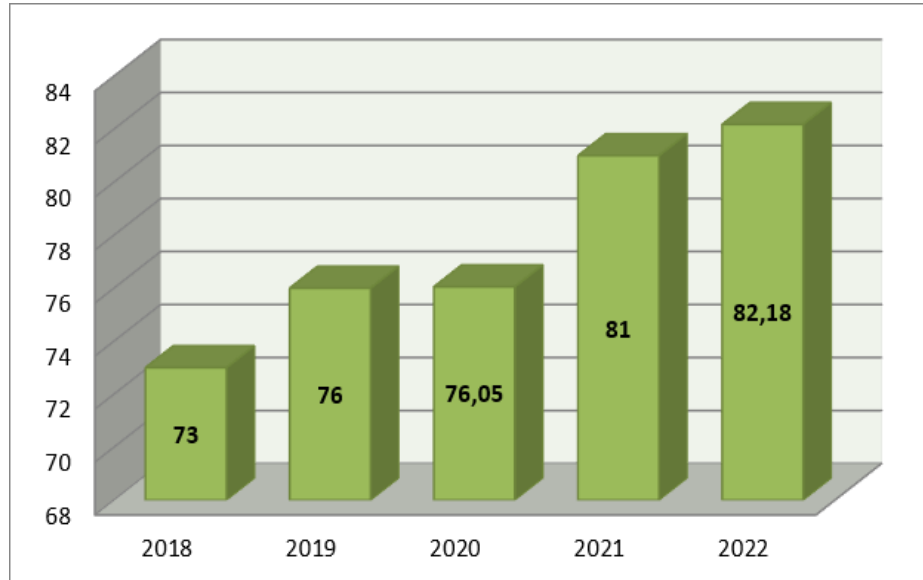
Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi. Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu:

- a. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- b. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- c. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- d. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)



Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2021 adalah sebesar 81,00 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,15. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 106,36%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2022 adalah sebesar 82,18 dengan peringkat Aman Terkendali, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,2. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 107,84%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 naik sebesar 1,18 poin.



**Gambar 2. 29 Capaian Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2018-2022**

Didalam Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan terdapat dimensi kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan yang sejalan dan dapat dijadikan tolok ukur dalam mendukung keselarasan dalam pencapaian Indeks Kesalehan pada Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2. 23 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					I	II	III	IV	10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																			
1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Wajib Belajar 9 Tahun</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.961.227.626</b>	<b>100</b>	<b>4.436.758.660</b>	<b>100</b>	<b>57.163.128.579</b>			<b>100</b>	<b>61.599.887.239</b>	<b>100%</b>	<b>61%</b>	
1	1	2	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>66.950.144.200</b>	<b>100</b>	<b>2.554.155.718</b>	<b>100</b>	<b>52.460.913.487</b>			<b>100</b>	<b>55.015.069.205</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	68	1.056.207.700	0	2.900.000	28	437.954.868		28	440.854.868	41%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit	4880	40.670.000.000	0	48.388.866	4600	49.130.202.330		4600	49.178.591.196	94%	121%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	283.281.000	0	60.480.790	0	46.823.900		0	107.304.690	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	168.577.000	0	-	0	-		0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	177.176.000	0	30.649.435	0	71.805.717		0	102.455.152	0%	58%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	293.566.000	0	73.486.091	0	64.440.000		0	137.926.091	0%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	189.916.000	0	33.157.838	0	30.424.000		0	63.581.838	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	306.973.000	0	53.815.359	0	88.955.939		0	142.771.298	0%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	152.626.000	0	32.477.612	0	23.241.000		0	55.718.612	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	354.228.000	0	83.815.161	0	70.316.900		0	154.132.061	0%	44%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Didik (SDN Oro - Oro Ombo)																	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	139.947.000	0	26.659.300	0	71.856.220					0	98.515.520	0%	70%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	152.185.000	0	-	0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.442.000	0	37.986.493	0	31.700.208					0	69.686.701	0%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	254.492.000	0	57.486.099	0	72.234.800					0	129.720.899	0%	51%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	236.001.000	0	47.321.649	0	47.671.010					0	94.992.659	0%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	186.397.000	0	39.527.691	0	37.768.300					0	77.295.991	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	419.729.000	0	56.165.377	0	72.358.000					0	128.523.377	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	208.295.500	0	31.957.660	0	27.657.000					0	59.614.660	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	141.670.000	0	26.909.710	0	24.897.000					0	51.806.710	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	199.889.000	0	36.291.395	0	44.940.675					0	81.232.070	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	323.546.000	0	69.391.800	0	57.708.449					0	127.100.249	0%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	372.900.000	0	41.437.788	0	61.222.000					0	102.659.788	0%	28%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian																
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	198.418.000	0	36.472.586	0	53.745.600					0	90.218.186	0%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	174.272.000	0	19.999.298	0	39.999.555					0	59.998.853	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.129.000	0	25.720.917	0	25.798.900					0	51.519.817	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	436.862.000	0	84.317.424	0	116.252.800					0	200.570.224	0%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	248.571.000	0	80.429.617	0	67.410.600					0	147.840.217	0%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	333.674.000	0	79.788.211	0	68.335.000					0	148.123.211	0%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	226.409.000	0	58.883.309	0	59.880.874					0	118.764.183	0%	52%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	176.487.000	0	-	0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	265.232.000	0	71.484.150	0	24.655.200					0	96.139.350	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	173.282.000	0	36.385.908	0	33.597.226					0	69.983.134	0%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	279.104.000	0	48.105.814	0	47.674.000					0	95.779.814	0%	34%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	176.350.000	0	26.148.550	0	28.598.000					0	54.746.550	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	162.976.000	0	31.239.330	0	35.128.700					0	66.368.030	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	253.546.000	0	60.288.300	0	69.199.707					0	129.488.007	0%	51%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	126.334.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	350.092.000	0	76.234.988	0	111.032.829					0	187.267.817	0%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	189.465.000	0	28.488.684	0	22.471.000					0	50.959.684	0%	27%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	436.181.000	0	101.668.410	0	110.557.600					0	212.226.010	0%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	133.440.000	0	23.870.232	0	40.876.200					0	64.746.432	0%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	196.679.000	0	39.394.030	0	37.785.280					0	77.179.310	0%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	284.316.000	0	77.931.722	0	39.325.000					0	117.256.722	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	360.290.000	0	54.654.202	0	81.733.800					0	136.388.002	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	264.879.000	0	62.897.456	0	69.090.000					0	131.987.456	0%	50%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	224.045.000	0	20.878.373	0	17.356.000					0	38.234.373	0%	17%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	444.378.000	0	79.225.823	0	57.092.500					0	136.318.323	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	321.711.000	0	59.478.018	0	43.959.500					0	103.437.518	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	238.968.000	0	53.350.491	0	238.968.000					0	292.318.491	0%	122%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	188.487.000	0	31.564.000	0	54.471.500					0	86.035.500	0%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	247.445.000	0	45.778.605	0	33.093.300					0	78.871.905	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	126.303.000	0	27.259.947	0	20.897.000					0	48.156.947	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	175.762.000	0	42.107.066	0	41.018.000					0	83.125.066	0%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	187.140.000	0	40.031.663	0	38.406.500					0	78.438.163	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	270.901.000	0	33.470.240	0	37.687.000					0	71.157.240	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	116.239.000	0	17.483.320	0	19.843.900					0	37.327.220	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.714.000	0	26.011.719	0	33.945.700					0	59.957.419	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.079.000	0	24.037.201	0	30.090.400					0	54.127.601	0%	37%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	50	449.340.000	0	-	1	18.515.500					1	18.515.500	2%	4%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	73	708.000.000	5	38.770.000	2	78.242.500					7	117.012.500	10%	17%	Dinas Pendidikan
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.818.822.426</b>	<b>100</b>	<b>1.835.458.882</b>	<b>100</b>	<b>4.605.151.802</b>					<b>100</b>	<b>6.440.610.684</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	6	200.378.400	0	600.000	2	834.316.158					2	834.916.158	33%	417%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	3.975.043.026	0	10.812.000	0	1.814.987.000					0	1.825.799.000	0%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	761	1.075.214.000	0	125.157.088	0	111.639.435					0	236.796.523	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	749	665.151.000	0	137.402.366	0	147.357.252					0	284.759.618	0%	43%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	556	606.869.000	0	149.263.100	0	179.981.500					0	329.244.600	0%	54%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	860	636.595.000	0	111.779.327	0	106.951.000					0	218.730.327	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	422	780.283.000	0	235.981.698	0	179.087.119					0	415.068.817	0%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	615	767.282.000	0	100.617.863	0	173.023.400					0	273.641.263	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	722	724.390.000	0	95.681.050	0	181.641.300					0	277.322.350	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	526	324.372.000	0	41.296.050	0	87.242.150					0	128.538.200	0%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	435	701.484.000	0	233.776.748	0	139.781.000					0	373.557.748	0%	53%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	517	976.920.000	0	158.461.741	0	169.370.850					0	327.832.591	0%	34%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	650	712.148.000	0	142.089.184	0	175.377.700					0	317.466.884	0%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	581	378.161.000	0	74.420.311	0	110.405.750					0	184.826.061	0%	49%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	692	539.907.000	0	129.783.460	0	113.933.288					0	243.716.748	0%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	324	375.477.000	0	88.336.896	0	68.618.900					0	156.955.796	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	23	212.633.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	105	522.540.000	0	-	2	11.438.000					2	11.438.000	2%	2%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	570.970.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>64</b>	<b>8.528.461.000</b>	<b>0</b>	<b>44.048.060</b>	<b>0</b>	<b>65.971.290</b>					<b>0</b>	<b>110.019.350</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	175	343.425.000	0	21.004.060	15	39.550.290					15	60.554.350	9%	18%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1000	3.600.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	163	1.011.796.000	0	23.044.000	5	26.421.000					5	49.465.000	3%	5%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	163	3.573.240.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>663.800.000</b>	<b>100</b>	<b>3.096.000</b>	<b>0</b>	<b>31.092.000</b>					<b>100</b>	<b>34.188.000</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	175	178.000.000	0	1.856.000	3	4.234.000					3	6.090.000	2%	3%	Dinas Pendidikan



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)			
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	75	85.000.000	0	1.240.000	11	26.858.000					11	28.098.000	15%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4	400.800.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Prosentase Sekolah berkurikulum SNP</b>	%	100	5.256.616.906	100	214.244.000	100	1.462.267.023					100	1.676.511.023	100%	32%	
1	1	3	2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu</b>	%	100	3.963.725.003	100	158.635.000	100	1.068.049.808					100	1.226.684.808	100%	31%	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1.657.533.530	0	115.609.500	0	631.755.500					0	747.365.000	0%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1.338.312.674	0	39.190.500	0	314.154.800					0	353.345.300	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	96	967.878.799	1	3.835.000	9	122.139.508					10	125.974.508	10%	13%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu</b>	%	100	1.292.891.903	100	55.609.000	100	394.217.215					100	449.826.215	100%	35%	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	1.292.891.903	0	55.609.000	0	394.217.215					0	449.826.215	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	4			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi</b>	%	65	1.609.200.000	0	305.844.400	0	264.725.200					0	570.569.600	0%	35%	
1	1	4	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan</b>	<b>persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi</b>	%	66	1.609.200.000	0	305.844.400	0	264.725.200					0	570.569.600	0%	35%	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	6	750.000.000		-	1	239.022.200					1	239.022.200	17%	32%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	2	859.200.000		305.844.400	0	25.703.000					0	331.547.400	0%	39%	Dinas Pendidikan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																						
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target</b>	%	75	96.959.857.208	0	5.994.295.925	0	15.024.115.008					0	21.018.410.933	0%	22%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	48.974.582.391	0	52.132.525	0	2.444.633.748	0		0		0	2.496.766.273	0%	5%	
							Unit	162		0		0										
							%	89,13		0		0										
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Unit	1	544.352.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	246.629.080	0	-	0	1.192.000					0	1.192.000	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	3	34.502.467.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	198	1.933.520.134	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	778	1.976.438.000	0	1.417.000	118	396.554.527					118	397.971.527	15%	20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	17	1.413.119.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	619	143.404.500	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	25	3.128.867.000	0	35.554.435	4	629.205.346					4	664.759.781	16%	21%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	6	4.999.852.477	0	-	1	1.395.402.000					1	1.395.402.000	17%	28%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	162	85.933.200	18	15.161.090	36	22.279.875					54	37.440.965	33%	44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>47.985.274.817</b>	<b>0</b>	<b>5.942.163.400</b>	<b>0</b>	<b>12.579.481.260</b>					<b>0</b>	<b>18.521.644.660</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2490	891.908.100	109	10.745.600	133	12.268.400					242	23.014.000	10%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2377	67.976.000	241	10.929.600	351	5.683.600					592	16.613.200	25%	24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2264	110.303.450	76	7.168.000	48	5.218.000					124	12.386.000	5%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9218	247.091.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31972	103.130.000	0	736.000	0	4.226.000					0	4.962.000	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	115490	119.184.408	0	4.872.000	0	7.670.000					0	12.542.000	0%	11%	Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28597	69.678.100	0	368.000	0	8.643.600					0	9.011.600	0%	13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	13.567.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	28.788.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	338	64.735.000	0	11.972.000	0	7.980.000					0	19.952.000	0%	31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	52.894.750	0	-	0	8.312.000					0	8.312.000	0%	16%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	163.368.900	0	9.800.000	0	58.829.000					0	68.629.000	0%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2	210.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2	210.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2	210.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	2	210.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo)	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar																Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2	210.000.000	0		0					0		-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2	210.000.000	0		0					0		-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	162.926.250	0	2.208.000	0	30.602.000				0		32.810.000	0%	20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	310.665.000	0	20.700.000	1	62.190.000				1		82.890.000	33%	27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	342.402.000	0	25.140.000	1	110.265.000				1		135.405.000	33%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	469.350.000	0	24.150.000	1	148.695.000				1		172.845.000	33%	37%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	249.475.000	0	24.000.000	1	92.835.000				1		116.835.000	33%	47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	672.959.000	0	44.580.000	1	108.600.000				1		153.180.000	33%	23%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	536.250.000	0		1	220.125.000				1		220.125.000	33%	41%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	400.507.500	0	34.896.000	1	48.023.000				1		82.919.000	33%	21%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	109.035.700	0	1.668.800	0	4.618.400					0	6.287.200	0%	6%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3	115.061.000	0	3.000.000	1	54.113.200					1	57.113.200	33%	50%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	338	60.032.200	0	4.800.000	0	7.200.000					0	12.000.000	0%	20%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	276.645.000	0	19.165.000	0	20.006.000					0	39.171.000	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	27.233.193.164	3	5.558.928.100	15	10.385.381.900					18	15.944.310.000	50%	59%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	10	324.124.800	0	17.674.000	0	25.062.000					0	42.736.000	0%	13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.919.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.466.214.600	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.634.640.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.531.620.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	2.100.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.916.250.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					(Puskesmas Demangan)																	Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	7	2.279.953.695	0	23.467.500	3	950.007.760					3	973.475.260	43%	43%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	22.939.200	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	659.406.000	0	81.194.800	0	192.926.400					0	274.121.200	0%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar</b>	%	91	198.360.350	0	47.153.000	0	39.347.850					0	86.500.850	0%	44%	
1	2	3	2.03		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</b>	Orang	500	198.360.350	98	47.153.000	148	39.347.850					246	86.500.850	49%	44%	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	500	198.360.350	98	47.153.000	72	39.347.850					170	86.500.850	34%	44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar</b>	%	88	96.205.700	0	15.656.200	0	16.614.000					0	32.270.200	0%	34%	
1	2	4	2.01		<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Dokumen	2	61.684.700	0	15.656.200	0	4.714.400					0	20.370.600	0%	33%	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	2	61.684.700	0	15.656.200	0	4.714.400					0	20.370.600	0%	33%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																Keluarga Berencana
1	2	4	2.04		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>34.521.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.899.600</b>					<b>0</b>	<b>11.899.600</b>	<b>0%</b>	<b>34%</b>	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	3	34.521.000	0	0	0	11.899.600					0	11.899.600	0%	34%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata</b>	<b>%</b>	<b>62,5</b>	<b>2.482.254.780</b>	<b>0</b>	<b>165.352.800</b>	<b>0</b>	<b>575.317.400</b>					<b>0</b>	<b>740.670.200</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	
1	2	5	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>355.011.920</b>	<b>0</b>	<b>28.586.800</b>	<b>0</b>	<b>17.395.400</b>					<b>0</b>	<b>45.982.200</b>	<b>0%</b>	<b>13%</b>	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	355.011.920	0	28.586.800	0	17.395.400					0	45.982.200	0%	13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>2.127.242.860</b>	<b>0</b>	<b>136.766.000</b>	<b>1</b>	<b>557.922.000</b>					<b>1</b>	<b>694.688.000</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	Dokumen	3	2.127.242.860	0	136.766.000	1	557.922.000					1	694.688.000	33%	33%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)				
					Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			Keluarga Berencana		
1	3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																						
1	3	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase ketaatan terhadap RTRW</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>0</b>		<b>146.056.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>348.307.407</b>			<b>0</b>		<b>494.363.907</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>		
						<b>Persentase Rawan Banjir/Genangan</b>	<b>%</b>	<b>18,47</b>		<b>12.574.216.000</b>	<b>0</b>		<b>146.056.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>348.307.407</b>			<b>0</b>		<b>494.363.907</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>		
1	3	2	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>			<b>0</b>		<b>146.056.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>348.307.407</b>			<b>0</b>		<b>494.363.907</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>		
						<b>Persentase rawan Genangan</b>	<b>%</b>	<b>18,47</b>		<b>12.574.216.000</b>	<b>0</b>		<b>146.056.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>348.307.407</b>			<b>0</b>		<b>494.363.907</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>		
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	2		235.100.000	0		-	0								0		-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	2		3.165.339.960	0		-	0								0		-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0,5		8.075.086.040	0		26.647.500	0			27.300.000					0		53.947.500	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1		1.098.690.000	0		119.409.000	0			321.007.407					0		440.416.407	0%	40%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>21.869.000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0</b>								<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
1	3	3	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>21.869.000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0</b>								<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1		21.869.000	0		-	0			0					0		-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase panjang drainase dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>80,09</b>		<b>22.188.093.000</b>	<b>0</b>		<b>300.098.789</b>	<b>0</b>			<b>802.584.640</b>					<b>0</b>		<b>1.102.683.429</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	
1	3	6	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase panjang drainase dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>80,09</b>		<b>22.188.093.000</b>	<b>0</b>		<b>300.098.789</b>	<b>0</b>			<b>802.584.640</b>					<b>0</b>		<b>1.102.683.429</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Dokumen	20		934.450.000	0		-	0			-					0		-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun																
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	100	19.195.397.000	0	-	0	205.144.800					0	205.144.800	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	100	2.058.246.000	19	300.098.789	25	597.439.840					44	897.538.629	44%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan</b>	%	100	38.642.900.000	0	2.592.100	0	1.661.842.200					0	1.664.434.300	0%	4%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	38.642.900.000	0	2.592.100	0	1.661.842.200					0	1.664.434.300	0%	4%	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	5	242.900.000	0	2.592.100	0	0					0	2.592.100	0%	1%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	40	38.400.000.000	0	-	2	1.661.842.200					2	1.661.842.200	5%	4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan</b>	%	100	18.964.000.895	0	1.305.498.400	0	2.170.614.250					0	3.476.112.650	0%	18%	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan sesuai ketentuan	%	100	18.964.000.895	0	1.305.498.400	0	2.170.614.250					0	3.476.112.650	0%	18%	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	27	18.371.066.895	27	1.252.570.400	27	1.970.813.250					27	3.223.383.650	100%	18%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	27	592.934.000	27	52.928.000	27	199.801.000					27	252.729.000	100%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi mantab</b>	%	95,5	41.965.000.000	0	1.298.291.000	0	8.975.446.380					0	10.273.737.380	0%	24%	
1	3	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi mantap</b>	%	95,5	41.965.000.000	0	1.298.291.000	0	8.975.446.380					0	10.273.737.380	0%	24%	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	1	258.292.800	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M <sup>2</sup>	1500	3.015.100.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	1	408.600.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	1,5	1.652.330.000	0	-	0	39.200.000					0	39.200.000	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM	2	13.976.210.000	0	-	0	715.105.380					0	715.105.380	0%	5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	1,5	14.379.050.000	0	649.766.000	0,5	7.364.621.000					0,5	8.014.387.000	33%	56%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	6	5.852.247.200	0	648.525.000	2	758.470.000					2	1.406.995.000	33%	24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M2	10	2.195.180.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M <sup>2</sup>	10	227.990.000	0	-	3	98.050.000					3	98.050.000	30%	43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi</b>	%	77,98	679.650.000	0	1.750.700	0	9.913.000					0	11.663.700	0%	2%	
1	3	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat</b>	orang	100	491.250.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	Orang	100	491.250.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan																
1	3	11	2.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi</b>	%	95	188.400.000	0	1.750.700	0	9.913.000					0	11.663.700	0%	6%	
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	80	188.400.000	0	1.750.700	0	9.913.000					0	11.663.700	0%	6%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase ketaatan terhadap RTRW</b>	%	100	1.250.000.000	0	18.448.912	0	40.784.383					0	59.233.295	0%	5%	
1	3	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan</b>	<b>Dokumen</b>	1	950.000.000	0	12.125.862	0	21.969.115					0	34.094.977	0%	4%	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	0	6.573.630	0	12.957.480					0	19.531.110	0%	10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000	0	5.552.232	0	9.011.635					0	14.563.867	0%	5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	250.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	200.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Dokumen</b>	1	100.000.000	0	5.893.050	0	14.397.300					0	20.290.350	0%	20%	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	100.000.000	0	5.893.050	0	14.397.300					0	20.290.350	0%	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Dokumen</b>	1	200.000.000	0	430.000	0	4.417.968					0	4.847.968	0%	2%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	200.000.000	0	430.000	0	4.417.968					0	4.847.968	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																						
1	4	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Prosentase Pengembangan Perumahan</b>	%	100	2.477.810.500	0	217.001.502	0	487.276.590					0	704.278.092	0%	28%	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Dokumen	1	86.150.000	0	1.445.900	0	-					0	1.445.900	0%	2%	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	86.150.000	0	1.445.900	0	0					0	1.445.900	0%	2%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	lokasi	3	2.295.210.500	0	215.055.602	1	486.826.590					1	701.882.192	33%	31%	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	3	2.295.210.500	0	215.055.602	1	486.826.590					1	701.882.192	33%	31%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	96.450.000	0	500.000	0	450.000					0	950.000	0%	1%	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan	1	96.450.000	0	500.000	0	450.000					0	950.000	0%	1%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh</b>	%	99,5	5.723.441.600	0	44.364.000	0	327.170.550					0	371.534.550	0%	6%	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	95.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	95.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
																						Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	%	0,5	5.628.441.600	0	44.364.000	0	327.170.550					0	371.534.550	0%	7%	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	3	38.736.000	0	4.196.000	0						0	4.196.000	0%	11%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit	160	2.222.940.600	0	8.391.000	0	13.468.250					0	21.859.250	0%	1%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	ha	16,41	3.366.765.000	0	31.777.000	0	313.702.300					0	345.479.300	0%	10%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	%	100	19.677.447.900	0	1.628.169.110	50	4.014.652.030					50	5.642.821.140	50%	29%	
1	4	5	2.01		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai</b>	%	100	19.677.447.900	0	1.628.169.110	50	4.014.652.030					50	5.642.821.140	50%	29%	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	19.677.447.900	3	1.628.169.110	3	4.014.652.030					3	5.642.821.140	100%	29%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																	
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan</b>	%	97	11.113.091.000	97	744.669.042	97	697.755.500					97	1.442.424.542	100%	13%	
1	5	2	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Orang	78	8.566.566.000	78	538.597.750	78	642.718.000					78	1.181.315.750	100%	14%	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Kasus	40	1.525.526.000	40	162.929.250	40	215.683.250					40	378.612.500	100%	25%	Satuan Polisi Pamong Praja

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	275	812.347.000	67	96.479.750	53	131.810.000					120	228.289.750	44%	28%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8	152.772.000	0		1	19.847.500					1	19.847.500	13%	13%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	6	5.763.046.000	0	217.452.750	1	217.467.250					1	434.920.000	17%	8%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	78	312.875.000	12	61.736.000	13	57.910.000					25	119.646.000	32%	38%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>2.442.006.000</b>	<b>1</b>	<b>206.071.292</b>	<b>1</b>	<b>55.037.500</b>					<b>2</b>	<b>261.108.792</b>	<b>50%</b>	<b>11%</b>	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Dokumen	4	2.096.102.000	1	189.921.292	0	9.747.500					1	199.668.792	25%	10%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan	Laporan	12	345.904.000	3	16.150.000	1	45.290.000					4	61.440.000	33%	18%	Satuan Polisi Pamong Praja

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP																dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas</b>	%	100	104.519.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	12	104.519.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</b>	%	100	1.412.859.000	0	196.288.300	0	249.294.182	-	-	-	-	0	445.582.482	0%	32%	
1	5	3	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	%	100	112.354.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	50.000.000	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	300	62.354.000	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	%	100	1.144.390.000	26,7	134.215.000	42,83	231.554.182	-	-	-	-	69,5	365.769.182	70%	32%	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	50.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	87.155.000	0	-	0	26.000.000	-	-	-	-	0	26.000.000	0%	30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	5	19.040.000	1	1.015.000	4	15.620.182	-	-	-	-	5	16.635.182	100%	87%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	6	50.650.000	0	-	7	36.239.000					7	36.239.000	117%	72%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	37	888.600.000	37	133.200.000	0	133.200.000					37	266.400.000	100%	30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	300	48.945.000	0	-	300	20.495.000					300	20.495.000	100%	42%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	%	100	106.115.000	0	42.073.300	75	7.740.000					75	49.813.300	75%	47%	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	12	80.475.000	0	19.485.000	18	7.740.000					18	27.225.000	150%	34%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	12	25.640.000	0	22.588.300	0	-					0	22.588.300	0%	88%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana</b>	%	100	50.000.000	25	20.000.000	20	10.000.000					45	30.000.000	45%	60%	
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	50.000.000	0	20.000.000	0	10.000.000					0	30.000.000	0%	60%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	%	100	1.091.528.000	0	181.159.850	50	174.588.600					50	355.748.450	50%	33%	
1	5	4	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	1.074.428.000	100	181.159.850	100	174.588.600					100	355.748.450	100%	33%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)			
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	6	686.635.000	1	102.421.100	1	99.556.600			2	201.977.700	33%	29%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6	387.793.000	1	78.738.750	1	75.032.000			2	153.770.750	33%	40%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	5	4	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran</b>	%	90	17.100.000	0	-	0	-			0	-	0%	0%			
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	6	17.100.000	0	-	0	0			0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1	6				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																	
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial</b>	%	58	3.589.656.050	0	218.067.200	0	291.855.300			0	509.922.500	0%	14%			
1	6	2	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang dibina</b>	%	58	3.589.656.050	0	218.067.200	0	291.855.300			0	509.922.500	0%	14%			
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	214	396.044.900	43	67.428.400	209	40.700.000			252	108.128.400	118%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	65.647.800	0	7.023.800	3	9.151.900			3	16.175.700	100%	25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	210.899.700	0	7.458.300	5	52.563.200			5	60.021.500	100%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	2.917.063.650	0	136.156.700	14	189.440.200			14	325.596.900	100%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
1	6	4						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	%	100	1.635.853.661	0	587.204.900	0	137.597.200					0	724.802.100	0%	44%	
1	6	4	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	%	100	1.088.072.181	0	522.697.600	0	51.891.200					0	574.588.800	0%	53%	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	204.084.000	24	31.076.000	24	18.598.000					48	49.674.000	29%	24%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	25.768.681	27	15.843.700	0	-					27	15.843.700	45%	61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	35.457.200	7	25.594.900	0	-					7	25.594.900	54%	72%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	42.300.000	0	4.263.000	4	480.000					4	4.743.000	33%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	62	10.100.000	0	2.100.000	1	700.000					1	2.800.000	2%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	666.392.900	114	432.542.000	230	14.580.700					230	447.122.700	85%	67%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	103.969.400	13	11.278.000	3	17.532.500					16	28.810.500	27%	28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti</b>	%	100	547.781.480	0	64.507.300	0	85.706.000					0	150.213.300	0%	27%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>																
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	191.360.500	0	16.359.000	4	15.200.000					4	31.559.000	16%	16%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	95.736.800	0	13.472.800	160	15.558.800					160	29.031.600	64%	30%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	20.250.900	0	1.340.000	34	11.604.400					34	12.944.400	68%	64%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	10.789.900	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	26.051.380	0	3.003.500	85	12.110.800					85	15.114.300	85%	58%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	135	71.700.000	0	10.700.000	160	11.600.000					160	22.300.000	119%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	117.792.000	0	19.632.000	75	19.632.000					75	39.264.000	100%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	14.100.000	0	-	4	-					4	-	22%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>%</b>	<b>99,66</b>	<b>10.466.050.900</b>	<b>0</b>	<b>2.386.333.150</b>	<b>0</b>	<b>842.065.200</b>					<b>0</b>	<b>3.228.398.350</b>	<b>0%</b>	<b>31%</b>	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>8.668.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>					<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Orang	15	3.960.000	0	100.000	4	250.000					4	350.000	27%	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Kewenangan Kabupaten/Kota																Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	4.488.000	0		0					0		100.000	0%	2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	220	0		1					1		-	13%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.457.382.900</b>	<b>0</b>	<b>2.386.233.150</b>	<b>0</b>	<b>841.715.200</b>				<b>0</b>		<b>3.227.948.350</b>	<b>0%</b>	<b>31%</b>	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	24685	919.803.700	1376	81.413.600	30889					30889		180.820.200	125%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	4000	606.105.400	873	123.458.150	30889					30889		123.901.000	772%	41%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	4000	8.903.928.800	873	2.178.811.800	3726					3726		536.994.000	93%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	27.545.000	0	2.549.600	0					0		2.549.600	0%	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>657.016.400</b>	<b>0</b>	<b>54.220.500</b>	<b>0</b>	<b>58.068.000</b>				<b>0</b>		<b>112.288.500</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2.01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>78.209.900</b>	<b>0</b>	<b>4.184.500</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>4.184.500</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	39.282.600	0	4.184.500	0					0		4.184.500	0%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	Orang	300	15.177.300	0		0					0		-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	23.750.000	0		0	0					0		0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana</b>	%	100	578.806.500	0	50.036.000	0	58.068.000					0	108.104.000	0%	19%	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	135.615.200	0		0	0					0		0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	443.191.300	17	50.036.000	22	58.068.000					39	108.104.000	130%	24%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>	%	100	182.250.680	0	24.283.942	0	24.791.630					0	49.075.572	0%	27%	
1	6	7	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	%	100	182.250.680	0	24.283.942	0	24.791.630					0	49.075.572	0%	27%	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	966	182.250.680	0	24.283.942	966	24.791.630					966	49.075.572	100%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>16%</b>	<b>23%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																						
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan																						
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik																						
<b>Faktor Penghambat :</b>																						
1. Adanya regulasi baru mengenai struktur sumber dana APBD yang menjadikan OPD harus memetakan sumber dana dan peruntukan belanjanya																						
2. Adanya perubahan Juknis pada beberapa dana mandatori seperti dana DBH - CHT																						
3. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini																						
<b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b>																						
1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan																						
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																						
-																						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					I	II	III	IV											
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)		RP. (%)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																			
2	7	3		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>643.811.800</b>	<b>0</b>	<b>24.060.000</b>	<b>0</b>	<b>359.653.300</b>		<b>0</b>	<b>383.713.300</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>		
2	7	3	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>40</b>	<b>621.802.000</b>	<b>0</b>	<b>23.362.000</b>	<b>45</b>	<b>351.692.500</b>		<b>45</b>	<b>375.054.500</b>	<b>113%</b>	<b>60%</b>		
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	50	621.802.000	0	23.362.000	45	351.692.500	45	375.054.500	90%	60%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	3	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Prosentase LPKS yang berijin</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>10.054.800</b>	<b>0</b>	<b>698.000</b>	<b>60</b>	<b>7.960.800</b>		<b>60</b>	<b>8.658.800</b>	<b>300%</b>	<b>86%</b>	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	27	10.054.800	0	698.000	30	7.960.800	30	8.658.800	111%	86%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	3	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>perusahaan</b>	<b>30</b>	<b>11.955.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	11.955.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	4		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>165.600.000</b>	<b>0</b>	<b>40.889.400</b>	<b>0</b>	<b>45.994.000</b>		<b>0</b>	<b>86.883.400</b>	<b>0%</b>	<b>52%</b>		
2	7	4	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>230</b>	<b>165.600.000</b>	<b>0</b>	<b>40.889.400</b>	<b>0</b>	<b>45.994.000</b>		<b>0</b>	<b>86.883.400</b>	<b>0%</b>	<b>52%</b>	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	99.091.575	0	31.888.800	0	13.404.000	0	45.292.800	0%	46%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	200	66.508.425	23	9.000.600	213	32.590.000	213	41.590.600	107%	63%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	7	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan</b>	<b>%</b>	<b>16</b>	<b>1.436.872.624</b>	<b>0</b>	<b>270.046.000</b>	<b>0</b>	<b>187.741.600</b>					<b>0</b>	<b>457.787.600</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>		
2	7	5	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>50</b>	<b>9.050.000</b>	<b>0</b>	<b>3.462.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	<b>3.462.000</b>	<b>0%</b>	<b>38%</b>		
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	15	3.462.000	15	3.462.000	0	0					15	3.462.000	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	5.588.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	5	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>1.427.822.624</b>	<b>0</b>	<b>266.584.000</b>	<b>0</b>	<b>187.741.600</b>					<b>0</b>	<b>454.325.600</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>		
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	15	35.460.000	0	4.400.000	8	4.400.000					8	8.800.000	53%	25%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	5800	1.392.362.624	576	262.184.000	4413	183.341.600					4989	445.525.600	86%	32%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	8				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																		
2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN</b>	<b>Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>764.802.900</b>	<b>0</b>	<b>207.291.150</b>	<b>0</b>	<b>222.430.840</b>					<b>0</b>	<b>429.721.990</b>	<b>0%</b>	<b>56%</b>		



1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
					<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>																						
2	8	2	2.01		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase program yang di ARG</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>144.341.900</b>	<b>0</b>	<b>72.096.550</b>	<b>0</b>	<b>29.447.500</b>					<b>0</b>	<b>101.544.050</b>	<b>0%</b>	<b>70%</b>						
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	32	78.234.400	12	62.843.550	20	-					32	62.843.550	100%	80%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	23.242.500	0	-	34	11.572.500					34	11.572.500	100%	50%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	30.217.000	0	-	34	17.875.000					34	17.875.000	100%	59%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	12.648.000	0	9.253.000	34	-					34	9.253.000	100%	73%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>34.946.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>31.362.000</b>					<b>0</b>	<b>31.362.000</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>						
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8	34.946.000	0	-	8	31.362.000					8	31.362.000	100%	90%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina</b>	<b>%</b>	<b>55</b>	<b>585.515.000</b>	<b>0</b>	<b>135.194.600</b>	<b>0</b>	<b>161.621.340</b>					<b>0</b>	<b>296.815.940</b>	<b>0%</b>	<b>51%</b>						

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	580	562.735.000	127	135.194.600	170	161.621.340					297	296.815.940	51%	53%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	22.780.000	0	-	1	-					1	-	100%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>240.371.000</b>	<b>0</b>	<b>57.696.770</b>	<b>0</b>	<b>59.716.880</b>					<b>0</b>	<b>117.413.650</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>	
2	8	3	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>68.287.000</b>	<b>0</b>	<b>21.696.000</b>	<b>0</b>	<b>32.024.880</b>					<b>0</b>	<b>53.720.880</b>	<b>0%</b>	<b>79%</b>	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	36.391.000	0	-	1	32.024.880					1	32.024.880	100%	88%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27	31.896.000	27	21.696.000	0	-					27	21.696.000	100%	68%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>155.907.000</b>	<b>0</b>	<b>25.900.000</b>	<b>0</b>	<b>25.900.000</b>					<b>0</b>	<b>51.800.000</b>	<b>0%</b>	<b>33%</b>	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	Layanan	20	155.907.000	0	25.900.000	6	25.900.000					6	51.800.000	30%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
2	8	3	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif</b>	%	100	16.177.000	0	10.100.770	0	1.792.000					0	11.892.770	0%	74%	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12	7.518.000	4	1.792.000	6	1.792.000					10	3.584.000	83%	48%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.659.000	0	8.308.770	1	-					1	8.308.770	100%	96%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas</b>	%	20	314.350.300	0	116.289.300	0	9.634.000					0	125.923.300	0%	40%	
2	8	4	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak</b>	%	85	264.579.300	0	112.989.300	0	1.692.000					0	114.681.300	0%	43%	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	83.769.300	34	81.417.300	0	-					34	81.417.300	100%	97%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	180.810.000	0	31.572.000	0	1.692.000					0	33.264.000	0%	18%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak</b>	%	100	49.771.000	0	3.300.000	75	7.942.000					75	11.242.000	75%	23%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	257	49.771.000	0	3.300.000	190	7.942.000					190	11.242.000	74%	23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Terpenuhi Data terpilah gender dan anak</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>156.292.900</b>	<b>0</b>	<b>8.686.000</b>	<b>0</b>	<b>8.325.500</b>					<b>0</b>	<b>17.011.500</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>	
						<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>								<b>0</b>
2	8	5	2.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengumpulan data gender dan anak</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>156.292.900</b>	<b>0</b>	<b>8.686.000</b>	<b>0</b>	<b>8.325.500</b>					<b>0</b>	<b>17.011.500</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	62.698.900	0	280.000	0	963.500					0	1.243.500	0%	2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	93.594.000	0	8.406.000	0	7.362.000					0	15.768.000	0%	17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>%</b>	<b>22,43</b>	<b>264.556.000</b>	<b>0</b>	<b>25.876.300</b>	<b>0</b>	<b>26.322.000</b>					<b>0</b>	<b>52.198.300</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	
2	8	6	2.01		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak</b>	<b>%</b>	<b>22</b>	<b>43.238.000</b>	<b>0</b>	<b>18.346.300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	<b>18.346.300</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	43.238.000	0	18.346.300	0	0					0	18.346.300	0%	42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>%</b>	<b>22</b>	<b>221.318.000</b>	<b>0</b>	<b>7.530.000</b>	<b>0</b>	<b>26.322.000</b>					<b>0</b>	<b>33.852.000</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	22.584.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	84.179.000	0	3.530.000	0	21.322.000					0	24.852.000	0%	30%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	76.214.000	0	4.000.000	0	5.000.000					0	9.000.000	0%	12%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	38.341.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>%</b>	<b>0,04</b>	<b>82.818.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>6.410.000</b>					<b>0</b>	<b>7.760.000</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak</b>	<b>%</b>	<b>40,47</b>	<b>26.312.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>					<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	26.312.000	0	-	0	6.000.000					0	6.000.000	0%	23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>34.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang	Layanan	12	5.750.000	0	1.350.000	0	0					0	1.350.000	0%	23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12			
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)			
					Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																					Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	28.400.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak</b>	%		100	22.356.000	0	-	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0%	2%						
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	22.356.000	0	-	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0	410.000	0%	2%					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	9				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																							
2	9	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Prosentase Angka Kecukupan Energi</b>	%		100	289.962.000	0	26.921.100	0	55.916.800	0	55.916.800	0	82.837.900	0%	29%								
2	9	3	2.01		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Prosentase ketersediaan pangan utama</b>	%		100	166.457.000	0	4.050.000	0	50.268.000	0	50.268.000	0	54.318.000	0%	33%								
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		3	16.713.500	0	-	1	7.747.000			1	7.747.000	33%	46%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan		1	117.252.000	0	4.050.000	0	35.171.000			0	39.221.000	0%	33%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Dokumen	4	32.491.500	0	-	0	7.350.000					0	7.350.000	0%	23%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Angka Kecukupan Energi / AKE</b>	<b>kcal/kapita</b>	<b>2100</b>	<b>123.505.000</b>	<b>0</b>	<b>22.871.100</b>	<b>0</b>	<b>5.648.800</b>					<b>0</b>	<b>28.519.900</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>		
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	24.855.000	0	19.271.100	0	1.098.800					0	20.369.900	0%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	98.650.000	0	3.600.000	0	4.550.000					0	8.150.000	0%	8%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	4			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Prosentase daerah rentan dan rawan pangan</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>43.842.500</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>					<b>0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>		
2	9	4	2.01		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>43.842.500</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>					<b>0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>		
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	43.842.500	0	3.200.000	0	3.200.000					0	6.400.000	0%	15%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Prosentase pangan segar aman yang teruji</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>86.182.500</b>	<b>0</b>	<b>4.417.000</b>		<b>50.110.475</b>					<b>0</b>	<b>54.527.475</b>	<b>0%</b>	<b>63%</b>		
2	9	5	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</b>	<b>lokasi</b>	<b>8</b>	<b>86.182.500</b>	<b>0</b>	<b>4.417.000</b>		<b>50.110.475</b>					<b>0</b>	<b>54.527.475</b>	<b>0%</b>	<b>63%</b>		
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	25.139.500	0	4.417.000	0	-					0	4.417.000	0%	18%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	61.043.000	0	-	1	50.110.475					1	50.110.475	100%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																		
2	10	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.402.000</b>	<b>30</b>	<b>2.021.250</b>					<b>30</b>	<b>4.423.250</b>	<b>30%</b>	<b>29%</b>		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	10	2	2.01		<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pemberian izin lokasi</b>	%	100	15.000.000	0	2.402.000	30	2.021.250					30	4.423.250	30%	29%		
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	%	100	15.000.000	0	2.402.000	30	2.021.250					30	4.423.250	30%	29%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	10	4			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan</b>	%	100	36.200.000	0	-	50	13.650.000					50	13.650.000	50%	38%		
2	10	4	2.01		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan</b>	%	100	36.200.000	0	-	50	13.650.000					50	13.650.000	50%	38%		
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	36.200.000	0	-	1	13.650.000					1	13.650.000	100%	38%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Prosentase Penatagunaan Tanah</b>	%	100	80.000.000	0	25.000.800	50	10.038.200					50	35.039.000	50%	44%		
2	10	10	2.01		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah</b>	%	100	80.000.000	0	25.000.800	50	10.038.200					50	35.039.000	50%	44%		
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	80.000.000	1	25.000.800	3	10.038.200					4	35.039.000	40%	44%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>																		
2	11	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia</b>	%	79,49	315.429.000	0	6.505.000	0	6.334.800					0	12.839.800	0%	4%		
2	11	2	2.01		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia</b>	dokumen	1	152.694.000	0	6.505.000	0	5.584.800					0	12.089.800	0%	8%		
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	152.694.000	0	6.505.000	0	5.584.800					0	12.089.800	0%	8%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia</b>	dokumen	1	162.735.000	0	-	0	750.000					0	750.000	0%	0%		



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	162.735.000	0	-	0	750.000					0	750.000	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</b>	%	50	923.491.779	0	66.867.500	7,5	102.927.500					7,5	169.795.000	15%	18%	
2	11	3	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya</b>	kegiatan/ usaha	78	663.400.063	0	59.984.500	53	67.797.500					53	127.782.000	68%	19%	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	276.787.919	0	44.808.500	0	27.361.500					0	72.170.000	0%	26%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	386.612.144	0	15.176.000	0	40.436.000					0	55.612.000	0%	14%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair</b>	usaha/ kegiatan	17	260.091.716	0	6.883.000	3	35.130.000					3	42.013.000	18%	16%	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2	135.091.916	0	870.000	1	29.630.000					1	30.500.000	50%	23%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	2	124.999.800	0	6.013.000	0	5.500.000					0	11.513.000	0%	9%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah</b>	%	100	76.700.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	
2	11	4	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah</b>	spesies	342	76.700.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	76.700.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)</b>	%	75	75.000.000	0	-	23	-					23	-	31%	0%	
2	11	5	2.01		<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)</b>	lokasi	17	75.000.000	0	-	7	-					7	-	41%	0%	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	dokumen	5	75.000.000	0	-	3	-					3	-	60%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	%	76,47	342.740.000	0	13.950.000	35	34.425.000					35	48.375.000	46%	14%	
2	11	6	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	perusahaan	17	342.740.000	0	13.950.000	7	34.425.000					7	48.375.000	41%	14%	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	4	197.740.000	0	13.950.000	2	16.704.000					2	30.654.000	50%	16%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	laporan	10	145.000.000	0	-	5	17.721.000					5	17.721.000	50%	12%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelayakan Operasi oleh Pemerintah																
2	11	8			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	%	100	614.764.500	0	31.555.000	0	4.662.850					0	36.217.850	0%	6%	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan	15	614.764.500	0	31.555.000	0	4.662.850					0	36.217.850	0%	6%	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	4	614.764.500	0	31.555.000	0	4.662.850					0	36.217.850	0%	6%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup</b>	%	100	100.000.000	0	-	40	42.497.000					40	42.497.000	40%	42%	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kasus	5	100.000.000	0	-	2	42.497.000					2	42.497.000	40%	42%	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	5	45.000.000	0	-	2	3.859.500					2	3.859.500	40%	9%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	1	55.000.000	0	-	1	38.637.500					1	38.637.500	100%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</b>	persen	72	4.304.290.776	0	319.408.050	72,04	702.161.200					72,04	1.021.569.250	100%	24%	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	ton	43780	4.204.290.776	0	319.408.050	16756,17	702.161.200					16756,17	1.021.569.250	38%	24%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	lokasi	2	250.000.000	0	3.742.700	2	10.016.900					2	13.759.600	100%	6%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	32280	2.239.000.000	7854	262.032.750	4218,5 58	280.546.700					12072,5 6	542.579.450	37%	24%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	27	147.659.200	0	53.632.600	27	23.635.000					27	77.267.600	100%	52%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	3	1.567.631.576	0	-	2	387.962.600					2	387.962.600	67%	25%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi</b>	<b>kelompok</b>	<b>45</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>					<b>20</b>	<b>-</b>	<b>44%</b>	<b>0%</b>		
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	3	100.000.000	0	-	3	-					3	-	100%	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																		
2	12	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>264.677.400</b>	<b>25</b>	<b>68.386.235</b>	<b>66,22</b>	<b>19.716.650</b>					<b>66,22</b>	<b>88.102.885</b>	<b>68%</b>	<b>33%</b>		
2	12	2	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>164.677.400</b>	<b>25</b>	<b>46.155.835</b>	<b>25</b>	<b>19.716.650</b>					<b>50</b>	<b>65.872.485</b>	<b>52%</b>	<b>40%</b>		
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	12	90.000.000	3	36.859.835	5	13.864.650					8	50.724.485	67%	56%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	12	74.677.400	3	9.296.000	5	5.852.000					8	15.148.000	67%	20%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	12	2	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penerbitan Kartu Keluarga</b>	%	96	100.000.000	3	22.230.400	0	-					3	22.230.400	3%	22%				
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	laporan	12	100.000.000	3	22.230.400	0	-					3	22.230.400	25%	22%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	3			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil</b>	%	94,5	160.842.000	0	-	99,2	59.780.000					99,2	59.780.000	105%	37%				
2	12	3	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim</b>	%	91	160.842.000	0	-	0	59.780.000					0	59.780.000	0%	37%				
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	12	65.438.000	0	-	5	-					5	-	42%	0%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	4	95.404.000	0	-	4	59.780.000					4	59.780.000	100%	63%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Akurasi database kependudukan</b>	%	99,46	275.471.650	0	77.865.443	100	65.376.167					100	143.241.610	101%	52%				
2	12	4	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase update data penduduk</b>	%	83	74.706.000	0	3.304.000	0	53.876.167					0	57.180.167	0%	77%				
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	12	35.100.000	0	-	1	32.895.000					1	32.895.000	8%	94%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	dokumen	15	39.606.000	0	3.304.000	17	20.981.167					17	24.285.167	113%	61%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	%	100	200.765.650	0	74.561.443	5	11.500.000					5	86.061.443	5%	43%				
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	laporan	12	200.765.650	0	74.561.443	5	11.500.000					5	86.061.443	42%	43%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																				
2	14	2			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah SSK</b>	<b>SSK</b>	8	439.867.720	0	64.433.900	0	259.072.030					0	323.505.930	0%	74%				
					<b>Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna</b>	<b>Kampung KB</b>	5	0		0		0													

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	2	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>98.183.000</b>	<b>0</b>	<b>7.128.400</b>	<b>0</b>	<b>27.537.600</b>			<b>0</b>	<b>34.666.000</b>	<b>0%</b>	<b>35%</b>			
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	7	98.183.000	0	7.128.400	2	27.537.600			2	34.666.000	29%	35%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>27</b>	<b>341.684.720</b>	<b>0</b>	<b>57.305.500</b>	<b>0</b>	<b>231.534.430</b>			<b>0</b>	<b>288.839.930</b>	<b>0%</b>	<b>85%</b>			
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								89.787.030			0	89.787.030	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	289.169.720	4	57.305.500	7	141.747.400			11	199.052.900	41%	69%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	24	52.515.000	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Menurunnya Unmet Need</b>	<b>%</b>	<b>7,5</b>	<b>1.922.669.452</b>	<b>0</b>	<b>80.377.200</b>	<b>0</b>	<b>1.024.565.000</b>			<b>0</b>	<b>1.104.942.200</b>	<b>0%</b>	<b>57%</b>			
2	14	3	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</b>	<b>Organisasi</b>	<b>27</b>	<b>601.248.212</b>	<b>0</b>	<b>8.092.000</b>	<b>0</b>	<b>85.245.200</b>			<b>0</b>	<b>93.337.200</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>			
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Organisasi	27	5.450.900	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
						kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	2	256.957.200	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	41.216.200	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	75.000.000	0	-	0	10.250.000					0	10.250.000	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	12	46.800.000	0	-	0	6.405.600					0	6.405.600	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	72	135.823.912	6	8.092.000	23	68.589.600					29	76.681.600	40%	56%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	40.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>	<b>748.155.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>748.155.200</b>					<b>0</b>	<b>748.155.200</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	3	740.654.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	150	7.501.200	0	-	150	15.500.000					150	15.500.000	100%	207%	Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b>	<b>Laporan</b>	<b>22</b>	<b>452.516.040</b>	<b>2</b>	<b>62.325.200</b>	<b>2</b>	<b>136.384.600</b>					<b>4</b>	<b>198.709.800</b>	<b>18%</b>	<b>44%</b>	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	22	16.200.000	2	550.000	2	1.100.000					4	1.650.000	18%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	651	391.017.040	79	61.775.200	138	130.804.600					217	192.579.800	33%	49%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	2	31.499.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	13.800.000	0	-	1	4.480.000					1	4.480.000	25%	32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>120.750.000</b>	<b>0</b>	<b>9.960.000</b>	<b>0</b>	<b>54.780.000</b>					<b>0</b>	<b>64.740.000</b>	<b>0%</b>	<b>54%</b>	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	Kampung	7	120.750.000	0	9.960.000	0	54.780.000					0	64.740.000	0%	54%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
						(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB																Keluarga Berencana
2	14	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB</b>	%	82	909.868.900	0	107.790.400	0	231.420.200					0	339.210.600	0%	37%	
2	14	4	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	Orang	240	909.868.900	0	107.790.400	0	231.420.200					0	339.210.600	0%	37%	
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	240	199.354.400	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	225	421.740.000	33	52.200.000	74	185.110.000					107	237.310.000	48%	56%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	32	288.774.500	4	55.590.400	4	46.310.200					8	101.900.600	25%	35%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>15</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																	
2	15	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas</b>	%	92	7.110.085.176	0	699.389.290		2.772.139.323					0	3.471.528.613	0%	49%	
2	15	2	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik</b>	%	85	2.852.340.520	0	224.073.550	60	1.296.406.235					60	1.520.479.785	71%	53%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	2	52.350.000	0	-					0	-	0%	0%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	1.042.174.800	0	-	200	1.005.175.000			200	1.005.175.000	100%	96%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	1.757.815.720	0	224.073.550	2	291.231.235			2	515.304.785	40%	29%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase terminal berfungsi baik</b>	%	<b>100</b>	<b>189.200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.430.400</b>	<b>100</b>	<b>176.923.350</b>			<b>100</b>	<b>186.353.750</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>			
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	189.200.000	0	9.430.400	2	176.923.350			2	186.353.750	100%	98%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir</b>	%	<b>100</b>	<b>1.026.708.000</b>	<b>0</b>	<b>105.067.630</b>	<b>70</b>	<b>420.854.255</b>			<b>70</b>	<b>525.921.885</b>	<b>70%</b>	<b>51%</b>			
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.026.708.000	0	105.067.630	1	420.854.255			1	525.921.885	100%	51%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kendaraan lulus uji</b>	%	<b>100</b>	<b>627.634.800</b>	<b>0</b>	<b>65.895.750</b>	<b>100</b>	<b>399.322.840</b>			<b>100</b>	<b>465.218.590</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>			
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	10	232.486.000	0	45.991.750	10	99.647.840			10	145.639.590	100%	63%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	395.148.800	0	19.904.000	12	299.675.000			12	319.579.000	100%	81%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	%	<b>100</b>	<b>59.304.000</b>	<b>0</b>	<b>430.500</b>	<b>50</b>	<b>12.300.000</b>			<b>50</b>	<b>12.730.500</b>	<b>50%</b>	<b>21%</b>			
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6	59.304.000	0	430.500	3	12.300.000			3	12.730.500	50%	21%		Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk</b>	<b>Persentase pengurusan rekomendasi analalin</b>	%	<b>100</b>	<b>359.616.000</b>	<b>0</b>	<b>28.385.740</b>	<b>40</b>	<b>19.718.555</b>			<b>40</b>	<b>48.104.295</b>	<b>40%</b>	<b>13%</b>			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Jalan Kabupaten/Kota</b>																	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	12	359.616.000	0	28.385.740	4	19.718.555					4	48.104.295	33%	13%	Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2.08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>946.667.000</b>	<b>0</b>	<b>107.871.800</b>	<b>40</b>	<b>200.945.588</b>					<b>40</b>	<b>308.817.388</b>	<b>40%</b>	<b>33%</b>	
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	4	51.300.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	775.103.000	0	107.871.800	1	158.836.580					1	266.708.380	100%	34%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	120.264.000	0	-	1	42.109.008					1	42.109.008	100%	35%	Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2.09</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan angkutan umum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.048.614.856</b>	<b>0</b>	<b>158.233.920</b>	<b>40</b>	<b>245.668.500</b>					<b>40</b>	<b>403.902.420</b>	<b>40%</b>	<b>39%</b>	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	41	1.048.614.856	0	158.233.920	41	245.668.500					41	403.902.420	100%	39%	Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>16</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>3.019.065.320</b>	<b>0</b>	<b>426.221.755</b>	<b>0</b>	<b>719.012.695</b>					<b>0</b>	<b>1.145.234.450</b>	<b>0%</b>	<b>38%</b>	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.019.065.320</b>	<b>100</b>	<b>426.221.755</b>	<b>100</b>	<b>719.012.695</b>					<b>100</b>	<b>1.145.234.450</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	1.555.562.323	3	173.218.000	2	491.812.480					5	665.030.480	42%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	973.923.328	3	201.986.120	2	164.277.780					5	366.263.900	42%	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	232.964.450	3	32.117.635	2	37.382.435					5	69.500.070	42%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	135.415.219	3	9.450.000	2						5	9.450.000	42%	7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	121.200.000	3	9.450.000	2	25.540.000					5	34.990.000	42%	29%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	%	100	8.802.706.560	100	3.166.008.341	100	3.134.580.104					100	6.300.588.445	100%	72%	
2	16	3	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD pengguna domain.id</b>	%	100	4.858.900.000	100	2.499.038.891	100	2.494.254.292					100	4.993.293.183	100%	103%	
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000	0	16.056.891	0	11.272.292					0	27.329.183	0%	27%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	82	4.758.900.000	82	2.482.982.000	82	2.482.982.000					82	4.965.964.000	100%	104%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah</b>	%	100	3.943.806.560	0	666.969.450	100	640.325.812					100	1.307.295.262	100%	33%	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.776.480.000	0	460.536.105	0	460.468.807					0	921.004.912	0%	33%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	273.700.000	0	48.832.130	0	49.878.220					0	98.710.350	0%	36%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	502.848.000	0	49.308.715	0	34.143.785					0	83.452.500	0%	17%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	2	180.778.560	0	27.300.000	0	18.200.000					0	45.500.000	0%	25%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	50.000.000	0	-	0	13.590.000					0	13.590.000	0%	27%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	35.000.000	0	2.992.500	0	12.045.000					0	15.037.500	0%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	125.000.000	0	78.000.000	1	52.000.000					1	130.000.000	100%	104%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																		
2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>444.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>79.252.500</b>					<b>0</b>	<b>79.252.500</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>		
2	17	5	2.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK</b>	<b>koperasi</b>	<b>35</b>	<b>444.620.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>79.252.500</b>					<b>20</b>	<b>79.252.500</b>	<b>57%</b>	<b>18%</b>		
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	300	444.620.000	0	-	185	79.252.500					185	79.252.500	62%	18%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	17	6			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah</b>	<b>%</b>	<b>2,5</b>	<b>59.995.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>120.809.100</b>					<b>0</b>	<b>121.709.100</b>	<b>0%</b>	<b>203%</b>		
2	17	6	2.01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah</b>	<b>koperasi</b>	<b>5</b>	<b>59.995.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>120.809.100</b>					<b>0</b>	<b>121.709.100</b>	<b>0%</b>	<b>203%</b>		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	130	59.995.000	0	900.000	0	120.809.100					0	121.709.100	0%	203%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik</b>	<b>%</b>	<b>7,33</b>	<b>200.075.406</b>	<b>0</b>	<b>17.029.300</b>	<b>0</b>	<b>16.678.051</b>					<b>0</b>	<b>33.707.351</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>		
2	17	8	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik</b>	<b>orang</b>	<b>11</b>	<b>200.075.406</b>	<b>0</b>	<b>17.029.300</b>	<b>0</b>	<b>16.678.051</b>					<b>0</b>	<b>33.707.351</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>		
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	60	200.075.406	0	17.029.300	48	16.678.051					48	33.707.351	80%	17%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																		
2	18	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>34.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>350.000</b>					<b>100</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>		
2	18	2	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah peta potensi investasi yang tersedia</b>	<b>buah</b>	<b>1</b>	<b>34.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>350.000</b>					<b>1</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>		
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	34.700.000	0	-	1	350.000					1	350.000	100%	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang merealisasikan investasinya</b>	<b>%</b>	<b>32</b>	<b>308.848.200</b>	<b>0</b>	<b>21.283.159</b>	<b>32</b>	<b>116.990.959</b>					<b>32</b>	<b>138.274.118</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>		
2	18	3	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah investor baru</b>	<b>investor</b>	<b>30</b>	<b>308.848.200</b>	<b>0</b>	<b>21.283.159</b>	<b>27</b>	<b>116.990.959</b>					<b>27</b>	<b>138.274.118</b>	<b>90%</b>	<b>45%</b>		
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	Dokumen	1	308.848.200	0	21.283.159	1	116.990.959					1	138.274.118	100%	45%	Dinas Penanaman Modal dan	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
					Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Kabupaten/Kota																Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>687.175.500</b>	<b>0</b>	<b>121.171.645</b>	<b>99,62</b>	<b>112.514.993</b>					<b>99,62</b>	<b>233.686.638</b>	<b>111%</b>	<b>34%</b>	
2	18	4	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pemohon Izin</b>	<b>izin</b>	<b>1700</b>	<b>687.175.500</b>	<b>0</b>	<b>121.171.645</b>	<b>2656</b>	<b>112.514.993</b>					<b>2656</b>	<b>233.686.638</b>	<b>156%</b>	<b>34%</b>	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1800	227.314.000	0	41.758.900	1712	35.135.590					1712	76.894.490	95%	34%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	360	222.501.500	0	41.948.220	66	65.200.203					66	107.148.423	18%	48%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	40	237.360.000	0	37.464.525	10	12.179.200					10	49.643.725	25%	21%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM</b>	<b>perusahaan</b>	<b>100</b>	<b>462.675.000</b>	<b>0</b>	<b>47.017.000</b>	<b>6</b>	<b>88.586.700</b>					<b>6</b>	<b>135.603.700</b>	<b>6%</b>	<b>29%</b>	
2	18	5	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang dibina</b>	<b>perusahaan</b>	<b>250</b>	<b>462.675.000</b>	<b>0</b>	<b>47.017.000</b>	<b>154</b>	<b>88.586.700</b>					<b>154</b>	<b>135.603.700</b>	<b>62%</b>	<b>29%</b>	
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	300	424.582.500	0	40.670.000	145	80.916.700					145	121.586.700	48%	29%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	kegiatan usaha	20	38.092.500	0	6.347.000	9	7.670.000					9	14.017.000	45%	37%	Dinas Penanaman Modal dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
					Pelaksanaan Penanaman Modal	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan																Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik</b>	%	100	198.248.500	0	29.143.200	0	29.143.200					0	58.286.400	0%	29%		
2	18	6	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik</b>	jenis izin	105	198.248.500	0	29.143.200	0	29.143.200					0	58.286.400	0%	29%		
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	198.248.500	0	29.143.200	1	29.143.200					1	58.286.400	50%	29%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																		
2	19	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	%	10	475.000.000	0	104.740.600	0	84.533.228					0	189.273.828	0%	40%		
2	19	2	2.01		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan</b>	Event	2	475.000.000	0	104.740.600	0	84.533.228					0	189.273.828	0%	40%		
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	100	475.000.000	23	104.740.600	78	84.533.228					78	189.273.828	78%	40%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
2	19	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	%	25	4.191.546.361	0	954.328.577	0	303.531.500					0	1.257.860.077	0%	30%		
2	19	3	2.01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi</b>	Sarpras Olahraga	3	2.115.546.361	0	697.501.202	0	218.762.500					0	916.263.702	0%	43%		



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	sarana prasarana	3	2.115.546.361	0	697.501.202	3	218.762.500					3	916.263.702	100%	43%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah</b>	<b>Event</b>	<b>3</b>	<b>460.000.000</b>	<b>1</b>	<b>216.909.000</b>	<b>1</b>	<b>2.800.000</b>					<b>2</b>	<b>219.709.000</b>	<b>67%</b>	<b>48%</b>	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	3	460.000.000	1	216.909.000	1	2.800.000					2	219.709.000	67%	48%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.04		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang dibina</b>	<b>Cabang Olahraga</b>	<b>10</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Organisasi	1	1.000.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.05		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan</b>	<b>Festival Olahraga</b>	<b>3</b>	<b>616.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.918.375</b>	<b>0</b>	<b>81.969.000</b>					<b>0</b>	<b>121.887.375</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	616.000.000	0	39.918.375	2	81.969.000					2	121.887.375	67%	20%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																	
2	20	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.753.700</b>	<b>0</b>	<b>3.273.500</b>					<b>0</b>	<b>11.027.200</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	125.000.000	0	7.753.700	0	3.273.500					0	11.027.200	0%	9%	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	125.000.000	0	7.753.700	0	3.273.500					0	11.027.200	0%	9%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																	
2	21	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengaman informasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>292.872.000</b>	<b>0</b>	<b>6.738.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>					<b>0</b>	<b>8.683.000</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	21	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan</b>	<b>JKS</b>	<b>2</b>	<b>292.872.000</b>	<b>0</b>	<b>6.738.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>			<b>0</b>	<b>8.683.000</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>			
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	41.752.000	0	3.012.000	0	1.105.000			0	4.117.000	0%	10%			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	34	251.120.000	34	3.726.000	34	840.000			34	4.566.000	100%	2%			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																	
2	22	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Prosentase seni budaya yang dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.209.100.000</b>	<b>0</b>	<b>39.018.500</b>	<b>0</b>	<b>539.482.000</b>			<b>0</b>	<b>578.500.500</b>	<b>0%</b>	<b>48%</b>			
2	22	2	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan</b>	<b>Budaya</b>	<b>15</b>	<b>1.209.100.000</b>	<b>0</b>	<b>39.018.500</b>	<b>0</b>	<b>539.482.000</b>			<b>0</b>	<b>578.500.500</b>	<b>0%</b>	<b>48%</b>			
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Budaya	10	939.100.000	0	39.018.500	3	539.482.000			3	578.500.500	30%	62%			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/Gro up	20	270.000.000	0	-	0	-			0	-	0%	0%			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>			<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>28%</b>			
2	22	3	2.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah seni budaya yang dibina</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>			<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0%</b>	<b>28%</b>			
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang/Gro up	45	50.000.000	0	-	22	14.000.000			22	14.000.000	49%	28%			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	22	5			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata</b>	<b>Obyek</b>	<b>2</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
2	22	5	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikembangkan</b>	<b>Obyek</b>	<b>20</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Obyek	20	50.000.000	0	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	40%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
2	23				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																				
2	23	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</b>	<b>%</b>	<b>6</b>	<b>1.040.301.770</b>	<b>0</b>	<b>200.715.000</b>	<b>0</b>	<b>200.715.000</b>	<b>0</b>	<b>200.715.000</b>	<b>0</b>	<b>401.430.000</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>						
2	23	2	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>4,6</b>	<b>349.200.000</b>	<b>0</b>	<b>79.772.500</b>	<b>0</b>	<b>79.772.500</b>	<b>0</b>	<b>79.772.500</b>	<b>0</b>	<b>159.545.000</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>						
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	74	282.400.000	24	79.772.500	50	54.575.361											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2400	66.800.000	0	-	0	-											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	2	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemasyarakatan gemar membaca</b>	<b>kali</b>	<b>20</b>	<b>691.101.770</b>	<b>0</b>	<b>120.942.500</b>	<b>3</b>	<b>48.985.000</b>	<b>0</b>	<b>48.985.000</b>	<b>3</b>	<b>169.927.500</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>						
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	2600	591.101.770	325	120.942.500	34	45.845.000											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	1	100.000.000	0	-	1	3.140.000											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	3			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>37</b>	<b>205.737.656</b>	<b>0</b>	<b>33.648.500</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>35.123.500</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>						
2	23	3	2.01		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan</b>	<b>Eksemplar</b>	<b>178</b>	<b>205.737.656</b>	<b>0</b>	<b>33.648.500</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>35.123.500</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>						

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	orang	2	106.849.718	0	33.648.500	2	-					2	33.648.500	100%	31%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Eksemplar	2	98.887.938	0	-	4	1.475.000					4	1.475.000	200%	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>2</b>	<b>24</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																	
2	24	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)</b>	<b>skor</b>	<b>88</b>	<b>656.180.000</b>	<b>0</b>	<b>155.998.700</b>	<b>0</b>	<b>44.383.000</b>					<b>0</b>	<b>200.381.700</b>	<b>0%</b>	<b>31%</b>	
2	24	2	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>345.182.000</b>	<b>0</b>	<b>45.227.000</b>	<b>0</b>	<b>16.797.000</b>					<b>0</b>	<b>62.024.000</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	58000	345.182.000	4395	45.227.000	24166	16.797.000					28561	62.024.000	49%	18%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>310.998.000</b>	<b>0</b>	<b>110.771.700</b>	<b>0</b>	<b>27.586.000</b>					<b>0</b>	<b>138.357.700</b>	<b>0%</b>	<b>44%</b>	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	260	310.998.000	93	110.771.700	198	27.586.000					198	138.357.700	76%	44%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>skor</b>	<b>8,6</b>	<b>162.762.100</b>	<b>0</b>	<b>72.028.400</b>	<b>0</b>	<b>45.017.400</b>					<b>0</b>	<b>117.045.800</b>	<b>0%</b>	<b>72%</b>	
2	24	3	2.01		<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>162.762.100</b>	<b>0</b>	<b>72.028.400</b>	<b>0</b>	<b>45.017.400</b>					<b>0</b>	<b>117.045.800</b>	<b>0%</b>	<b>72%</b>	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	arsip	1000	81.211.400	732	70.057.100	1664	-					2396	70.057.100	240%	86%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1					2	3		4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
					Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2 24 3 2.01 2					Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		berkas	1000	81.550.700	0	1.971.300	1160	45.017.400					1160	46.988.700	116%	58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						<b>36%</b>	<b>35%</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																						<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>	
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																								
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik																								
<b>Faktor Penghambat :</b>																								
1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol 2. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini																								
<b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b>																								
1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan																								
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																								
-																								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1					2	3		4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3 25 4					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya		Ton	285	159.900.000	34	38.533.520	0	21.642.786					34	60.176.306	12%	38%	
3 25 4 2.04					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) (RTP)		RTP	250	159.900.000	38	38.533.520	30	21.642.786					68	60.176.306	27%	38%	
3 25 4 2.04 3					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Unit	3	20.000.000	0		0						0		0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 25 4 2.04 5					Pembinaan dan Pemantauan	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan		Orang	100	139.900.000	100	38.533.520	0	21.642.786					100	60.176.306	100%	43%	Dinas Ketahanan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Pembudidayaan Ikan di Darat	pembudidayaan ikan di darat																Pangan dan Pertanian
3	25	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Jumlah total produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>89</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>					<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0%</b>	<b>56%</b>	
3	25	5	2.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)</b>	<b>orang</b>	<b>435</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>75</b>	<b>3.400.000</b>					<b>75</b>	<b>19.500.000</b>	<b>17%</b>	<b>56%</b>	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	35.000.000	0	16.100.000	1	3.400.000					1	19.500.000	50%	56%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Tingkat Konsumsi Makan Ikan</b>	<b>Kg/Kapita /tahun</b>	<b>16,1</b>	<b>214.032.000</b>	<b>0</b>	<b>3.735.000</b>	<b>0</b>	<b>38.745.800</b>					<b>0</b>	<b>42.480.800</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	
3	25	6	2.02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina</b>	<b>orang</b>	<b>50</b>	<b>67.141.000</b>	<b>0</b>	<b>3.735.000</b>	<b>20</b>	<b>25.887.800</b>					<b>20</b>	<b>29.622.800</b>	<b>40%</b>	<b>44%</b>	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	67.141.000	0	3.735.000	30	25.887.800					30	29.622.800	100%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga</b>	<b>ton</b>	<b>26</b>	<b>146.891.000</b>	<b>0</b>		<b>15</b>	<b>12.858.000</b>					<b>15</b>	<b>12.858.000</b>	<b>58%</b>	<b>9%</b>	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Pelaku Usaha	12	146.891.000	0		0	12.858.000					0	12.858.000	0%	9%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
				<b>PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>																						
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		<b>Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani</b>		<b>%</b>	<b>75</b>	<b>1.930.184.000</b>	<b>0</b>	<b>52.512.400</b>	<b>0</b>	<b>73.930.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.442.800</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>							
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	23.550.000	0	-	0	5.700.000	-	0	5.700.000	0%	24%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.906.634.000	0	52.512.400	0	68.230.400	-	0	120.742.800	0%	6%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik</b>		<b>%</b>	<b>75</b>	<b>70.440.000</b>	<b>0</b>	<b>45.966.520</b>	<b>0</b>	<b>13.700.000</b>	<b>0</b>	<b>59.666.520</b>	<b>0%</b>	<b>85%</b>								
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	70.440.000	30	45.966.520	5	13.700.000	-	35	59.666.520	292%	85%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik</b>		<b>%</b>	<b>75</b>	<b>233.727.000</b>	<b>0</b>	<b>4.897.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>6.387.000</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>								
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		<b>Prosentase pengembangan prasarana pertanian</b>		<b>%</b>	<b>75</b>	<b>16.138.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>								
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	1	16.138.000	0	-	0	1.490.000	-	0	1.490.000	0%	9%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara</b>		<b>%</b>	<b>25</b>	<b>217.589.000</b>	<b>0</b>	<b>4.897.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>4.897.000</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>								
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	52.815.000	0	-	1	-	-	1	-	100%	0%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	8.009.000	0	4.897.000	1	-	-	1	4.897.000	100%	61%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	156.765.000	0	-	0	-	-	0	-	0%	0%							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN</b>		<b>Prosentase penurunan kejadian dan jumlah</b>		<b>%</b>	<b>10</b>	<b>260.856.000</b>	<b>0</b>	<b>97.852.187</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000</b>	<b>0</b>	<b>105.102.187</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>								



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
				<b>HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>kasus penyakit hewan menular</b>																					
3	27	4	2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan</b>	%	80	155.797.000	0	77.136.287	0	1.000.000	0	78.136.287	0	50%										
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	4	155.797.000	1	77.136.287	2	1.000.000								3	78.136.287	75%	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	4	2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan pamedik veteriner)</b>	jenis	1	15.000.000	0	-	0	-	-	0	-	0%										
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Laporan	1	15.000.000	0	-	0	-	-	0	0%					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	4	2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi</b>	%	80	90.059.000	0	20.715.900	0	6.250.000	0	26.965.900	0	30%										
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	25.000.000	0	1.368.000	0	-	0	1.368.000	0%					0	1.368.000	0%	5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	65.059.000	0	19.347.900	3	6.250.000								3	25.597.900	30%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase lahan aman bencana pertanian</b>	%	74	112.370.000	0	1.950.000	0	-	0	1.950.000	0%						0	1.950.000	0%	2%		
3	27	5	2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas lahan aman bencana pertanian</b>	Ha/Tahun	1900	112.370.000	0	1.950.000	0	-	0	1.950.000	0%						0	1.950.000	0%	2%		
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	112.370.000	0	1.950.000	0	-	0	1.950.000	0%					0	1.950.000	0%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
3	27	6		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian</b>	%	12	33.600.000	0	-	12	1.000.000							12	1.000.000	100%	3%				
3	27	6	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten</b>	jenis	2	33.600.000	0	-	2	1.000.000							2	1.000.000	100%	3%				
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	33.600.000	0	-	0	1.000.000						0	1.000.000	0%	3%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	27	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih</b>	%	20	235.475.000	0		1.350.000	0	119.899.060						0	121.249.060	0%	51%				
3	27	7	2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah SDM Pertanian terlatih</b>	orang	200	235.475.000	0		1.350.000	100	119.899.060						100	121.249.060	50%	51%				
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	39	138.975.000	0		1.350.000	38	47.698.760					38	49.048.760	97%	35%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit usaha	2	96.500.000	0	-	0	72.200.300						0	72.200.300	0%	75%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	30			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																						
3	30	2		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan</b>	%	100	164.204.400	18		46.769.000	16	10.092.500						34	56.861.500	34%	35%				
3	30	2	2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan</b>	%	100	164.204.400	18		46.769.000	16	10.092.500						34	56.861.500	34%	35%				
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	75	164.204.400	2		46.769.000	12	10.092.500					14	56.861.500	19%	35%		Dinas Perdagangan		
3	30	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya</b>	%	100	4.322.249.628	0		691.241.000	16	227.385.400						16	918.626.400	16%	21%				
3	30	3	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana</b>	<b>Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya</b>	pasar	17	713.682.428	0		112.538.400	17	113.692.700						17	226.231.100	100%	32%				

1					2		3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Distribusi Perdagangan</b>																		
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	11.046.000	0		3	9.608.000						3	9.608.000	100%	87%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	702.636.428	17	112.538.400	17	104.084.700						34	216.623.100	200%	31%	Dinas Perdagangan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.608.567.200</b>	<b>0</b>	<b>578.702.600</b>	<b>12,5</b>	<b>113.692.700</b>						<b>12,5</b>	<b>692.395.300</b>	<b>13%</b>	<b>19%</b>	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	2	210.310.000	0	34.760.000	0	9.608.000						0	44.368.000	0%	21%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	3.398.257.200	0	543.942.600	1	104.084.700						1	648.027.300	25%	19%	Dinas Perdagangan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>254.657.000</b>	<b>0</b>	<b>67.411.200</b>	<b>41,8</b>	<b>23.762.800</b>						<b>41,8</b>	<b>91.174.000</b>	<b>42%</b>	<b>36%</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>236.664.000</b>	<b>0</b>	<b>61.841.200</b>	<b>33,5</b>	<b>19.354.800</b>						<b>33,5</b>	<b>81.196.000</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	100.707.000	0	30.497.200	1	15.638.800						1	46.136.000	33%	46%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	135.957.000	0	31.344.000	0	3.716.000						0	35.060.000	0%	26%	Dinas Perdagangan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Tersalurannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>17.993.000</b>	<b>0</b>	<b>5.570.000</b>	<b>50</b>	<b>4.408.000</b>						<b>50</b>	<b>9.978.000</b>	<b>50%</b>	<b>55%</b>	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	2	17.993.000	0	5.570.000	1	4.408.000						1	9.978.000	50%	55%	Dinas Perdagangan

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)				
3	30	6		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT</b>	%	100	214.569.024	14	35.168.400	13	26.505.000								27	61.673.400	27%	29%				
3	30	6	2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya</b>	bulan	12	214.569.024	3	35.168.400	2	26.505.000								5	61.673.400	42%	29%				
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Unit	7000	205.301.024	963	30.718.400	1823	26.505.000								2786	57.223.400	40%	28%	Dinas Perdagangan			
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Orang	150	9.268.000	0	4.450.000	0	-								0	4.450.000	0%	48%	Dinas Perdagangan			
3	30	7		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase produk perdagangan yang dipromosikan</b>	%	100	309.031.550	0	-	25	10.000.000								25	10.000.000	25%	3%				
3	30	7	2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</b>	kali	4	309.031.550	0	-	1	10.000.000								1	10.000.000	25%	3%				
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	4	129.031.550	0	-	0	-								0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan			
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	dokumen	2	180.000.000	0	-	1	10.000.000								1	10.000.000	50%	6%	Dinas Perdagangan			
3	31			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																							
3	31	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat</b>	%	5	89.492.950	0	4.400.000	0	20.501.195								0	24.901.195	0%	28%				
3	31	2	2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan</b>	IKM	20	89.492.950	0	4.400.000	0	20.501.195								0	24.901.195	0%	28%				
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	22.906.150	0	-	1	5.300.000								1	5.300.000	100%	23%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	23.000.000	0	-	1	2.320.000								1	2.320.000	50%	10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	43.586.800	0	4.400.000	0	12.881.195					0	17.281.195	0%	40%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>persentase IKM yang mengikuti publikasi produk</b>	%	12,8	210.795.438	0	16.927.000	0	91.743.800					0	108.670.800	0%	52%		
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	IKM	40	210.795.438	0	16.927.000	0	91.743.800					0	108.670.800	0%	52%		
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	210.795.438	0	16.927.000	1	91.743.800					1	108.670.800	50%	52%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	32				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>																		
3	32	3			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	%	100	39.101.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	
				Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian		%	20	0		0									0%				
				Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian		%	40	0		0									0%				
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	Orang	40	39.101.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	40	23.301.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	30	15.800.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>30%</b>	<b>27%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																			
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan																			
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik																			
<b>Faktor Penghambat :</b>																			
<b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b>																			
1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan																			
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																			
-																			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)							
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																						
4	1	2																				
4	1	2																				
4	1	2																				
4	1	2	2.01																			
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	1.214.948.600	1	340.327.600	1	425.442.000					2	765.769.600	50%	63%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	7	235.000.000	0	25.918.000	0	136810675					0	162.728.675	0%	69%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.02																			
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	6	9.248.290.929	1	294.353.500	2	3.396.314.500					3	3.690.668.000	50%	40%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.03																			
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	20	266.750.000	0	-	3	97.200.000					3	97.200.000	15%	36%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	25	226.275.880	5	67.958.620	0	34.199.685					5	102.158.305	20%	45%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	400	184.628.380	0	-	56	-					56	-	14%	0%	Bagian Hukum

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	2	2.04		<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Prosentase Kerjasama yang difasilitasi</b>	%	100	345.000.000	0	127.084.900	0	121.747.000				0	248.831.900	0%	72%	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	5	345.000.000	1	127.084.900	1	121.747.000				2	248.831.900	40%	72%	Bagian Pemerintahan
4	1	3			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	%	100	841.765.595	25	134.361.671	25	151.665.500				50	286.027.171	50%	34%	
4	1	3	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan</b>	Indeks	81	336.769.600	0	38.296.500	0	87.305.500				0	125.602.000	0%	37%	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	235.984.960	0	17.565.500	1	66.574.500				1	84.140.000	50%	36%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	2	100.784.640	0	20.731.000	1	20.731.000				1	41.462.000	50%	41%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
					jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	kegiatan	2	0		1		1		50%							
4	1	3	2.02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya &gt;79% dari target</b>	%	100	107.511.660	25	15.084.651	25	9.750.000				50	24.834.651	50%	23%	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	31.496.300	0	-	0	-				0	-	0%	0%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	76.015.360	3	15.084.651	3	9.750.000				6	24.834.651	50%	33%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa &gt;79% dari target</b>	%	100	199.354.240	25	80.980.520	25	43.900.000				50	124.880.520	50%	63%	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	92.664.800	3	51.304.520	3	22.500.000				6	73.804.520	50%	80%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	106.689.440	3	29.676.000	3	21.400.000				6	51.076.000	50%	48%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.04		<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase kegiatan yang telah dilaksanakan</b>	%	100	198.130.095	0	-	0	10.710.000				0	10.710.000	0%	5%	

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
4	1	3	2.04	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	%	100	198.130.095	0	-	0	10.710.000					0	10.710.000	0%	5%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat					
4	2				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																						
4	2	2			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Skor</b>	<b>85</b>	<b>12.253.836.420</b>	<b>0</b>	<b>2.967.847.994</b>	<b>0</b>	<b>2.315.157.629</b>					<b>0</b>	<b>5.283.005.623</b>	<b>0%</b>	<b>43%</b>						
4	2	2	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.781.493.140</b>	<b>0</b>	<b>1.854.688.800</b>	<b>8</b>	<b>1.016.696.150</b>					<b>8</b>	<b>2.871.384.950</b>	<b>8%</b>	<b>60%</b>						
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	21	3.218.753.660	2	377.870.000	0	266.381.150					2	644.251.150	10%	20%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan oleh Badan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	6	1.562.739.480	6	1.476.818.800	1	750.315.000					7	2.227.133.800	117%	143%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>1.516.935.100</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>	<b>20</b>	<b>183.375.000</b>					<b>20</b>	<b>190.025.000</b>	<b>200%</b>	<b>13%</b>						
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1.516.935.100	0	6.650.000	1	183.375.000					1	190.025.000	20%	13%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>574.554.900</b>	<b>0</b>	<b>176.642.000</b>	<b>50</b>	<b>237.468.350</b>					<b>50</b>	<b>414.110.350</b>	<b>50%</b>	<b>72%</b>						
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	338.831.780	0	162.642.000	0	29.945.100					0	192.587.100	0%	57%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	235.723.120	0	14.000.000	1	207.523.250					1	221.523.250	100%	94%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.204.257.280</b>	<b>0</b>	<b>649.936.794</b>	<b>39</b>	<b>562.010.729</b>					<b>39</b>	<b>1.211.947.523</b>	<b>39%</b>	<b>29%</b>						
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.003.790.000	1	545.011.794	0	121.767.000					1	666.778.794	17%	33%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	120	1.307.556.800	0	88.425.000	20	144.800.000					20	233.225.000	17%	18%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	892.910.480	0	16.500.000	1	295.443.729					1	311.943.729	100%	35%	Sekretariat DPRD					
4	2	2	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RPKD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.176.596.000</b>	<b>0</b>	<b>279.930.400</b>	<b>32</b>	<b>315.607.400</b>					<b>32</b>	<b>595.537.800</b>	<b>32%</b>	<b>51%</b>						



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	90	1.176.596.000	0	279.930.400	29	315.607.400					29	595.537.800	32%	51%	Sekretariat DPRD		
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				<b>36%</b>	<b>40%</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan <b>Faktor Penghambat :</b> - <b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b> - <b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b> -																								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																								
<b>PERENCANAAN</b>																								
5	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.417.459.130</b>	<b>0</b>	<b>502.196.923</b>	<b>0</b>	<b>176.717.065</b>					<b>0</b>	<b>678.913.988</b>	<b>0%</b>	<b>48%</b>			
5	1	2	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1.197.420.880</b>	<b>0</b>	<b>477.732.573</b>	<b>0</b>	<b>154.581.065</b>					<b>0</b>	<b>632.313.638</b>	<b>0%</b>	<b>53%</b>			
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	138.605.400	1	129.361.700	1	3.933.000					1	133.294.700	100%	96%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita Acara	1	149.241.780	1	147.815.700	1	-					1	147.815.700	100%	99%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	318.862.660	1	175.250.813	1	86.800.000					1	262.050.813	100%	82%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	590.711.040	0	25.304.360	0	63.848.065					0	89.152.425	0%	15%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	1	2	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>220.038.250</b>	<b>0</b>	<b>24.464.350</b>	<b>0</b>	<b>22.136.000</b>					<b>0</b>	<b>46.600.350</b>	<b>0%</b>	<b>21%</b>			

1					2		3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	2	2.03	1			Dokumen	2	93.060.650	0	19.478.600	1	16.255.000					1	35.733.600	50%	38%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.03	3			Dokumen	4	126.977.600	1	4.985.750	1	5.881.000					2	10.866.750	50%	9%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3					%	92	977.516.400	0	56.263.100	0	50.830.000					0	107.093.100	0%	11%		
5	1	3	2.01				Dokumen	1	343.409.120	0	34.906.000	0	24.255.000					0	59.161.000	0%	17%		
5	1	3	2.01	1			Dokumen	1	72.000.000	0	17.428.200	0	5.864.000					0	23.292.200	0%	32%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.01	3			Laporan	1	53.280.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.01	5			Dokumen	1	211.710.620	0	14.223.800	0	18.391.000					0	32.614.800	0%	15%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.01	7			OPD	26	6.418.500	0	3.254.000	0	-					0	3.254.000	0%	51%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.02				Dokumen	1	230.051.400	0	5.000.000	0	7.886.000					0	12.886.000	0%	6%		
5	1	3	2.02	1			Dokumen	1	47.237.000	0	-	0	2.886.000					0	2.886.000	0%	6%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	5	182.814.400	0	5.000.000	0	5.000.000					0	10.000.000	0%	5%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>404.055.880</b>	<b>0</b>	<b>16.357.100</b>	<b>0</b>	<b>18.689.000</b>					<b>0</b>	<b>35.046.100</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	138.904.500	0	10.998.000	0	7.000.000					0	17.998.000	0%	13%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	6	90.151.380	0	5.359.100	0	5.738.000					0	11.097.100	0%	12%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	150.000.000	0	-	0	5.951.000					0	5.951.000	0%	4%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Dokumen	6	25.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>	<b>2</b>				<b>KEUANGAN</b>																	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.224.351.023</b>	<b>0</b>	<b>236.665.850</b>	<b>25</b>	<b>426.550.100</b>					<b>25</b>	<b>663.215.950</b>	<b>25%</b>	<b>13%</b>	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Pengesahan Perda APBD tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>918.685.000</b>	<b>0</b>	<b>28.335.600</b>	<b>25</b>	<b>160.164.100</b>					<b>25</b>	<b>188.499.700</b>	<b>25%</b>	<b>21%</b>	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	83.421.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	56.819.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	28	16.876.000	28	16.335.600	0	-					28	16.335.600	100%	97%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	28	16.111.000	0	-	0	8.200.800					0	8.200.800	0%	51%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	154.679.000	0	-	0	28.640.500							0	28.640.500	0%	19%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	154.679.000	0	-	0	-							0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3	436.100.000	0	12.000.000	0	123.322.800							0	135.322.800	0%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45.050.000</b>	<b>0</b>	<b>6.325.000</b>	<b>25</b>	<b>8.795.000</b>						<b>25</b>	<b>15.120.000</b>	<b>25%</b>	<b>34%</b>			
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	55	39.950.000	0	5.475.000	24	7.350.000							24	12.825.000	44%	32%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	3	5.100.000	0	850.000	2	1.445.000							2	2.295.000	67%	45%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.138.759.000</b>	<b>0</b>	<b>198.953.000</b>	<b>25</b>	<b>205.425.000</b>						<b>25</b>	<b>404.378.000</b>	<b>25%</b>	<b>36%</b>			
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2	135.000.000	0	22.598.000	2	57.690.000							2	80.288.000	100%	59%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	66.000.000	0	9.855.000	0	10.310.000							0	20.165.000	0%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	80.000.000	0	-	0	-							0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	600	857.759.000	0	166.500.000	100	137.425.000							100	303.925.000	17%	35%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan</b>	<b>Persentase tersusunnya Laporan BTT</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.121.857.023</b>	<b>0</b>	<b>3.052.250</b>	<b>25</b>	<b>52.166.000</b>						<b>25</b>	<b>55.218.250</b>	<b>25%</b>	<b>2%</b>			

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
					<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																						
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	3.121.857.023	0	3.052.250	3	52.166.000					3	55.218.250	25%	2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.939.948.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462.324.000</b>	<b>25</b>	<b>26.155.000</b>					<b>25</b>	<b>1.488.479.000</b>	<b>25%</b>	<b>77%</b>						
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>22</b>	<b>1.939.948.000</b>	<b>0</b>	<b>1.462.324.000</b>	<b>5</b>	<b>26.155.000</b>					<b>5</b>	<b>1.488.479.000</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>						
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	97.142.000	0	-	1	12.500.000					1	12.500.000	50%	13%	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	1.803.206.000	1	1.456.969.000	0	9.120.000					1	1.466.089.000	50%	81%	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	18	39.600.000	0	5.355.000	4	4.535.000					4	9.890.000	22%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah					
						Pengelolaan Aset yang Dilindungi	%	100		0				0											0	0%	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>1.302.297.752</b>	<b>0</b>	<b>13.876.200</b>	<b>0</b>	<b>218.527.000</b>					<b>0</b>	<b>232.403.200</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>						
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.302.297.752</b>	<b>0</b>	<b>13.876.200</b>	<b>0</b>	<b>218.527.000</b>					<b>0</b>	<b>232.403.200</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>						
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	287.100.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	185.268.002	0	6.857.400	0	-					0	6.857.400	0%	4%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	dokumen	1	15.059.430	0	-	0	1.086.000					0	1.086.000	0%	7%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen	1	165.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	WP	4303	183.016.800	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	1	40.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah					
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Wajib Pajak	8923	6.993.000	0	1.656.000	0	-					0	1.656.000	0%	24%	Badan Pendapatan Daerah					

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi				100	99.040.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%			100	310.550.520	0	4.480.400	0	215.634.000					0	220.114.400	0%	71%	Badan Pendapatan Daerah	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen			1	10.270.000	0	882.400	0	1.807.000					0	2.689.400	0%	26%	Badan Pendapatan Daerah	
<b>5</b>	<b>3</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>																				
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>skor</b>			<b>87,7</b>	<b>2.417.697.200</b>	<b>0</b>	<b>288.177.250</b>	<b>0</b>	<b>255.846.000</b>					<b>0</b>	<b>544.023.250</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>		
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>1.202.560.000</b>	<b>0</b>	<b>58.030.000</b>	<b>89</b>	<b>91.119.200</b>					<b>89</b>	<b>149.149.200</b>	<b>89%</b>	<b>12%</b>		
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan			2	1.003.200.000	0	45.152.000	1	51.794.200					1	96.946.200	50%	10%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen			160	89.360.000	0	700.000	36	33.910.000					36	34.610.000	23%	39%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen			1000	110.000.000	0	12.178.000	####	5.415.000					1380	17.593.000	138%	16%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>461.784.200</b>	<b>0</b>	<b>69.518.250</b>	<b>61</b>	<b>101.001.000</b>					<b>61</b>	<b>170.519.250</b>	<b>61%</b>	<b>37%</b>		
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen			702	375.626.200	0	44.018.250	45	101.001.000					45	145.019.250	6%	39%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen			455	86.158.000	0	25.500.000	7	-					7	25.500.000	2%	30%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>601.710.000</b>	<b>0</b>	<b>154.470.000</b>	<b>30</b>	<b>57.312.800</b>					<b>30</b>	<b>211.782.800</b>	<b>30%</b>	<b>35%</b>		
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen			150	601.710.000	0	154.470.000	28	57.312.800					28	211.782.800	19%	35%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.04</b>		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>%</b>			<b>100</b>	<b>151.643.000</b>	<b>0</b>	<b>6.159.000</b>	<b>20</b>	<b>6.413.000</b>					<b>20</b>	<b>12.572.000</b>	<b>20%</b>	<b>8%</b>		
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen			1	14.391.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang			1429	60.130.000	0	-	98	643.000					98	643.000	7%	1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	60	77.122.000	0	6.159.000	18	5.770.000					18	11.929.000	30%	15%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																						
5	4	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase Realisasi Pengembangan SDM</b>	%	20	2.459.306.900	0	351.438.489	0	432.788.987					0	784.227.476	0%	32%	
5	4	2	2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis</b>	%	85	1.590.042.900	0	290.679.400	44	352.608.124					44,4	643.287.524	52%	40%	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	277	1.590.042.900	37	290.679.400	182	352.608.124					219	643.287.524	79%	40%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya</b>	%	80	869.264.000	0	60.759.089	14	80.180.863					14	140.939.952	18%	16%	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	177	869.264.000	0	60.759.089	26	80.180.863					26	140.939.952	15%	16%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																						
5	5	2			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan</b>	%	100	1.377.973.164	0	24.407.900	0	276.991.000					0	301.398.900	0%	22%	
5	5	2	2.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian</b>	<b>Dokumen</b>	2	1.114.178.361	0	16.769.900	0	271.090.700					0	287.860.600	0%	26%	
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	938.831.161	0	11.844.900	0	266.114.700					0	277.959.600	0%	30%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	175.347.200	0	4.925.000	0	4.976.000					0	9.901.000	0%	6%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	1	263.794.803	0	7.638.000	0	5.900.300					0	13.538.300	0%	5%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	263.794.803	0	7.638.000	0	5.900.300					0	13.538.300	0%	5%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>20%</b>	<b>30%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<p><b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan</p> <p><b>Faktor Penghambat :</b> 1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol</p> <p><b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b> 1. Terus melakukan koordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b> -</p>																						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>																						
6	1	2			Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	%	40	386.115.900	0	119.540.798	6	25.860.000						6	145.400.798	15%	38%	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	Laporan	29	352.646.300	8	118.465.598	6	19.566.000					14	138.031.598	48%	39%	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	51.712.800	0	19.140.000	1	5.400.000					1	24.540.000	33%	47%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	15	129.926.000	6	64.290.050	4	9.470.000					10	73.760.050	67%	57%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	24.436.000	0	4.906.800	1	4.696.000					1	9.602.800	25%	39%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	128.766.400	0	28.808.748	0	-					0	28.808.748	0%	22%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	17.805.100	0	1.320.000	0	-					0	1.320.000	0%	7%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	33.469.600	0	1.075.200	0	6.294.000					0	7.369.200	0%	22%	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	5.364.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah



1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	3	28.105.600	0	1.075.200	1	6.294.000					1	7.369.200	33%	26%	Inspektorat Daerah					
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi</b>	%	100	794.648.700	0	154.672.000	15	167.831.600					15	322.503.600	15%	41%						
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	2	6.622.800	0	0	0						0		0%	0%						
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	6.622.800	0	0	0						0		0%	0%	Inspektorat Daerah					
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	7	788.025.900	0	154.672.000	5	167.831.600					5	322.503.600	71%	41%						
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	34	129.592.000	0	0	4	55.401.600					4	55.401.600	12%	43%	Inspektorat Daerah					
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	658.433.900	0	154.672.000	1	112.430.000					1	267.102.000	25%	41%	Inspektorat Daerah					

Rata - Rata Capaian Kinerja (%)

22%

39%

Predikat Kinerja

Sangat Rendah

Sangat Rendah

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

-

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12						
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)						
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																										
7	1				<b>KECAMATAN TAMAN</b>																										
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	89	4.787.942.665	0	1.390.826.032	25	1.027.140.543							25	2.417.966.575	28%	51%								

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase terselesainya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan</b>	%	100	4.765.944.265	0	1.390.826.032	50	1.024.702.543					50	2.415.528.575	50%	51%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	546.493.765	3	177.158.061	3	102.316.186					6	279.474.247	50%	51%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	514.902.000	3	141.565.972	3	131.618.342					6	273.184.314	50%	53%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	537.454.321	3	152.487.609	3	112.158.779					6	264.646.388	50%	49%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	321.833.320	3	109.565.996	3	62.459.281					6	172.025.277	50%	53%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	673.116.804	3	222.674.800	3	154.033.466					6	376.708.266	50%	56%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	551.971.326	3	137.101.588	3	107.652.590					6	244.754.178	50%	44%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	491.145.017	3	167.533.994	3	106.443.804					6	273.977.798	50%	56%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Laporan	12	523.445.596	3	145.287.302	3	109.624.442					6	254.911.744	50%	49%	Kecamatan Taman

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	605.582.116	3	137.450.710	3	138.395.653							6	275.846.363	50%	46%	Kecamatan Taman	
7	1	2	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	21.998.400	0		1	2.438.000							1	2.438.000	1%	11%		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	21.998.400	0		0	2.438.000							0	2.438.000	0%	11%	Kecamatan Taman	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	%	100	1.596.029.695	70	592.466.800	0	548.451.556							70	1.140.918.356	70%	71%		
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	1.558.434.695	70	592.466.800	0	548.451.556							70	1.140.918.356	70%	73%		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	305.620.750	7	297.460.900	0								7	297.460.900	100%	97%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojoarjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	40.000.000	0		3	39.694.250							3	39.694.250	100%	99%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	44.531.000	3	43.845.000	0								3	43.845.000	100%	98%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	83.300.000	2	81.464.000	1	40.000.000							3	121.464.000	100%	146%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	109.588.612	0		0								0		0%	0%	Kecamatan Taman	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	65.000.000	0	-	3	105.894.000					3	105.894.000	100%	163%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	30.472.000	3	32.995.700	0	-					3	32.995.700	100%	108%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	217.187.240	0	20.500.000	2	122.096.706					2	142.596.706	50%	66%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	25.150.000	5	24.000.000	0	-					5	24.000.000	100%	95%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	190.171.781	0	34.019.200	0	-					0	34.019.200	0%	18%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	79.263.000	0	-	1	23.700.000					1	37.200.000	33%	47%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	76.043.272	0	-	1	39.500.000					1	39.500.000	50%	52%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	46.486.400	0	13.500.000	2	23.453.400					2	36.953.400	67%	79%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	11.520.000	0	-	2	7.000.000					2	7.000.000	67%	61%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	4	36.500.000	0	-	4	36.500.000					4	36.500.000	100%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	51.297.700	0	-	1	33.000.000					1	33.000.000	50%	64%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	44.901.040	0	-	1	23.500.000					1	23.500.000	50%	52%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	4	55.138.700	3	44.682.000	1	9.400.000					4	54.082.000	100%	98%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	46.263.200	0	-	3	44.713.200					3	44.713.200	100%	97%	Kecamatan Taman
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga</b>				<b>37.595.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>					<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12			
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)			
					<b>Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>																							
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	37.595.000	0		0										0		0%	0%		Kecamatan Taman	
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	%	100	338.399.400	0		67		357.802.500								67		407.968.000	67%	121%		
7	1	4	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	138.376.000	0		7		326.487.500								7		344.145.000	7%	249%		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	138.376.000	3		4		326.487.500								7		344.145.000	58%	249%		Kecamatan Taman
7	1	4	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	200.023.400	0		2		31.315.000								2		63.823.000	2%	32%		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	10	200.023.400	2		1		31.315.000								3		63.823.000	30%	32%		Kecamatan Taman
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain</b>	%	100	108.919.600	0		25		18.139.000								25		56.683.300	25%	52%		
7	1	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti</b>	%	100	108.919.600	0		0		18.139.000								0		56.683.300	0%	52%		
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Orang	120	35.140.000	47		0		18.139.000								47		36.343.000	39%	103%		Kecamatan Taman

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	52.594.400	0	11.162.100	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.162.100	0%	21%	Kecamatan Taman	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	21.185.200	0	9.178.200	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.178.200	0%	43%	Kecamatan Taman	
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																											
<b>7 1 KECAMATAN KARTOHARJO</b>																											
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>indeks</b>	<b>88</b>	<b>4.459.731.365</b>	<b>0</b>	<b>994.143.204</b>	<b>0</b>	<b>954.332.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.948.476.015</b>	<b>0%</b>	<b>44%</b>		
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b>	<b>indeks</b>	<b>3</b>	<b>4.421.075.365</b>	<b>0</b>	<b>985.613.204</b>	<b>0</b>	<b>954.332.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.939.946.015</b>	<b>0%</b>	<b>44%</b>		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	537.265.700	3	125.869.693	2	134.951.949	2	5	5	5	5	5	5	5	5	260.821.642	42%	49%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	463.782.228	3	103.042.665	2	96.350.934	2	5	5	5	5	5	5	5	5	199.393.599	42%	43%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	556.783.020	3	121.471.208	2	116.530.252	2	5	5	5	5	5	5	5	5	238.001.460	42%	43%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Laporan	12	505.787.293	3	117.146.491	2	110.846.585	2	5	5	5	5	5	5	5	5	227.993.076	42%	45%	Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	483.760.059	3	109.691.513	2	108.587.786					5	218.279.299	42%	45%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	425.042.900	3	92.602.926	2	67.539.305					5	160.142.231	42%	38%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	506.945.530	3	121.234.122	2	118.218.205					5	239.452.327	42%	47%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	467.384.605	3	100.925.392	2	96.730.543					5	197.655.935	42%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	474.324.030	3	93.629.194	2	104.577.252					5	198.206.446	42%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	38.656.000	0	8.530.000	0	-					0	8.530.000	0%	22%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	38.656.000	1	8.530.000	0	-					1	8.530.000	25%	22%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	%	100	2.256.448.569	0	496.181.813	25	158.460.500					25	654.642.313	25%	29%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
7	1	3	2.02		Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	269.452.000	7	256.978.013	0	-					7	256.978.013	100%	95%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	59.400.000	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	21%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	173.488.547	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	7%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	305.879.969	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	4%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	160.855.200	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	169.920.000	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	163.734.000	0	12.500.000	0	-					0	12.500.000	0%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	145.618.400	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	9%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	161.167.600	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	221.200.000	0	12.750.000	0	-					0	12.750.000	0%	6%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	41.503.200	1	15.900.000	4	25.398.400					5	41.298.400	100%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	26.511.453	1	7.500.000	4	19.009.200					5	26.509.200	100%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	43.759.000	2	17.700.000	3	11.800.000					5	29.500.000	100%	67%	Kecamatan Kartoharjo



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	39.144.800	2	15.000.000	3	10.000.000					5	25.000.000	100%	64%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	30.080.000	1	8.400.000	3	21.569.000					4	29.969.000	80%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	36.266.000	1	9.300.000	3	5.890.000					4	15.190.000	80%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	54.381.600	1	19.500.000	3	13.000.000					4	32.500.000	80%	60%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	38.832.400	1	14.400.000	3	24.062.800					4	38.462.800	80%	99%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	31.519.600	1	9.900.000	3	19.671.100					4	29.571.100	80%	94%	Kecamatan Kartoharjo
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>83.734.800</b>	<b>0</b>	<b>7.103.800</b>	<b>0</b>	<b>8.060.000</b>					<b>0</b>	<b>15.163.800</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	83.734.800	3	7.103.800	2	8.060.000					5	15.163.800	42%	18%	Kecamatan Kartoharjo
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>312.260.650</b>	<b>0</b>	<b>108.952.000</b>	<b>25</b>	<b>225.640.200</b>					<b>25</b>	<b>334.592.200</b>	<b>25%</b>	<b>107%</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.338.600</b>	<b>0</b>	<b>62.495.000</b>	<b>25</b>	<b>224.780.200</b>					<b>25</b>	<b>287.275.200</b>	<b>25%</b>	<b>143%</b>	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	16	200.338.600	4	62.495.000	5	224.780.200					9	287.275.200	56%	143%	Kecamatan Kartoharjo
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>111.922.050</b>	<b>0</b>	<b>46.457.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>					<b>0</b>	<b>47.317.000</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Laporan	6	111.922.050	2	46.457.000	0	860.000					2	47.317.000	33%	42%	Kecamatan Kartoharjo

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
					Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain )</b>	%	100	186.232.000	0	44.390.000	15	22.265.000					15	66.655.000	15%	36%				
7	1	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</b>	%	100	186.232.000	0	44.390.000	15	22.265.000					15	66.655.000	15%	36%				
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	275	100.000.000	35	22.475.000		22.265.000					35	44.740.000	13%	45%			Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	75.000.000	1	18.685.000	0	-					1	18.685.000	25%	25%			Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	11.232.000	0	3.230.000	0	-					0	3.230.000	0%	29%			Kecamatan Kartoharjo	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																								
7	1	<b>KECAMATAN MANGUHARJO</b>																							
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>Skor</b>	90	4.390.172.597	0	1.511.996.191	0	959.794.984					0	2.471.791.175	0%	56%				
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan</b>	%	100	4.372.020.597	0	1.501.779.791	20	959.794.984					20	2.461.574.775	20%	56%				

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
					yang Ada di Kecamatan			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	593.449.399	3	202.808.490	2	132.551.873					5	335.360.363	42%	57%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	424.953.987	3	174.972.705	2	70.676.904					5	245.649.609	42%	58%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	447.580.000	3	128.004.109	2	100.435.643					5	228.439.752	42%	51%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	376.301.600	3	162.873.518	2	59.723.874					5	222.597.392	42%	59%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	472.146.352	3	134.993.091	2	100.265.281					5	235.258.372	42%	50%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	470.394.344	3	153.099.059	2	116.623.539					5	269.722.598	42%	57%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	422.765.484	3	147.559.788	2	74.511.259					5	222.071.047	42%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	725.758.000	3	241.466.033	2	183.383.442					5	424.849.475	42%	59%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	438.671.431	3	156.002.998	2	121.623.169					5	277.626.167	42%	63%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	18.152.000	0	10.216.400	0	-					0	10.216.400	0%	56%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	18.152.000	0	10.216.400	0	-					0	10.216.400	0%	56%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan</b>	%	100	2.476.496.919	0	327.943.460	0	288.514.967					0	616.458.427	0%	25%	
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	2.413.084.519	0	327.943.460	0	280.695.967					0	608.639.427	0%	25%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	280.755.080	7	277.339.360	0	-					7	277.339.360	100%	99%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	150.800.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	47.919.500	0	-	1	23.809.500					1	23.809.500	50%	50%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	50.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	101.800.000	0	-	1	18.731.250					1	18.731.250	50%	18%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	406.806.750	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	120.487.100	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)																	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	99.251.000	0		1	30.646.667					1	30.646.667	50%	31%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	31.000.000	0	2.300.000	1	17.205.000					1	19.505.000	50%	63%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	497.200.000	0		0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	82.434.281	2	35.559.600	1	22.500.000					3	58.059.600	60%	70%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	54.457.288	0		0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	52.400.000	0		0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	75.000.000	0		2	11.500.000					2	11.500.000	40%	15%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	69.075.110	0		3	24.480.000					3	24.480.000	60%	35%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	75.000.000	0	1.500.000	2	26.000.000					2	27.500.000	40%	37%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	74.787.910	1	9.744.500	2	20.826.000					3	30.570.500	60%	41%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	75.000.000	0	1.500.000	3	53.997.550					3	55.497.550	60%	74%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	68.910.500	0		3	31.000.000					3	31.000.000	60%	45%	Kecamatan Manguharjo
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>63.412.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.819.000</b>					<b>0</b>	<b>7.819.000</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	63.412.400	0		0	7.819.000					0	7.819.000	0%	12%	Kecamatan Manguharjo

1					2		3		4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K (%) RP. (%)				
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan</b>	%	100	338.346.450	0	93.079.000	50	314.836.600					50	407.915.600	50%	121%			
7	1	4	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</b>	%	100	90.176.600	0	44.883.000	0	240.883.600					0	285.766.600	0%	317%			
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	90.176.600	0	44.883.000	0	240.883.600					0	285.766.600	0%	317%	Kecamatan Manguharjo		
7	1	4	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</b>	%	100	248.169.850	0	48.196.000	0	73.953.000					0	122.149.000	0%	49%			
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	248.169.850	0	48.196.000	0	73.953.000					0	122.149.000	0%	49%	Kecamatan Manguharjo		
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan OPD lain)</b>	%	100	103.577.200	0		30	52.921.000					30	52.921.000	30%	51%			
7	1	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Himbuan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti</b>	%	100	103.577.200	0		0	36.581.000					0	36.581.000	0%	35%			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	350	37.482.000	0		0	20.241.000					0	20.241.000	0%	54%	Kecamatan Manguharjo		

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
					Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	1	51.076.000	0		0	16.340.000						0	16.340.000	0%	32%			Kecamatan Manguharjo	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	15.019.200	0									0		0%	0%			Kecamatan Manguharjo	
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						<b>36%</b>	<b>64%</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																						<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>			
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																										
1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan																										
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik																										
<b>Faktor Penghambat :</b>																										
-																										
<b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b>																										
1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan																										
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																										
-																										

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																									
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																									
8	1	2			<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>314.049.297</b>	<b>0</b>	<b>22.547.080</b>	<b>0</b>	<b>138.880.100</b>					<b>0</b>	<b>161.427.180</b>	<b>0%</b>	<b>51%</b>				
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	jenis	6	314.049.297	0	22.547.080	0	138.880.100					0	161.427.180	0%	51%				
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	125	314.049.297	0	22.547.080	0	138.880.100					0	161.427.180	0%	51%			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu</b>	%	100	1.900.062.030	0	-	0	950.563.500					0	950.563.500	0%	50%	
8	1	3	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat</b>	%	100	1.900.062.030	0	-	0	950.563.500					0	950.563.500	0%	50%	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	33	980.581.030	0	-	33	950.563.500					33	950.563.500	100%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah		125	34.353.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	laporan	1	885.128.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Status Kelembagaan Orkemas</b>	%	68	185.337.000	0	-	0	29.538.000					0	29.538.000	0%	16%				
8	1	4	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan</b>	%	75	185.337.000	0	-	0	29.538.000					0	29.538.000	0%	16%				
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Orang	75	185.337.000	0	-	0	29.538.000					0	29.538.000	0%	16%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan</b>	%	100	593.661.370	0	105.204.000	0	185.036.831					0	290.240.831	0%	49%				
8	1	5	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah koordinasi</b>	kali	3	593.661.370	0	105.204.000	0	185.036.831					0	290.240.831	0%	49%				
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Orang	100	60.000.000	0	-	20	20.736.831					20	20.736.831	20%	35%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	533.661.370	70	105.204.000	93	164.300.000					163	269.504.000	41%	51%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase konflik yang terfasilitasi</b>	%	100	1.711.599.350	0	133.024.600	0	84.285.900					0	217.310.500	0%	13%				
8	1	6	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah konflik</b>	konflik	0	1.711.599.350	0	133.024.600	0	84.285.900					0	217.310.500	100%	13%				
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas	Orang	100	1.335.350.000	0	59.047.600	0	-					0	59.047.600	0%	4%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2		3		4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
							kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota		Dokumen	12	376.249.350	3	73.977.000	3	84.285.900					6	158.262.900	50%	42%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																					<b>16%</b>	<b>36%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																					<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan <b>Faktor Penghambat :</b> - <b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b> - <b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b> -																								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I	II	III	IV			

1					2		3		4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Skor	A	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	K (%)	RP. (%)			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan				674.683.764.842	0	86.702.123.241	0	130.150.460.167					0	216.852.583.408	0%	32%	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		%	100	4.927.900.000	25	501.819.814	13	2.766.372.000					38	3.268.191.814	38%	66%	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	8	88.079.900	2	6.766.400	2	65.408.000					4	72.174.400	50%	82%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen	1	50.000.000	0	9.662.200	0	11.495.497					0	21.157.697	0%	42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	128.694.300	0	75.327.000	2	7.500.000					2	82.827.000	50%	64%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	6	71.280.000	1	33.909.400	2	9.250.000					3	43.159.400	50%	61%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Perencanaan Perangkat Daerah																	Usaha Kecil Dan Menengah
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	97.600.000	1	10.211.185	2	42.984.500					3	53.195.685	50%	55%	Dinas Perhubungan
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	30.491.000	1	15.698.000	1	2.772.500					2	18.470.500	40%	61%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	894	3	-	1	-					4	-	67%	0%	Dinas Perdagangan
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	75.329.977	1	8.466.329	0	10.480.300					1	18.946.629	17%	25%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	20.129.900	2	8.623.000	1	784.400					3	9.407.400	43%	47%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	12.837.000	4	3.158.800	1	1.609.200					5	4.768.000	50%	37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	10.086.000	1	700.000	0	-					1	700.000	6%	7%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	15.083.568	0	-	3	-					3	-	17%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	24.507.000	5	3.710.000	3	4.570.000					8	8.280.000	40%	34%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	4.927.900.000	0	-	1	2.766.372.000					1	2.766.372.000	17%	56%	Dinas Pendidikan
						Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	Mahasiswa	1000		0		0		0	0	0	0%					
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	121.618.400	0	10.000.000	0	22.540.000					0	32.540.000	0%	27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	18.673.400	4	2.353.750	1	994.020					5	3.347.770	25%	18%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	163.974.000	6	106.470.000	0	-					6	106.470.000	50%	65%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	2.250.000	1	-	2	420.000					3	420.000	50%	19%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	170.122.119	3	6.016.100	4	-					7	6.016.100	50%	4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	102.025.000	1	56.910.000	4	7.188.500					5	64.098.500	63%	63%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	67.000.100	1	56.745.500	1	8.178.000					2	64.923.500	33%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	9.892.000	3	-	6	-					9	-	45%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	200.000.000	3	-	2	1.156.500					5	1.156.500	50%	1%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	30.000.000	1	14.230.250	2	6.076.400					3	20.306.650	60%	68%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	10	58.118.820	1	741.000	0	-					1	741.000	10%	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	8.000.000	1	2.529.000	1	1.421.000					2	3.950.000	33%	49%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	15.000.000	3	4.409.000	3	2.166.000					6	6.575.000	50%	44%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	1.000.000	0	-	1	-					1	-	17%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	14.358.960	3	2.534.500	3	1.350.000					6	3.884.500	50%	27%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	0	374.500	1	874.500					1	1.249.000	50%	6%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21	5.000.000	4	763.500	2	1.130.000					6	1.893.500	29%	38%	Bagian Umum			
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	11.655.600	0	520.000	0	680.000					0	1.200.000	0%	10%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	2.000.000	0	-	4	-					4	-	50%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5.000.000	1	388.600	0	-					1	388.600	25%	8%	Badan Pendapatan Daerah			
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	19.400.000	0	1.720.000	4	280.000					4	2.000.000	80%	10%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	1.861.500	5	1.800.000	0	-					5	1.800.000	25%	97%	Inspektorat Daerah			
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	45.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	129.497.100	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian			

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
																										Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	61.842.200	0	57.081.800	2	1.230.000							2	58.311.800	100%	94%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12.350.000	3	-	5	-							8	-	67%	0%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	9.703.287	0	-	0	-							0	-	0%	0%		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>468.353.441.160</b>	<b>25</b>	<b>61.609.281.230</b>	<b>17</b>	<b>106.942.857.443</b>							<b>42</b>	<b>168.552.138.673</b>	<b>42%</b>	<b>36%</b>			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1549	175.699.025.000	1549	27.440.208.086	1549	48.285.295.550							1549	75.725.503.636	100%	43%		Dinas Pendidikan	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	313	52.675.045.551	313	6.018.201.944	313	13.302.965.037							313	19.321.166.981	100%	37%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	228	23.808.447.460	228	2.982.637.574	228	5.829.090.692							228	8.811.728.266	100%	37%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	51	7.792.677.420	51	937.747.737	51	1.703.700.695							51	2.641.448.432	100%	34%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	34	7.227.329.160	34	733.483.651	34	1.078.223.636							34	1.811.707.287	100%	25%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54	6.038.083.000	54	930.700.186	54	1.413.161.212							54	2.343.861.398	100%	39%		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1.823.700.000	13	216.572.600	0	358.465.292							13	575.037.892	100%	32%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	6.088.945.055	35	750.600.660	35	1.189.708.037							35	1.940.308.697	100%	32%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	5.219.111.176	36	695.756.799	35	1.152.964.922							35	1.848.721.721	97%	35%		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
																						Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	27	4.975.918.000	27	560.419.234	26	934.208.709					26	1.494.627.943	96%	30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	89	10.148.268.592	89	1.529.805.368	0	2.138.332.483					89	3.668.137.851	100%	36%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	4.161.881.310	28	559.164.962	29	925.115.815					29	1.484.280.777	104%	36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54	7.072.466.452	54	941.024.840	54	1.368.454.005					54	2.309.478.845	100%	33%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	37	5.155.263.990	33	695.434.303	33	1.066.245.588					33	1.761.679.891	89%	34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	4.173.982.800	26	510.645.448	26	849.605.822					52	1.360.251.270	200%	33%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4.142.500.000	25	587.803.207	25	1.025.916.609					25	1.613.719.816	100%	39%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.766.524.636	25	499.994.834	25	832.868.378					50	1.332.863.212	50%	35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	9.504.392.000	75	1.251.579.728	75	1.888.467.524					150	3.140.047.252	200%	33%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	840.696.000	11	66.695.533	11	218.079.785					11	284.775.318	100%	34%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	9	798.134.736	9	77.014.399	9	187.020.352					18	264.034.751	200%	33%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	10	1.438.916.360	10	66.264.426	10	202.791.986					20	269.056.412	200%	19%	Bagian Hukum
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	1.596.391.040	15	95.094.183	8	389.284.182					8	484.378.365	53%	30%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	1.025.442.780		77.166.980		295.009.457					0	372.176.437	0%	36%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
						persentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100		100		100						100		100%		
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	163	12.616.719.810	163	1.572.089.800	163	2.268.878.560					163	3.840.968.360	100%	30%	Bagian Umum



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3.679.743.078	19	409.038.339	0	669.477.393					19	1.078.515.732	100%	29%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	6.254.954.457	31	592.760.103	31	1.011.850.327					31	1.604.610.430	100%	26%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3000	37.000.000.000	3000	3.192.905.889	3000	3.827.285.943					300	7.020.191.832	10%	19%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31	8.151.715.664	31	643.597.241	31	1.476.321.881					31	2.119.919.122	100%	26%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	6.099.847.949	43	777.433.299	43	1.243.605.933					43	2.021.039.232	100%	33%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	8.895.736.674	45	982.897.587	45	1.591.120.504					45	2.574.018.091	100%	29%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	3.861.088.819	23	500.629.165	23	809.410.251					46	1.310.039.416	200%	34%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	76	12.381.426.184	76	1.529.981.508	76	2.387.972.445					76	3.917.953.953	100%	32%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.174.001.118	70	1.564.667.103	0	2.449.336.863					70	4.014.003.966	100%	33%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.785.398.481	70	1.573.436.314	70	2.529.553.925					70	4.102.990.239	100%	35%	Kecamatan Manguharjo
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	78.680.000	3	-	5	19.170.000					8	19.170.000	67%	24%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	13	61.000.000	3	11.799.500	1	3.118.000					4	14.917.500	31%	24%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	122.551.408	3	33.282.800	3	17.799.350					6	51.082.150	46%	42%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Dokumen	2	13.435.000	0	246.000	0	2.720.300					0	2.966.300	0%	22%	Badan Perencanaan, Penelitian dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD																Pengembangan Daerah
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	13	2.000.000	3	499.900	2	260.000					5	759.900	38%	38%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Laporan	26	2.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.002.948.201</b>	<b>25</b>	<b>809.152.217</b>	<b>25</b>	<b>500.251.425</b>					<b>50</b>	<b>1.309.403.642</b>	<b>50%</b>	<b>12%</b>	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	132.950.000	0	-	0	129.363.525					0	129.363.525	0%	97%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	684.175.000	0	8.466.000	0	-					0	8.466.000	0%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	154.049.325	1	99.953.250	2	21.400.800					3	121.354.050	100%	79%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	204.240.000	0	126.352.360	1	70.292.000					1	196.644.360	100%	96%	Dinas Perhubungan
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	32.250.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	61.544.700	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	8.294.786.000	0	69.936.000	0	107.608.000					0	177.544.000	0%	2%	Bagian Umum
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	64.818.894	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	44.298.500	1	8.536.500	1	-					2	8.536.500	67%	19%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Orang	59	104.586.000	0	-	58	100.478.000					58	100.478.000	98%	96%	Dinas Sosial, Pemberdayaan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	230	150.306.500	135	97.007.000	95	14.082.000					230	111.089.000	100%	74%	Dinas Lingkungan Hidup
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	31	160.250.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	1.500.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	orang	34	10.000.000	0	1.898.800	0	1.252.700					0	3.151.500	0%	32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	26.487.000	15	6.735.000	58	8.615.100					73	15.350.100	122%	58%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	350	29.810.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	134	202.050.000	37	73.717.680	0	2.929.000					37	76.646.680	28%	38%	Dinas Perhubungan
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	19	226.268.400	2	26.000.000	5	-					7	26.000.000	37%	11%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	67	310.000.000	67	53.962.997	67	3.465.000					67	57.427.997	100%	19%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	30	62.815.812	30	55.410.830	0	-					30	55.410.830	100%	88%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	14.854.000	100	51.893.000	100	13.142.000					100	65.035.000	100%	438%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	70	14.644.320	70	125.230.000	70	23.570.500					70	148.800.500	100%	1016%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	16.263.750	25	4.052.800	25	4.052.800					50	8.105.600	50%	50%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	1	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	18.004.609.180	25	3.558.601.177	18	4.271.584.993					43	7.830.186.170	43%	43%	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	0	25.895.000	0	175.071.005					0	200.966.005	0%	80%	Bagian Umum
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	3.898.202.000	12	543.023.286	8	873.709.951					20	1.416.733.237	54%	36%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.784.227.716	0	289.614.835	0	389.628.766					0	679.243.601	0%	38%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	500.000.000	1	78.799.356	1	69.327.514					2	148.126.870	22%	30%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	19	627.605.500	3	105.988.775	5	91.880.400					8	197.869.175	42%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	224.694.116	3	29.961.250	5	49.612.030					8	79.573.280	67%	35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	9	413.842.990	1	102.231.200	1	77.032.500					2	179.263.700	22%	43%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	593.150.940	0	101.473.235	0	74.443.000					0	175.916.235	0%	30%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	19.103.116	3	10.638.050	5	5.381.000					8	16.019.050	67%	84%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	23.356.970	3	3.935.000	5	7.169.600					8	11.104.600	67%	48%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	18.541.900	3	3.630.000	5	2.767.000					8	6.397.000	67%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	148	280.950.000	35	34.920.320	29	86.071.659					64	120.991.979	43%	43%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	463.220.000	34	81.234.573	29	112.203.530					63	193.438.103	53%	42%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	250.000.000	14	58.847.479	14	154.205.080					28	213.052.559	47%	85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	20	183.880.000	4	34.833.264	4	45.999.830					8	80.833.094	40%	44%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	150.000.000	6	23.890.260	4	92.352.850					10	116.243.110	50%	77%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	70.000.000	6	18.205.582	6	31.326.622					12	49.532.204	50%	71%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	142	325.541.000	23	56.614.500	12	28.599.020					35	85.213.520	25%	26%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	200.000.000	23	44.375.000	23	34.578.812					46	78.953.812	66%	39%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	237.520.000	3	41.972.000	5	23.471.680					8	65.443.680	67%	28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	245.712.000	3	55.973.200	10	99.300.100					13	155.273.300	108%	63%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	110.000.000	9	26.895.500	16	42.714.280					25	69.609.780	63%	63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	210.043.000	28	116.290.622	12	9.280.580					40	125.571.202	67%	60%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	200.000.000	4	59.498.140	6	23.590.756					10	83.088.896	40%	42%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	274.233.794	12	59.407.000	5	48.082.000					17	107.489.000	35%	39%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	250.000.000	3	43.220.265	3	59.085.800					6	102.306.065	50%	41%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	88.407.000	25	14.546.000	25	26.114.380					50	40.660.380	50%	46%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	276.443.200	17	70.194.100	4	21.495.700					21	91.689.800	70%	33%	Dinas Perdagangan			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	150.000.000	4	24.791.500	4	59.513.814					8	84.305.314	33%	56%	Bagian Pemerintahan			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	167.326.280	3	11.393.246	3	48.308.614					6	59.701.860	50%	36%	Bagian Organisasi			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	2	15.012.000	7	16.436.000					9	31.448.000	75%	31%	Bagian Hukum			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	98.194.000	3	43.635.500	3	21.852.000					6	65.487.500	50%	67%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	180.000.000	25	39.988.500	25	65.699.380					50	105.687.880	50%	59%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	324	2.088.407.600	58	375.050.934	73	808.059.483					131	1.183.110.417	40%	57%	Bagian Umum			
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	937.733.258	12	253.754.638	0	190.387.934					12	444.142.572	27%	47%	Sekretariat DPRD			
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	404.710.800	0	29.755.000	0	99.796.498					0	129.551.498	0%	32%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	400.000.000	42	255.484.491	10	30.404.480					52	285.888.971	74%	71%	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	81.648.000	3	29.710.770	3	18.533.516					6	48.244.286	40%	59%	Badan Pendapatan Daerah			
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	323.200.000	14	54.479.046	20	56.905.649					34	111.384.695	43%	34%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	65	350.363.000	16	148.147.500	2	39.885.500					18	188.033.000	28%	54%	Inspektorat Daerah			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	80	200.000.000	25	52.999.500	25	29.744.500					50	82.744.000	63%	41%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	10	98.572.000	2	25.495.260	0	-					2	25.495.260	20%	26%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	136.064.000	3	40.461.500	2	9.300.680					5	49.762.180	42%	37%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	119.715.000	3	22.334.000	2	22.261.500					5	44.595.500	42%	37%	Kecamatan Manguharjo
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.866.574.015</b>	<b>0</b>	<b>1.423.881.252</b>	<b>0</b>	<b>397.950.570</b>					<b>0</b>	<b>1.821.831.822</b>	<b>0%</b>	<b>31%</b>	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	5.200.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	161.175.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	829.000.000	0	307.000.000	0	1.500.000					0	308.500.000	0%	37%	Bagian Umum
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	7	173.150.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	987.270.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	160.950.000	0	-	5	184.792.000					5	184.792.000	100%	115%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2.260.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	15	342.100.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	
2	23	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100	48.840.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	342	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	24.725.250	2	8.150.500	0	-	-	-	-	2	8.150.500	22%	33%	Kecamatan Manguharjo	
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.500.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	17.800.000	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	5.500.000	1	5.500.000	0	-	-	-	-	1	5.500.000	25%	100%	Dinas Perdagangan	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	7.500.000	2	6.849.900	0	-	-	-	-	2	6.849.900	100%	91%	Bagian Hukum	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	15.800.000	3	14.150.000	0	-	-	-	-	3	14.150.000	100%	90%	Bagian Umum	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	195.850.000	0	-	0	-	23.840.000	-	-	0	23.840.000	0%	12%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	100	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	98.475.293	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	3	6.200.000	0	-	0	-	13.250.000	-	-	0	13.250.000	0%	214%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	1	5.101.785	0	5.100.000	0	-	-	-	-	0	5.100.000	0%	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.071.500	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.320.000	1	12.375.000	0	-					1	12.375.000	100%	93%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	9.515.000	0	900.000	0	-					0	900.000	0%	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	5.434.000	0	-	2	4.880.000					2	4.880.000	100%	90%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	110.428.373	7	106.626.600	3	1.200.000					10	107.826.600	100%	98%	Dinas Perhubungan
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	58.700.000	0	-	1	36.396.900					1	36.396.900	50%	62%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12.210.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.767.050	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	42.917.633	5	41.617.600	0	1.300.000					5	42.917.600	100%	100%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%	100	3.265.065	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5	91.255.320	2	41.780.000	0	-					2	41.780.000	40%	46%	Bagian Umum
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	348.489.090	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	6.058.485	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	6	146.946.030	0	-	0	29.710.770					0	29.710.770	0%	20%	Badan Pendapatan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	69.972.703	1	10.679.300	3	58.592.000					4	69.271.300	80%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	149.000.000	0	64.625.000	0	-					0	64.625.000	0%	43%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	58.865.046	0	-	5	29.588.900					5	29.588.900	50%	50%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	81.585.000	0	151.337.352	0	-					0	151.337.352	0%	185%	Kecamatan Manguharjo
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	5.550.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.500.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	840.000.000	0	647.190.000	0	-					0	647.190.000	0%	77%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	14.325.950	0	-	1	12.900.000					1	12.900.000	50%	90%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>51.139.087.778</b>	<b>25</b>	<b>11.077.410.674</b>	<b>25</b>	<b>9.994.779.064</b>					<b>50</b>	<b>21.072.189.738</b>	<b>50%</b>	<b>41%</b>	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	3.791.796.347	2	408.931.800	3	642.451.578					5	1.051.383.378	50%	28%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	2.200.700.000	4	348.963.613	2	388.204.896					6	737.168.509	30%	33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	2.124.753.500	2	507.108.201	2	537.277.385					4	1.044.385.586	67%	49%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	321.693.000	3	108.185.700	3	45.823.450					6	154.009.150	50%	48%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	915.466.263	5	150.813.606	6	98.836.503					11	249.650.109	46%	27%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	696.295.004	0	146.548.950	4	145.253.700					4	291.802.650	100%	42%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2.206.150.695	0	447.074.901	1	346.977.075					1	794.051.976	50%	36%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.076.641.200	0	235.678.355	0	176.812.943					0	412.491.298	0%	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	38	823.932.153	9	169.718.421	9	149.152.670					18	318.871.091	47%	39%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1.975.792.292	0	384.288.800	1	410.125.700					1	794.414.500	100%	40%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	655.822.696	25	129.426.940	25	85.285.100					50	214.712.040	50%	33%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	842.400.792	0	155.780.900	1	128.985.000					1	284.765.900	50%	34%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	210.000.000	3	37.977.000	3	58.178.600					6	96.155.600	50%	46%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	167.577.108	3	25.709.100	3	13.850.300					6	39.559.400	50%	24%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	242.386.424	3	39.043.716	14	59.621.971					14	98.665.687	117%	41%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	297.748.799	3	94.095.661	3	49.364.400					6	143.460.061	50%	48%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	259.215.360	0	41.015.050	0	57.451.250					0	98.466.300	0%	38%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
						persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100		25		25						50		50%		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18	4.686.554.640	6	711.175.012	2	868.850.203					8	1.580.025.215	44%	34%	Bagian Umum
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.536.057.009	4	407.103.031	0	374.723.197					4	781.826.228	17%	31%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	837.914.000	0	123.261.280	0	178.860.609					0	302.121.889	0%	36%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	13.101.555.179	0	4.518.619.216	3	2.952.327.056					3	7.470.946.272	300%	57%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	446.318.000	3	86.872.840	3	73.929.100					6	160.801.940	50%	36%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	876.420.108	2	175.275.385	25	158.736.508					27	334.011.893	225%	38%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.014.168.490	3	179.520.116	2	288.156.882					5	467.676.998	42%	46%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	843.513.545	0	6.941.300	20	151.887.248					20	158.828.548	167%	19%	Kecamatan Manguharjo
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	14	1.239.700.000	3	238.050.000	4	269.900.000					7	507.950.000	50%	41%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	374.400.000	3	66.590.000	3	68.880.000					6	135.470.000	50%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	5.152.864.928	3	831.628.700	2	1.061.731.000					5	1.893.359.700	42%	37%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	695.374.912	3	140.003.680	5	66.416.240					8	206.419.920	67%	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	525.875.334	25	162.009.400	25	86.728.500					50	248.737.900	50%	47%	Badan Pendapatan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>14.722.079.795</b>	<b>25</b>	<b>2.417.049.414</b>	<b>9</b>	<b>2.778.145.778</b>					<b>34</b>	<b>5.195.195.192</b>	<b>34%</b>	<b>35%</b>	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	216	147.242.800	12	20.720.550	54	44.869.813					66	65.590.363	31%	45%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	80	346.771.300	6	21.872.300	6	27.217.423					12	49.089.723	15%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	59	370.280.838	17	85.277.918	15	53.982.648					32	139.260.566	54%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	65	1.500.324.850	12	258.944.810	14	218.535.939					26	477.480.749	40%	32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	489.677.000	5	56.707.780	5	64.294.400					10	121.002.180	50%	25%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	215.702.000	5	20.048.800	5	18.466.082					10	38.514.882	40%	18%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	48.716.000	5	15.961.280	2	5.020.076					7	20.981.356	37%	43%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	75.397.000	5	11.792.900	5	11.884.200					10	23.677.100	29%	31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	15	1.318.205.722	4	318.435.400	11	195.270.300					15	513.705.700	100%	39%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	25	23.000.000	12	4.069.500	5	3.541.500					17	7.611.000	68%	33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	57	626.065.000	8	100.434.395	0	109.027.411					8	209.461.806	14%	33%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	31	157.650.000	4	28.353.627	3	25.611.816					7	53.965.443	23%	34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	44.192.000	3	10.057.800	3	7.200.000					6	17.257.800	30%	39%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	55.000.000	7	19.582.000	5	10.585.500					12	30.167.500	40%	55%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	58.000.000	25	19.286.020	25	6.151.500					50	25.437.520	50%	44%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	44	252.701.714	8	51.585.900	7	14.148.481					15	65.734.381	34%	26%	Dinas Perdagangan

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12		
											K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K (%)		RP. (%)		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	20.000.000	1	4.227.000	0	3.717.300							1	7.944.300	25%	40%	Bagian Pemerintahan			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	18.963.000	1	4.866.500	0	3.582.276							1	8.448.776	17%	45%	Bagian Organisasi			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	20.547.600	1	5.270.000	1	2.650.000							2	7.920.000	50%	39%	Bagian Hukum			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	19.321.000	1	7.850.160	2	2.781.691							3	10.631.851	43%	55%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	22.000.000	25	3.650.000	25	7.340.221							50	10.990.221	50%	50%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	94	868.174.950	12	142.025.534	28	384.542.343							40	526.567.877	43%	61%	Bagian Umum			
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	308.841.290	2	37.937.877	0	16.769.215							2	54.707.092	8%	18%	Sekretariat DPRD			
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	33.834.205	0	8.758.000	0	8.621.300							0	17.379.300	0%	51%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Unit	36	80.000.000	12	29.217.576	1	15.985.600							13	45.203.176	36%	57%	Badan Keuangan dan Aset Daerah			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	35	41.725.000	7	7.920.000	2	7.540.800					9	15.460.800	26%	37%	Badan Pendapatan Daerah
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	33.355.700	7	14.029.040	7	16.429.640					14	30.458.680	70%	91%	Inspektorat Daerah
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	17.336.000	3	3.872.243	5	2.091.500					8	5.963.743	44%	34%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	30.000.000	0	7.242.000	0	11.236.943					0	18.478.943	0%	62%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	52.522.300	2	9.710.980	0	5.030.690					2	14.741.670	13%	28%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	14	27.029.066	2	4.294.000	3	4.804.000					5	9.098.000	36%	34%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	63.865.108	3	6.941.300	2	4.889.000					5	11.830.300	33%	19%	Kecamatan Manguharjo
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	138.283.000	0	40.974.000	2	14.050.500					2	55.024.500	25%	40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Operasional atau Lapangan																	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	18.552.040	0	1.997.000	2	4.020.000					2	6.017.000	67%	32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	23.157.329	0	3.820.000	0	3.570.000					0	7.390.000	0%	32%	Kecamatan Kartoharjo
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	9.497.500	3	2.445.000	10	2.415.000					13	4.860.000	87%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	189.050.800	3	35.000.300	35	21.711.500					38	56.711.800	253%	30%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	5	14.985.000	1	1.100.000	2	8.500.000					3	9.600.000	60%	64%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	179	330.921.350	0	8.245.000	0	3.136.800					0	11.381.800	0%	3%	Sekretariat DPRD
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	382.278.000	0,2	67.197.650	0,12	48.493.550					0,32	115.691.200	32%	30%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.311.400	0	201.500	0	-					0	201.500	0%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	1	100.000.000	0	24.980.000	0	48.958.000					0	73.938.000	0%	74%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	183.500.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	152.421.075	0	24.804.577	2	24.428.030					2	49.232.607	100%	32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	39.097.025	0	5.325.045	1	14.836.960					1	20.162.005	100%	52%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	1	171.952.000	0	-	0	7.006.659				0	7.006.659	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	69.996.600	0	23.180.400	3	7.846.600				3	31.027.000	100%	44%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	31.329.560	1	30.400.000	0	2.599.150				1	32.999.150	100%	105%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	222.250.000	0	17.600.000	2	200.350.000				2	217.950.000	100%	98%	Dinas Perhubungan	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	125.000.000	0	-	3	11.032.250				3	11.032.250	100%	9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.816.600	0	-	1	7.500.000				1	7.500.000	100%	28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.816.600	0	-	1	7.500.000				1	7.500.000	100%	28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	50.000.000	0	6.951.375	1	25.787.140				1	32.738.515	100%	65%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	80.000.000	25	43.928.106	25	21.527.960				50	65.456.066	50%	82%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.336.000	0	11.401.000	2	33.768.200				2	45.169.200	67%	90%	Dinas Perdagangan	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	0	-	0	0				0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.500.000	0	-	0	-				0	-	0%	0%	Bagian Organisasi	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.500.000	0	1.548.000	0	-				0	1.548.000	0%	62%	Bagian Hukum	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	707.641.235	0	-	0,5	250.000.000					0,5	250.000.000	50%	35%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	28.750.000	0	-	0	12.665.500					0	12.665.500	0%	44%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	500.000.000	0	91.642.780	0	42.993.326					0	134.636.106	0%	27%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	73.638.750	0	7.346.800	0	8.338.900					0	15.685.700	0%	21%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	77.616.000	0	3.616.000	0	44.769.195					0	48.385.195	0%	62%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	21.000.000	0	-					0	21.000.000	0%	42%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	81.275.000	0	-	0	53.453.500					0	53.453.500	0%	66%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	148.710.000	0	20.252.000	2	60.233.700					2	80.485.700	100%	54%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	27.600.000	0	500.000					0	28.100.000	0%	56%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000					0	3.000.000	0%	30%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	0	100.303.900	2	-					2	100.303.900	100%	100%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	52.693.000	0	8.732.558	0	14.937.000					0	23.669.558	0%	45%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	75.000.000	2	26.501.000	7	18.936.660					7	45.437.660	117%	61%	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	206	149.704.300	32	20.957.000	40	48.645.000					72	69.602.000	35%	46%	Dinas Pendidikan

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	273	126.420.450	3	18.019.000	2	9.250.000							5	27.269.000	2%	22%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	466.462.500	0	-	0	76.950.777							0	76.950.777	0%	16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	106	420.245.000	22	49.778.120	10	54.020.200							32	103.798.320	30%	25%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	68	79.720.000	14	4.500.000	20	6.275.000							34	10.775.000	50%	14%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	17.595.000	0	2.605.000	1	6.395.000							1	9.000.000	20%	51%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	110	91.034.720	13	18.323.400	30	7.945.950							43	26.269.350	39%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	27.380.037	8	10.750.000	16	2.115.000							24	12.865.000	67%	47%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	122	34.670.500	6	5.715.000	5	3.010.000							11	8.725.000	9%	25%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	149	102.376.703	15	22.437.550	42	18.584.000							57	41.021.550	38%	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	136.075.000	4	48.865.300	6	5.906.000							10	54.771.300	100%	40%	Dinas Perhubungan	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	182.800.000	6	20.328.850	10	15.203.950							16	35.532.800	32%	19%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	40.000.000	0	9.755.000	1	13.955.000					1	23.710.000	100%	59%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	65.000.000	25	15.646.000	25	3.145.500					50	18.791.500	50%	29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	80.653.400	0	15.177.000	1	3.867.500					1	19.044.500	33%	24%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	10.000.000	2	2.010.000	2	1.985.600					4	3.995.600	24%	40%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	12.410.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	19.000.000	3	1.773.300	6	1.560.000					9	3.333.300	23%	18%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	19.159.000	10	3.500.000	10	4.000.000					20	7.500.000	50%	39%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	9.200.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	129	289.036.500	32	71.175.321	25	43.613.325					57	114.788.646	44%	40%	Bagian Umum
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	48.795.780	0	3.498.600	0	29.238.500					0	32.737.100	0%	67%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	108.000.000	0	6.602.500	3	26.564.650					3	33.167.150	38%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	100	40.500.000	25	19.433.837	25	4.878.000					50	24.311.837	50%	60%	Badan Pendapatan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Kantor atau Bangunan Lainnya																	
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	47.925.000	1	6.215.000	3	6.045.000					4	12.260.000	50%	26%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	35.000.000	2	5.921.455	2	7.000.000					4	12.921.455	29%	37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15.000.000	2	3.900.000	1	900.000					3	4.800.000	20%	32%	Inspektorat Daerah
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	6	37.471.800	0	4.330.000	0	6.100.000					0	10.430.000	0%	28%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	60	34.882.000	9	5.975.000	15	4.951.000					24	10.926.000	40%	31%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	59.413.798	7	9.320.000	0	6.205.138					7	15.525.138	12%	26%	Kecamatan Manguharjo
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	53.915.500	0	5.000.000	3	9.325.000					3	14.325.000	50%	27%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	53.915.500	0	5.000.000	3	9.325.000					3	14.325.000	50%	27%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	2	1	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah</b>	%	100	76.538.881.063	0	-	0	-					0	-	0%	0%	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	76.538.881.063	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	1	1	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	%	100	1.000.000.000	25	176.316.936	25	129.408.061					50	305.724.997	50%	31%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	400.000.000	2	43.881.936	2	41.118.061					2	84.999.997	100%	21%	Bagian Umum
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	600.000.000	2	132.435.000	2	88.290.000					2	220.725.000	100%	37%	Bagian Umum
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>25</b>	<b>353.864.041</b>	<b>25</b>	<b>330.318.603</b>					<b>50</b>	<b>684.182.644</b>	<b>50%</b>	<b>34%</b>	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	20	1.100.000.000	2	186.354.450	4	221.132.637					6	407.487.087	30%	37%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	16	575.000.000	3	147.285.572	2	81.926.670					5	229.212.242	31%	40%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	15	325.000.000	3	20.224.019	2	27.259.296					5	47.483.315	33%	15%	Bagian Umum
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Tingkat Kematangan Organisasi</b>	<b>skor</b>	<b>28,4</b>	<b>1.381.735.110</b>	<b>0</b>	<b>184.742.342</b>	<b>0</b>	<b>145.210.800</b>					<b>0</b>	<b>329.953.142</b>	<b>0%</b>	<b>24%</b>	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	339.871.000	0	54.832.780	0	52.039.400					0	106.872.180	0%	31%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	662.366.630	0	48.304.004	0	64.485.400					0	112.789.404	0%	17%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	379.497.480	0	81.605.558	2	28.686.000					2	110.291.558	100%	29%	Bagian Organisasi
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.14</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.928.968.500</b>	<b>25</b>	<b>25.208.000</b>	<b>25</b>	<b>80.311.000</b>					<b>50</b>	<b>105.519.000</b>	<b>50%</b>	<b>5%</b>	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	500	1.928.968.500	25	25.208.000	25	80.311.000					50	105.519.000	10%	5%	Bagian Umum
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.912.152.890</b>	<b>25</b>	<b>2.453.998.305</b>	<b>9</b>	<b>1.556.523.680</b>					<b>34</b>	<b>4.010.521.985</b>	<b>34%</b>	<b>25%</b>	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	15.553.173.870	30	2.453.998.305	0	1.556.523.680					30	4.010.521.985	100%	26%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2	253.979.020	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	105.000.000	0	-	8	-					8	-	27%	0%	Sekretariat DPRD
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.905.387.150</b>	<b>25</b>	<b>2.110.797.839</b>	<b>17</b>	<b>256.746.750</b>					<b>42</b>	<b>2.367.544.589</b>	<b>42%</b>	<b>124%</b>	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	37.957.150	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	1.867.430.000	3	2.110.797.839	4	256.746.750					7	2.367.544.589	58%	127%	Sekretariat DPRD
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>47%</b>	<b>32%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<p><b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>                      1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan</p> <p><b>Faktor Penghambat :</b>                      -</p> <p><b>Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:</b>                      -</p> <p><b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>                      -</p>																						

Sumber : Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023

Hasil evaluasi pencapaian target kinerja Kota Madiun Pada Triwulan I rata – rata 9% dengan tingkat serapan anggaran sebesar 15%. Tingkat capaian ini masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak indikator Program dan Sebagian indikator kegiatan dan sub kegiatan yang penghitungan capaiannya baru bisa dihitung pada akhir tahun 2023. Sehingga untuk pengitungan capaian kinerja masih banyak yang belum terisi. Untuk hasil evaluasi Triwulan II rata – rata capaian kinerja naik menjadi 29% dan capaian realisasi 36%. Walaupun begitu predikat capaiannya masih sangat rendah. Kenaikan pada capaian kinerja dan realisasi ini dikarenakan proses pergeseran anggaran sudah selesai sehingga perangkat daerah yang mengalami pergeseran sub kegiatan ataupun rekening dikarenakan adanya peraturan madantory seperti DAK, DBHCHT sudah bisa memulai pelaksanaan kegiatannya.



### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan panduan atau strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang ditargetkan. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun pada Perubahan RKPD 2023 menyesuaikan dengan asumsi makro dasar APBN 2023 dan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan tingkat pusat dan Provinsi Jawa Timur. Asumsi makro dalam APBN 2023, pertumbuhan ekonomi dijaga pada kisaran 5 - 5,3 persen dan inflasi akan dijaga pada level 2 - 4 persen. Nilai tukar rupiah berada pada angka Rp14.300 - 14.800 per dolar AS. Lalu asumsi harga minyak atau *Indonesia Crude Price* (ICP) sebesar 80 - 100 dolar AS per barel. Produksi minyak siap jual atau lifting minyak sebesar 619 - 680 ribu barel minyak per hari. Lalu lifting gas di asumsikan sebesar 1.020 - 1.116 ribu barel setara minyak per hari.

**Tabel 3.1  
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia 2023**

<b>Indikator</b>	<b>2023</b>
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i> )	5,0 - 5,3
Inflasi (% <i>yoy</i> )	2,0 - 4,0
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	7,34 - 9,16
Nilai Tukar (Rp/ US\$)	14.300 - 14.800
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	80 - 100
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	619 - 680
Lifting Gas (BOE/hari)	1.020 - 1.116

*Sumber: Nota Keuangan APBN, 2023*

Selain itu arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun memperhatikan berbagai regulasi pemerintah pusat dan Provinsi sebagai berikut

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Selain berbagai hal diatas, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan pembangunan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Setidaknya terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Bappenas, 2020 (RPJMN 2020 – 2024)

**Gambar 3.1**  
**Tujuh Agenda Pembangunan Nasional**

Tujuh agenda pembangunan nasional, mengacu pada 5 (lima) arahan presiden yang meliputi pembangan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tujuh agenda pembangunan nasional di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

### **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

#### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

#### **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

#### **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, Pemerintah provinsi juga telah merumuskan agenda/strategi pembangunan daerah melalui 7 agenda utama sebagai berikut:

<b>7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2022</b>	<b>7 Agenda Pembangunan Jatim Tahun 2022</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</li><li>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li><li>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</li><li>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li><li>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li><li>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</li><li>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata</li><li>2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</li><li>3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,</li><li>4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</li><li>5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</li><li>6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,</li><li>7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</li></ol>

**Gambar 3.2**

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2023**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2023. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah 1) Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur; 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan; 4). Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal; 5). Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumberdaya Energi; 6). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.



**Gambar 3. 3**  
**Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur**

Percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden no 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan gerbang Kertokusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan seingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selain itu, pembangunan Kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, petkebunan dan nilai tambah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.



**Gambar 3. 4 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur**

Di Jawa Timur, penetapan klaster dirumuskan atas dasar RPJMD tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 yaitu Wilis Utara.

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

- a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk.

Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

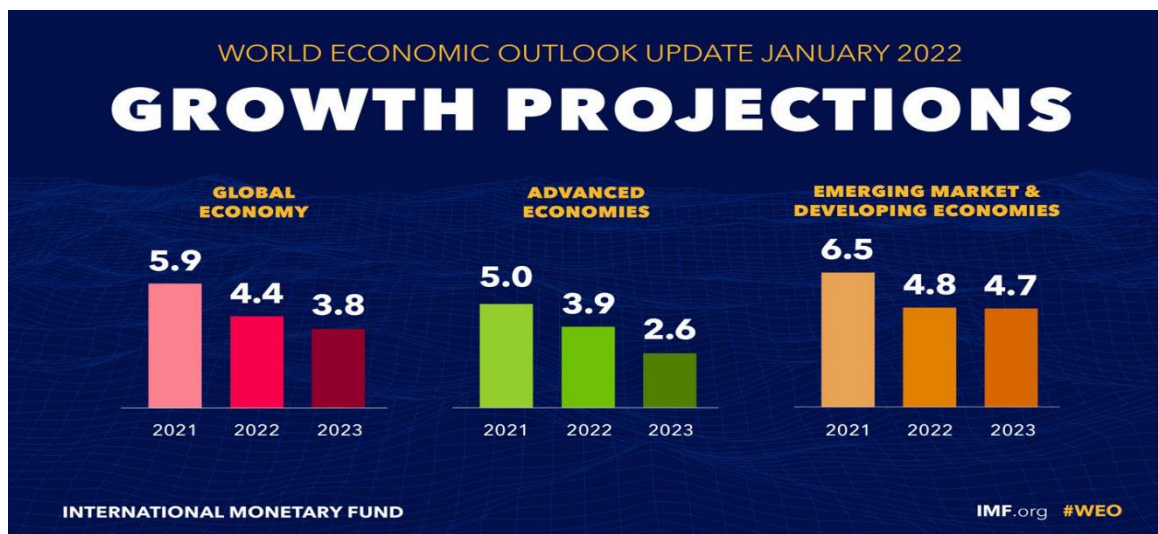
- b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.



Kondisi ekonomi global pada tahun 2023 diprediksikan mengalami penurunan di bandingkan tahun 2022 dan 2021. Perekonomian global memasuki tahun 2022 dalam posisi yang lebih lemah tahun sebelumnya. Ketika varian Omicron COVID-19 baru menyebar, negara-negara telah menerapkan kembali pembatasan mobilitas. Naiknya harga energi dan gangguan pasokan telah mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi dan lebih luas daripada yang diantisipasi, terutama di Amerika Serikat dan banyak pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Kondisi tersebut diperparah oleh konflik antar Rusia dan Ukraina diawal bulan Maret 2022. Konflik tersebut menyebabkan harga minyak global meningkat tajam, harga komoditas bahan industri dan makanannya juga meningkat.

Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat dari 5,9 pada 2021 menjadi 4,4 persen pada 2022—setengah poin persentase lebih rendah untuk 2022 daripada di World Economic Outlook (WEO) Oktober, sebagian besar mencerminkan penurunan perkiraan di dua ekonomi terbesar. Asumsi yang direvisi menghapus paket kebijakan fiskal Build Back Better dari baseline, penarikan akomodasi moneter lebih awal, dan kekurangan pasokan yang berkelanjutan menghasilkan revisi turun 1,2 poin persentase untuk Amerika Serikat. Di Cina, gangguan yang disebabkan oleh pandemi terkait dengan kebijakan tanpa toleransi COVID-19 dan tekanan keuangan yang berkepanjangan di antara pengembang properti telah menyebabkan penurunan peringkat sebesar 0,8 poin persentase. Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi 3,8 persen pada tahun 2023. Meskipun ini 0,2 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, peningkatan sebagian besar mencerminkan peningkatan mekanis setelah hambatan saat ini pada pertumbuhan menghilang pada paruh kedua tahun 2022. Perkiraan tersebut tergantung pada hasil kesehatan yang merugikan menurun ke tingkat yang rendah di sebagian besar negara pada akhir 2022, dengan asumsi tingkat vaksinasi meningkat di seluruh dunia dan terapi menjadi lebih efektif.



Sumber: IMF (2021)

**Gambar 3. 5 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2023**

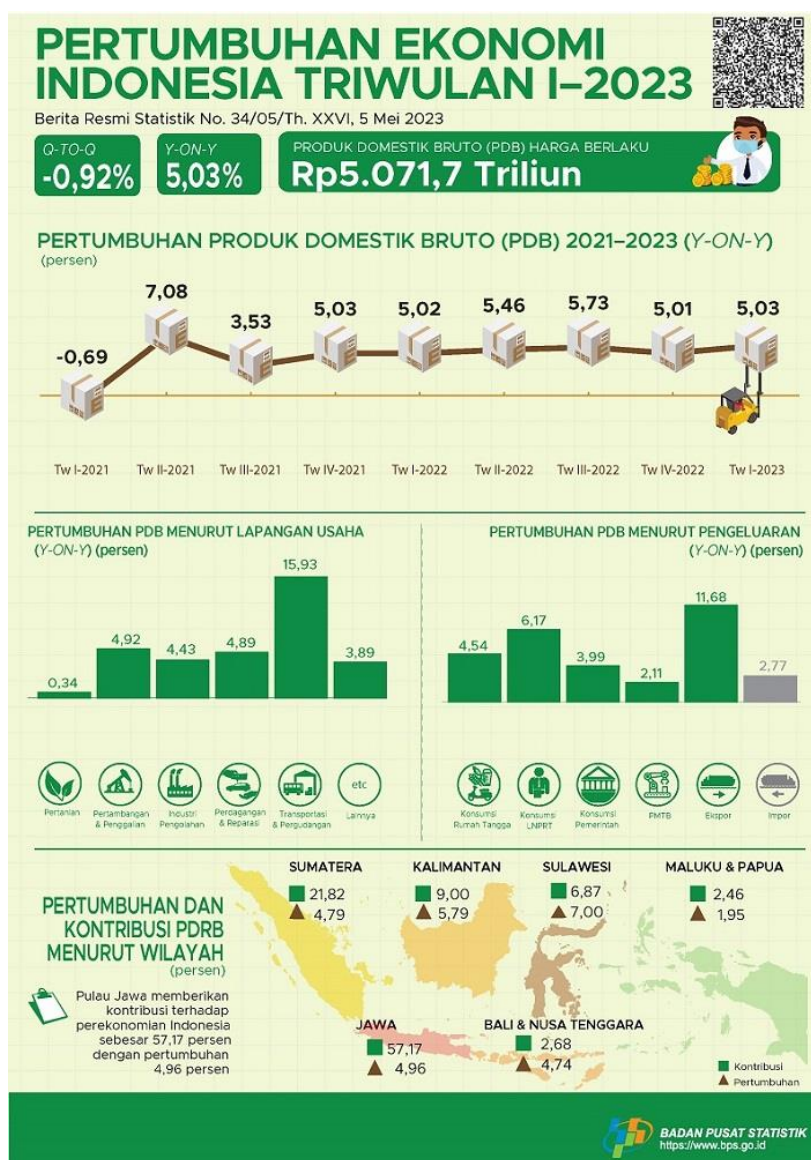
Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global di prediksi tumbuh sebesar 4,4 persen. Pada tahun 2022, negara berkembang di proyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen dan jauh lebih tinggi dari Negara maju yang di proyeksikan hanya sebesar 3,9 persen. Begitupula pada tahun 2023, negara berkembang di proyeksikan tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian maju namun dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yaitu dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

**Tabel 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2023**

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023			
	IMF	WB	OECD
<b>World</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Major Economies</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	-
Amerika Serikat	2,6	2,6	2,4
Euro Area	2,5		2,5
Jepang	1,8	1,2	1,1
<b>Emerging Markets</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	-
China	5,2	5,3	5,1
<b>Indonesia</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
Vietnam	-	6,5	-
Thailand	4,7	4,3	-
Malaysia	5,7	4,5	-
Filipina	6,9		-
Brazil	1,6	2,7	2,1
India	7,1	6,8	5,5

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2022, OECD Economic Outlook Des 2022, Asian Development Outlook (ADO) ADB Des 2022

Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2023, walaupun ekonomi global mengalami perlambatan. Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus. Perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan global seperti Gangguan rantai pasok, Krisis Energi, Normalisasi suku bunga, Perkembangan varian baru COVID-19, dan China *switching policy*.



**Gambar 3. 6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan I tahun 2023**

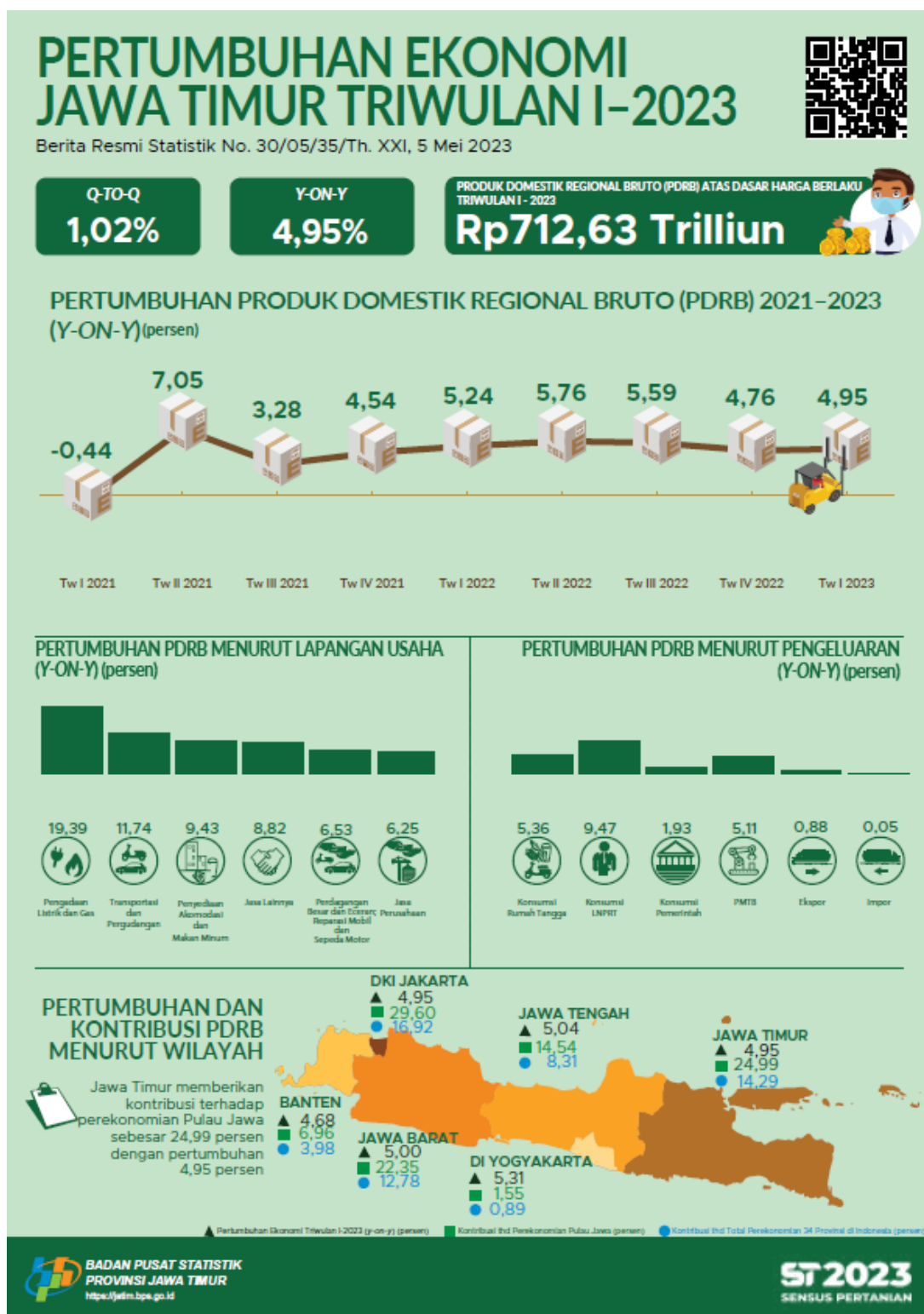
Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,55 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,90 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 6,37 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,43 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 18,57 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 11,85 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,77 persen; serta Konstruksi sebesar 9,88 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,02 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,68 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 6,17 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,54 persen, Komponen PK-P sebesar 3,99 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,11 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 2,77 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 52,88 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,11 persen, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,71 persen, Komponen PK-P sebesar 5,32 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,17 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,40 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 19,56 persen.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

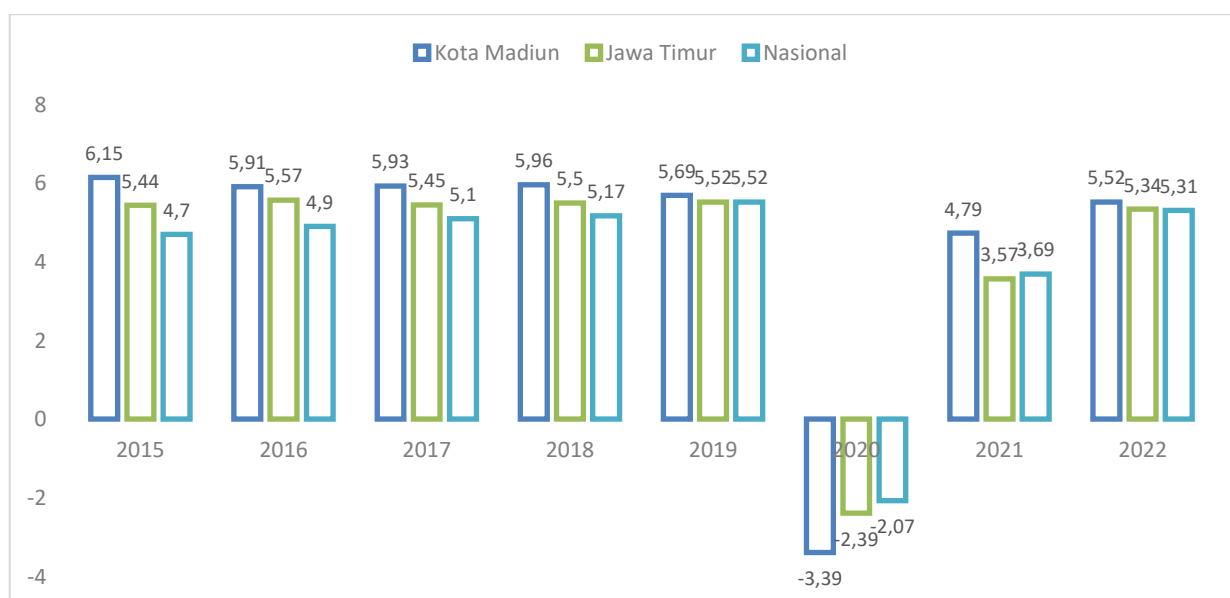


**Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sampai Triwulan I tahun 2023**

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2023 terhadap Triwulan I-2022 meningkat sebesar 4,95 persen (y-on-y). Semua lapangan Usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 19,39 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 11,74 persen, serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,43 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,29 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0,97 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, diantaranya adalah Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,45 persen, 6,58 persen, 0,66 persen, 7,91 persen, 0,30 persen, dan 0,44 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,00 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,13 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,76 persen, serta Konstruksi sebesar 8,79 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,69 persen.



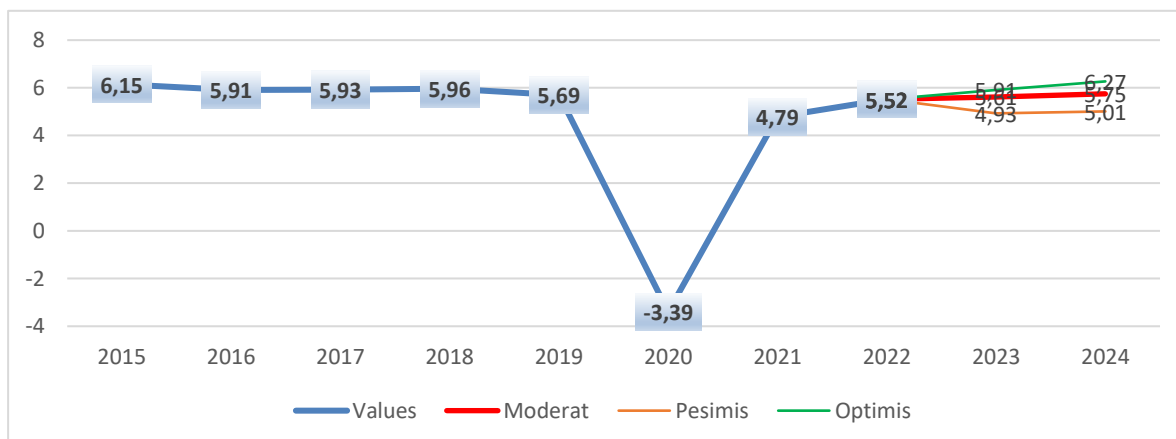
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2022**

Sebelum terjadinya COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 sebesar 6,15% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,44% dan 4,7%.

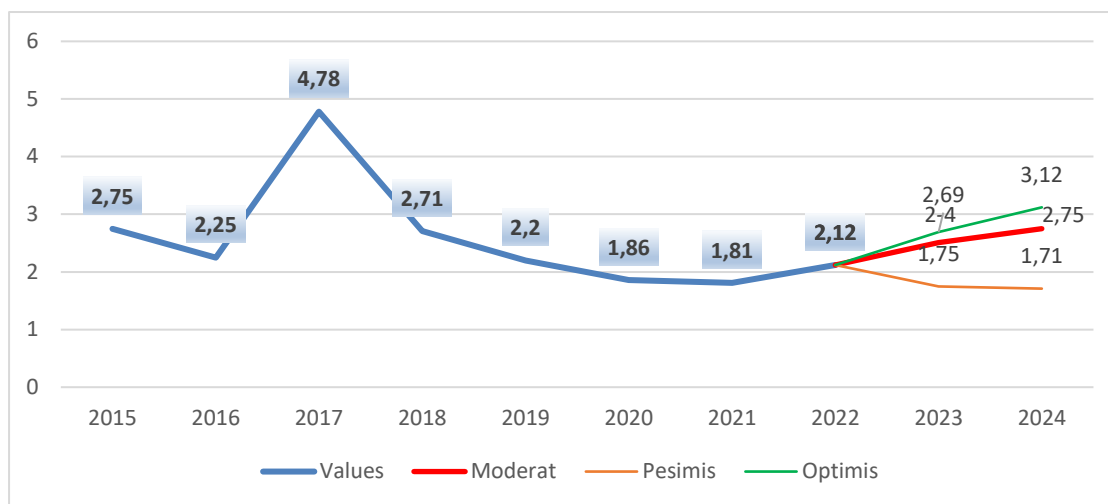
Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69% namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39% di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak COVID-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73% dan 5,52%. Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur dan melebihi provinsi Jawa Timur dan nasional.

Pada tahun 2023, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah ketidakpastian ekonomi global, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi pasca pandemic Covid19. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun Pasca COVID-19 menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2023 hingga tahun 2024.



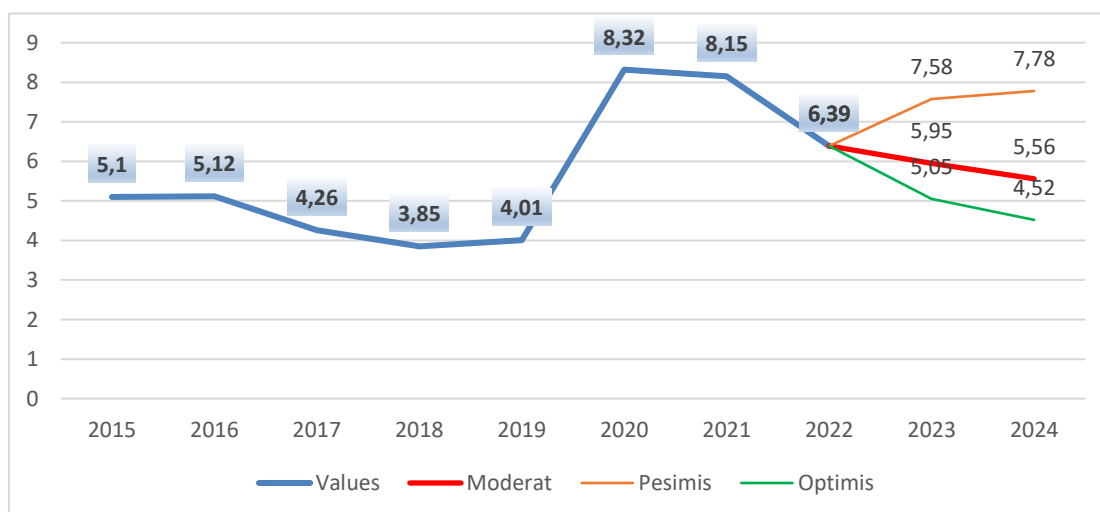
**Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2023 sampai dengan tahun 2024**

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan dari 5,96 ke 5,69. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga minus 3,39%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,52% tahun 2022. Pada tahun 2023, dengan asumsi stabilitas ekonomi nasional dan regional terjaga, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,61% dengan skema moderat. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,75%.



**Gambar 3. 10 Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024**

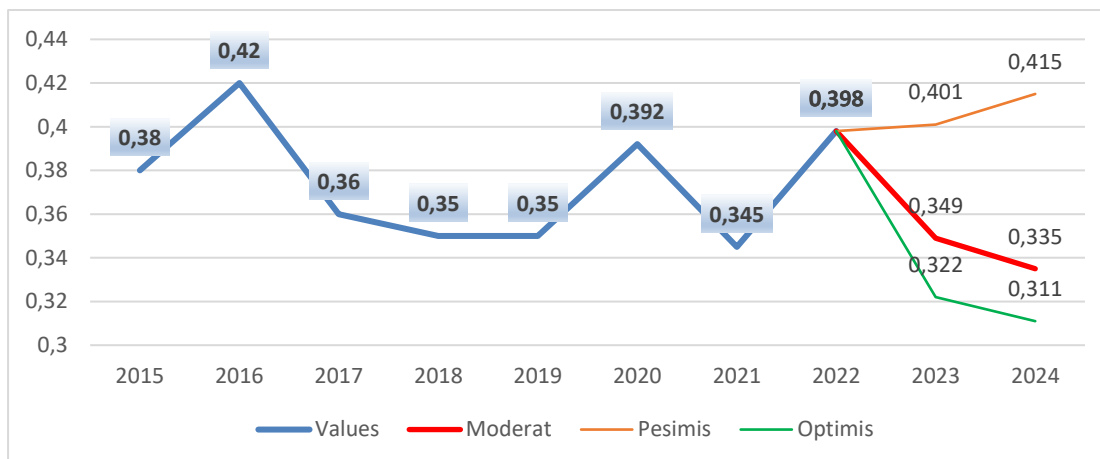
Inflasi Kota Madiun dalam lima tahun terakhir mengalami nilai yang cenderung menurun. Pada tahun 2018, inflasi sebesar 2,71% dan mengalami penurunan hingga sebesar 2,12% tahun 2022. Dampak COVID-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86%. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas COVID-19. Pada tahun 2023 nilai inflasi diproyeksikan dikisaran angka 2-4% dan pada tahun 2024 nilai inflasi diproyeksikan skema moderat diangka 2,75%. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada rentang 2 – 4%.



**Gambar 3. 11 Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024**

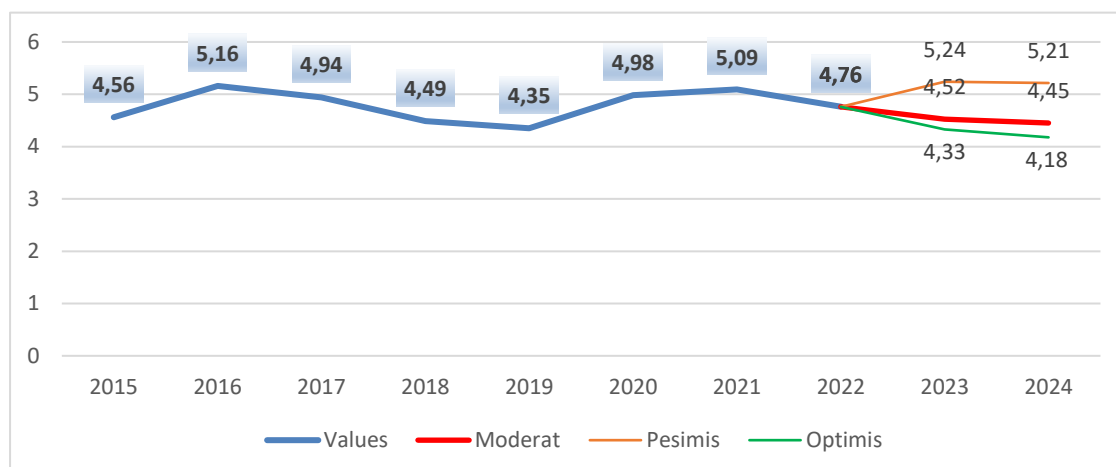
Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01%. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32%. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Pada tahun 2022, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga 6,39%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan masing – masing sebesar 5,95% tahun 2023 dan 5,56% tahun 2024 dengan skema moderat.





**Gambar 3. 12 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024**

Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak COVID-19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 0,392. Kemudian di tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan hingga 0,345 namun kembali naik menjadi 0,398 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, indek gini di proyeksikan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,349 dan 0,335 dengan skema moderat. Nilai indek diatas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.



**Gambar 3. 13 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024**

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic COVID-19 yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,09%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada tahun 2022, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,76%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dan 2024 di proyeksikan mengalami penurunan dengan nilai masing – masing sebesar 4,52% dan 4,45%.



Sumber: Bappeda Kota Madiun

**Gambar 3. 14 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun**

Arah kebijakan ekonomi kota Madiun dapat dilihat dari misi empat dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dengan tujuan utamanya adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi

1. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat
2. Peningkatan jaringan tenaga kerja
3. Penyediaan kebijakan ramah investasi
4. Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi
5. Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB
6. Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan
7. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata
8. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
9. Pengembangan ekonomi kreatif
10. Pengembangan ekonomi digital masyarakat
11. Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro
12. Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
13. Peningkatan kelembagaan koperasi
14. Peningkatan ketersediaan pangan
15. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

16. Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
17. Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW
18. Peningkatan jejaring sosial
19. Penguatan program pengentasan kemiskinan

**Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2023 mengikuti arah kebijakan dalam RPJMD Kota Madiun 2019 – 2024.** Arah kebijakan ekonomi difokuskan pada penguatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital ekonomi Kota Madiun sebagai dampak COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (recovery) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2023 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



**Gambar 3. 15 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023**

1. Akselerasi ekonomi daerah pasca COVID-19

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/recovery dampak COVID-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan recovery perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,19 persen dengan skenario moderat Tahun 2022. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah.

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi recovery dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan

Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengemabngan keluarahn untuk menstimulus perekonomian.

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan relaksasi dalam rangka recovery COVID-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan sunset policy. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah dalam upaya akselerasi ekonomi pasca COVID19, sehingga membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
    1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
    2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
    3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

## 2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.

Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

## 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
  - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;

- b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2023
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

7. Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar lebih dari 45,7 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2023, belanja subsidi tidak dianggarkan.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2023, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;



- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
  - c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
  - f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.
1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
  2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2023 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-*cover* oleh pemerintah daerah.

### **3.2.4 Kerangka Pendanaan 2023**

Kerangka pendanaan memiliki hubungan yang sejalan dengan kondisi indikator ekonomi makro. Proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun mengalami perubahan di hamper seluruh komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan. PAD dan pendapatan transfer di proyeksikan mengalami peningkatan.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kota Madiun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami perubahan dari Rp. 1.071.012.267.175 menjadi Rp 1.083.680.983.423, atau meningkat sebesar 12.668.716.248. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari APBD 2023. PAD diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.858.601.058 atau dari sebesar Rp 255.138.115.765 pada APBD 2023 menjadi sebesar Rp 256.996.716.823. Peningkatan tersebut disebabkan dari komponen pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan komponen PAD lainnya mengalami penurunan yaitu retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Transfer yang diterima mengalami peningkatan khususnya dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan nilai sebesar Rp 10.810.115.190. Peningkatan tersebut berasal dari sub komponen pendapatan bagi hasil yaitu sebesar Rp 11.006.974.590, meskipun pada komponen bantuan keuangan di proyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 196.859.400. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah tahun 2023, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 1.263.012.267.175 menjadi Rp 1.274.924.655.870 dengan perubahan peningkatan sebesar Rp 11.912.388.695. Belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 53.513.907.397 dengan komponen belanja barang dan jasa yang mengalami peningkatan hingga Rp 45.877.030.365, belanja hibah naik sebesar Rp 22.205.369.500 dan belanja bantuan sosial naik sebesar Rp 5.596.665.000. Sedangkan belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 20.165.157.468.

Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp 244.661.755.442 menjadi Rp 221.239.451.153. Seluruh komponen dalam belanja modal mengalami penurunan kecuali Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja Tidak Terduga yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 21.692.166.273 menurun menjadi Rp 3.512.951.860. Sedangkan Belanja Transfer tidak mengalami perubahan. Proyeksi perubahan Kerangka Pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2023 secara spesifik dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3. 3 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Madiun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/(Berkurang)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>255.138.115.765</b>	<b>256.996.716.823</b>	<b>1.858.601.058</b>
1.1.1	Pajak Daerah	92.000.000.000	103.215.450.000	11.215.450.000
1.1.2	Retribusi Daerah	18.411.856.225	17.584.273.007	(827.583.218)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.158.702.324	16.029.310.600	870.608.276
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	129.567.557.216	120.167.683.216	(9.399.874.000)
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>815.874.151.410</b>	<b>826.684.266.600</b>	<b>10.810.115.190</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730.401.876.000	730.401.876.000	0
1.2.1.1	Dana Perimbangan	667.100.985.000	667.100.985.000	0
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.771.397.000	85.771.397.000	0
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	487.288.274.000	487.288.274.000	0
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.400.881.000	6.400.881.000	0
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.640.433.000	87.640.433.000	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	63.300.891.000	63.300.891.000	0
1.2.2	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>85.472.275.410</b>	<b>96.282.390.600</b>	<b>10.810.115.190</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	84.656.513.410	95.663.488.000	11.006.974.590
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	815.762.000	618.902.600	(196.859.400)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.071.012.267.175</b>	<b>1.083.680.983.423</b>	<b>12.668.716.248</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>996.658.345.460</b>	<b>1.050.172.252.857</b>	<b>53.513.907.397</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	490.371.338.423	470.206.180.955	(20.165.157.468)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	463.979.666.642	509.856.697.007	45.877.030.365
2.1.4	Belanja Subsidi	99.146.000	99.146.000	0
2.1.5	Belanja Hibah	15.725.267.295	37.930.636.795	22.205.369.500
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.482.927.100	32.079.592.100	5.596.665.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.661.755.442</b>	<b>221.239.451.153</b>	<b>(23.422.304.289)</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.482.130.000	722.130.000	(2.760.000.000)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.164.228.212	72.179.686.139	(2.984.542.073)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.884.543.580	82.452.148.961	(15.432.394.619)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.458.770.080	63.661.579.763	202.809.683
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.672.083.570	2.223.906.290	(2.448.177.280)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2023</b>	<b>RKPD PERUBAHAN 2023</b>	<b>Bertambah/(Berkurang)</b>
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>21.692.166.273</b>	<b>3.512.951.860</b>	<b>(18.179.214.413)</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	21.692.166.273	3.512.951.860	(18.179.214.413)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.274.924.655.870</b>	<b>11.912.388.695</b>
	<b>Total Surplus / (defisit)</b>	<b>(192.000.000.000)</b>	<b>(191.243.672.447)</b>	<b>756.327.553</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>192.000.000.000</b>	<b>191.243.672.447</b>	<b>(756.327.553)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	192.000.000.000	191.243.672.447	(756.327.553)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>192.000.000.000</b>	<b>191.243.672.447</b>	<b>(756.327.553)</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>192.000.000.000</b>	<b>191.243.672.447</b>	<b>(756.327.553)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.274.924.655.870</b>	<b>11.912.388.695</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

**BAB IV**  
**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah merupakan panduan atau arahan yang ditetapkan untuk mengarahkan upaya pembangunan suatu daerah. Tujuan dan sasaran ini membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengukur kemajuan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Terdapat dua pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun Bersih dan berwibawa. Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pilar selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa.



**Gambar 4. 1 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024**

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka pencapaian misi diatas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024**

<b>Tujuan dan Sasaran</b>		
<b>1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>		
<b>T1</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	<b>IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi</b>
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
<b>2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>		
<b>T2</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	<b>IT2.1. livable city</b>
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<b>3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T3</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	<b>IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia</b> <b>IT3.2. Indeks Pembangunan Gender</b>
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
<b>4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa

Tujuan dan Sasaran		
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman
		IT5.2. Indeks Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks rasa aman

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Gini, Indeks Reformasi Birokrasi, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi terkini. Adapun rincian mengenai indikator dan target Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Madiun pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target	
				RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	<b>T1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 69,26	(B) 69	(B) 69,26
2	<b>T2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	<i>Livable City</i>	90,33	88,60	90,33
3	<b>T3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,01	82,15	82,47
		Indeks Pembangunan Gender	94,57	94,49	94,57



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target	
				RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
4	<b>T4. Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87*	6,42	6,89
5	<b>T5. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	Indeks Ketentraman	81,25	77,15	77,15
		Indeks Gini	0,398	0,332	0,329

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2023 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 4. 3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li> <li>• Program Pengembangan Umkm</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Hubungan Industrial</li> <li>• Program Pengembangan Umkm</li> <li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ul>
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</li> </ul>
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
dan kesejahteraan sosial.	serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb)</li> <li>● Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>● Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan</li> <li>● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>● Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat)</li> <li>● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</li> </ul>
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Kepegawaian Daerah</li> <li>● Pendidikan Dan Pelatihan</li> <li>● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Aplikasi Informatika</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li> <li>● Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi</li> <li>● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>● Program Informasi Dan Komunikasi Publik</li> <li>● Program Aplikasi Informatika</li> </ul>

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan.

Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat 2023**

JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH USULAN POKIR
Perbaikan Jalan	DAPIL 1 KARTOHARJO	34
Saluran		83
Penerangan Jalan Umum		13
Bantuan/Kesosialan		27
Fasilitas Umum		42
Pemulihan Ekonomi		9
Persampahan		7
Jembatan		1
Pavingisasi		7
Pelatihan		4
<hr/>		
Perbaikan Jalan	DAPIL 2 TAMAN I	20
Saluran		15
Penerangan Jalan Umum		7
Bantuan/Kesosialan		4
Fasilitas Umum		13
Pemulihan Ekonomi		7
Persampahan		1
Pavingisasi		5
Pelatihan		1
<hr/>		
Perbaikan Jalan	DAPIL 3 TAMAN II	9
Saluran		32
Penerangan Jalan Umum		5
Bantuan/Kesosialan		6
Fasilitas Umum		20
Pemulihan Ekonomi		3
Pavingisasi		9
<hr/>		
Perbaikan Jalan	DAPIL 4 MANGUHARJO	14
Saluran		28
Penerangan Jalan Umum		9
Bantuan/Kesosialan		22
Fasilitas Umum		14
Pemulihan Ekonomi		5
Persampahan		2
Jembatan		2
Pavingisasi		8
TOTAL USULAN POKIR		488

*Sumber : Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023*

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahaan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi inklusif
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan
3. Kualitas sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing
4. Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi



**Gambar 4. 2 Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2023**

Secara detail, isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 5 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023**

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
<b>Isu Strategis 1:</b> Pembangunan ekonomi inklusif	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>Masih rendahnya kontribusi BUMD</p> <p>Masih terbatasnya kontribusi PAD</p> <p>Infrastruktur pendukung investasi belum memadai</p> <p>Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun</p> <p>Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun</p> <p>Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai</p> <p>Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal</p> <p>Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal</p> <p>Pengangguran yang meningkat.</p>
<p><b>Isu Strategis 2:</b> Kualitas sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing</p>	<p>Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khususnya gedung dan bangunan)</p> <p>Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)</p> <p>Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi</p> <p>Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)</p> <p>Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah</p> <p>Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.</p> <p>Akses Internet yang kurang memadai</p> <p>Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.</p> <p>Belum berkembangnya metode kurikulum daring</p> <p>Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama</p> <p>Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan</p> <p>Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan</p> <p>Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki komptensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP</p> <p>Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan</p> <p>Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit</p> <p>Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya manajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
<b>Isu Strategis 3:</b> Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan</p> <p>Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat</p> <p>Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP</p> <p>Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan</p> <p>Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis</p> <p>Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP</p> <p>Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan</p>
<p><b>Isi Strategis 4:</b> Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan</p>	<p>Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kota</p> <p>Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang</p> <p>Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</p> <p>Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang</p> <p>banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan</p> <p>Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar di beberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus</p> <p>Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai</p> <p>Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kependhunian dan backlog kepemilikan.</p> <p>Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bappeda Kota Madiun

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 4. 6 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023**

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
Isu Strategis 1: Pembangunan ekonomi inklusif	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
Isu Strategis 2: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Isu Strategis 3: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi



ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



**Gambar 4. 3 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023**

Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang sudah berjalan serta prognosis terhadap kondisi yang akan datang, tema dan prioritas pembangunan di dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2023 dipandang masih relevan dengan kondisi global, nasional, dan regional. Sehingga tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu: **“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera”** dan prioritas pembangunan sebagaimana berikut:

**Tabel 4. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2023**

Nasional	Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Madiun 2023
<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor

Nasional	Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Madiun 2023
		unggulan, ekonomi kreatif dan digital
<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital
<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

Nilai pendanaan tiap-tiap prioritas setelah perubahan ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Pendanaan Per Prioritas Pembangunan**

No	BELANJA PRIORITAS	RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023	Bertambah / Berkurang
Prioritas 1	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	47.071.429.640	55.742.838.701	8.671.409.061
Prioritas 2	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	661.118.843.802	673.060.021.533	11.941.177.731
Prioritas 3	Peningkatan pelayanan publik berbasis <i>smart city</i> dan percepatan reformasi birokrasi	332.812.995.970	326.929.726.373	- 5.883.269.597
Prioritas 4	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	222.008.997.763	219.192.069.263	-2.816.928.500
<b>TOTAL</b>		<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.274.924.655.870</b>	<b>11.912.388.695</b>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023

Total Belanja prioritas diproyeksikan meningkat untuk Prioritas I dan Prioritas II, akan tetapi untuk Prioritas III dan Prioritas IV mengalami penurunan. Hal ini disebabkan anggaran pada prioritas III dan Prioritas IV digunakan untuk mendukung Prioritas I dan Prioritas II pada perubahan RKPD Tahun 2023. Penambahan pagu pada prioritas I sebesar 18,42% atau (8.671.409.061) dan pada Prioritas II sebesar 1,81% atau (11.941.177.731), dan untuk penurunan prioritas III sebesar 1,77% (- 5.883.269.597) sedangkan penurunan pada Prioritas IV sebesar 1,27% (2.816.928.500).

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan, didalamnya terdapat pagu anggaran pendukung SPM sesuai Bidang Urusan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terkait kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diampu Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel 4. 9 Anggaran Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal**

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Bertasipasi Dalam Pendidikan (APS)	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		100	%			
3	Pendidikan Kesetaraan		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	175	peserta didik	Kota Madiun	386.444.038	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		peserta didik	Kota Madiun	12.472.027.400	
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				Kota Madiun		
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMP)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		peserta didik		8.647.441.500	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	68	ruang		2.112.207.499	
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6	unit		3.753.707.300	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4880	unit		49.427.655.400	
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	siswa		3.975.043.026	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
		Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>						

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pendidikan kesetaraan (APS)							
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	4	satuan pendidikan	Kota Madiun	728.430.000	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
		Iklim Keamanan SMP	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	559.017.964	
		Iklim Kebhinekaan SD	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	73,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	646.979.700	
		Iklim Kebhinekaan SMP	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	559.017.964	
		Iklim Inklusivitas SD	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>						
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	69,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	646.979.700	
		Iklim Inklusivitas SMP	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>						
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	559.017.964	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	67	%			
		Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	<b>Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>						
			Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6,00	dokumen	Kota Madiun	750.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2	laporan	Kota Madiun	859.200.000	
		Rata-Rata Kemampuan Numeral SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6,00	dokumen	Kota Madiun	750.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	2	laporan	Kota Madiun	859.200.000	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		Rata-Rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,00	dokumen	Kota Madiun	750.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	Kota Madiun	859.200.000	
		Rata-Rata Kompetensi Numeransi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/ kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,00	dokumen	Kota Madiun	750.000.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	laporan	Kota Madiun	859.200.000	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>						
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	163,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	1.011.796.000	
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>						
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000,00	orang	Kota Madiun	3.600.000.000	
1		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2490	Orang	Kota Madiun	883.311.400	
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2377	Orang	Kota Madiun	49.007.200	
3		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2264	Orang	Kota Madiun	84.232.800	
4		Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9218	Orang	Kota Madiun	242.621.000	
5		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	31972	Orang	Kota Madiun	97.973.500	



NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan Sesuai Standar					
6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115490	Orang	Kota Madiun	56.621.200	
7		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28597	Orang	Kota Madiun	50.753.600	
8		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68973	Orang	Kota Madiun	13.548.000	
9		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8143	Orang	Kota Madiun	202.012.000	
10		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	338	Orang	Kota Madiun	64.735.000	
11		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5076	Orang	Kota Madiun	53.440.000	
12		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5780	Orang	Kota Madiun	199.463.200	
1		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh	100	%	Kota Madiun	21.269.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				rumah tangga di wilayah kabupaten/kota					
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota					
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum					
2		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	Prosentase Jambanisasi yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	100	Rumah	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	2.222.940.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Bansos Jambanisasi)						
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	60	cpb	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	3.346.865.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (Pembangunan MCK)						
			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Prosentase Pengembangan Perumahan					

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	86.150.000	
			Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	dokumen			
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	2.295.210.500	
			Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3	unit rumah (rusunawa)			
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					96.450.000	
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	1	laporan			
<b>I</b>		<b>Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		100	%	Kota Madiun		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1			<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40	kasus	Kota Madiun	1.313.413.000	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	275	kasus	Kota Madiun	720.060.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8	dokumen	Kota Madiun	152.772.000	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	dokumen	Kota Madiun	4.200.000.000	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78	orang	Kota Madiun	312.875.000	
2			<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>						
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4	dokumen	Kota Madiun	2,392,746,805	
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan	Kota Madiun	648,061,744	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II</b>		<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (KEBENCANAAN)</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		100	%	Kota Madiun		
1			<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					1.063.750.000	
			Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6	dokumen	Kota Madiun	699.128.000	
			Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	Laporan	Kota Madiun	365.527.000	
2			<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>					163.530.000	
			Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6	dokumen	Kota Madiun	58.573.000	
<b>III</b>		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1</b>			<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>						
a			Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	-	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b			Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komukikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabuaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka keada Penduduk yang tinggal di daerah bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan temat tinggalnya	300	orang	Kota Madiun	61.133.000	
<b>2</b>		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>						
a			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	50.000.000	
b			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200	orang	Kota Madiun	85.633.000	
c			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas	5	unit	Kota Madiun	16.636.000	
d			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6	kawasan	Kota Madiun	47.613.000	
e			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan managerialnya	37	orang	Kota Madiun	888.600.000	
f			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	50.000.000	
g			Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300	orang	Kota Madiun	43.553.000	
<b>3</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (DAMKAR)</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>						

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	12	orang	Kota Madiun	80.475.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12	orang	Kota Madiun	22.589.000	
I		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100	%	Kota Madiun		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti							
1			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20	%	Kota Madiun		
a			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165	orang	Kota Madiun	166.548.000	
b			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		60	orang	Kota Madiun	52.967.043	
c			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		13	orang	Kota Madiun	35.457.200	
d			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		12	orang	Kota Madiun	42.300.000	

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		62	orang	Kota Madiun	10.100.000	
f			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		270	orang	Kota Madiun	1.978.852.820	
g			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		60	orang	Kota Madiun	180.267.000	
II		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Penyediaan Makanan					
				Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana					
1			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sos					
a			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	orang		39.282.600	
b			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		300	orang		15.177.300	
c			Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial		15	orang		23.750.000	

Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas, serta Pagu Indikatif Program Kota Madiun pada Perubahan RKPD Tahun 2023 pada Perubahan RKPD Tahun 2023, terangkum dalam Prioritas pendukung sasaran tabel berikut:



**Tabel 4. 10**  
**Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas, serta Pagu Indikatif Program Kota Madiun**  
**pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

NO	PRIORITAS KOTA MADIUN	SASARAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET RPJMD 2023	TARGET 2023	TARGET PERUBAHAN 2023	URUSAN	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH				
1	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,12	6,15	6,15	Tenaga Kerja	8.951.715.914	12.264.926.675	3.313.210.761	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
							Penanaman Modal	7.013.651.247	7.303.552.247	289.901.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
							Transmigrasi	39.101.000	-	- 39.101.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	2,91	10,16	10,16	Perdagangan	16.288.388.030	16.302.788.030	14.400.000	Dinas Perdagangan				
							Pertanian	2.876.652.000	5.339.992.300	2.463.340.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
							Kealutan dan Perikanan	408.932.000	410.755.000	1.823.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
							Perindustrian	286.998.388	2.465.313.388	2.178.315.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
							Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	0,84	11,32	21,57	Pariwisata	1.736.446.866	1.896.446.866	160.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
											Kebudayaan	8.627.874.689	8.915.174.689	287.300.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
											Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	841.669.506	843.889.506	2.220.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								<b>47.071.429.640</b>	<b>55.742.838.701</b>	<b>8.671.409.061</b>					
2	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,65	4,77	4,48	Sosial	26.685.587.364	27.725.399.447	1.039.812.083	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
							Pangan	7.989.144.000	7.467.762.500	- 521.381.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	72,83	73,13	Kesehatan	259.150.352.764	261.702.366.372	2.552.013.608	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
							Bidang Pengendalian Penduduk dan	3.272.406.072	5.167.335.300	1.894.929.228	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				

NO	PRIORITAS KOTA MADIUN	SASARAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET RPJMD 2023	TARGET 2023	TARGET PERUBAHAN 2023	URUSAN	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH	
							Keluarga Berencana					
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,42	14,42	14,43	Perpustakaan	6.290.980.096	6.241.451.423	- 49.528.673	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Kepemudaan dan Olah Raga	6.566.546.361	7.968.389.861	1.401.843.500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
			Rata-rata Lama Sekolah	11,16	11,39	11,67	Pendidikan	310.889.961.464	304.973.559.644	- 5.916.401.820	Dinas Pendidikan	
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,2	77,2	78,03	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.380.001.150	2.311.931.650	- 68.069.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,46 (Harmonis)	B skor 74,46 (Harmonis)	B skor 74,46 (Harmonis)	Pemerintahan Umum	9.394.676.531	19.999.076.531	10.604.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Indeks rasa aman	76,27	76,27	82,18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.738.188.000	25.741.748.805	1.003.560.805	Satuan Polisi Pamong Praja	
								3.761.000.000	3.761.000.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
								<b>661.118.843.802</b>	<b>673.060.021.533</b>	<b>11.941.177.731</b>		
3	Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (79)	BB (71,25)	BB (79)	Perencanaan	9.653.849.790	10.514.212.381	860.362.591	Badan Perencanaan, Penelitin dan Pengembangan Daerah	
				Keuangan					80.888.982.806	59.113.512.248	- 21.775.470.558	Badan Keuangan dan Aset Daerah
									9.914.084.416	10.666.314.484	752.230.068	Badan Pendapatan Daerah
			Pengawasan					9.545.730.204	10.020.494.616	474.764.412	Inspektorat	
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi (3,42)	Penunjang Urusan Pemerintahan	64.866.942.662	64.949.872.757	82.930.095	Sekretariat Daerah	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,87 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,87 (BAIK)	Komunikasi dan Informatika	29.482.372.217	29.736.072.217	253.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
								Persandian				
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 (baik)	86,55	86,964	Statistik	125.000.000	125.000.000	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							Kearsipan					818.942.100

NO	PRIORITAS KOTA MADIUN	SASARAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET RPJMD 2023	TARGET 2023	TARGET PERUBAHAN 2023	URUSAN	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
			Pemerintah Kota Madiun				Pendidikan dan Pelatihan	2.459.306.900	2.459.306.900	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Kepegawaian	9.335.910.709	9.353.710.709	17.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Penunjang Urusan Pemerintahan	44.640.156.804	44.750.655.945	110.499.141	Sekretariat DPRD
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.669.644.194	6.884.144.194	214.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Unsur Kewilayahan	21.444.643.698	26.327.926.664	4.883.282.966	Kecamatan Taman
						21.352.021.292		24.635.491.273	3.283.469.981	Kecamatan Manguharjo	
						19.948.267.723		24.887.599.670	4.939.331.947	Kecamatan Kartoharjo	
			Indeks Inovasi Daerah	1925	58,4	58,4	Penelitian dan Pengembangan	1.374.268.455	1.344.069.542	30.198.913	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								<b>332.812.995.970</b>	<b>326.929.726.373</b>	<b>- 5.883.269.597</b>	
<b>4</b>	Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,42	98,42	98,42	pekerjaan umum dan penataan ruang	135.921.022.426	<b>132.221.835.526</b>	- 3.699.186.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							perumahan rakyat dan kawasan permukiman	41.402.543.705	41.622.303.705	219.760.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							perhubungan	17.855.163.966	18.304.063.966	448.900.000	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,85	57,85	58,13	Lingkungan Hidup	26.699.067.666	26.729.266.066	30.198.400	Dinas Lingkungan Hidup
							pertanahan	131.200.000	314.600.000	183.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
								<b>222.008.997.763</b>	<b>219.192.069.263</b>	<b>- 2.816.928.500</b>	
								<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.274.924.655.870</b>	<b>11.912.388.695</b>	

Sumber: Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Madiun.** Melalui program prioritas yang direncanakan dan dijalankan pada Tahun 2023, diharapkan target indikator kinerja pembangunan dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan swasta serta lembaga yang ada di Kota Madiun dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Program prioritas Kota Madiun Tahun 2023 dilaksanakan oleh **25** Organisasi Perangkat Daerah dan **3** Kecamatan. Program-program tersebut disertai dengan indikator kinerja sasaran dan target serta indikator kinerja program dan target.

Rincian perubahan anggaran dan perubahan pagu per urusan dalam APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Pagu Anggaran Perubahan per Urusan Pemerintahan 2023**

No.	URUSAN	PAGU			Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG		
1	Bidang Pendidikan	310.889.961.464	304.973.559.644	- 5.916.401.820	Pengurangan Gaji PPPK	Dinas Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	259.150.352.764	261.702.366.372	2.552.013.608	Penambahan dana JKN, DBHCHT, DAK Fisik dan Non Fisik	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.921.022.426	132.221.835.526	- 3.699.186.900	Pengurangan Paving dan PJU yang masuk ke 3 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kaewasan Permukiman	41.402.543.705	41.622.303.705	219.760.000	Penambahan penunjang DAK integrasi Kawasan kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	24.738.188.000	25.741.748.805	1.003.560.805	Penambahan Dana DBHCHT serta honor tenaga kontrak	Satuan Polisi Pamong Praja
		3.761.000.000	3.761.000.000	-	Nihil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Bidang Sosial	26.685.587.364	27.725.399.447	1.039.812.083	Penambahan bansos dari 10 bulan menjadi 12 bulan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Bidang Tenaga Kerja	8.951.715.914	12.264.926.675	3.313.210.761	Penambahan dana DBHCHT, Perjalanan Dinas (SPPD), dan Pemeliharaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	URUSAN	PAGU			Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG		
					Gedung serta Belanja Gaji	
8	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	2.380.001.150	2.311.931.650	- <b>68.069.500</b>	Pengurangan belanja operasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	<b>Bidang Pangan</b>	7.989.144.000	7.467.762.500	- <b>521.381.500</b>	Pengurangan Belanja Alat Pasca Panen Cabai (alat kemasan cabai)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	<b>Bidang Pertanahan</b>	131.200.000	314.600.000	<b>183.400.000</b>	Penambahan penunjang DAK integrasi legalitas tanah dan rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>26.699.067.666</b>	<b>26.729.266.066</b>	<b>30.198.400</b>	Hadiah untuk Proklamasi	Dinas Lingkungan Hidup
12	<b>Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>6.669.644.194</b>	<b>6.884.144.194</b>	<b>214.500.000</b>	Penambahan Bahan Habis Pakai operasional E-KTP, serta mamin rapat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	<b>Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>3.272.406.072</b>	<b>5.167.335.300</b>	<b>1.894.929.228</b>	Penambahan DBHCHT, DAK Fisik dan Non Fisik	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>17.855.163.966</b>	<b>18.304.063.966</b>	<b>448.900.000</b>	Penambahan Sewa Angkot Gratis	Dinas Perhubungan
15	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	29.482.372.217	29.736.072.217	<b>253.700.000</b>	Penambahan untuk Menyusun Buku pengelolaan Kota Madiun oleh Bapak Wali Kota Madiun	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	841.669.506	843.889.506	<b>2.220.000</b>	Penambahan Belanja operasional	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	7.013.651.247	<b>7.303.552.247</b>	<b>289.901.000</b>	Rehab Gedung	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	6.566.546.361	7.968.389.861	<b>1.401.843.500</b>	Hibah Koni dan pelaksanaan Volly Karang taruna serta PKK	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga
19	<b>Bidang Statistik</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	-	Nihil	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	<b>Bidang Persandian</b>	<b>292.872.000</b>	<b>292.872.000</b>	-	Nihil	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	<b>Bidang Kebudayaan</b>	8.627.874.689	8.915.174.689	<b>287.300.000</b>	Pelaksanaan pagelaran wayang kulit dan Pecel Pincuk	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga
22	<b>Bidang Perpustakaan</b>	<b>6.290.980.096</b>	<b>6.241.451.423</b>	- <b>49.528.673</b>	Pergeseran anggaran antar bidang urusan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	<b>Bidang Kearsipan</b>	<b>818.942.100</b>	<b>868.470.773</b>	<b>49.528.673</b>	Pergeseran anggaran antar bidang urusan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	408.932.000	410.755.000	<b>1.823.000</b>	Penambahan Belanja operasional pakan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
25	<b>Bidang Pariwisata</b>	1.736.446.866	<b>1.896.446.866</b>	<b>160.000.000</b>	Pertunjukan Konser Slank	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga

No.	URUSAN	PAGU			Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG		
26	Bidang Pertanian	2.876.652.000	5.339.992.300	2.463.340.300	Penambahan Dana DBHCHT, Belanja untuk diserahkan pada Masyarakat, pelatihan dan study tiru	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	Bidang Perdagangan	16.288.388.030	16.302.788.030	14.400.000	Penambahan Belanja operasional	Dinas Perdagangan
28	Bidang Perindustrian	286.998.388	2.465.313.388	2.178.315.000	Penambahan dana DBHCHT dan Perjalanan Dinas (SPPD)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
29	Bidang Transmigrasi	39.101.000	-	-39.101.000	Bidang urusan tidak lagi diampuh oleh dinas terkait	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	64.866.942.662	64.949.872.757	82.930.095	Penambahan Belanja operasional	Sekretariat Daerah
		44.640.156.804	44.750.655.945	110.499.141	Penambahan Belanja operasional	Sekretariat DPRD
31	Unsur Penunjang Perencanaan	9.653.849.790	10.514.212.381	860.362.591	Ranwal RPJPD, Forum Konsultasi Publik RPD dan RPJPD	Badan Perencanaan, Penelitin dan Pengembangan Daerah
32	Unsur Penunjang Keuangan	80.888.982.806	59.113.512.248	-21.775.470.558	Pengurangan Dana BTT	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		9.914.084.416	10.666.314.484	752.230.068	Penambahan untuk Insentif, Penyusunan Perwal, Aplikasi SIMPADAMA dan Cetak Blanks	Badan Pendapatan Daerah
33	Unsur Penunjang Kepegawaian	9.335.910.709	9.353.710.709	17.800.000	Penambahan Belanja operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	2.459.306.900	2.459.306.900	-	Nihil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1.374.268.455	1.344.069.542	-30.198.913	Pengurangan biaya operasional	Badan Perencanaan, Penelitin dan Pengembangan Daerah
36	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9.545.730.204	10.020.494.616	474.764.412	Penambahan untuk peringatan hari anti korupsi sedunia, tambahan TPP dan Pendampingan dengan BPKP	Inspektorat Daerah
37	Unsur Kewilayahan	21.444.643.698	26.327.926.664	4.883.282.966	Penambahan untuk Paving dan PJU	Kecamatan Taman
		21.352.021.292	24.635.491.273	3.283.469.981	Penambahan untuk Paving dan PJU	Kecamatan Manguharjo
		19.948.267.723	24.887.599.670	4.939.331.947	Penambahan untuk Paving dan PJU	Kecamatan Kartoharjo
38	Unsur Pemerintahan Umum	9.394.676.531	19.999.076.531	10.604.400.000	Hibah KPU dan Bawaslu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.263.012.267.175	1.274.924.655.870	11.912.388.695		

Sumber: Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023

Adapun rekapitulasi perubahan pagu anggaran per Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Pagu Anggaran Perubahan per Perangkat Daerah 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		BERKURANG/ BERTAMBAH
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	PAGU SEBELUM	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	4	4	12	12	170	170	310.889.961.464	304.973.559.644	- 5.916.401.820
2	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	19	19	88	201	262.422.758.836	266.869.701.672	4.446.942.836
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	17	17	35	35	135.921.022.426	132.221.835.526	- 3.699.186.900
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	7	16	16	22	22	41.533.743.705	41.936.903.705	403.160.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	12	12	22	22	24.738.188.000	25.741.748.805	1.003.560.805
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	10	10	18	19	3.761.000.000	3.761.000.000	-
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	12	29	29	74	74	29.065.588.514	30.037.331.097	971.742.583
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	9	16	16	24	24	10.080.383.808	15.574.129.569	5.493.745.761
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	13	24	24	39	39	11.274.728.000	13.218.509.800	1.943.781.800
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	18	18	29	29	26.699.067.666	26.729.266.066	30.198.400
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	11	12	23	25	6.669.644.194	6.884.144.194	214.500.000
12	Dinas Perhubungan	2	2	15	15	23	23	17.855.163.966	18.304.063.966	448.900.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	11	11	25	25	29.900.244.217	30.153.944.217	253.700.000
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	7	12	12	18	18	7.052.752.247	7.303.552.247	250.800.000
15	Dinas Kebudayaan,	9	9	17	17	21	21	16.930.867.916	18.780.011.416	1.849.143.500

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		BERKURANG/ BERTAMBAH
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	PAGU SEBELUM	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga									
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	12	12	19	19	7.109.922.196	7.109.922.196	-
17	Dinas Perdagangan	6	6	14	14	21	21	16.288.388.030	16.302.788.030	14.400.000
18	Sekretariat Daerah	3	3	16	17	73	75	64.866.942.662	64.949.872.757	82.930.095
19	Sekretariat DPRD	2	2	14	14	24	24	44.640.156.804	44.750.655.945	110.499.141
20	Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah	4	4	14	14	31	31	11.028.118.245	11.858.281.923	830.163.678
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	11	11	25	25	80.888.982.806	59.113.512.248	-21.775.470.558
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2	7	7	18	18	9.914.084.416	10.666.314.484	752.230.068
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	12	12	19	19	11.795.217.609	11.813.017.609	17.800.000
24	Inspektorat Daerah	3	3	8	8	17	17	9.545.730.204	10.020.494.616	474.764.412
25	Kecamatan Taman	5	5	14	14	44	44	21.444.643.698	26.327.926.664	4.883.282.966
26	Kecamatan Manguharjo	5	5	14	14	46	46	21.352.021.292	24.635.491.273	3.283.469.981
27	Kecamatan Kartoharjo	5	5	14	14	46	46	19.948.267.723	24.887.599.670	4.939.331.947
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	11	11	19	19	9.394.676.531	19.999.076.531	10.604.400.000
		<b>155</b>	<b>155</b>	<b>400</b>	<b>402</b>	<b>1.033</b>	<b>1.151</b>	<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.274.924.655.870</b>	<b>11.912.388.695</b>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

Rincian anggaran per program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat dalam **tabel berikut:**



**Tabel 5.3**  
**Perubahan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Perangkat Daerah Tahun 2023**

**PRIORITAS I : Peningkatan Inklusivitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital**

No.	URUSAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET				PAGU			PERANGKAT DAERAH
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RPKD 2023	SATUAN	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RPKD 2023	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>	2	7	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	80.03 %	80.03 %	%	<b>6.809.084.238</b>	<b>6.348.947.714</b>	<b>6.792.705.985</b>	
		2	07	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>71.280.000</b>	<b>71.280.000</b>	<b>71.280.000</b>	
		2	07	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	71.280.000	71.280.000	71.280.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.219.111.176</b>	<b>5.445.684.652</b>	<b>5.470.630.413</b>	
		2	07	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	Orang/bulan	5.219.111.176	5.445.684.652	5.470.630.413	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>700.000.000</b>	<b>713.290.000</b>	<b>885.975.000</b>	
		2	07	0	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	Paket	500.000.000	500.000.000	548.800.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																	Dan Menengah
		2	07	0	2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	Laporan	200.000.000	213.290.000	337.175.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		<b>2</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>703.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>119.627.510</b>	
		2	07	0	2.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	700.000.000	-	-	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	3.500.000	3.500.000	119.627.510	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		<b>2</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>115.193.062</b>	<b>115.193.062</b>	<b>245.193.062</b>	
		2	07	0	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	Unit	48.716.000	48.716.000	68.716.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	39.097.025	39.097.025	144.097.025	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	36 Unit	36 Unit	Unit	27.380.037	27.380.037	32.380.037	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	30 %	30 %	%	<b>643.811.800</b>	<b>643.811.800</b>	<b>2.093.811.800</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	07	03	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	40 orang	40 orang	150 orang	Orang	<b>621.802.000</b>	<b>621.802.000</b>	<b>2.071.802.000</b>	
		2	07	03	2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang	50 Orang	180 Orang	Orang	621.802.000	621.802.000	2.071.802.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	03	2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Prosentase LPKS yang berijin	Persentase LPKS yang berijin	20 %	20 %	20 %	%	<b>10.054.800</b>	<b>10.054.800</b>	<b>10.054.800</b>	
		2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 Lembaga	27 Lembaga	27 Lembaga	Lembaga	10.054.800	10.054.800	10.054.800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	03	2.05	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	Perusahaan	<b>11.955.000</b>	<b>11.955.000</b>	<b>11.955.000</b>	
		2	07	03	2.05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	11.955.000	11.955.000	11.955.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	7	4		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	15 %	15 %	%	<b>165.600.000</b>	<b>165.600.000</b>	<b>170.900.000</b>	
		2	07	04	2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	230 orang	230 orang	230 orang	Orang	<b>165.600.000</b>	<b>165.600.000</b>	<b>170.900.000</b>	
		2	07	04	2.03	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	99.091.575	99.091.575	102.931.575	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	04	2.03	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Orang	66.508.425	66.508.425	67.968.425	Dinas Tenaga Kerja,

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)								Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	7	5		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	16 %	16 %	%	<b>1.436.872.624</b>	<b>1.793.356.400</b>	<b>3.207.508.890</b>	
		2	07	0	2.	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 perusa haan	50 perusa haan	50 perusa haan	Perusaha a n	<b>9.050.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>9.050.000</b>	
		2	07	0	2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusa haan	15 Perusa haan	15 Perusa haan	Perusaha a n	3.462.000	3.462.000	3.462.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	5.588.000	5.588.000	5.588.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	07	0	2.	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	Persentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	75 %	75 %	%	<b>1.427.822.624</b>	<b>1.784.306.400</b>	<b>3.198.458.890</b>	
		2	07	0	2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	Perkara	35.460.000	35.460.000	35.460.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	07	0	2.0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5800 Orang	5800 Orang	10000 Orang	Orang	1.392.362.624	1.748.846.400	3.162.998.890	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
													<b>9.055.368.662</b>	<b>8.951.715.914</b>	<b>12.264.926.675</b>		
2	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	2	17	5		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	75 %	75 %	%	<b>444.620.000</b>	<b>460.790.000</b>	<b>460.790.000</b>	
		2	17	0	2.0	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	35 koperasi	35 koperasi	35 koperasi	Koperasi	<b>444.620.000</b>	<b>460.790.000</b>	<b>460.790.000</b>	
		2	17	0	2.0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	300 orang	300 orang	Orang	444.620.000	460.790.000	460.790.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	17	6		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	2.5 %	2.5 %	%	<b>59.995.000</b>	<b>180.804.100</b>	<b>180.804.100</b>	
		2	17	0	2.0	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	5 koperasi	5 koperasi	Koperasi	<b>59.995.000</b>	<b>180.804.100</b>	<b>180.804.100</b>	
		2	17	0	2.0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130 unit usaha	130 unit usaha	130 unit usaha	Unit Usaha	59.995.000	180.804.100	180.804.100	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		2	17	8		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7.33 %	7.33 %	7.33 %	%	<b>200.075.406</b>	<b>200.075.406</b>	<b>202.295.406</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	17	0	2.	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	11 orang	11 orang	11 orang	Orang	<b>200.075.406</b>	<b>200.075.406</b>	<b>202.295.406</b>	
		2	17	0	2.0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	Unit Usaha	200.075.406	200.075.406	202.295.406	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
														<b>704.690.406</b>	<b>841.669.506</b>	<b>843.889.506</b>	
3	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	3	31	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	5 %	5 %	%	<b>89.492.950</b>	<b>89.492.950</b>	<b>2.090.592.950</b>	
		3	31	0	2.0	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	20 IKM	20 IKM	20 IKM	IKM	<b>89.492.950</b>	<b>89.492.950</b>	<b>2.090.592.950</b>	
		3	31	0	2.0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	22.906.150	22.906.150	22.906.150	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		3	31	0	2.0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		3	31	0	2.0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	43.586.800	43.586.800	2.044.686.800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		3	31	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	12,83 %	12,83 %	12,83 %	%	<b>210.795.438</b>	<b>197.505.438</b>	<b>374.720.438</b>	
		3	31	0	2.0	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	40 IKM	40 IKM	40 IKM	IKM	<b>210.795.438</b>	<b>197.505.438</b>	<b>374.720.438</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		3	31	0	2	0	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2	2	2	Dokumen	210.795.438	197.505.438	374.720.438	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
																	<b>300.288.388</b>	<b>286.998.388</b>	<b>2.465.313.388</b>	
																	<b>10.060.347.456</b>	<b>10.080.383.808</b>	<b>15.574.129.569</b>	
2	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	3	25	4				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	285 Ton	285 Ton	Ton	<b>159.900.000</b>	<b>159.900.000</b>	<b>186.241.000</b>		
		3	25	0	2	0	4	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	250 RTP	250 RTP	250 RTP	Rtp	<b>159.900.000</b>	<b>159.900.000</b>	<b>186.241.000</b>		
		3	25	0	2	0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	20.000.000	20.000.000	18.691.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	0	2	0	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang	100 orang	100 Orang	Orang	139.900.000	139.900.000	167.550.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3	25	5				<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	89 Ton	89 Ton	Ton	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.510.000</b>		
		3	25	0	2	0	1	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan dan	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan	435 orang	435 orang	435 orang	Orang	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.510.000</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								aan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)								
		3	25	0	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	35.000.000	35.000.000	34.510.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	25	6		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Tingkat konsumsi makan ikan	16.1 Kg/ Kapita/ Tahun	16.1 Kg/ Kapita/ tahun	16.1 Kg/ Kapita/ tahun	Kg/Kapita /Tahun	<b>214.032.000</b>	<b>214.032.000</b>	<b>190.004.000</b>	
		3	25	0	2	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	50 orang	50 orang	Orang	<b>67.141.000</b>	<b>67.141.000</b>	<b>65.164.000</b>	
		3	25	0	2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	30 Unit usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Usaha	67.141.000	67.141.000	65.164.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	25	0	2	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 ton	26 ton	26 ton	Ton	<b>146.891.000</b>	<b>146.891.000</b>	<b>124.840.000</b>	
		3	25	0	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	12 pelaku usaha	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	Usaha	146.891.000	146.891.000	124.840.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	<b>BIDANG PERTANIAN</b>	3	27	2		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Efektivitas sarana pertanian	Efektivitas sarana pertanian	60 %	60 %	60 %	%	<b>408.932.000</b>	<b>408.932.000</b>	<b>410.755.000</b>	
														<b>2.000.624.000</b>	<b>2.038.647.500</b>	<b>2.269.957.000</b>	
		3	27	0	2	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %	75 %	75 %	%	<b>1.930.184.000</b>	<b>1.930.184.000</b>	<b>2.140.615.000</b>	
		3	27	0	2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	23.550.000	23.550.000	23.550.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	1.906.634.000	1.906.634.000	2.117.065.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	75 %	75 %	%	<b>70.440.000</b>	<b>108.463.500</b>	<b>129.342.000</b>	
		3	27	0	2	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	70.440.000	108.463.500	129.342.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	3		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	75 %	75 %	%	<b>233.727.000</b>	<b>233.727.000</b>	<b>439.684.000</b>	
		3	27	0	2	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	75 %	75 %	75 %	%	<b>16.138.000</b>	<b>16.138.000</b>	<b>14.954.000</b>	
		3	27	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	16.138.000	16.138.000	14.954.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	Persentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	25 %	25 %	25 %	%	<b>217.589.000</b>	<b>217.589.000</b>	<b>424.730.000</b>	
		3	27	0	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	52.815.000	52.815.000	52.815.000	Dinas Ketahanan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Direhabilitasi dan Dipelihara	Direhabilitasi dan Dipelihara								Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	8.009.000	8.009.000	7.215.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	156.765.000	156.765.000	364.700.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	4		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	10 %	10 %	%	<b>260.856.000</b>	<b>222.832.500</b>	<b>342.841.000</b>	
		3	27	0	2.0	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	80 %	80 %	%	<b>155.797.000</b>	<b>117.773.500</b>	<b>240.353.000</b>	
		3	27	0	2.0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Laporan	155.797.000	117.773.500	240.353.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	1 jenis	1 jenis	1 jenis	Jenis	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
		3	27	0	2.0	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	80 %	80 %	%	<b>90.059.000</b>	<b>90.059.000</b>	<b>87.488.000</b>	
		3	27	0	2.0	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Laporan	25.000.000	25.000.000	16.543.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Laporan	65.059.000	65.059.000	70.945.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Persentase lahan aman bencana pertanian	74 %	74 %	74 %	%	<b>112.370.000</b>	<b>112.370.000</b>	<b>167.855.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	27	0	2.	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Luas lahan aman bencana pertanian	Luas lahan aman bencana pertanian	1900 Ha/ Tahun	1900 Ha/ Tahun	1900 Ha/ Tahun	Ha/Tahun	<b>112.370.000</b>	<b>112.370.000</b>	<b>167.855.000</b>	
		3	27	0	2.0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50 Ha	50 Ha	Ha	112.370.000	112.370.000	167.855.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	6		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	12 %	12 %	12 %	%	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>	
		3	27	0	2.	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis	2 jenis	2 jenis	Jenis	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>	
		3	27	0	2.0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	33.600.000	33.600.000	33.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	20 %	20 %	%	<b>235.475.000</b>	<b>235.475.000</b>	<b>2.086.055.300</b>	
		3	27	0	2.	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah SDM Pertanian terlatih	Jumlah SDM Pertanian terlatih	200 orang	200 orang	200 orang	Orang	<b>235.475.000</b>	<b>235.475.000</b>	<b>2.086.055.300</b>	
		3	27	0	2.0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 kelompok	39 kelompok	39 kelompok	Kelompok	138.975.000	138.975.000	1.946.820.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	0	2.0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit usaha	2 Unit usaha	2 Unit usaha	Usaha	96.500.000	96.500.000	139.235.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
														<b>2.876.652.000</b>	<b>2.876.652.000</b>	<b>5.339.992.300</b>	
														<b>3.285.584.000</b>	<b>3.285.584.000</b>	<b>5.750.747.300</b>	
1	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	2	18	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	80.03 skor	80.03 skor	Skor	<b>5.486.263.847</b>	<b>5.211.004.047</b>	<b>5.500.905.047</b>	
		2	18	0	2.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>30.491.000</b>	<b>30.491.000</b>	<b>30.491.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								evaluasi perangkat daerah	pengendalian dan evaluasi perangkat daerah									
		2	18	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Dokumen	30.491.000	30.491.000	30.491.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>4.173.982.800</b>	<b>4.009.723.000</b>	<b>4.009.723.000</b>	
		2	18	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	Orang/Bulan	4.173.982.800	4.009.723.000	4.009.723.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>274.233.794</b>	<b>274.233.794</b>	<b>274.233.794</b>	
		2	18	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	Laporan	274.233.794	274.233.794	274.233.794	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		5 unit	12 unit	Unit		<b>58.700.000</b>	<b>58.700.000</b>	<b>58.700.000</b>	
		2	18	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	12 Unit	Unit	58.700.000	58.700.000	58.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>823.932.153</b>	<b>712.932.153</b>	<b>753.933.953</b>	
		2	18	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	Laporan	823.932.153	712.932.153	753.933.953	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan	Persentase tercukupinya pemenuhan	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>124.924.100</b>	<b>124.924.100</b>	<b>373.823.300</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah									
		2	18	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Unit	44.192.000	44.192.000	53.397.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	26.816.600	26.816.600	266.510.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	53.915.500	53.915.500	53.915.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>34.700.000</b>	<b>34.700.000</b>	<b>34.700.000</b>	
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	1 buah	1 buah	Buah	<b>34.700.000</b>	<b>34.700.000</b>	<b>34.700.000</b>	
		2	18	0	2	0	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	34.700.000	34.700.000	34.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase investor yang merealisasikan investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	32 persen	40 persen	40 persen	Persen	<b>308.848.200</b>	<b>308.848.200</b>	<b>308.848.200</b>	
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah investor baru	Jumlah investor baru	30 investor	30 investor	30 investor	Investor	<b>308.848.200</b>	<b>308.848.200</b>	<b>308.848.200</b>	
		2	18	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	308.848.200	308.848.200	308.848.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	Persentase Pelayanan	90 persen	90 persen	90 persen	Persen	<b>687.175.500</b>	<b>798.175.500</b>	<b>798.175.500</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Perizinan Terselesaikan									
		2	18	0	2.	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pemohon Izin	Jumlah Pemohon Izin	1700 izin	3000 izin	4000 izin	Izin	<b>687.175.500</b>	<b>798.175.500</b>	<b>798.175.500</b>	
		2	18	0	2.0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	227.314.000	227.314.000	227.314.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	0	2.0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	360 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	222.501.500	222.501.500	222.501.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	0	2.0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40 Orang	40 Orang	30 Orang	Orang	237.360.000	348.360.000	348.360.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	110 perusahaan	110 perusahaan	Perusahaan	<b>462.675.000</b>	<b>462.675.000</b>	<b>462.675.000</b>	
		2	18	0	2.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perusahaan yang dibina	Jumlah perusahaan yang dibina	250 perusahaan	320 perusahaan	320 perusahaan	Perusahaan	<b>462.675.000</b>	<b>462.675.000</b>	<b>462.675.000</b>	
		2	18	0	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	424.582.500	424.582.500	420.273.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Pelaksanaan Penanaman Modal							Terpadu Satu Pintu	
		2	18	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	Kegiatan Usaha	38.092.500	38.092.500	42.401.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	18	6		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>198.248.500</b>	<b>198.248.500</b>	<b>198.248.500</b>	
		2	18	0	2	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	105 jenis izin	105 jenis izin	52 jenis izin	Jenis Izin	<b>198.248.500</b>	<b>198.248.500</b>	<b>198.248.500</b>	
		2	18	0	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	198.248.500	198.248.500	198.248.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
														<b>7.177.911.047</b>	<b>7.013.651.247</b>	<b>7.303.552.247</b>	
2	<b>BIDANG TRANSMIGRASI</b>	3	32	3		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	40%	100 persen	100 persen	Persen	<b>39.101.000</b>	<b>39.101.000</b>	-	
		3	32	0	2	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Rang	<b>39.101.000</b>	<b>39.101.000</b>	-	
		3	32	0	2	Penyuluhan Transmigrasi	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	Kepala Keluarga	23.301.000	23.301.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3	32	0	2	Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Orang	15.800.000	15.800.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
														<b>39.101.000</b>	<b>39.101.000</b>	-	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													7.217.012.047	7.052.752.247	7.303.552.247		
2	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>	2	22	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	A skor	A skor	Skor	6.593.342.292	6.818.774.689	6.908.074.689	
		2	22	0	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
		2	22	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	4.142.500.000	4.400.232.397	4.400.232.397	
		2	22	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Orang/bulan	4.142.500.000	4.400.232.397	4.400.232.397	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	32.250.000	-	-	
		2	22	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	32.250.000	-	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		2	22	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	bulan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									dan Konsultasi SKPD							n dan Olah Raga	
		2	22	0	2.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>	
		2	22	0	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	17.800.000	17.800.000	17.800.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.975.792.292</b>	<b>1.975.742.292</b>	<b>2.065.042.292</b>	
		2	22	0	2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	1.975.792.292	1.975.742.292	2.065.042.292	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	
		2	22	0	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Gedung	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Gedung	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.209.100.000</b>	<b>1.709.100.000</b>	<b>1.907.100.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	22	0	2	0	2									
		2	22	0	2	0	2						1.209.100.000	1.709.100.000	1.907.100.000	
		2	22	0	2	0	1						939.100.000	1.439.100.000	1.637.100.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	2	0	3						270.000.000	270.000.000	270.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	3								50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2	22	0	3	0	1						50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2	22	0	3	0	1						50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	22	0	5								50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2	22	0	5	0	2						50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		2	22	0	5	0	2						50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
													7.902.442.292	8.627.874.689	8.915.174.689	
3	<b>BIDANG PARIWISATA</b>	3	26	0	2								317.660.866	317.660.866	437.660.866	
		3	26	0	2	0	3						317.660.866	317.660.866	437.660.866	
		3	26	0	2	0	3						50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									pariwisata yang dikembangkan								Kepemudaan dan Olah Raga
		3	26	0	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	Lokasi	267.660.866	267.660.866	387.660.866	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		3	26	0		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	50 %	50 %	50 %	%	<b>643.000.000</b>	<b>1.140.786.000</b>	<b>1.180.786.000</b>	
		3	26	0	2	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	4 Event	4 Event	4 Event	event	<b>643.000.000</b>	<b>1.140.786.000</b>	<b>1.180.786.000</b>	
		3	26	0	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	4 Event	4 Event	4 Event	event	643.000.000	1.140.786.000	1.180.786.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		3	26	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	19.5 %	19.5 %	%	<b>278.000.000</b>	<b>278.000.000</b>	<b>278.000.000</b>	
		3	26	0	2	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	19.5 %	19.5 %	%	<b>278.000.000</b>	<b>278.000.000</b>	<b>278.000.000</b>	
		3	26	0	2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	24 Orang	24 Orang	24 Orang	orang	278.000.000	278.000.000	278.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
														<b>1.238.660.866</b>	<b>1.736.446.866</b>	<b>1.896.446.866</b>	
														<b>9.141.103.158</b>	<b>10.364.321.555</b>	<b>10.811.621.555</b>	
1	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>	3	30	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	A skor	A skor	Skor	<b>11.074.865.806</b>	<b>10.923.676.428</b>	<b>10.916.553.086</b>	
		3	30	0	2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,	100 %	100 %	100 %	%	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								evaluasi perangkat daerah	pengendalian dan evaluasi perangkat daerah										
		3	30	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Dokumen	894	894	894	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>9.504.392.000</b>	<b>9.353.202.622</b>	<b>9.353.202.622</b>	
		3	30	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan	Orang/Bulan	9.504.392.000	9.353.202.622	9.353.202.622	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>61.544.700</b>	<b>61.544.700</b>	<b>61.544.700</b>	
		3	30	0	2	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	1 paket	Paket	61.544.700	61.544.700	61.544.700	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>276.443.200</b>	<b>276.443.200</b>	<b>291.443.200</b>	
		3	30	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	30 laporan	Laporan	276.443.200	276.443.200	291.443.200	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>64.168.000</b>	
		3	30	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	1 Unit	9 Unit	Unit	5.500.000	5.500.000	64.168.000	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>842.400.792</b>	<b>842.400.792</b>	<b>754.249.250</b>	
		3	30	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	Laporan	842.400.792	842.400.792	754.249.250	Dinas Perdagangan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3	30	0	2.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>383.691.114</b>	<b>383.691.114</b>	<b>391.051.314</b>	
		3	30	0	2. 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 unit	44 unit	44 unit	Unit	252.701.714	252.701.714	238.701.714	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2. 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	50.336.000	50.336.000	71.696.200	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2. 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	Unit	80.653.400	80.653.400	80.653.400	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	100 %	100 %	%	<b>164.204.400</b>	<b>264.204.400</b>	<b>267.374.400</b>	
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2. 0</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	%	<b>164.204.400</b>	<b>264.204.400</b>	<b>267.374.400</b>	
		3	30	0	2. 0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	Dokumen	164.204.400	264.204.400	267.374.400	Dinas Perdagangan
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.322.249.628</b>	<b>4.322.249.628</b>	<b>4.323.887.270</b>	
		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2. 0</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 pasar	17 pasar	17 pasar	Pasar	<b>713.682.428</b>	<b>713.682.428</b>	<b>811.300.070</b>	
		3	30	0	2. 0	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	3 unit	3 unit	Unit	11.046.000	11.046.000	11.046.000	Dinas Perdagangan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		3	30	0	2	0	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit	17 unit	17 unit	Unit	702.636.428	702.636.428	800.254.070	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.608.567.200</b>	<b>3.608.567.200</b>	<b>3.512.587.200</b>	
		3	30	0	2	0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	210.310.000	210.310.000	210.310.000	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Dokumen	3.398.257.200	3.398.257.200	3.302.277.200	Dinas Perdagangan
		3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	100 %	100 %	%	<b>254.657.000</b>	<b>254.657.000</b>	<b>250.257.000</b>	
		3	30	0	2	0	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	100 %	100 %	%	<b>236.664.000</b>	<b>236.664.000</b>	<b>232.264.000</b>	
		3	30	0	2	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Laporan	100.707.000	100.707.000	96.307.000	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Laporan	135.957.000	135.957.000	135.957.000	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Tersalurkannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	Persentase Tersalurkannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	100 %	100 %	%	<b>17.993.000</b>	<b>17.993.000</b>	<b>17.993.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		3	30	0	2	0	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Laporan	17.993.000	17.993.000	17.993.000	Dinas Perdagangan
		3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	100 %	100 %	%	<b>214.569.024</b>	<b>214.569.024</b>	<b>235.684.724</b>	
		3	30	0	2	0	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bulan	<b>214.569.024</b>	<b>214.569.024</b>	<b>235.684.724</b>	
		3	30	0	2	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 unit	7000 unit	7000 unit	Unit	205.301.024	205.301.024	226.416.724	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	150 Orang	150 Orang	Orang	9.268.000	9.268.000	9.268.000	Dinas Perdagangan
		3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	100 %	100 %	%	<b>309.031.550</b>	<b>309.031.550</b>	<b>309.031.550</b>	
		3	30	0	2	0	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	4 kali	4 kali	4 kali	Kali	<b>309.031.550</b>	<b>309.031.550</b>	<b>309.031.550</b>	
		3	30	0	2	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	4 UMKM	4 UMKM	Umkm	129.031.550	129.031.550	129.031.550	Dinas Perdagangan
		3	30	0	2	0	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Dinas Perdagangan
															<b>16.339.577.408</b>	<b>16.288.388.030</b>	<b>16.302.788.030</b>	
							<b>Pagu Anggaran Prioritas I : Peningkatan Inklusivitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital</b>						<b>46.043.624.069</b>	<b>47.071.429.640</b>	<b>55.742.838.701</b>			

**PRIORITAS II : Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia**

No.	URUSAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET				PAGU			PERANGKAT DAERAH
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SATUAN	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BIDANG PENDIDIKAN	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	185.583.777.393	186.170.596.913	184.781.839.693	
		1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100 %	100 %	%	4.927.900.000	4.927.900.000	8.307.433.400	
		1	01	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	4.927.900.000	4.927.900.000	8.307.433.400	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	1000 Mahasiswa	1000 Mahasiswa	1000 Mahasiswa	Mahasiswa				
		1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	%	175.699.025.000	176.285.844.520	171.254.487.000	
		1	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang/bulan	1549 Orang/bulan	1549 Orang/bulan	Orang/bulan	175.699.025.000	176.285.844.520	171.254.487.000	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100 %	100 %	%	4.179.152.000	4.179.152.000	4.259.975.000	
		1	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	37 Paket	Paket	3.898.202.000	3.898.202.000	3.696.172.000	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	148 Laporan	148 Laporan	Laporan	280.950.000	280.950.000	563.803.000	Dinas Pendidikan



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		1	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	%	<b>98.475.293</b>	<b>98.475.293</b>	<b>98.475.293</b>		
		1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan parasan Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 Unit	2 Unit	Unit	98.475.293	98.475.293	98.475.293	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	100%	100%	%	<b>679.225.100</b>	<b>679.225.100</b>	<b>861.469.000</b>		
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	216 Unit	216 Unit	216 Unit	Unit	147.242.800	147.242.800	196.923.000	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	382.278.000	382.278.000	489.065.000	Dinas Pendidikan
		1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	206 Unit	206 Unit	206 Unit	Unit	149.704.300	149.704.300	175.481.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100%	100%	100%	%	<b>57.557.373.126</b>	<b>74.899.647.426</b>	<b>71.679.084.535</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	%	<b>42.883.547.700</b>	<b>55.495.203.100</b>	<b>52.736.954.935</b>		
		1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	68 Ruang	68 Ruang	68 Ruang	Ruang	1.056.207.700	1.056.207.700	2.112.207.499	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4880 Unit	4880 Unit	4880 Unit	Unit	40.670.000.000	53.281.655.400	49.427.655.400	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 siswa	50 Siswa	50 Siswa	Siswa	449.340.000	449.340.000	550.112.336	Dinas Pendidikan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	73 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	708.000.000	708.000.000	646.979.700	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.481.564.426</b>	<b>9.034.893.326</b>	<b>8.529.559.562</b>	
		1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 unit	6 unit	6 unit	Unit	200.378.400	3.753.707.300	3.288.125.572	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	3.975.043.026	3.975.043.026	3.975.043.026	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	212.633.000	212.633.000	212.633.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	Peserta Didik	522.540.000	522.540.000	494.740.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	570.970.000	570.970.000	559.017.964	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	64 %	64 %	64 %	%	<b>8.528.461.000</b>	<b>9.378.121.000</b>	<b>9.421.140.038</b>	
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	Peserta Didik	343.425.000	343.425.000	386.444.038	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	Orang	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	1.011.796.000	1.011.796.000	1.011.796.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	163 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	3.573.240.000	4.422.900.000	4.422.900.000	Dinas Pendidikan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	01	02	2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>663.800.000</b>	<b>991.430.000</b>	<b>991.430.000</b>	
		1	01	02	2.04	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	Peserta Didik	178.000.000	178.000.000	178.000.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.04	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.04	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	400.800.000	728.430.000	728.430.000	Dinas Pendidikan
		1	1	3		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Persentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.256.616.906</b>	<b>4.806.662.625</b>	<b>4.807.339.116</b>	
		1	01	03	2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.963.725.003</b>	<b>3.549.770.722</b>	<b>3.550.447.213</b>	
		1	01	03	2.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1.657.533.530	1.549.355.530	1.550.038.223	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2.01	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1.338.312.674	1.112.636.393	1.112.630.191	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2.01	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	96 Orang	96 Orang	96 Orang	Orang	967.878.799	887.778.799	887.778.799	Dinas Pendidikan
		1	01	03	2.02	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.292.891.903</b>	<b>1.256.891.903</b>	<b>1.256.891.903</b>	
		1	01	03	2.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1.292.891.903	1.256.891.903	1.256.891.903	Dinas Pendidikan
		1	01	04		<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	65%	65 %	65 %	%	<b>1.609.200.000</b>	<b>1.609.200.000</b>	<b>1.609.200.000</b>	
		1	01	04	2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga</b>	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang	66 %	66 %	66 %	%	<b>1.609.200.000</b>	<b>1.609.200.000</b>	<b>1.609.200.000</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>213.127.000</b>	<b>213.127.000</b>	-		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>213.127.000</b>	<b>213.127.000</b>	-		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>213.127.000</b>	<b>213.127.000</b>	-		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	168.577.000	168.577.000	-	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	44.550.000	44.550.000	-	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>238.556.000</b>	<b>238.556.000</b>	<b>451.683.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>238.556.000</b>	<b>238.556.000</b>	<b>451.683.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>238.556.000</b>	<b>238.556.000</b>	<b>451.683.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	177.176.000	177.176.000	345.753.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	61.380.000	61.380.000	105.930.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>	<b>634.126.000</b>		



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						<b>WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>			
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>			
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>	<b>237.766.000</b>			
		1	01	02	2.0	1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	152.626.000	152.626.000	152.626.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	85.140.000	85.140.000	85.140.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>608.658.000</b>	<b>608.658.000</b>	<b>588.657.900</b>			
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>608.658.000</b>	<b>608.658.000</b>	<b>588.657.900</b>			
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>608.658.000</b>	<b>608.658.000</b>	<b>588.657.900</b>			
		1	01	02	2.0	1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	354.228.000	354.228.000	334.228.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	254.430.000	254.430.000	254.429.900	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>233.007.000</b>	<b>233.007.000</b>	<b>437.662.000</b>			
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>233.007.000</b>	<b>233.007.000</b>	<b>437.662.000</b>			

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>233.007.000</b>	<b>233.007.000</b>	<b>437.662.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	139.947.000	139.947.000	292.132.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	93.060.000	93.060.000	145.530.000	Dinas Pendidikan
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>204.655.000</b>	<b>204.655.000</b>			
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>204.655.000</b>	<b>204.655.000</b>		
		1	01	02	2.0	1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>204.655.000</b>	<b>204.655.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	152.185.000	152.185.000		Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	52.470.000	52.470.000		Dinas Pendidikan
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>		
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>	
		1	01	02	2.0	1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>	<b>228.732.000</b>	
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	158.442.000	158.442.000	158.442.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	70.290.000	70.290.000	70.290.000	Dinas Pendidikan



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Mengelola Dana BOS									
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	<b>405.962.000</b>	
		1	01	02	2.0	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	254.492.000	254.492.000	254.492.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	151.470.000	151.470.000	151.470.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>391.431.000</b>	<b>391.431.000</b>	<b>381.431.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>391.431.000</b>	<b>391.431.000</b>	<b>381.431.000</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>391.431.000</b>	<b>391.431.000</b>	<b>381.431.000</b>	
		1	01	02	2.0	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	236.001.000	236.001.000	226.001.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	155.430.000	155.430.000	155.430.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>214.117.000</b>	<b>214.117.000</b>	<b>189.945.500</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>214.117.000</b>	<b>214.117.000</b>	<b>189.945.500</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>214.117.000</b>	<b>214.117.000</b>	<b>189.945.500</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	186.397.000	186.397.000	162.225.500	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	27.720.000	27.720.000	27.720.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>631.589.000</b>	<b>631.589.000</b>	<b>559.845.800</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>631.589.000</b>	<b>631.589.000</b>	<b>559.845.800</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>631.589.000</b>	<b>631.589.000</b>	<b>559.845.800</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	419.729.000	419.729.000	347.985.800	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	211.860.000	211.860.000	211.860.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>363.725.500</b>	<b>363.725.500</b>	<b>315.725.500</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>363.725.500</b>	<b>363.725.500</b>	<b>315.725.500</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>363.725.500</b>	<b>363.725.500</b>	<b>315.725.500</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	208.295.500	208.295.500	160.295.500	Dinas Pendidikan



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>595.796.000</b>	<b>595.796.000</b>	<b>552.596.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>595.796.000</b>	<b>595.796.000</b>	<b>552.596.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>595.796.000</b>	<b>595.796.000</b>	<b>552.596.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	323.546.000	323.546.000	280.346.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	272.250.000	272.250.000	272.250.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>663.960.000</b>	<b>663.960.000</b>	<b>562.760.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>663.960.000</b>	<b>663.960.000</b>	<b>562.760.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>663.960.000</b>	<b>663.960.000</b>	<b>562.760.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	372.900.000	372.900.000	271.700.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	291.060.000	291.060.000	291.060.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	<b>330.088.000</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>	<b>951.662.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	436.862.000	436.862.000	436.862.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	514.800.000	514.800.000	514.800.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>559.431.000</b>	<b>559.431.000</b>	<b>541.511.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>559.431.000</b>	<b>559.431.000</b>	<b>541.511.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>559.431.000</b>	<b>559.431.000</b>	<b>541.511.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	248.571.000	248.571.000	238.571.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	310.860.000	310.860.000	302.940.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>	<b>793.034.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	333.674.000	333.674.000	333.674.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 1	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	459.360.000	459.360.000	459.360.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>346.199.000</b>	<b>346.199.000</b>	<b>606.836.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>346.199.000</b>	<b>346.199.000</b>	<b>606.836.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>346.199.000</b>	<b>346.199.000</b>	<b>606.836.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	226.409.000	226.409.000	402.896.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 1	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	119.790.000	119.790.000	203.940.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>260.637.000</b>	<b>260.637.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>260.637.000</b>	<b>260.637.000</b>		
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>260.637.000</b>	<b>260.637.000</b>		
		1	01	02	2.0 1	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	176.487.000	176.487.000		Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 1	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	84.150.000	84.150.000		Dinas Pendidikan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Mengelola Dana BOS										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>572.132.000</b>	<b>572.132.000</b>	<b>557.732.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>572.132.000</b>	<b>572.132.000</b>	<b>557.732.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>572.132.000</b>	<b>572.132.000</b>	<b>557.732.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	265.232.000	265.232.000	250.832.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	306.900.000	306.900.000	306.900.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>	<b>291.092.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	173.282.000	173.282.000	173.282.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	117.810.000	117.810.000	117.810.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>		



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>	<b>598.874.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	279.104.000	279.104.000	279.104.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	319.770.000	319.770.000	319.770.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	<b>229.810.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	176.350.000	176.350.000	176.350.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	53.460.000	53.460.000	53.460.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	<b>321.376.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	162.976.000	162.976.000	162.976.000	Dinas Pendidikan



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>629.272.000</b>	<b>629.272.000</b>	<b>786.986.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>629.272.000</b>	<b>629.272.000</b>	<b>786.986.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>629.272.000</b>	<b>629.272.000</b>	<b>786.986.000</b>	
		1	01	02	2.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	350.092.000	350.092.000	446.426.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	279.180.000	279.180.000	340.560.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	<b>359.745.000</b>	
		1	01	02	2.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	189.465.000	189.465.000	189.465.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	170.280.000	170.280.000	170.280.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	<b>862.871.000</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>610.026.000</b>	<b>610.026.000</b>	<b>607.828.500</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>610.026.000</b>	<b>610.026.000</b>	<b>607.828.500</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>610.026.000</b>	<b>610.026.000</b>	<b>607.828.500</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	284.316.000	284.316.000	284.316.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	325.710.000	325.710.000	323.512.500	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>677.090.000</b>	<b>677.090.000</b>	<b>667.090.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>677.090.000</b>	<b>677.090.000</b>	<b>667.090.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>677.090.000</b>	<b>677.090.000</b>	<b>667.090.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	360.290.000	360.290.000	350.290.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	316.800.000	316.800.000	316.800.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>660.879.000</b>	<b>660.879.000</b>	<b>640.879.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>660.879.000</b>	<b>660.879.000</b>	<b>640.879.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>660.879.000</b>	<b>660.879.000</b>	<b>640.879.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	264.879.000	264.879.000	244.879.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	396.000.000	396.000.000	396.000.000	Dinas Pendidikan
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>		
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>	<b>333.935.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	224.045.000	224.045.000	224.045.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	109.890.000	109.890.000	109.890.000	Dinas Pendidikan
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>942.348.000</b>	<b>942.348.000</b>	<b>889.288.000</b>		
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>942.348.000</b>	<b>942.348.000</b>	<b>889.288.000</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>942.348.000</b>	<b>942.348.000</b>	<b>889.288.000</b>		
		1	01	02	2.0	23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	444.378.000	444.378.000	405.178.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	497.970.000	497.970.000	484.110.000	Dinas Pendidikan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Mengelola Dana BOS									
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>647.421.000</b>	<b>647.421.000</b>	<b>602.766.600</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>647.421.000</b>	<b>647.421.000</b>	<b>602.766.600</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>647.421.000</b>	<b>647.421.000</b>	<b>602.766.600</b>	
		1	01	02	2.0	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	321.711.000	321.711.000	277.056.600	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	325.710.000	325.710.000	325.710.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	<b>542.898.000</b>	
		1	01	02	2.0	23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	238.968.000	238.968.000	238.968.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	303.930.000	303.930.000	303.930.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>355.797.000</b>	<b>355.797.000</b>	<b>332.397.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>355.797.000</b>	<b>355.797.000</b>	<b>332.397.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>355.797.000</b>	<b>355.797.000</b>	<b>332.397.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	188.487.000	188.487.000	165.087.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	167.310.000	167.310.000	167.310.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>433.565.000</b>	<b>433.565.000</b>	<b>409.565.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>433.565.000</b>	<b>433.565.000</b>	<b>409.565.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>433.565.000</b>	<b>433.565.000</b>	<b>409.565.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	247.445.000	247.445.000	223.445.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	186.120.000	186.120.000	186.120.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>248.073.000</b>	<b>248.073.000</b>	<b>273.073.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>248.073.000</b>	<b>248.073.000</b>	<b>273.073.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>248.073.000</b>	<b>248.073.000</b>	<b>273.073.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	126.303.000	126.303.000	151.303.000	Dinas Pendidikan





1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>445.141.000</b>	<b>445.141.000</b>	<b>387.341.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>445.141.000</b>	<b>445.141.000</b>	<b>387.341.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>445.141.000</b>	<b>445.141.000</b>	<b>387.341.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	270.901.000	270.901.000	213.101.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	174.240.000	174.240.000	174.240.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	<b>190.489.000</b>	
		1	01	02	2.0 23 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	116.239.000	116.239.000	116.239.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0 29 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	74.250.000	74.250.000	74.250.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>196.334.000</b>	<b>196.334.000</b>	<b>186.334.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>196.334.000</b>	<b>196.334.000</b>	<b>186.334.000</b>	
		1	01	02	2.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>196.334.000</b>	<b>196.334.000</b>	<b>186.334.000</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.571.424.800</b>	<b>1.571.424.800</b>	<b>1.556.016.800</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.571.424.800</b>	<b>1.571.424.800</b>	<b>1.556.016.800</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.571.424.800</b>	<b>1.571.424.800</b>	<b>1.556.016.800</b>		
		1	01	02	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	749 Peserta Didik	749 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	665.151.000	665.151.000	649.743.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	906.273.800	906.273.800	906.273.800	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.278.419.000</b>	<b>1.278.419.000</b>	<b>1.238.419.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.278.419.000</b>	<b>1.278.419.000</b>	<b>1.238.419.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.278.419.000</b>	<b>1.278.419.000</b>	<b>1.238.419.000</b>		
		1	01	02	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	556 Peserta Didik	556 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	606.869.000	606.869.000	566.869.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	671.550.000	671.550.000	671.550.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.677.195.000</b>	<b>1.677.195.000</b>	<b>1.543.932.000</b>		
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.677.195.000</b>	<b>1.677.195.000</b>	<b>1.543.932.000</b>		
		1	01	02	2.0	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.677.195.000</b>	<b>1.677.195.000</b>	<b>1.543.932.000</b>		



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.598.010.000</b>	<b>1.598.010.000</b>	<b>1.541.010.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.598.010.000</b>	<b>1.598.010.000</b>	<b>1.541.010.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.598.010.000</b>	<b>1.598.010.000</b>	<b>1.541.010.000</b>	
		1	01	02	2.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	722 Peserta Didik	722 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	724.390.000	724.390.000	667.390.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	873.620.000	873.620.000	873.620.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	<b>966.882.000</b>	
		1	01	02	2.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	526 Peserta Didik	526 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	324.372.000	324.372.000	324.372.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	642.510.000	642.510.000	642.510.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	<b>1.226.624.000</b>	
		1	01	02	2.023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	435 Peserta Didik	435 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	701.484.000	701.484.000	701.484.000	Dinas Pendidikan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		1	01	02	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	525.140.000	525.140.000	525.140.000	Dinas Pendidikan	
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>1.412.271.200</b>	<b>1.412.271.200</b>	<b>1.295.871.200</b>				
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.412.271.200</b>	<b>1.412.271.200</b>	<b>1.295.871.200</b>		
		1	01	02	2.0 1		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.412.271.200</b>	<b>1.412.271.200</b>	<b>1.295.871.200</b>		
		1	01	02	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	517 Peserta Didik	517 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	976.920.000	976.920.000	860.520.000	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	435.351.200	435.351.200	435.351.200	Dinas Pendidikan	
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>1.499.858.000</b>	<b>1.499.858.000</b>	<b>1.459.858.000</b>				
		1	1	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.499.858.000</b>	<b>1.499.858.000</b>	<b>1.459.858.000</b>		
		1	01	02	2.0 1		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.499.858.000</b>	<b>1.499.858.000</b>	<b>1.459.858.000</b>		
		1	01	02	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	650 Peserta Didik	650 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	712.148.000	712.148.000	672.148.000	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	787.710.000	787.710.000	787.710.000	Dinas Pendidikan	
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
							<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>				

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>	<b>1.084.801.000</b>	
		1	01	02	2.0231	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	581 Peserta Didik	581 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	378.161.000	378.161.000	378.161.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0291	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	706.640.000	706.640.000	706.640.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>1.379.647.000</b>	<b>1.379.647.000</b>	<b>1.281.042.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.379.647.000</b>	<b>1.379.647.000</b>	<b>1.281.042.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.379.647.000</b>	<b>1.379.647.000</b>	<b>1.281.042.000</b>	
		1	01	02	2.0231	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	692 Peserta Didik	692 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	539.907.000	539.907.000	441.302.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0291	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	839.740.000	839.740.000	839.740.000	Dinas Pendidikan
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	
		1	1	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Wajib Belajar 9 Tahun	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	100 %	100 %	%	<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	
		1	01	02	2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	100 %	100 %	%	<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	<b>842.557.000</b>	
		1	01	02	2.0231	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	324 Peserta Didik	324 Peserta Didik	Satuan Pendidikan	375.477.000	375.477.000	375.477.000	Dinas Pendidikan
		1	01	02	2.0291	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	467.080.000	467.080.000	467.080.000	Dinas Pendidikan



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							yang Mengelola Dana BOS	yang Mengelola Dana BOS									
													293.410.821.925	310.889.961.464	304.973.559.644		
1	BIDANG KESEHATAN	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	84.5 skor	84.5 skor	Skor	55.745.191.817	49.832.813.848	49.652.270.560	
		1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	79 dokumen	79 dokumen	79 dokumen	Dokumen	339.195.400	334.107.200	316.369.600	
								Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %	100 %	100 %	%				
		1	02	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Dokumen	88.079.900	182.785.300	172.825.700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	121.618.400	116.618.400	110.718.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Laporan	129.497.100	34.703.500	32.825.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	52.675.045.551	46.861.673.182	46.266.894.960	
		1	02	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang /bulan	313 Orang /bulan	313 Orang /bulan	Orang/bulan	52.675.045.551	46.861.673.182	46.266.894.960	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 paket	1 paket	1 paket	Paket	2.247.447.716	2.153.530.316	2.600.010.000	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Perengkapan Kantor yang Disediakan	Perengkapan Kantor yang Disediakan									
		1	02	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	1.784.227.716	1.690.310.316	1.848.790.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	Laporan	463.220.000	463.220.000	751.220.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.0	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 unit	80 unit	80 unit	Unit	<b>483.503.150</b>	<b>483.503.150</b>	<b>468.996.000</b>	
		1	02	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	80 Unit	80 Unit	Unit	346.771.300	346.771.300	321.706.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	10.311.400	10.311.400	24.663.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273 Unit	273 Unit	273 Unit	Unit	126.420.450	126.420.450	122.627.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	75 %	75 %	%	<b>39.157.720.997</b>	<b>38.400.838.202</b>	<b>47.744.142.351</b>	
		1	02	02	2.0	01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	<b>5.581.271.780</b>	<b>4.996.997.585</b>	<b>6.202.684.627</b>	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	162 unit	162 unit	162 unit	Unit					

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas										
								Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	89.13 %	89.13 %	89.13 %	%						
		1	02	02	2.0	09	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	246.629.080	246.629.080	246.629.080	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	14	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	778 Unit	778 Unit	778 Unit	Unit	1.976.438.000	1.569.394.000	2.136.931.017	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	15	1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	619 Unit	619 Unit	619 Unit	Unit	143.404.500	143.404.500	158.439.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	16	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	Paket	3.128.867.000	2.959.120.005	2.904.515.327	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	17	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			4 Paket	Paket	-	-	651.790.003	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	20	1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	162 Unit	162 Unit	162 Unit	Unit	85.933.200	78.450.000	104.380.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	2		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	75 %	75 %	%	<b>33.576.449.217</b>	<b>33.403.840.617</b>	<b>41.541.457.724</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	02	02	2.0	01 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2490 Oran g	2490 Oran g	2490 Oran g	Orang	891.908.100	891.784.900	883.311.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2377 Oran g	2377 Oran g	2377 Oran g	Orang	67.976.000	67.976.000	49.007.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	03 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2264 Oran g	2264 Oran g	2264 Oran g	Orang	110.303.450	107.507.450	84.232.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	04 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9218 Oran g	9218 Oran g	9218 Oran g	Orang	247.091.000	247.091.000	242.621.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	05 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31972 Ora ng	31972 Ora ng	31972 Ora ng	Orang	103.130.000	103.130.000	97.973.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	06 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115490 Or ang	115490 Or ang	114664 Or ang	Orang	119.184.408	112.786.408	56.621.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	07 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28597 Ora ng	28597 Ora ng	28597 Ora ng	Orang	69.678.100	69.678.100	50.753.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	08 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	68973 Ora ng	Orang	13.567.000	13.567.000	13.548.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	09 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	8143 Oran g	Orang	28.788.000	28.788.000	202.012.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	10 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	338 Orang	338 Orang	338 Orang	Orang	64.735.000	64.735.000	64.735.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						dengan Gangguan Jiwa Berat		Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	5076 Orang	Orang	52.894.750	52.894.750	53.440.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	5780 Orang	Orang	163.368.900	163.368.900	199.463.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	162.926.250	162.926.250	1.488.729.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	400.507.500	159.330.000	207.449.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Dokumen	109.035.700	92.281.400	115.042.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	115.061.000	115.061.000	112.452.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			339 Orang	Orang	-	-	36.348.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	338 Orang	338 Orang	338 Orang	Orang	60.032.200	58.204.200	55.294.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	276.645.000	276.645.000	475.514.250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	Dokumen	27.233.193.164	27.233.193.164	33.448.581.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Dokumen	324.124.800	324.124.800	324.109.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen	2.279.953.695	2.376.422.095	2.376.233.374	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	22.939.200	22.939.200	220.947.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	659.406.000	659.406.000	683.036.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	91 %	91 %	91 %	%	<b>198.360.350</b>	<b>198.360.350</b>	<b>893.645.000</b>	
		1	02	03	2.02		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						%	-	-	<b>42.419.000</b>	
		1	02	03	2.02		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			6 Dokumen	Dokumen	-	-	42.419.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	03	2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</b>	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	500 orang	500 orang	500 orang	Orang	<b>198.360.350</b>	<b>198.360.350</b>	<b>851.226.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya								
		1	02	03	2.0013	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500 Orang	500 Orang	500 Orang	Orang	198.360.350	198.360.350	851.226.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2	4		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	88 %	88 %	%	<b>96.205.700</b>	<b>96.205.700</b>	<b>91.395.000</b>	
		1	02	04	2.001	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	<b>61.684.700</b>	<b>61.684.700</b>	<b>58.600.000</b>	
		1	02	04	2.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	61.684.700	61.684.700	58.600.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	04	2.004	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Dokumen	<b>34.521.000</b>	<b>34.521.000</b>	<b>32.795.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		1	02	04	2.0 4	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	34.521.000	34.521.000	32.795.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %	62,5 %	62,5 %	%	<b>2.482.254.780</b>	<b>2.481.934.780</b>	<b>2.893.531.836</b>	
		1	02	05	2.0 1		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>355.011.920</b>	<b>355.011.920</b>	<b>543.972.036</b>	
		1	02	05	2.0 1	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	355.011.920	355.011.920	543.972.036	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	05	2.0 3		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Dokumen	<b>2.127.242.860</b>	<b>2.126.922.860</b>	<b>2.349.559.800</b>	
		1	02	05	2.0 3	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	2.127.242.860	2.126.922.860	2.349.559.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>144.980.339.134</b>	<b>153.731.374.284</b>	<b>142.319.797.025</b>	
		1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	<b>A skor</b>	<b>A skor</b>	<b>A skor</b>	<b>Skor</b>	<b>101.587.028.523</b>	<b>110.338.063.673</b>	<b>107.434.707.164</b>	



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	02	01	2.0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	%	23.808.447.460	32.559.482.610	29.935.117.601	
		1	02	01	2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	228 Orang /bulan	406 Orang /bulan	386 Orang /bulan	Orang/bulan	23.808.447.460	32.559.482.610	29.935.117.601	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 %	100 %	100 %	%	1.239.700.000	1.239.700.000	770.550.000	
		1	02	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Laporan	1.239.700.000	1.239.700.000	770.550.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	01	2.1 0	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	100 %	100 %	%	76.538.881.063	76.538.881.063	76.729.039.563	
		1	02	01	2.1 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	%	76.538.881.063	76.538.881.063	76.729.039.563	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	75 %	75 %	%	43.393.310.611	43.393.310.611	34.885.089.861	
		1	02	02	2.0 1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase indikator SPM kesehatan rujukan mencapai target	Persentase indikator SPM kesehatan rujukan mencapai target	89.13 %	89.13 %	89.13 %	%	43.393.310.611	43.393.310.611	34.885.089.861	
		1	02	02	2.0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	544.352.000	544.352.000	546.652.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0 1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 unit	1 unit	1 unit	Unit	34.502.467.000	31.605.718.500	22.862.791.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0 1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan	198 unit	180 unit	180 unit	Unit	1.933.520.134	1.933.520.134	1.934.320.134	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Fasilitas Pelayanan Kesehatan		kesehatan yang disediakan	kesehatan yang disediakan							Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	17 Unit	24 Unit	57 Unit	Unit	1.413.119.000	4.309.867.500	3.828.686.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	Paket	4.999.852.477	4.999.852.477	5.712.640.227	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>2.439.665.000</b>	<b>2.439.665.000</b>	<b>3.012.933.500</b>	
		1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %			%	<b>2.439.665.000</b>	<b>2.439.665.000</b>	<b>2.997.423.500</b>	
		1	02	02	2.01			<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>27.642.000</b>	
		1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			15 Unit	Unit			27.642.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	<b>2.439.665.000</b>	<b>2.439.665.000</b>	<b>2.969.781.500</b>	
		1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			435 Orang	Orang			26.032.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1873 Orang	Orang			3.750.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan			3591 Orang	Orang			6.300.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Kesehatan Sesuai Standar								Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4827 Orang	Orang			2.592.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			60 Orang	Orang			3.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			194 Orang	Orang			1.300.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			482 Orang	Orang			3.841.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	310.665.000	310.665.000	583.664.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	Dokumen			27.962.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	Dokumen			7.583.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	Dokumen			128.433.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	Dokumen			9.814.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			60 Orang	Orang			1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	Dokumen			54.438.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	Paket			416	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.919.000.000	1.919.000.000	2.108.353.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	Laporan			200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			29 Orang	Orang			1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			5 Orang	Orang			100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN</b>									<b>15.510.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							<b>MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										
		1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								15.510.000		
		1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	Dokumen		15.510.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							2.018.616.600	2.018.616.600	2.587.003.100	
		1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	%	2.018.616.600	2.018.616.600	2.544.769.100	
		1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						%		27.470.000		
		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			15 Unit	Unit		27.470.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	2.018.616.600	2.018.616.600	2.517.299.100
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Dokumen				
								Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %	75 %	75 %	%				
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan			298 Orang	Orang		30.425.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Kesehatan Sesuai Standar								Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0042		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1064 Orang	Orang	-	4.900.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0052		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7724 Orang	Orang	-	9.400.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0072		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3157 Orang	Orang	-	3.864.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0102		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			37 Orang	Orang	-	1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0112		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			140 Orang	Orang	-	1.750.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	342.402.000	342.402.000	614.653.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0162		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	Dokumen	-	15.140.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0172		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan			1 Dokumen	Dokumen	-	12.524.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Kesehatan Lingkungan								Keluarga Berencana		
		1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	Dokumen			127.180.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	Dokumen			2.650.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				37 Orang	Orang			100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	Dokumen			28.708.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				1 Paket	Paket			1.664	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.466.214.600	1.466.214.600	1.663.487.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	Laporan			250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				19 Orang	Orang			1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	42		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1 Orang	Orang			100	Dinas Kesehatan,	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								pelayanan kesehatan malaria								Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								42.234.000			
		1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								42.234.000			
		1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	Dokumen		42.234.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						2.313.990.000	2.313.990.000	2.936.166.500		
		1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %			%	2.313.990.000	2.313.990.000	2.821.754.500		
		1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								29.368.000			
		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			15 Unit	Unit		29.368.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	2.313.990.000	2.313.990.000	2.792.386.500	
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			410 Orang	Orang		22.668.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	02	02	2.006 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			20326 Orang	Orang	-	-	10.584.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.007 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3979 Orang	Orang	-	-	6.158.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.011 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			167 Orang	Orang	-	-	1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.012 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			508 Orang	Orang	-	-	1.100.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.013 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.015 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	469.350.000	469.350.000	739.242.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.016 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	Dokumen	-	-	600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.017 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	Dokumen	-	-	17.923.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.018 2		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			3 Dokumen	Dokumen	-	-	102.376.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	02	02	2.0	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	Dokumen	-	-	9.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	Dokumen	-	-	34.952.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	Paket	-	-	416	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.634.640.000	1.634.640.000	1.844.816.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	Laporan	-	-	250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			24 Orang	Orang	-	-	1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	Orang	-	-	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							-	-	114.412.000	
		1	02	05	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	114.412.000	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	02	05	2.0013		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	Dokumen	-	-	114.412.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1.991.095.000</b>	<b>1.991.095.000</b>	<b>2.642.669.500</b>	
		1	2	2		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %			%	<b>1.991.095.000</b>	<b>1.991.095.000</b>	<b>2.569.417.500</b>	
		1	02	02	2.001		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							-	-	<b>30.407.000</b>	
		1	02	02	2.001		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			18 Unit	Unit	-	-	30.407.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.002	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	<b>1.991.095.000</b>	<b>1.991.095.000</b>	<b>2.539.010.500</b>	
		1	02	02	2.002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			298 Orang	Orang	-	-	21.790.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1041 Orang	Orang	-	-	5.700.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2048 Orang	Orang	-	-	3.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan			3266 Orang	Orang	-	-	7.440.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								Penduduk dan Keluarga Berencana		
		1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				39 Orang	Orang			1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				108 Orang	Orang			1.350.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				342 Orang	Orang			500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	249.475.000	249.475.000	570.850.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	Dokumen			7.249.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	Dokumen			21.519.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			3 Dokumen	Dokumen			101.388.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan			2 Dokumen	Dokumen			7.453.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Surveilans Kesehatan								Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penerima NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			39 Orang	Orang			2.400.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	Dokumen			41.752.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	Paket			416	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.531.620.000	1.531.620.000	1.744.300.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	Laporan			200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			13 Orang	Orang			400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.02		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	Orang			100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								<b>73.252.000</b>		
		1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber</b>								<b>73.252.000</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							<b>Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											
		1	02	05	2.0	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	Dokumen			73.252.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>2.982.959.000</b>	<b>2.982.959.000</b>	<b>3.659.477.000</b>		
		1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %		%		<b>2.982.959.000</b>	<b>2.982.959.000</b>	<b>3.596.287.100</b>		
		1	02	02	2.0	1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>31.286.000</b>		
		1	02	02	2.0	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			15 Unit	Unit			31.286.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	<b>2.982.959.000</b>	<b>2.982.959.000</b>	<b>3.565.001.100</b>	
		1	02	02	2.0	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			522 Orang	Orang			38.950.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7605 Orang	Orang			6.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			25525 Orang	Orang			4.650.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	02	02	2.0	07 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7924 Orang	Orang	-	-	1.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	10 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			76 Orang	Orang	-	-	1.500.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	11 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			162 Orang	Orang	-	-	2.250.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	13 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	15 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	672.959.000	672.959.000	1.028.370.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	16 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	Dokumen	-	-	32.966.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	17 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	Dokumen	-	-	9.793.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	18 2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			3 Dokumen	Dokumen	-	-	66.538.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	20 2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	Dokumen	-	-	3.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	02	02	2.0	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	Dokumen	-	-	46.970.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Paket	Paket	-	-	4.992	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	2.100.000.000	2.100.000.000	2.320.312.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	Laporan	-	-	1.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Orang	Orang	-	-	500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	42		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		1 Orang	Orang	-	-	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	2	5				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								<b>63.189.900</b>		
		1	02	05	2.0	3		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>63.189.900</b>		
		1	02	05	2.0	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		1 Dokumen	Dokumen	-	-	63.189.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
		1	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							2.662.500.000	2.662.500.000	3.269.335.000	
		1	2	2		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %		%		2.662.500.000	2.662.500.000	3.234.501.000	
		1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							-	-	28.827.000	
		1	02	02	2.01		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			15 Unit	Unit	-	-	28.827.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	2.662.500.000	2.662.500.000	3.205.674.000	
		1	02	02	2.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			487 Orang	Orang	-	-	24.370.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2110 Orang	Orang	-	-	11.350.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7754 Orang	Orang	-	-	6.600.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7423 Orang	Orang	-	-	5.332.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan			73 Orang	Orang	-	-	1.500.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Jiwa Berat Sesuai Standar								Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			216 Orang	Orang	-	3.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			582 Orang	Orang	-	11.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	210.000.000	210.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	536.250.000	536.250.000	849.704.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.0	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	Dokumen	-	39.135.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	Dokumen	-	8.063.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	Dokumen	-	85.471.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	Dokumen	-	9.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	Dokumen	-	35.464.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																Keluarga Berencana	
		1	02	02	2.028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	Paket			416	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.916.250.000	1.916.250.000	2.113.717.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	Laporan			500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20 Orang	Orang			750	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	02	02	2.042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			1 Orang	Orang			100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									<b>34.834.000</b>	
		1	02	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>34.834.000</b>	
		1	02	05	2.001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	Dokumen			34.834.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
														<b>257.068.898.378</b>	<b>259.150.352.764</b>	<b>261.702.366.372</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	2	14	2		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Meningkatnya Jumlah SSK	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	8 SSK	8 SSK	SSK	<b>439.867.720</b>	<b>439.867.720</b>	<b>704.621.300</b>	
								Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung g KB	5 Kampung g KB	5 Kampung g KB	%				
		2	14	02	2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Dokumen	<b>98.183.000</b>	<b>98.183.000</b>	<b>93.263.600</b>	
		2	14	02	2.0071	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen	98.183.000	98.183.000	93.263.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	27 Kelurahan	27 Kelurahan	27 Kelurahan	Kelurahan	<b>341.684.720</b>	<b>341.684.720</b>	<b>611.357.700</b>	
		2	14	02	2.0092		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			12 Laporan	Laporan	-	-	296.715.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	Laporan	289.169.720	289.169.720	314.642.700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	02	2.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	Dokumen	52.515.000	52.515.000	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	3		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	7.5 %	7.5 %	%	<b>1.922.669.452</b>	<b>1.922.669.452</b>	<b>2.674.264.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	14	03	2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	Organisasi	<b>601.248.212</b>	<b>601.248.212</b>	<b>533.450.000</b>	
		2	14	03	2.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	Organisasi	5.450.900	5.450.900	120.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.01	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	256.957.200	256.957.200	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.01	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 unit	4 unit	4 unit	Unit	41.216.200	41.216.200	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.01	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	75.000.000	75.000.000	150.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.01	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	46.800.000	46.800.000	39.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0071	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	Laporan	135.823.912	135.823.912	144.450.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0081	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	40.000.000	40.000.000	80.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.002	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 unit	3 unit	3 unit	Unit	748.155.200	748.155.200	58.000.000	
		2	14	03	2.0012		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			7 Organisasi	Organisasi	-	-	4.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	740.654.000	740.654.000	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0042	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	150 Orang	150 Orang	Orang	7.501.200	7.501.200	54.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2	14	03	2.0 3	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	Laporan	<b>452.516.040</b>	<b>452.516.040</b>	<b>1.965.314.000</b>		
		2	14	03	2.0 3	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	Laporan	16.200.000	16.200.000	13.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0 3	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	651 Orang	651 Orang	651 Orang	Orang	391.017.040	391.017.040	781.632.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0 3	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	31.499.000	31.499.000	1.158.982.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0 3	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan	13.800.000	13.800.000	11.700.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	03	2.0 4		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Dokumen	<b>120.750.000</b>	<b>120.750.000</b>	<b>117.500.000</b>	
		2	14	03	2.0 4	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			1 Dokumen	Dokumen	-	-	9.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	14	03	2.0034	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	Kampung	120.750.000	120.750.000	108.500.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	82 %	82 %	%	<b>909.868.900</b>	<b>909.868.900</b>	<b>1.788.450.000</b>	
		2	14	04	2.001	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang	240 Orang	240 Orang	Orang	<b>909.868.900</b>	<b>909.868.900</b>	<b>1.788.450.000</b>	
		2	14	04	2.0021		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			20 Unit	Unit	-	-	361.200.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2.0041	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang	240 Orang	210 Orang	Orang	199.354.400	199.354.400	172.563.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	14	04	2.0051	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	225 Orang	225 Orang	225 Orang	Orang	421.740.000	421.740.000	973.800.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
		2	14	04	2.0071	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	Laporan	288.774.500	288.774.500	280.886.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
														3.272.406.072	3.272.406.072	5.167.335.300	
														260.341.304.450	262.422.758.836	266.869.701.672	
	<b>BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	1	05	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.10 Indeks	80.10 Indeks	80.10 Indeks	Indeks	10.273.754.000	12.533.569.000	13.585.582.494	
		1	05	01	2.001	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	163.974.000	163.974.000	163.974.000	
		1	05	01	2.0061	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	163.974.000	163.974.000	163.974.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.002	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	54 Orang	54 Orang	Orang	6.038.083.000	7.958.848.000	7.858.848.000	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	05	01	2.0012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	Orang/bulan	6.038.083.000	7.958.848.000	7.858.848.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	<b>684.175.000</b>	<b>684.175.000</b>	<b>684.175.000</b>	
		1	05	01	2.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	684.175.000	684.175.000	684.175.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Laporan	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
		1	05	01	2.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Laporan	150.000.000	150.000.000	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.007	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	<b>359.871.500</b>	<b>698.921.500</b>	<b>982.361.500</b>	
		1	05	01	2.007	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	160.950.000	200.000.000	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.007	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	195.850.000	495.850.000	735.850.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	3.071.500	3.071.500	46.511.500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.008	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	<b>2.124.753.500</b>	<b>2.124.753.500</b>	<b>2.647.446.994</b>	
		1	05	01	2.008	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	2.124.753.500	2.124.753.500	2.647.446.994	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	<b>752.897.000</b>	<b>752.897.000</b>	<b>948.777.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	05	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Unit	489.677.000	489.677.000	443.057.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.0099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	183.500.000	183.500.000	401.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	01	2.0099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	68 Unit	68 Unit	Unit	79.720.000	79.720.000	104.720.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	97 %	97 %	%	11.113.091.000	11.113.091.000	11.032.938.311	
		1	05	02	2.0011	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78 Orang	78 Orang	78 Orang	Orang	8.566.566.000	8.566.566.000	7.981.051.762	
		1	05	02	2.0011	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40 Kasus	40 Kasus	40 Kasus	Kasus	1.525.526.000	1.525.526.000	1.313.413.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02	2.0011	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	275 Kasus	275 Kasus	275 Kasus	Kasus	812.347.000	812.347.000	720.060.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
		1	05	02	2.0031	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Dokumen	152.772.000	152.772.000	152.772.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02	2.0041	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	5.763.046.000	5.763.046.000	5.481.931.762	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02	2.0051	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang	78 Orang	78 Orang	Orang	312.875.000	312.875.000	312.875.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02	2.002	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dapat ditangani sesuai SOP	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	<b>2.442.006.000</b>	<b>2.442.006.000</b>	<b>3.040.808.549</b>	
		1	05	02	2.002	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	2.096.102.000	2.096.102.000	2.392.746.805	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	02	2.0032	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	345.904.000	345.904.000	648.061.744	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	05	02	2.0 3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	Dapat Ditangani Sesuai SOP Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	%	104.519.000	104.519.000	11.078.000	
		1	05	02	2.0 3	01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	104.519.000	104.519.000	11.078.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	04		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	100 %	%	1.091.528.000	1.091.528.000	1.123.228.000	
		1	05	04	2.0 1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	%	1.074.428.000	1.074.428.000	1.064.655.000	
		1	05	04	2.0 1	01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	686.635.000	686.635.000	699.128.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	04	2.0 1	02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	387.793.000	387.793.000	365.527.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	05	04	2.0 2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	90 %	90 %	%	17.100.000	17.100.000	58.573.000	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	05	04	2.012	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	17.100.000	17.100.000	58.573.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
														22.478.373.000	24.738.188.000	25.741.748.805	
	<b>BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	1	5	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	81.5 Skor	81.5 Skor	Skor	2.386.841.000	2.348.141.000	2.364.418.000	
		1	05	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		1	05	01	2.061	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	1.823.700.000	1.785.000.000	1.682.835.000	
		1	05	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	Orang/bulan	1.823.700.000	1.785.000.000	1.682.835.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	70.000.000	70.000.000	120.000.000	
		1	05	01	2.096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Laporan	70.000.000	70.000.000	120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		1	05	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>13.320.000</b>	<b>13.320.000</b>	<b>12.375.000</b>		
		1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	13.320.000	13.320.000	12.375.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>321.693.000</b>	<b>321.693.000</b>	<b>374.576.000</b>		
		1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	321.693.000	321.693.000	374.576.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>155.878.000</b>	<b>155.878.000</b>	<b>172.382.000</b>		
		1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Unit	138.283.000	138.283.000	148.787.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	17.595.000	17.595.000	23.595.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.412.859.000</b>	<b>1.412.859.000</b>	<b>1.396.582.000</b>	
		1	05	03	2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	%	<b>112.354.000</b>	<b>112.354.000</b>	<b>61.133.000</b>		
		1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	50.000.000	50.000.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	05	03	2.0021	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Orang	62.354.000	62.354.000	61.133.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0022	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.144.390.000</b>	<b>1.144.390.000</b>	<b>1.182.035.000</b>	
		1	05	03	2.0021	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0022	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Orang	87.155.000	87.155.000	85.633.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0024	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	19.040.000	19.040.000	16.636.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0026	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	Kawasan	50.650.000	50.650.000	47.613.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0028	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang	37 Orang	37 Orang	Orang	888.600.000	888.600.000	888.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.0029		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen			50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1	05	03	2.00210	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Orang	48.945.000	48.945.000	43.553.000	Badan Penanggulangan



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	05	03	2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 %	100 %	100 %	%	<b>106.115.000</b>	<b>106.115.000</b>	<b>103.064.000</b>	an Bencana Daerah
		1	05	03	2.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Orang	80.475.000	80.475.000	80.475.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Orang	25.640.000	25.640.000	22.589.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	05	03	2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %	%	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.350.000</b>	
		1	05	03	2.04	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.350.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
														<b>3.799.700.000</b>	<b>3.761.000.000</b>	<b>3.761.000.000</b>	
<b>BIDANG SOSIAL</b>	1	6	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	A nilai	A nilai	Nilai	<b>8.942.179.640</b>	<b>8.776.155.897</b>	<b>8.757.157.718</b>	
		1	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>360.658.619</b>	<b>215.220.700</b>	<b>206.776.700</b>	
		1	06	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	128.694.300	128.694.300	124.237.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																Perlindungan Anak	
		1	06	01	2.0061	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Laporan	170.122.119	24.684.200	21.227.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.0071	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	61.842.200	61.842.200	61.311.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.002	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>6.211.496.463</b>	<b>6.357.465.639</b>	<b>6.070.479.302</b>	
		1	06	01	2.0012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	Orang/Bulan	6.088.945.055	6.234.914.489	5.937.424.352	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.0072	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	Laporan	122.551.408	122.551.150	133.054.950	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>131.073.000</b>	<b>128.023.000</b>	<b>128.023.000</b>	
		1	06	01	2.0095	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	59 Orang	59 Orang	Orang	104.586.000	101.536.000	101.536.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.00510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Orang	26.487.000	26.487.000	26.487.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	06	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>325.541.000</b>	<b>325.541.000</b>	<b>325.541.000</b>	
		1	06	01	2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	142 laporan	142 laporan	142 laporan	Laporan	325.541.000	325.541.000	325.541.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>164.386.500</b>	<b>9.515</b>	<b>293.311.158</b>	
		1	06	01	2.0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	19 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	161.175.000	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.0702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2.260.000	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	Unit	9.515	9.515	293.311.158	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>1.289.866.263</b>	<b>1.289.796.263</b>	<b>1.273.868.763</b>	
		1	06	01	2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Laporan	915.466.263	915.396.263	875.168.763	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	374.400.000	374.400.000	398.700.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>459.157.795</b>	<b>459.157.795</b>	<b>459.157.795</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	06	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	25 unit	25 unit	Unit	215.702.000	215.702.000	215.702.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	152.421.075	152.421.075	152.421.075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	110 unit	110 unit	110 unit	Unit	91.034.720	91.034.720	91.034.720	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	6	2		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	58 persen	58 persen	Persen	<b>3.589.656.050</b>	<b>3.589.655.950</b>	<b>3.868.748.450</b>	
		1	06	02	2.003	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase PSKS yang dibina	Persentase PSKS yang dibina	58 persen	58 persen	58 persen	Persen	<b>3.589.656.050</b>	<b>3.589.655.950</b>	<b>3.868.748.450</b>	
		1	06	02	2.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	214 Orang	214 Orang	Orang	396.044.900	396.044.900	692.969.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	3 Orang	Orang	65.647.800	65.647.800	60.155.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	Keluarga	210.899.700	210.899.600	199.425.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	02	2.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	Lembaga	2.917.063.650	2.917.063.650	2.916.197.650	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	6	4		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>1.635.853.661</b>	<b>3.014.561.181</b>	<b>3.011.758.543</b>	
		1	06	04	2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>1.088.072.181</b>	<b>2.466.779.701</b>	<b>2.466.492.063</b>	
		1	06	04	2.001	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165 orang	165 Orang	165 Orang	Orang	204.084.000	204.084.000	166.548.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.002	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 Orang	60 Orang	Orang	25.768.681	25.768.681	52.967.043	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	13 Orang	13 Orang	Orang	35.457.200	35.457.200	35.457.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	12 Orang	12 Orang	Orang	42.300.000	42.300.000	42.300.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	62 orang	62 Orang	62 Orang	Orang	10.100.000	10.100.000	10.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	270 orang	270 Orang	270 Orang	Orang	666.392.900	1.900.292.820	1.978.852.820	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
		1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 Orang	60 Orang	Orang	103.969.400	248.777.000	180.267.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>547.781.480</b>	<b>547.781.480</b>	<b>545.266.480</b>	
		1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 Orang	25 Orang	Orang	191.360.500	191.360.500	191.360.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	250 Orang	250 Orang	Orang	95.736.800	95.736.800	95.736.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 Orang	50 Orang	Orang	20.250.900	20.250.900	20.250.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 Orang	20 Orang	Orang	10.789.900	10.789.900	10.774.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 Orang	100 Orang	Orang	26.051.380	26.051.380	26.051.380	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	135 orang	150 Orang	150 Orang	Orang	71.700.000	71.700.000	69.200.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								Perlindungan Anak		
		1	06	04	2.0 2	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75 Orang	75 Orang	Orang	117.792.000	117.792.000	117.792.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	04	2.0 2	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	18 Orang	18 Orang	Orang	14.100.000	14.100.000	14.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66%	99,66 %	99,66 %	%	<b>10.466.050.900</b>	<b>10.465.947.950</b>	<b>11.248.468.350</b>	
		1	06	05	2.0 1		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 persen	95 persen	95 persen	Persen	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>4.270.000</b>	
		1	06	05	2.0 1	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	Orang	3.960.000	3.960.000	1.660.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2.0 1	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	8 Orang	Orang	4.488.000	4.488.000	2.410.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2.0 1	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	8 Orang	Orang	220	220	200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2.0 2		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>10.457.382.900</b>	<b>10.457.279.950</b>	<b>11.244.198.350</b>	
		1	06	05	2.0 2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	24685 Orang	24685 Orang	Orang	919.803.700	919.800.400	917.583.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2.0 2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	4000 Keluarga	4000 Keluarga	Keluarga	606.105.400	606.005.750	452.052.550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																Perlindungan Anak	
		1	06	05	2.0032	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	4000 keluarga	4000 keluarga	4000 keluarga	Keluarga	8.903.928.800	8.903.928.800	9.847.017.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	05	2.0042	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	56 Orang	56 Orang	Orang	27.545.000	27.545.000	27.545.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	6	6		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>657.016.400</b>	<b>657.016.300</b>	<b>657.016.300</b>	
		1	06	06	2.0011	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>78.209.900</b>	<b>78.209.900</b>	<b>78.209.900</b>	
		1	06	06	2.0011	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Orang	39.282.600	39.282.600	39.282.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2.0021	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Orang	15.177.300	15.177.300	15.177.300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2.0051	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	Orang	23.750.000	23.750.000	23.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2.0022	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan</b>	Persentase Kelurahan yang mendapatkan	Persentase Kelurahan yang	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>578.806.500</b>	<b>578.806.400</b>	<b>578.806.400</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana									
		1	06	06	2.0 2	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	Kampung	135.615.200	135.615.200	135.615.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	06	06	2.0 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Orang	443.191.300	443.191.200	443.191.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>182.250.680</b>	<b>182.250.086</b>	<b>182.250.086</b>	
		1	06	07	2.0 1		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>182.250.680</b>	<b>182.250.086</b>	<b>182.250.086</b>	
		1	06	07	2.0 1	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	966 Makam	966 Makam	Makam	182.250.680	182.250.086	182.250.086	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															<b>25.473.007.331</b>	<b>26.685.587.364</b>	<b>27.725.399.447</b>	
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	2	8	2			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>764.802.900</b>	<b>1.326.947.850</b>	<b>1.319.598.350</b>	
		2	08	02	2.0 1		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase program yang di ARG	Persentase program yang di ARG	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>144.341.900</b>	<b>144.341.900</b>	<b>136.992.400</b>	
		2	08	02	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	Dokumen	78.234.400	78.234.400	72.834.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Kewenangan Kabupaten/Kota	Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota									
		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	Dokumen	23.242.500	23.242.500	23.043.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	Daerah	30.217.000	30.217.000	30.217.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	Daerah	12.648.000	12.648.000	10.898.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20 persen	20 persen	20 persen	persen	<b>34.946.000</b>	<b>34.946.000</b>	<b>34.946.000</b>	
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Dokumen	34.946.000	34.946.000	34.946.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Kewenangan Kabupaten/Kota										
		2	08	02	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>585.515.000</b>	<b>1.147.659.950</b>	<b>1.147.659.950</b>	
		2	08	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	580 Orang	580 Orang	Orang	562.735.000	1.124.879.950	1.124.879.950	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	02	2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	22.780.000	22.780.000	22.780.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	8	3		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>240.371.000</b>	<b>240.370.350</b>	<b>240.370.350</b>	
		2	08	03	2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	98 persen	98 persen	98 persen	persen	<b>68.287.000</b>	<b>68.286.980</b>	<b>68.286.980</b>	
		2	08	03	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	36.391.000	36.390.980	36.390.980	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Daerah	31.896.000	31.896.000	31.896.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	08	03	2.0 2	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	85 persen	85 persen	85 persen	persen	<b>155.907.000</b>	<b>155.906.600</b>	<b>155.906.600</b>	
		2	08	03	2.0 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	Layanan	155.907.000	155.906.600	155.906.600	Dinas Sosial, Pernerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2.0 3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>16.177.000</b>	<b>16.176.770</b>	<b>16.176.770</b>	
		2	08	03	2.0 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Orang	7.518.000	7.518.000	7.518.000	Dinas Sosial, Pernerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	03	2.0 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	8.659.000	8.658.770	8.658.770	Dinas Sosial, Pernerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	8	4		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	20 persen	20 persen	persen	<b>314.350.300</b>	<b>314.350.300</b>	<b>295.700.300</b>	
		2	08	04	2.0 1	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	85 persen	85 persen	85 persen	persen	<b>264.579.300</b>	<b>264.579.300</b>	<b>246.779.300</b>	
		2	08	04	2.0 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	Daerah	83.769.300	83.769.300	82.969.300	Dinas Sosial, Pernerdayaan Perempuan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							dan Perlindungan Anak	
		2	08	04	2.0021	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	180.810.000	180.810.000	163.810.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	04	2.0022	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>49.771.000</b>	<b>49.771.000</b>	<b>48.921.000</b>	
		2	08	04	2.0022	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	257 Orang	257 Orang	257 Orang	Orang	49.771.000	49.771.000	48.921.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	8	5		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	<b>156.292.900</b>	<b>150.961.900</b>	<b>108.891.900</b>	
		2	08	05	2.0011	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>156.292.900</b>	<b>150.961.900</b>	<b>108.891.900</b>	
		2	08	05	2.0011	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	62.698.900	57.367.900	45.649.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	05	2.0021	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	93.594.000	93.594.000	63.242.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota								dan Perlindungan Anak	
		2	8	6		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	22,43 persen	22,43 persen	persen	<b>264.556.000</b>	<b>264.553.110</b>	<b>264.553.110</b>	
		2	08	06	2.01	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	22 persen	22 persen	22 persen	persen	<b>43.238.000</b>	<b>43.237.900</b>	<b>43.237.900</b>	
		2	08	06	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	43.238.000	43.237.900	43.237.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	22 persen	22 persen	22 persen	persen	<b>221.318.000</b>	<b>221.315.210</b>	<b>221.315.210</b>	
		2	08	06	2.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Orang	22.584.000	22.583.900	22.583.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	84.179.000	84.178.800	84.178.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	76.214.000	76.211.600	76.211.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	06	2.02	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	38.341.000	38.340.910	38.340.910	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Perlindungan Anak	
		2	8	7		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	0,04 persen	0,04 persen	persen	<b>82.818.000</b>	<b>82.817.640</b>	<b>82.817.640</b>	
		2	08	07	2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak		40.74 persen	40.74 persen	persen		<b>26.312.000</b>	<b>26.311.810</b>	<b>26.311.810</b>	
		2	08	07	2.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	26.312.000	26.311.810	26.311.810	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	07	2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>34.150.000</b>	<b>34.149.900</b>	<b>34.149.900</b>	
		2	08	07	2.0022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	Layanan	5.750.000	5.750.000	5.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	07	2.0042	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	28.400.000	28.399.900	28.399.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	08	07	2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>22.356.000</b>	<b>22.355.930</b>	<b>22.355.930</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		2	08	07	2.0 3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	22.356.000	22.355.930	22.355.930	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															1.823.191.100	2.380.001.150	2.311.931.650	
															27.296.198.431	29.065.588.514	30.037.331.097	
	<b>BIDANG PANGAN</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	A skor	A skor	Skor	<b>6.302.859.900</b>	<b>6.459.399.000</b>	<b>6.837.267.500</b>	
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100 %	100 %	100 %	%	<b>102.025.000</b>	<b>102.025.000</b>	<b>113.649.000</b>	
		2	09	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Dokumen	102.025.000	102.025.000	113.649.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.975.918.000</b>	<b>5.132.457.000</b>	<b>5.132.457.000</b>	
		2	09	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/bulan	27 orang/bulan	27 orang/bulan	Orang/Bulan	4.975.918.000	5.132.457.000	5.132.457.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prosentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>44.298.500</b>	<b>44.298.500</b>	<b>16.078.000</b>	
		2	09	01	2.0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	44.298.500	44.298.500	16.078.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan	100 %	100 %	100 %	%	<b>883.667.400</b>	<b>877.580.500</b>	<b>1.185.741.600</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								dokumen administrasi umum									
		2	09	01	2.0026	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 paket	19 paket	19 paket	Paket	627.605.500	621.518.600	771.140.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.0086	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	18.541.900	18.541.900	23.476.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.0096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	237.520.000	237.520.000	391.125.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.007</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.434.000</b>	<b>5.434.000</b>	<b>78.880.300</b>	
		2	09	01	2.0107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	5.434.000	5.434.000	78.880.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.009</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>291.517.000</b>	<b>297.604.000</b>	<b>310.461.600</b>	
		2	09	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	Unit	75.397.000	75.397.000	88.254.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 Unit	15 Unit	Unit	9.497.500	15.584.500	15.584.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	Unit/Tahun	171.952.000	171.952.000	171.952.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	01	2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	122 unit	122 unit	122 unit	Unit	34.670.500	34.670.500	34.670.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		2	9	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Persentase Angka Kecukupan Energi	100 %	100 %	100 %	%	<b>289.962.000</b>	<b>1.399.720.000</b>	<b>512.371.500</b>	
		2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	Persentase ketersediaan pangan utama	100 %	100 %	100 %	%	<b>166.457.000</b>	<b>1.276.215.000</b>	<b>360.320.500</b>	
		2	09	03	2.001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	16.713.500	16.713.500	12.662.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	03	2.002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	117.252.000	1.227.010.000	317.889.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	03	2.004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Dokumen	32.491.500	32.491.500	29.769.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	03	2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Angka Kecukupan Energi / AKE	Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal/kapita	2100 kkal/kapita	2100 kkal/kapita	Kkal/Kapita	<b>123.505.000</b>	<b>123.505.000</b>	<b>152.051.000</b>	
		2	09	03	2.004	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	24.855.000	24.855.000	23.553.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	03	2.004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Laporan	98.650.000	98.650.000	128.498.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	9	4		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Persentase daerah rentan dan rawan pangan	25 %	25 %	25 %	%	<b>43.842.500</b>	<b>43.842.500</b>	<b>39.730.000</b>	
		2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>43.842.500</b>	<b>43.842.500</b>	<b>39.730.000</b>	
		2	09	04	2.001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	43.842.500	43.842.500	39.730.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	9	5		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Persentase pangan segar aman yang teruji	80 %	80 %	80 %	%	<b>86.182.500</b>	<b>86.182.500</b>	<b>78.393.500</b>	
		2	09	05	2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	Lokasi	<b>86.182.500</b>	<b>86.182.500</b>	<b>78.393.500</b>	
		2	09	05	2.001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	25.139.500	25.139.500	23.538.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	05	2.005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	61.043.000	61.043.000	54.855.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
														<b>6.722.846.900</b>	<b>7.989.144.000</b>	<b>7.467.762.500</b>	
	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	2	19	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	15 %	10 %	10 %	%	<b>475.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	
		2	19	02	2.001	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	2 Event	2 Event	2 Event	event	<b>475.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	
		2	19	02	2.008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Orang	475.000.000	475.000.000	475.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	19	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	25 %	25 %	%	<b>4.191.546.361</b>	<b>6.091.546.361</b>	<b>7.493.389.861</b>	
		2	19	03	2.001	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 Sarpras Olahraga	3 Sarpras Olahraga	3 Sarpras Olahraga	Sarpras Olahraga	<b>2.115.546.361</b>	<b>3.015.546.361</b>	<b>3.015.546.361</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	19	03	2.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarana prasarana	3 sarana prasarana	3 sarana prasarana	Sarana Prasarana	2.115.546.361	3.015.546.361	3.015.546.361	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	19	03	2.002	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	3 Event	3 Event	event	460.000.000	1.460.000.000	1.658.000.000	
		2	19	03	2.0022	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	3 Event	3 Event	event	460.000.000	1.460.000.000	1.658.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	19	03	2.004	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 Cabang Olahraga	10 Cabang Olahraga	10 Cabang Olahraga	Cabang Olahraga	1.000.000.000	1.000.000.000	2.203.843.500	
		2	19	03	2.0024	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	Organisasi	1.000.000.000	1.000.000.000	2.203.843.500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		2	19	03	2.005	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga	3 Festival Olahraga	3 Festival Olahraga	Festival Olahraga	616.000.000	616.000.000	616.000.000	
		2	19	03	2.0015	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga	3 Festival Olahraga	3 Festival Olahraga	Festival Olahraga	616.000.000	616.000.000	616.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
													4.666.546.361	6.566.546.361	7.968.389.861		
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	2	23	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	82 skor	82 skor	Skor	4.832.923.152	5.044.940.670	5.097.514.767	
		2	23	01	2.001	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	58.118.820	58.118.820	42.418.000	
		2	23	01	2.0011	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Dokumen	58.118.820	58.118.820	42.418.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.002	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	3.766.524.636	4.027.382.154	4.040.291.218	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2	23	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	3.766.524.636	4.027.382.154	4.040.291.218	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>88.407.000</b>	<b>88.407.000</b>	<b>152.954.000</b>	
		2	23	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	100 %	%	88.407.000	88.407.000	152.954.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>61.050.000</b>	<b>12.210.000</b>	<b>12.210.000</b>	
		2	23	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan	100%	100 %	100 %	%	48.840.000	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 Unit	2 Unit	Unit	12.210.000	12.210.000	12.210.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>655.822.696</b>	<b>655.822.696</b>	<b>608.950.000</b>	
		2	23	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	%	655.822.696	655.822.696	608.950.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>203.000.000</b>	<b>203.000.000</b>	<b>240.691.549</b>	
		2	23	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	58.000.000	58.000.000	82.903.780	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		2	23	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	80.000.000	80.000.000	94.378.940	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	65.000.000	65.000.000	63.408.829	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	6 %	6 %	%	<b>1.040.301.770</b>	<b>1.040.301.770</b>	<b>1.015.899.000</b>	
		2	23	02	2.0	1	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.6 %	4.6 %	4.6 %	%	<b>349.200.000</b>	<b>349.200.000</b>	<b>357.840.000</b>	
		2	23	02	2.0	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	74 layanan	74 layanan	74 layanan	Layanan	282.400.000	282.400.000	291.040.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	02	2.0	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2400 eksemplar	2400 eksemplar	2400 eksemplar	Eksemplar	66.800.000	66.800.000	66.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	02	2.0	2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	20 kali	20 kali	Kali	<b>691.101.770</b>	<b>691.101.770</b>	<b>658.059.000</b>	
		2	23	02	2.0	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2600 lokus	2600 lokus	2600 lokus	Lokus	591.101.770	591.101.770	558.059.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	02	2.0	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	Perpustakaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	03			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	37 %	37 %	%	<b>205.737.656</b>	<b>205.737.656</b>	<b>128.037.656</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	23	03	2.01	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	178 eksemplar	178 eksemplar	Eksemplar	<b>205.737.656</b>	<b>205.737.656</b>	<b>128.037.656</b>	
		2	23	03	2.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	2 orang	2 orang	2 orang	Orang	106.849.718	106.849.718	106.849.718	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	23	03	2.01	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	Eksemplar	98.887.938	98.887.938	21.187.938	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
													<b>6.078.962.578</b>	<b>6.290.980.096</b>	<b>6.241.451.423</b>		
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	80.50 Nilai	80.50 Nilai	Nilai	<b>5.093.015.274</b>	<b>5.112.047.604</b>	<b>5.116.447.604</b>	
	<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>57.837.000</b>	<b>57.837.000</b>	<b>57.837.000</b>		
	8	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Dokumen	12.837.000	12.837.000	12.837.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	<b>8</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.861.088.819</b>	<b>4.053.271.149</b>	<b>4.053.271.149</b>		
	8	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	Orang/bulan	3.861.088.819	4.053.271.149	4.053.271.149	Badan Kesatuan	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																Bangsa dan Politik		
		8	01	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	%	<b>62.815.812</b>	<b>62.815.812</b>	<b>62.815.812</b>		
		8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	30 orang	30 orang	30 orang	orang	62.815.812	62.815.812	62.815.812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>793.150.940</b>	<b>793.150.940</b>	<b>776.810.940</b>		
		8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	paket	593.150.940	593.150.940	576.810.940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	80 laporan	80 laporan	laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>243.122.703</b>	<b>69.972.703</b>	<b>69.972.703</b>		
		8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 unit	7 unit	7 unit	unit	173.150.000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	69.972.703	69.972.703	69.972.703	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	100 %	100 %	100 %	%	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>95.740.000</b>		
		8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	30.000.000	30.000.000	50.740.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		8	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	14 unit	14 unit	unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	1	2			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	100 %	%	<b>314.049.297</b>	<b>314.049.297</b>	<b>314.049.297</b>	
		8	01	02	2.0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah jenis kegiatan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	jenis	<b>314.049.297</b>	<b>314.049.297</b>	<b>314.049.297</b>	
		8	01	02	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125 Orang	125 Orang	125 Orang	Orang	314.049.297	314.049.297	314.049.297	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	03			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.900.062.030</b>	<b>1.400.062.030</b>	<b>12.000.062.030</b>	
		8	01	03	2.0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.900.062.030</b>	<b>1.400.062.030</b>	<b>12.000.062.030</b>	
		8	01	03	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang	33 orang	33 orang	33 orang	orang	980.581.030	980.581.030	980.581.030	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah									
		8	01	03	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	125 orang	125 orang	125 orang	orang	34.353.000	34.353.000	34.353.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	03	2.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	laporan	885.128.000	385.128.000	10.985.128.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	68 %	68 %	68 %	%	<b>185.337.000</b>	<b>185.337.000</b>	<b>185.337.000</b>	
		8	01	04	2.0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	75 %	75 %	75 %	%	<b>185.337.000</b>	<b>185.337.000</b>	<b>185.337.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		8	01	04	2.0 03 1	<b>Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	75 orang	75 orang	75 orang	orang	185.337.000	185.337.000	185.337.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	1	5		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	%	<b>593.661.370</b>	<b>671.581.250</b>	<b>671.581.250</b>	
		8	01	05	2.0 1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah koordinasi	Jumlah koordinasi	3 kali	3 kali	3 kali	kali	<b>593.661.370</b>	<b>671.581.250</b>	<b>671.581.250</b>	
		8	01	05	2.0 03 1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	100 orang	orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	05	2.0 04 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	400 Orang	400 Orang	Orang	533.661.370	611.581.250	611.581.250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		8	1	6		<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase konflik yang terfasilitasi	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	%	1.711.599.350	1.711.599.350	1.711.599.350	
		8	01	06	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah konflik	Jumlah konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	konflik	1.711.599.350	1.711.599.350	1.711.599.350	
		8	01	06	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	100 orang	100 orang	100 orang	orang	1.335.350.000	1.335.350.000	1.335.350.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	01	06	2.01	06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	dokumen	376.249.350	376.249.350	376.249.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
													<b>9.797.724.321</b>	<b>9.394.676.531</b>	<b>19.999.076.531</b>		
<b>Pagu Anggaran Prioritas II : Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia</b>													<b>634.592.477.966</b>	<b>661.118.843.802</b>	<b>673.060.021.533</b>		
													<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		

**PRIORITAS III : Peningatan Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi**

No.	URUSAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET				PAGU			PERANGKAT DAERAH		
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN AN RKPD 2023	SATUAN	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
1	<b>BIDANG ADMINISTRASI</b>	2	12	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	5.555.385.727	6.066.239.303	6.309.474.457	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	22.242.000	3.305.000	79.650.000	
		2	12	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	20 laporan	20 laporan	laporan	9.892.000	2.290.000	2.290.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	12.350.000	1.015.000	77.360.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	4.240.561.310	4.820.281.080	4.406.803.400	
		2	12	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	Orang/Bulan	4.161.881.310	4.741.601.080	4.328.123.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Dokumen	78.680.000	78.680.000	78.680.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	29.810.000	11.500.000	32.541.500	
		2	12	01	2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 orang	30 orang	30 orang	Orang	29.810.000	11.500.000	11.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	12	01	2.0	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			49 orang	Orang	-	-	21.041.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>377.154.202</b>	<b>379.071.423</b>	<b>621.050.465</b>	
		2	12	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Paket	224.694.116	224.694.116	389.242.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Paket	19.103.116	20.982.621	36.357.375	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Paket	23.356.970	23.529.686	25.088.510	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40 laporan	12 laporan	Laporan	110.000.000	109.865.000	170.361.880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>7</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			100 %	%	-	-	<b>240.665.951</b>	
		2	12	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			10 unit			-	-	240.665.951	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>695.374.912</b>	<b>666.468.200</b>	<b>660.037.110</b>	
		2	12	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	695.374.912	666.468.200	660.037.110	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan	100 %	100 %	100 %		<b>190.243.303</b>	<b>185.613.600</b>	<b>268.726.031</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		2	12	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	25 unit	20 unit	unit	23.000.000	23.000.000	25.406.367	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	3 unit	unit	18.552.040	18.552.040	21.552.040	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	2 unit	Unit	14.985.000	14.985.000	27.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	31.329.560	34.929.560	44.705.105	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	149 unit	149 unit	75 unit	unit	102.376.703	94.147.000	150.062.519	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97%	97 %	97 %	%	<b>264.677.400</b>	<b>208.753.240</b>	<b>187.143.864</b>	
		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	96 %	96 %	96 %	%	<b>164.677.400</b>	<b>132.133.800</b>	<b>122.853.104</b>	
		2	12	02	2.0	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	90.000.000	90.000.000	85.822.640	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	02	2.0	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	dokumen	74.677.400	42.133.800	37.030.464	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	12	02	2.0 3	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	96 %	96 %	96 %	%	<b>100.000.000</b>	<b>76.619.440</b>	<b>64.290.760</b>	
		2	12	02	2.0 3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	100.000.000	76.619.440	64.290.760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	3		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,50%	94 %	94 %	%	<b>160.842.000</b>	<b>168.702.000</b>	<b>172.282.982</b>	
		2	12	03	2.0 1	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	91 %	91 %	91 %	%	<b>160.842.000</b>	<b>168.702.000</b>	<b>172.282.982</b>	
		2	12	03	2.0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	dokumen	65.438.000	44.888.000	87.596.380	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	03	2.0 1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	Layanan	95.404.000	123.814.000	84.686.602	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Akurasi database kependudukan	Akurasi database kependudukan	99,46 %	99,46 %	99,46 %	%	<b>275.471.650</b>	<b>225.949.651</b>	<b>215.242.891</b>	
		2	12	04	2.0 1	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Persentase update data penduduk	Persentase update data penduduk	83 %	83 %	83 %	83 %	<b>74.706.000</b>	<b>74.706.000</b>	<b>69.029.960</b>	
		2	12	04	2.0 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Dokumen	35.100.000	35.100.000	33.695.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2.0 1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	Dokumen	39.606.000	39.606.000	35.334.360	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	12	04	2.0 3	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	100 %	%	<b>200.765.650</b>	<b>151.243.651</b>	<b>146.212.931</b>	
		2	12	04	2.0 3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait	Jumlah laporan hasil sosialisasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Laporan	200.765.650	151.243.651	146.212.931	Dinas Kependudukan



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	pengelolaan informasi administrasi kependudukan	terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan								kan dan Pencatatan Sipil	
													6.256.376.777	6.669.644.194	6.884.144.194		
1	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	2	16	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	7.099.855.190	7.325.300.337	7.361.300.337	
		2	16	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
		2	16	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	5.155.263.990	5.380.709.137	5.380.709.137	
		2	16	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	37 orang	33 orang	orang	5.155.263.990	5.380.709.137	5.380.709.137	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	200.000.000	200.000.000	220.753.200	
		2	16	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	Laporan	200.000.000	200.000.000	220.753.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %	%	2.500.000	2.500.000	18.000.000	
		2	16	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Jumlah unit sarana dan prasarana	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2.500.000	2.500.000	18.000.000	Dinas Komunikasi

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan								dan Informatika
		2	16	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.076.641.200</b>	<b>1.076.641.200</b>	<b>1.098.858.000</b>	
		2	16	01	2.038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1.076.641.200	1.076.641.200	1.098.858.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>465.450.000</b>	<b>465.450.000</b>	<b>442.980.000</b>	
		2	16	01	2.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	Unit	157.650.000	157.650.000	170.608.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	125.000.000	125.000.000	92.592.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	01	2.099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Unit	182.800.000	182.800.000	179.780.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	80 %	80 %	%	<b>3.019.065.320</b>	<b>3.019.065.320</b>	<b>3.236.765.320</b>	
		2	16	02	2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.019.065.320</b>	<b>3.019.065.320</b>	<b>3.236.765.320</b>	
		2	16	02	2.011	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	1.555.562.323	1.555.562.323	1.555.562.323	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		2	16	02	2.0	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	973.923.328	973.923.328	1.173.923.328	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	02	2.0	06	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	232.964.450	232.964.450	250.664.450	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	02	2.0	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	135.415.219	135.415.219	135.415.219	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	02	2.0	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	121.200.000	121.200.000	121.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	100 %	%	<b>8.802.706.560</b>	<b>19.138.006.560</b>	<b>19.138.006.560</b>	
		2	16	03	2.0	1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD pengguna domain.id	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.858.900.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
		2	16	03	2.0	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	82 unit	82 unit	3000 unit	unit	4.758.900.000	14.900.000.000	14.900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	2	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.943.806.560</b>	<b>4.138.006.560</b>	<b>4.138.006.560</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2	16	03	2.0	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	2.776.480.000	2.776.480.000	2.776.480.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	273.700.000	273.700.000	273.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	3 unit	3 unit	unit	502.848.000	502.848.000	475.942.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	2 layanan	2 layanan	layanan	180.778.560	180.778.560	180.778.560	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	50.000.000	50.000.000	76.906.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.0	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	125.000.000	319.200.000	319.200.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
															<b>18.921.627.070</b>	<b>29.482.372.217</b>	<b>29.736.072.217</b>	
	<b>BIDANG 2 STATISTIK</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	
		<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	1 survey	1 survey	survey	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	
		2	20	02	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Dinas Komunikasi

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								dan Informatika	
													125.000.000	125.000.000	125.000.000		
3	BIDANG PERSANDIAN	2	21	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	100 %	100 %	%	292.872.000	292.872.000	292.872.000	
		2	21	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	2 JKS	2 JKS	JKS	292.872.000	292.872.000	292.872.000	
		2	21	02	2.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	41.752.000	41.752.000	41.752.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	21	02	2.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	Daerah	251.120.000	251.120.000	251.120.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
													292.872.000	292.872.000	292.872.000		
													19.339.499.070	29.900.244.217	30.153.944.217		
2	BIDANG KEARSIPAN	2	24	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	88 skor	88 skor	Skor	656.180.000	656.180.000	705.708.673	
		2	24	02	2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	100 %	100 %	%	345.182.000	345.182.000	363.150.000	
		2	24	02	2.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	58000 berkas	58000 berkas	58000 berkas	Berkas	345.182.000	345.182.000	363.150.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	24	02	2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	100 %	100 %	%	310.998.000	310.998.000	342.558.673	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2	24	02	2.0 2	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	260 arsip	260 arsip	260 arsip	Arsip	310.998.000	310.998.000	342.558.673	Perpustakaan dan Kearsipan
		2	24	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	8,6 skor	8,6 skor	Skor	<b>162.762.100</b>	<b>162.762.100</b>	<b>162.762.100</b>	
		2	24	03	2.0 1		<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	100 %	100 %	%	<b>162.762.100</b>	<b>162.762.100</b>	<b>162.762.100</b>	
		2	24	03	2.0 1	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 arsip	1000 arsip	1000 arsip	Arsip	81.211.400	81.211.400	81.211.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	24	03	2.0 1	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 berkas	1000 berkas	1000 berkas	Berkas	81.550.700	81.550.700	81.550.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
															<b>818.942.100</b>	<b>818.942.100</b>	<b>868.470.773</b>	
							<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>											
1	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Implementasi Sakip Setda	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	A skor	A skor	A skor	Skor	<b>1.253.696.000</b>	<b>1.311.410.000</b>	<b>1.315.810.000</b>	
		4	01	01	2.0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	
		4	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		4	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>840.696.000</b>	<b>898.410.000</b>	<b>898.410.000</b>		
		4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	Orang/Bulan	840.696.000	898.410.000	898.410.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>		
		4	01	01	2.09	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemda	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>214.400.000</b>		
		4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	210.000.000	210.000.000	214.400.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>		
		4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	17 Unit	Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Sekretariat Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4	1	2		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.794.948.600</b>	<b>1.969.948.600</b>	<b>1.969.948.600</b>	
		4	01	02	2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.449.948.600</b>	<b>1.624.948.600</b>	<b>1.624.948.600</b>	
		4	01	02	2.011	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	1.214.948.600	1.214.948.600	1.214.948.600	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2.013	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen	235.000.000	410.000.000	410.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2.04	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	%	<b>345.000.000</b>	<b>345.000.000</b>	<b>345.000.000</b>	
		4	01	02	2.041	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Dokumen	345.000.000	345.000.000	345.000.000	Sekretariat Daerah
						<b>BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2.566.413.284</b>	<b>2.583.812.858</b>	<b>2.609.566.924</b>	
		4	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	80,01	80.01 Skor	80.01 Skor	Skor	<b>2.566.413.284</b>	<b>2.583.812.858</b>	<b>2.609.566.924</b>	
		4	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	%	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
		4	01	01	2.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>798.134.736</b>	<b>815.534.310</b>	<b>815.534.310</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	Orang/Bulan	798.134.736	815.534.310	815.534.310	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.15 Indeks	83.15 Indeks	83.15 Indeks	Indeks	<b>167.326.280</b>	<b>167.326.280</b>	<b>186.112.700</b>	
		4	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	167.326.280	167.326.280	186.112.700	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	%	<b>2.767.050</b>	<b>2.767.050</b>	<b>26.267.344</b>	
		4	01	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2.767.050	2.767.050	26.267.344	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	%	<b>167.577.108</b>	<b>167.577.108</b>	<b>158.263.760</b>	
		4	01	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	167.577.108	167.577.108	158.263.760	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%	%	<b>33.873.000</b>	<b>33.873.000</b>	<b>43.113.700</b>	
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	18.963.000	18.963.000	30.423.700	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	21 Unit	Unit	12.410.000	12.410.000	10.190.000	Sekretariat Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4	01	01	2.1 3	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Tingkat Kematangan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.4 skor	28.4 skor	28.4 skor	Skor	<b>1.381.735.110</b>	<b>1.381.735.110</b>	<b>1.365.275.110</b>			
		4	01	01	2.1 3	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	339.871.000	339.871.000	337.871.000	Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2.1 3	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	662.366.630	662.366.630	647.906.630	Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2.1 3	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	379.497.480	379.497.480	379.497.480	Sekretariat Daerah	
							<b>BAGIAN HUKUM</b>												
							<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2.509.504.644</b>	<b>2.614.920.284</b>	<b>2.622.120.284</b>		
		4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	30.05 Skor	30.05 Skor	30.05 Skor	Skor	<b>1.831.850.384</b>	<b>1.274.266.024</b>	<b>1.709.746.109</b>		
		4	01	01	2.0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	%	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
		4	01	01	2.0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	100 %	100 %	%	<b>1.438.916.360</b>	<b>864.232.000</b>	<b>864.232.000</b>		
		4	01	01	2.0 2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/ Bulan	10 Orang/ Bulan	10 Orang/ Bulan	Orang/Bulan	1.438.916.360	864.232.000	864.232.000	Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83,15 Indeks	83.15 Indeks	83.15 Indeks	Indeks	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>214.042.509</b>		
		4	01	01	2.0 9		2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	100.000.000	100.000.000	214.042.509	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	Persentase Pemenuhan Barang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>247.881.926</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		4	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	4 Unit	Unit	-	-	94.905.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	7.500.000	7.500.000	152.976.926	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	100 %	%	<b>242.386.424</b>	<b>259.486.424</b>	<b>334.604.548</b>	
		4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	242.386.424	259.486.424	334.604.548	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	100 %	100 %	%	<b>42.047.600</b>	<b>42.047.600</b>	<b>47.985.126</b>	
		4	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	20.547.600	20.547.600	26.485.126	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		40 Unit	40 Unit	Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	100 %	%	<b>677.654.260</b>	<b>1.340.654.260</b>	<b>912.374.175</b>	
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Pesentase Produk Hukum yang disusun	Pesentase Produk Hukum yang disusun	100 %	100 %	100 %	%	<b>677.654.260</b>	<b>1.340.654.260</b>	<b>912.374.175</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4	01	02	2.0	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Dokumen	266.750.000	929.750.000	390.500.000	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2.0	02	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	25 Kasus	25 Kasus	25 Kasus	Kasus	226.275.880	226.275.880	228.661.660	Sekretariat Daerah
		4	01	02	2.0	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	Dokumen	184.628.380	184.628.380	293.212.515	Sekretariat Daerah
							<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>											
							<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>3.102.597.567</b>	<b>3.250.665.337</b>	<b>3.250.665.337</b>	
		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	A skor	A Skor	A Skor	Skor	<b>2.795.731.667</b>	<b>2.943.799.437</b>	<b>2.945.822.210</b>	
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>14.358.960</b>	<b>14.358.960</b>	<b>14.358.960</b>	
		4	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	14.358.960	14.358.960	14.358.960	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.596.391.040</b>	<b>1.744.458.810</b>	<b>1.663.571.476</b>	
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.596.391.040	1.744.458.810	1.663.571.476	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>98.194.000</b>	<b>98.194.000</b>	<b>236.432.000</b>	
		4	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	98.194.000	98.194.000	236.432.000	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4	01	01	2.0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	dan Konsultasi SKPD Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	42.917.633	42.917.633	49.577.600	
		4	01	01	2.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	42.917.633	42.917.633	49.577.600	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	297.748.799	297.748.799	293.072.974	
		4	01	01	2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	297.748.799	297.748.799	293.072.974	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	746.121.235	746.121.235	688.809.200	
		4	01	01	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Unit	19.321.000	19.321.000	22.290.200	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	707.641.235	707.641.235	647.360.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	40 Unit	Unit	19.159.000	19.159.000	19.159.000	Sekretariat Daerah
		4	1	3		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	100 %	%	306.865.900	306.865.900	304.843.127	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4	01	03	2.0 2	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100 %	100 %	100 %	%	<b>107.511.660</b>	<b>107.511.660</b>	<b>107.011.660</b>		
		4	01	03	2.0 2	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	31.496.300	31.496.300	31.496.300	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.0 2	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	76.015.360	76.015.360	75.515.360	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.0 3	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100 %	100 %	100 %	%	<b>199.354.240</b>	<b>199.354.240</b>	<b>197.831.467</b>		
		4	01	03	2.0 3	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	92.664.800	92.664.800	124.454.027	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.0 3	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	106.689.440	106.689.440	73.377.440	Sekretariat Daerah
							<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>											
							<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>11.132.933.734</b>	<b>16.901.015.764</b>	<b>15.499.145.859</b>	
		4	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A skor	A Skor	A Skor	Skor	<b>1.547.873.205</b>	<b>1.530.125.235</b>	<b>1.530.125.235</b>	
		4	01	01	2.0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	%	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
		4	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD									
		4	01	01	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	100 %	100 %	%	<b>1.025.442.780</b>	<b>1.007.694.810</b>	<b>1.007.694.810</b>		
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	Orang/Bulan	1.025.442.780	1.007.694.810	1.007.694.810	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100 %	100 %	%	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>		
		4	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	persentase pemenuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	100 %	%	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %	%	<b>3.265.065</b>	<b>3.265.065</b>	<b>3.265.065</b>		
		4	01	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	0 Unit	0 Unit	Unit	3.265.065	3.265.065	3.265.065	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	%	<b>259.215.360</b>	<b>259.215.360</b>	<b>259.215.360</b>		
		4	01	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	Laporan	259.215.360	259.215.360	259.215.360	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>59.950.000</b>	<b>59.950.000</b>	<b>59.950.000</b>		
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %	100 %	%	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	28.750.000	28.750.000	28.750.000	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Dipelihara/Direhabilitasi	yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		4	01	01	2.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100 %	100 %	%	9.200.000	9.200.000	9.200.000	Sekretariat Daerah
		4	01	02		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100 %	100 %	%	<b>9.248.290.929</b>	<b>15.034.120.929</b>	<b>13.434.120.929</b>	
		4	01	02	2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	33 Indeks	100 %	100 %	%	<b>9.248.290.929</b>	<b>15.034.120.929</b>	<b>13.434.120.929</b>	
		4	01	02	2.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	9.248.290.929	15.034.120.929	13.434.120.929	Sekretariat Daerah
		4	01	03		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100 %	100 %	%	<b>336.769.600</b>	<b>336.769.600</b>	<b>534.899.695</b>	
		4	01	03	2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	80,98	80.98 Indeks	80.98 Indeks	Indeks	<b>336.769.600</b>	<b>336.769.600</b>	<b>336.769.600</b>	
		4	01	03	2.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	235.984.960	235.984.960	235.984.960	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	100.784.640	100.784.640	100.784.640	Sekretariat Daerah
		4	01	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	0	0	100 %	%	-	-	<b>198.130.095</b>	
		4	01	03	2.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,		0	1 Dokumen	Dokumen	-	-	198.130.095	Sekretariat Daerah



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja											
					<b>BAGIAN UMUM</b>													
					<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>35.463.703.320</b>	<b>36.235.169.819</b>	<b>37.682.615.753</b>			
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80,01	A skor	A skor	Skor	<b>35.463.703.320</b>	<b>36.235.169.819</b>	<b>37.682.615.753</b>			
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
		4	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>12.616.719.810</b>	<b>12.641.569.109</b>	<b>12.946.369.109</b>		
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	163 Orang /bulan	163 Orang /bulan	163 Orang /bulan	Orang/Bulan	12.616.719.810	12.641.569.109	12.946.369.109	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>8.294.786.000</b>	<b>8.294.786.000</b>	<b>7.537.085.000</b>		
		4	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	3 Paket	3 Paket	Paket	8.294.786.000	8.294.786.000	7.537.085.000	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.338.407.600</b>	<b>2.339.907.600</b>	<b>3.455.808.928</b>		
		4	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	250.000.000	251.500.000	271.500.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan	324 Laporan	324 Laporan	Laporan	2.088.407.600	2.088.407.600	3.184.308.928	Sekretariat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>936.055.320</b>	<b>1.464.345.320</b>	<b>1.311.255.320</b>		
		4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	829.000.000	1.357.290.000	1.173.100.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	Unit	15.800.000	15.800.000	46.900.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	5 unit	Unit	91.255.320	91.255.320	91.255.320	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.686.554.640</b>	<b>4.692.054.640</b>	<b>5.350.311.274</b>		
		4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 laporan	18 Laporan	18 Laporan	Laporan	4.686.554.640	4.692.054.640	5.350.311.274	Sekretariat Daerah
		<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.657.211.450</b>	<b>1.862.361.450</b>	<b>2.353.373.750</b>		
		4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	94 unit	94 Unit	94 Unit	Unit	868.174.950	1.069.374.950	1.170.419.250	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	500.000.000	502.850.000	892.818.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	129 unit	129 unit	129 unit	Unit	289.036.500	290.136.500	290.136.500	Sekretariat Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4	01	01	2.1 1	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>741.634.672</b>	
		4	01	01	2.1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	201.634.672	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.1 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	2 orang/bulan	Orang/Bulan	600.000.000	600.000.000	540.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.1 2	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
		4	01	01	2.1 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	Paket	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.1 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	16 paket	16 paket	16 paket	Paket	575.000.000	575.000.000	575.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.1 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	15 paket	15 paket	15 paket	Paket	325.000.000	325.000.000	325.000.000	Sekretariat Daerah
		4	01	01	2.1 4	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.928.968.500</b>	<b>1.935.145.700</b>	<b>1.981.777.700</b>	
		4	01	01	2.1 04	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	Laporan	1.928.968.500	1.935.145.700	1.981.777.700	Sekretariat Daerah
													<b>57.823.797.149</b>	<b>64.866.942.662</b>	<b>64.949.872.757</b>		
1	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	4	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	81 Skor	81 Skor	Skor	<b>26.399.381.136</b>	<b>30.620.002.275</b>	<b>30.731.002.412</b>	
		4	02	01	2.0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>75.329.977</b>	<b>75.329.977</b>	<b>75.329.977</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4	02	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	75.329.977	75.329.977	75.329.977	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.679.743.078</b>	<b>3.366.682.326</b>	<b>3.366.682.326</b>	
		4	02	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Orang/bulan	3.679.743.078	3.366.682.326	3.366.682.326	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>291.087.294</b>	<b>291.087.294</b>	<b>293.030.349</b>	
		4	02	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	64.818.894	64.818.894	64.818.894	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	19 Orang	19 Orang	Orang	226.268.400	226.268.400	228.211.455	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	100 %	100 %	%	<b>937.733.258</b>	<b>937.733.258</b>	<b>937.733.258</b>	
		4	02	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	Laporan	937.733.258	937.733.258	937.733.258	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	100 %	100 %	%	<b>348.489.090</b>	<b>6.105.000</b>	<b>6.105.000</b>	
		4	02	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Unit	348.489.090	6.105.000	6.105.000	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.536.057.009</b>	<b>2.602.797.882</b>	<b>2.727.451.920</b>	
		4	02	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Laporan	2.536.057.009	2.602.797.882	2.727.451.920	Sekretariat DPRD
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	100 %	100 %	%	<b>713.401.390</b>	<b>621.153.590</b>	<b>621.101.198</b>	
		4	02	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	Unit	308.841.290	308.841.290	308.788.898	Sekretariat DPRD

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
		4	02	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	179 Unit	179 Unit	Unit	330.921.350	238.673.550	238.673.550	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	73.638.750	73.638.750	73.638.750	Sekretariat DPRD	
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.1</b>	<b>5</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	100 %	100 %	%	<b>15.912.152.890</b>	<b>16.295.942.237</b>	<b>16.295.942.237</b>		
		4	02	01	2.1	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	Orang/Bulan	15.553.173.870	15.936.963.217	15.936.963.217	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Paket	253.979.020	253.979.020	253.979.020	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	Sekretariat DPRD	
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.1</b>	<b>6</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.905.387.150</b>	<b>6.423.170.711</b>	<b>6.407.626.147</b>		
		4	02	01	2.1	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Laporan	37.957.150	37.957.150	22.397.170	Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.1	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	1.867.430.000	6.385.213.561	6.385.228.977	Sekretariat DPRD	
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	85 Skor	85 Skor	Skor	<b>12.253.836.420</b>	<b>14.020.154.529</b>	<b>14.019.653.533</b>		
		<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.781.493.140</b>	<b>6.949.002.119</b>	<b>6.948.967.120</b>		
		4	02	02	2.0	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21 Dokumen	21 Dokumen	15 Dokumen	Dokumen	3.218.753.660	3.697.366.740	3.233.640.060	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.0	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	dokumen	1.562.739.480	3.251.635.379	3.715.327.060	Sekretariat DPRD	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4	02	02	2.0 2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.516.935.100</b>	<b>1.287.690.360</b>	<b>1.287.648.000</b>		
		4	02	02	2.0 2	03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Dokumen	1.516.935.100	1.287.690.360	1.287.648.000	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 3	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>574.554.900</b>	<b>614.181.770</b>	<b>499.378.733</b>		
		4	02	02	2.0 3	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	338.831.780	338.765.050	223.112.793	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 3	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	235.723.120	275.416.720	276.265.940	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	%	<b>4.204.257.280</b>	<b>4.356.857.280</b>	<b>4.356.857.280</b>		
		4	02	02	2.0 4	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	2.003.790.000	2.104.590.000	2.104.590.000	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 4	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	Dokumen	1.307.556.800	1.359.356.800	1.359.356.800	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 4	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	892.910.480	892.910.480	892.910.480	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2.0 5	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKP	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKP	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.176.596.000</b>	<b>812.423.000</b>	<b>926.802.400</b>		
		4	02	02	2.0 5	03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	Dokumen	1.176.596.000	812.423.000	926.802.400	Sekretariat DPRD
														<b>38.653.217.556</b>	<b>44.640.156.804</b>	<b>44.750.655.945</b>		
	<b>UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN</b>	5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	81 skor	81 skor	Skor	<b>8.189.057.514</b>	<b>7.215.164.260</b>	<b>7.480.661.831</b>	
		5	01	01	2.0 1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	100 %	100 %	100 %	%	<b>41.488.787</b>	<b>41.488.787</b>	<b>323.488.787</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen	20.129.900	20.129.900	207.129.900	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan	11.655.600	11.655.600	11.655.600	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Laporan	9.703.287	9.703.287	104.703.287	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>6.268.389.457</b>	<b>5.334.501.495</b>	<b>5.435.128.491</b>	
		5	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	Orang/Bulan	6.254.954.457	5.321.066.495	5.421.693.491	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	Laporan	13.435.000	13.435.000	13.435.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	100 %	100 %	100 %	%	<b>470.250.000</b>	<b>342.060.113</b>	<b>90.298.000</b>	
		5	01	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	31 orang	31 orang	Orang	160.250.000	160.250.000	4.932.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5	01	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 orang/keg	67 orang/keg	67 orang/keg	Orang/Keg	310.000.000	181.810.113	85.366.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>404.710.800</b>	<b>404.710.800</b>	<b>404.710.800</b>	
		5	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	404.710.800	404.710.800	404.710.800	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>6.058.485</b>	<b>6.058.485</b>	<b>72.566.785</b>	
		5	01	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	6.058.485	6.058.485	72.566.785	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>837.914.000</b>	<b>878.480.000</b>	<b>935.662.000</b>	
		5	01	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	837.914.000	878.480.000	935.662.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>160.245.985</b>	<b>207.864.580</b>	<b>218.806.968</b>	
		5	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	Unit	33.834.205	81.452.800	85.730.400	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	77.616.000	77.616.000	77.616.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Dipelihara/Direhabilitasi	yang Dipelihara/Direhabilitasi							dan Pengembangan Daerah	
		5	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	48.795.780	48.795.780	55.460.568	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.417.459.130</b>	<b>1.418.169.130</b>	<b>1.705.165.050</b>	
		5	01	02	2.0	1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	<b>1.197.420.880</b>	<b>1.198.130.880</b>	<b>1.564.697.600</b>	
		5	01	02	2.0	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Berita Acara	138.605.400	138.605.400	275.913.380	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	02	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Berita Acara	149.241.780	149.241.780	147.815.700	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	02	2.0	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Berita Acara	318.862.660	319.572.660	282.324.770	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	02	2.0	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	590.711.040	590.711.040	858.643.750	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	02	2.0	03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	<b>220.038.250</b>	<b>220.038.250</b>	<b>140.467.450</b>	
		5	01	02	2.0	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	93.060.650	93.060.650	96.660.650	Badan Perencanaan, Penelitian dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	01	02	2.0	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	126.977.600	126.977.600	43.806.800	Pengembang an Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		5	1	3			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	92 %	92 %	%	<b>977.516.400</b>	<b>1.020.516.400</b>	<b>1.328.385.500</b>	
		5	01	03	2.0	01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>343.409.120</b>	<b>343.409.120</b>	<b>469.615.120</b>	
		5	01	03	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	72.000.000	72.000.000	97.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		5	01	03	2.0	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	53.280.000	53.280.000	144.950.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		5	01	03	2.0	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	211.710.620	211.710.620	221.246.620	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		5	01	03	2.0	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	26 OPD	26 OPD	26 OPD	Opd	6.418.500	6.418.500	6.418.500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		5	01	03	2.0	2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian</b>	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>230.051.400</b>	<b>227.551.400</b>	<b>185.982.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						<b>Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>											
		5	01	03	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	47.237.000	47.237.000	34.437.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	03	2.0	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	Perangkat Daerah	182.814.400	180.314.400	151.545.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.0</b>	<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	<b>404.055.880</b>	<b>449.555.880</b>	<b>672.788.380</b>	
		5	01	03	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	138.904.500	184.404.500	462.458.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	03	2.0	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 OPD	6 OPD	6 OPD	Opd	90.151.380	90.151.380	47.254.880	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	03	2.0	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	150.000.000	150.000.000	147.975.500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	01	03	2.0	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Dokumen	25.000.000	25.000.000	15.100.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Renstra/Renja Bidang Kewilayahan									
														10.584.033.044	9.653.849.790	10.514.212.381		
	UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	%	1.377.973.164	1.374.268.455	1.344.069.542	
		5	05	02	2.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dokumen	1.114.178.361	1.110.473.652	1.157.453.652	
		5	05	02	2.0	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	938.831.161	935.126.452	1.035.126.452	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	05	02	2.0	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	175.347.200	175.347.200	122.327.200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5	05	02	2.0		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	263.794.803	263.794.803	186.615.890	
		5	05	02	2.0	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen	263.794.803	263.794.803	186.615.890	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
														1.377.973.164	1.374.268.455	1.344.069.542		
														11.962.006.208	11.028.118.245	11.858.281.923		
	UNSUR PENUNJANG KEUANGAN	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	A skor	A skor	skor	50.825.555.179	54.937.245.533	51.225.439.388	
		5	02	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		5	02	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Badan Keuangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							dan Aset Daerah		
		5	02	01	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	37.000.000.000	39.929.090.354	28.995.937.209		
		5	02	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang	2875 Orang/bulan	2875 Orang/bulan	Orang/bulan	37.000.000.000	39.929.090.354	28.995.937.209	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	400.000.000	400.000.000	500.000.000		
		5	02	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	Laporan	400.000.000	400.000.000	500.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	%	84.000.000	666.600.000	860.410.000		
		5	02	01	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	17 Unit	17 Unit	unit	84.000.000	666.600.000	860.410.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	%	13.101.555.179	13.701.555.179	20.521.692.179		
		5	02	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	13.101.555.179	13.701.555.179	20.521.692.179	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	238.000.000	238.000.000	345.400.000		
		5	02	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	36 Unit	36 Unit	36 Unit	unit	80.000.000	80.000.000	115.000.000	Badan Keuangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	unit	50.000.000	50.000.000	122.400.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	unit	108.000.000	108.000.000	108.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.224.351.023</b>	<b>24.011.789.273</b>	<b>5.738.124.860</b>	
		<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	%	<b>918.685.000</b>	<b>1.126.814.000</b>	<b>1.026.814.000</b>	
		5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	83.421.000	83.421.000	83.421.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	56.819.000	56.819.000	56.819.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	Dokumen	16.876.000	16.876.000	16.876.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	Dokumen	16.111.000	23.640.000	23.640.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	154.679.000	154.679.000	154.679.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	154.679.000	154.679.000	154.679.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	Jumlah Dokumen Regulasi serta	Jumlah Dokumen Regulasi serta	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	436.100.000	636.700.000	536.700.000	Badan Keuangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						serta Kebijakan Bidang Anggaran	serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kebijakan Bidang Anggaran	Kebijakan Bidang Anggaran								dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>45.050.000</b>	<b>45.050.000</b>	<b>50.600.000</b>	
		5	02	02	2.0 2	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	55 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	Dokumen	39.950.000	39.950.000	45.500.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 2	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.138.759.000</b>	<b>1.147.759.000</b>	<b>1.147.759.000</b>	
		5	02	02	2.0 3	03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 3	08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	66.000.000	66.000.000	66.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 3	09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 3	11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	600 Orang	Orang	857.759.000	866.759.000	866.759.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	02	2.0 4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase tersusunnya Laporan BTT	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.121.857.023</b>	<b>21.692.166.273</b>	<b>3.512.951.860</b>	
		5	02	02	2.0 4	09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	3.121.857.023	21.692.166.273	3.512.951.860	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	02	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.939.948.000</b>	<b>1.939.948.000</b>	<b>2.149.948.000</b>	
		5	02	03	2.0	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	Laporan	<b>1.939.948.000</b>	<b>1.939.948.000</b>	<b>2.149.948.000</b>	
		5	02	03	2.0	05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	97.142.000	97.142.000	157.142.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	03	2.0	07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	1.803.206.000	1.803.206.000	1.953.206.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5	02	03	2.0	11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Laporan	39.600.000	39.600.000	39.600.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
														<b>57.989.854.202</b>	<b>80.888.982.806</b>	<b>59.113.512.248</b>	
<b>PENUNJANG KEUANGAN</b>	5	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	<b>9.074.685.028</b>	<b>8.744.886.664</b>	<b>9.339.319.192</b>		
		5	02	01	2.0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
		5	02	01	2.0	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase terlaksananya admisnitration keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya admisnitration keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>8.151.715.664</b>	<b>7.688.817.300</b>	<b>8.249.589.800</b>	
		5	02	01	2.0	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	borang/bulan	8.151.715.664	7.688.817.300	8.249.589.800	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase terlaksananya	Persentase terlaksananya	100 %	100 %	100 %	%	<b>81.648.000</b>	<b>202.138.000</b>	<b>202.138.000</b>	



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								administrasi umum perangkat daerah	administrasi umum perangkat daerah										
		5	02	01	2.0	09	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	15 laporan	laporan	81.648.000	202.138.000	202.138.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	<b>146.946.030</b>	<b>146.946.030</b>	<b>146.946.030</b>	
		5	02	01	2.0	10	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	unit	146.946.030	146.946.030	146.946.030	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>525.875.334</b>	<b>538.485.334</b>	<b>572.145.362</b>	
		5	02	01	2.0	04	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	100 %	%	525.875.334	538.485.334	572.145.362	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>163.500.000</b>	<b>163.500.000</b>	<b>163.500.000</b>	
		5	02	01	2.0	01	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	35 unit	35 unit	unit	41.725.000	41.725.000	41.725.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	81.275.000	81.275.000	81.275.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	01	2.0	10	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %	100 %	100 %	%	40.500.000	40.500.000	40.500.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	2	4				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	10 %	10 %	%	<b>1.302.297.752</b>	<b>1.169.197.752</b>	<b>1.326.995.292</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	02	04	2.0	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	%	1.302.297.752	1.169.197.752	1.326.995.292		
		5	02	04	2.0	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	dokumen	287.100.000	154.000.000	254.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	185.268.002	185.268.002	185.268.002	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	15.059.430	15.059.430	107.849.430	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	165.000.000	165.000.000	165.000.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	4303 WP	4303 WP	4303 WP	WP	183.016.800	183.016.800	183.016.800	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	40.000.000	40.000.000	5.007.540	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	8923 Wajib Pajak	8923 Wajib Pajak	8923 Wajib Pajak	Pajak	6.993.000	6.993.000	6.993.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	100 %	100 %	100 %	%	99.040.000	99.040.000	99.040.000	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	%	310.550.520	310.550.520	310.550.520	Badan Pendapatan Daerah
		5	02	04	2.0	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	10.270.000	10.270.000	10.270.000	Badan Pendapatan Daerah
														10.376.982.780	9.914.084.416	10.666.314.484		
	<b>PENUNJANG KEPEGAWAIAN</b>	5	3	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	A skor	A skor	Skor	7.117.062.899	6.918.213.509	7.280.603.309	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		5	03	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>	
		5	03	01	2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	Laporan	19.400.000	19.400.000	19.400.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>6.099.847.949</b>	<b>5.900.998.559</b>	<b>5.900.998.559</b>	
		5	03	01	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	Bulan	6.099.847.949	5.900.998.559	5.900.998.559	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>323.200.000</b>	<b>323.200.000</b>	<b>441.100.000</b>	
		5	03	01	2.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	Laporan	323.200.000	323.200.000	441.100.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen			Persen	<b>14.325.950</b>	<b>14.325.950</b>	<b>244.368.145</b>	
		5	03	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	14.325.950	14.325.950	244.368.145	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>446.318.000</b>	<b>446.318.000</b>	<b>436.886.605</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5	03	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	446.318.000	446.318.000	436.886.605	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.0	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>213.971.000</b>	<b>213.971.000</b>	<b>237.850.000</b>	
		5	03	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	Unit	17.336.000	17.336.000	22.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	148.710.000	148.710.000	181.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Unit	47.925.000	47.925.000	34.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	87,7 skor	87,7 skor	Skor	<b>2.417.697.200</b>	<b>2.417.697.200</b>	<b>2.073.107.400</b>	
		5	03	02	2.0	01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>1.202.560.000</b>	<b>1.202.560.000</b>	<b>975.462.200</b>	
		5	03	02	2.0	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	1.003.200.000	1.003.200.000	777.682.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	Dokumen	89.360.000	89.360.000	89.360.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	Dokumen	110.000.000	110.000.000	108.420.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																an Sumber Daya Manusia		
		5	03	02	2.0 2	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>461.784.200</b>	<b>461.784.200</b>	<b>447.096.200</b>		
		5	03	02	2.0 2	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	702 Dokumen	702 Dokumen	Dokumen	375.626.200	375.626.200	375.626.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0 2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	455 Dokumen	455 Dokumen	Dokumen	86.158.000	86.158.000	71.470.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0 3	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>601.710.000</b>	<b>601.710.000</b>	<b>530.956.400</b>		
		5	03	02	2.0 3	02	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	Dokumen	601.710.000	601.710.000	530.956.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0 4	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen	100 persen	100 persen	Persen	<b>151.643.000</b>	<b>151.643.000</b>	<b>119.592.600</b>		
		5	03	02	2.0 4	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	14.391.000	14.391.000	13.980.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0 4	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang	1429 Orang	1429 Orang	Orang	60.130.000	60.130.000	28.490.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	03	02	2.0 4	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Orang	77.122.000	77.122.000	77.122.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	5	04	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	20 persen	20 persen	Persen	9.534.760.099	9.335.910.709	9.353.710.709	
		5	04	02	2.0	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	85 persen	85 persen	85 persen	Persen	2.459.306.900	2.459.306.900	2.459.306.900	
		5	04	02	2.0	03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 orang	277 Orang	277 Orang	Orang	1.590.042.900	1.590.042.900	1.590.042.900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	04	02	2.0	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80 persen	80 persen	80 persen	Persen	869.264.000	869.264.000	869.264.000	
		5	04	02	2.0	07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	177 laporan	177 Laporan	177 Laporan	Laporan	869.264.000	869.264.000	869.264.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
													2.459.306.900	2.459.306.900	2.459.306.900		
													11.994.066.999	11.795.217.609	11.813.017.609		
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	6	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	A Skor	A Skor	Skor	9.760.159.864	8.364.965.604	8.820.545.016	
		6	01	01	2.0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentse Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Prosentse Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 %	100 %	100 %	%	1.861.500	1.861.500	1.861.500	
		6	01	01	2.0	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Laporan	1.861.500	1.861.500	1.861.500	Inspektorat Daerah

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		6	01	01	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>8.895.736.674</b>	<b>7.048.842.414</b>	<b>7.376.098.986</b>	
		6	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	Orang/bulan	8.895.736.674	7.048.842.414	7.376.098.986	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	89 Nilai	89 Nilai	89 Nilai	Nilai	<b>764.205.990</b>	<b>764.205.990</b>	<b>882.997.990</b>	
		6	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Jenis	413.842.990	413.842.990	487.621.590	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	Laporan	350.363.000	350.363.000	395.376.400	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>98.355.700</b>	<b>550.055.700</b>	<b>559.586.540</b>	
		6	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Unit	33.355.700	33.355.700	42.886.540	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	50.000.000	501.700.000	501.700.000	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Inspektorat Daerah
		6	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	40%	40 %	40 %	%	<b>386.115.900</b>	<b>386.115.900</b>	<b>368.115.900</b>	
		6	01	02	2.0	1	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Jumlah laporan kegiatan	Jumlah laporan kegiatan	29 laporan	29 laporan	29 laporan	laporan	<b>352.646.300</b>	<b>352.646.300</b>	<b>334.646.300</b>	
		6	01	02	2.0	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	51.712.800	51.712.800	51.712.800	Inspektorat Daerah

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		6	01	02	2.0	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	Laporan	129.926.000	129.926.000	129.926.000	Inspektorat Daerah
		6	01	02	2.0	03	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan	24.436.000	24.436.000	24.436.000	Inspektorat Daerah
		6	01	02	2.0	04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	128.766.400	128.766.400	110.766.400	Inspektorat Daerah
		6	01	02	2.0	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	17.805.100	17.805.100	17.805.100	Inspektorat Daerah
		<b>6</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>33.469.600</b>	<b>33.469.600</b>	<b>33.469.600</b>	
		6	01	02	2.0	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	5.364.000	5.364.000	5.364.000	Inspektorat Daerah
		6	01	02	2.0	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	28.105.600	28.105.600	28.105.600	Inspektorat Daerah
		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100%	100 persen	100 persen	persen	<b>794.648.700</b>	<b>794.648.700</b>	<b>831.833.700</b>	
		<b>6</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	dokumen	<b>6.622.800</b>	<b>6.622.800</b>	<b>6.622.800</b>	
		6	01	03	2.0	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Rekomendasi	6.622.800	6.622.800	6.622.800	Inspektorat Daerah
		<b>6</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	dokumen	<b>788.025.900</b>	<b>788.025.900</b>	<b>825.210.900</b>	
		6	01	03	2.0	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	daerah	129.592.000	129.592.000	166.777.000	Inspektorat Daerah
		6	01	03	2.0	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring	Jumlah Kegiatan Koordinasi,	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kegiatan	658.433.900	658.433.900	658.433.900	Inspektorat Daerah



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
														10.940.924.464	9.545.730.204	10.020.494.616		
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN DAN KECAMATAN</b>	<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	<b>13.552.588.037</b>	<b>13.146.049.205</b>	<b>13.136.696.805</b>		
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>15.083.568</b>	<b>3.474.300</b>	<b>3.351.265</b>		
		7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	Dokumen	15.083.568	3.474.300	3.351.265	Kecamatan Kartoharjo
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>12.176.001.118</b>	<b>11.539.396.710</b>	<b>11.507.478.545</b>		
		7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	Orang/bulan	12.174.001.118	11.537.396.710	11.505.478.545	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kecamatan Kartoharjo
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>14.644.320</b>	<b>143.841.896</b>	<b>143.241.896</b>		
		7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	150 orang	150 orang	orang	14.644.320	143.841.896	143.241.896	Kecamatan Kartoharjo
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	87.75 indeks	87.75 indeks	87.75 indeks	indeks	<b>136.064.000</b>	<b>236.932.000</b>	<b>236.932.000</b>		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	136.064.000	236.932.000	236.932.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	01	2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>58.865.146</b>	<b>58.865.146</b>	<b>60.990.696</b>		
		7	01	01	2.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	0 unit	unit	100	100		Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	unit	58.865.046	58.865.046	60.990.696	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.014.168.490</b>	<b>1.025.777.758</b>	<b>1.026.135.108</b>	
		7	01	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	1.014.168.490	1.025.777.758	1.026.135.108	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>137.761.395</b>	<b>137.761.395</b>	<b>158.567.295</b>	
		7	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	14 unit	14 unit	unit	27.029.066	27.029.066	43.117.966	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	unit	23.157.329	23.157.329	23.157.329	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	unit	52.693.000	52.693.000	57.410.000	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	60 unit	60 unit	unit	34.882.000	34.882.000	34.882.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>38.656.000</b>	<b>38.656.000</b>	<b>38.656.000</b>	
		7	01	02	2.0 3	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>38.656.000</b>	<b>38.656.000</b>	<b>38.656.000</b>	
		7	01	02	2.0 3	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	38.656.000	38.656.000	38.656.000	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>353.186.800</b>	<b>353.186.800</b>	<b>349.255.200</b>	
		7	01	03	2.0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>269.452.000</b>	<b>269.452.000</b>	<b>265.520.400</b>	
		7	01	03	2.0 2	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	lembaga	269.452.000	269.452.000	265.520.400	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	03	2.0 3	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>83.734.800</b>	<b>83.734.800</b>	<b>83.734.800</b>	
		7	01	03	2.0 3	04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	83.734.800	83.734.800	83.734.800	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>312.260.650</b>	<b>631.322.200</b>	<b>1.022.012.200</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	04	2.0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>200.338.600</b>	<b>457.910.200</b>	<b>554.960.200</b>		
		7	01	04	2.0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 laporan	13 laporan	13 laporan	laporan	200.338.600	457.910.200	554.960.200	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	04	2.0	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>111.922.050</b>	<b>173.412.000</b>	<b>467.052.000</b>		
		7	01	04	2.0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	6 laporan	7 laporan	7 laporan	laporan	111.922.050	173.412.000	467.052.000	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain )	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain )	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>186.232.000</b>	<b>186.232.000</b>	<b>186.232.000</b>		
		7	01	05	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>186.232.000</b>	<b>186.232.000</b>	<b>186.232.000</b>		
		7	01	05	2.0	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	275 orang	720 orang	720 orang	orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
									Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
		7	01	05	2.0	05	1	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	05	2.0	07	1	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	dokumen	11.232.000	11.232.000	11.232.000	Kecamatan Kartoharjo
									<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>										
																	<b>578.769.494</b>	<b>674.880.900</b>	<b>1.169.067.700</b>	
		7	1	2					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indek s	87.8 indek s	87.8 indek s	indeks	<b>537.265.700</b>	<b>620.627.700</b>	<b>620.627.700</b>	
		7	01	02	2.0	2			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indek s	2.96 indek s	2.96 indek s	indeks	<b>537.265.700</b>	<b>620.627.700</b>	<b>620.627.700</b>	
		7	01	02	2.0	03	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	537.265.700	620.627.700	620.627.700	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	3					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>41.503.794</b>	<b>54.253.200</b>	<b>548.440.000</b>	
		7	01	03	2.0	2			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>41.503.794</b>	<b>54.253.200</b>	<b>548.440.000</b>	
		7	01	03	2.0	02		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	594	12.750.000	506.936.800	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	41.503.200	41.503.200	41.503.200	Kecamatan Kartoharjo	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>490.293.731</b>	<b>568.917.481</b>	<b>1.074.066.528</b>		
		7	01	02	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>463.782.228</b>	<b>529.656.028</b>	<b>529.626.528</b>		
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	463.782.228	529.656.028	529.626.528	Kecamatan Kartoharjo	
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>26.511.503</b>	<b>39.261.453</b>	<b>544.440.000</b>		
		7	01	03	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>26.511.503</b>	<b>39.261.453</b>	<b>544.440.000</b>		
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	50	12.750.000	517.928.547	Kecamatan Kartoharjo	
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	26.511.453	26.511.453	26.511.453	Kecamatan Kartoharjo	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>906.421.989</b>	<b>702.941.420</b>	<b>1.202.895.420</b>		
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>556.783.020</b>	<b>646.432.420</b>	<b>646.455.420</b>		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	02	2.0 2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>556.783.020</b>	<b>646.432.420</b>	<b>646.455.420</b>	
		7	01	02	2.0 2	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	556.783.020	646.432.420	646.455.420	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>349.638.969</b>	<b>56.509.000</b>	<b>556.440.000</b>	
		7	01	03	2.0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>349.638.969</b>	<b>56.509.000</b>	<b>556.440.000</b>	
		7	01	03	2.0 2	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	305.879.969	12.750.000	512.681.000	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	03	2.0 2	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	43.759.000	43.759.000	43.759.000	Kecamatan Kartoharjo
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>544.932.143</b>	<b>645.909.693</b>	<b>1.157.905.393</b>	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>505.787.293</b>	<b>594.014.893</b>	<b>609.465.393</b>	
		7	01	02	2.0 2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>505.787.293</b>	<b>594.014.893</b>	<b>609.465.393</b>	
		7	01	02	2.0 2	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	505.787.293	594.014.893	609.465.393	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>39.144.850</b>	<b>51.894.800</b>	<b>548.440.000</b>	
		7	01	03	2.0		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>39.144.850</b>	<b>51.894.800</b>	<b>548.440.000</b>	
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	50	12.750.000	509.295.200	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	39.144.800	39.144.800	39.144.800	Kecamatan Kartoharjo
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>513.840.109</b>	<b>599.033.659</b>	<b>1.107.713.659</b>	
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>483.760.059</b>	<b>556.203.659</b>	<b>559.273.659</b>	
		7	01	02	2.0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>483.760.059</b>	<b>556.203.659</b>	<b>559.273.659</b>	
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	483.760.059	556.203.659	559.273.659	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>30.080.050</b>	<b>42.830.000</b>	<b>548.440.000</b>	
		7	01	03	2.0		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>30.080.050</b>	<b>42.830.000</b>	<b>548.440.000</b>	





1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>561.327.180</b>	<b>680.240.030</b>	<b>1.149.548.430</b>		
		7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>506.945.530</b>	<b>613.108.430</b>	<b>613.108.430</b>		
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>506.945.530</b>	<b>613.108.430</b>	<b>613.108.430</b>	
		7	01	02	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	506.945.530	613.108.430	613.108.430	Kecamatan Kartoharjo
		7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>54.381.650</b>	<b>67.131.600</b>	<b>536.440.000</b>		
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>54.381.650</b>	<b>67.131.600</b>	<b>536.440.000</b>	
		7	01	03	2.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	50	12.750.000	482.058.400	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	03	2.0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	54.381.600	54.381.600	54.381.600	Kecamatan Kartoharjo
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
					<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>506.217.055</b>	<b>601.847.205</b>	<b>1.130.704.805</b>		
		7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	87.8 indeks	87.8 indeks	indeks	<b>467.384.605</b>	<b>550.264.805</b>	<b>550.264.805</b>		
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indeks	2.96 indeks	2.96 indeks	indeks	<b>467.384.605</b>	<b>550.264.805</b>	<b>550.264.805</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	467.384.605	550.264.805	550.264.805	Kecamatan Kartoharjo	
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>38.832.450</b>	<b>51.582.400</b>	<b>580.440.000</b>		
		7	01	03	2.0	2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>38.832.450</b>	<b>51.582.400</b>	<b>580.440.000</b>		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	50	12.750.000	541.607.600	Kecamatan Kartoharjo	
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	38.832.400	38.832.400	38.832.400	Kecamatan Kartoharjo	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
															<b>727.043.630</b>	<b>578.466.230</b>	<b>1.110.836.630</b>		
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indek s	87.8 indek s	87.8 indek s	indeks	<b>474.324.030</b>	<b>534.196.630</b>	<b>530.396.630</b>		
		7	01	02	2.0	2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.96 indek s	2.96 indek s	2.96 indek s	indeks	<b>474.324.030</b>	<b>534.196.630</b>	<b>530.396.630</b>		
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	474.324.030	534.196.630	530.396.630	Kecamatan Kartoharjo	
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>252.719.600</b>	<b>44.269.600</b>	<b>580.440.000</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	55 persen	55 persen	persen	<b>252.719.600</b>	<b>44.269.600</b>	<b>580.440.000</b>		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	unit	221.200.000	12.750.000	548.920.400	Kecamatan Kartoharjo
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas	5 pokmas	5 pokmas	pokmas	31.519.600	31.519.600	31.519.600	Kecamatan Kartoharjo
														<b>19.733.077.768</b>	<b>19.948.267.723</b>	<b>24.887.599.670</b>		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>		7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	80.01 skor	80.01 skor	Skor	<b>13.024.060.432</b>	<b>13.281.244.065</b>	<b>13.332.987.817</b>	
		7	01	01	2.0	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>24.507.000</b>	<b>24.506.985</b>	<b>24.506.985</b>	
		7	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Dokumen	24.507.000	24.506.985	24.506.985	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>11.787.398.481</b>	<b>11.854.586.130</b>	<b>11.870.699.082</b>	
		7	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	Orang/Bulan	11.785.398.481	11.852.586.130	11.868.699.082	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	100 %	100 %	%	<b>17.763.750</b>	<b>176.194.735</b>	<b>143.847.435</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	70 Orang	70 Orang	Orang	1.500.000	159.930.985	127.583.685	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Orang	16.263.750	16.263.750	16.263.750	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>119.715.000</b>	<b>119.715.000</b>	<b>153.091.000</b>	
		7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	119.715.000	119.715.000	153.091.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>32.883.750</b>	<b>8.158.500</b>	<b>8.158.500</b>	
		7	01	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	Unit	24.725.250	-	-	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	Unit	8.158.500	8.158.500	8.158.500	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>843.513.545</b>	<b>899.803.809</b>	<b>930.603.809</b>	
		7	01	01	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	843.513.545	899.803.809	930.603.809	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>198.278.906</b>	<b>198.278.906</b>	<b>202.081.006</b>	
		7	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	15 unit	15 unit	15 unit	Unit	63.865.108	63.865.108	67.667.208	Kecamatan Manguharjo

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kendaraan Dinas Jabatan			dibayarkan pajaknya								
		7	01	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	01	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	60 unit	60 unit	Unit	59.413.798	59.413.798	59.413.798	Kecamatan Manguharjo
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>18.152.000</b>	<b>18.152.000</b>	<b>18.152.000</b>	
		7	01	02	2.0	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>18.152.000</b>	<b>18.152.000</b>	<b>18.152.000</b>	
		7	01	02	2.0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	18.152.000	18.152.000	18.152.000	Kecamatan Manguharjo
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>344.167.480</b>	<b>344.167.480</b>	<b>344.167.480</b>	
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>280.755.080</b>	<b>280.755.080</b>	<b>280.755.080</b>	
		7	01	03	2.0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	Lembaga	280.755.080	280.755.080	280.755.080	Kecamatan Manguharjo

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	03	2.0 3	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	<b>63.412.400</b>	<b>63.412.400</b>	<b>63.412.400</b>	
		7	01	03	2.0 3	04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	63.412.400	63.412.400	63.412.400	Kecamatan Manguharjo
		7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>338.346.450</b>	<b>621.564.450</b>	<b>977.504.450</b>	
		7	01	04	2.0 1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>90.176.600</b>	<b>353.666.600</b>	<b>446.876.600</b>	
		7	01	04	2.0 02	1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	90.176.600	353.666.600	446.876.600	Kecamatan Manguharjo
		7	01	04	2.0 2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>248.169.850</b>	<b>267.897.850</b>	<b>530.627.850</b>	
		7	01	04	2.0 01	2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	248.169.850	267.897.850	530.627.850	Kecamatan Manguharjo
		7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	100 %	100 %	%	<b>103.577.200</b>	<b>103.577.200</b>	<b>103.577.200</b>	
		7	01	05	2.0 1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>103.577.200</b>	<b>103.577.200</b>	<b>103.577.200</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		7	01	05	2.0	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	350 Orang	350 Orang	Orang	37.482.000	37.482.000	37.482.000	Kecamatan Manguharjo	
		7	01	05	2.0	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	51.076.000	51.076.000	51.076.000	Kecamatan Manguharjo	
		7	01	05	2.0	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	15.019.200	15.019.200	15.019.200	Kecamatan Manguharjo	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>593.449.399</b>	<b>682.077.399</b>	<b>682.077.399</b>		
		7	01	02	2.0	2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>593.449.399</b>	<b>682.077.399</b>	<b>682.077.399</b>		
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	593.449.399	682.077.399	682.077.399	Kecamatan Manguharjo	



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>233.234.281</b>	<b>233.234.281</b>	<b>526.434.281</b>		
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>233.234.281</b>	<b>233.234.281</b>	<b>526.434.281</b>		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	150.800.000	150.800.000	445.800.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	Pokmas/Ormas	82.434.281	82.434.281	80.634.281	Kecamatan Manguharjo
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
														<b>527.330.775</b>	<b>675.611.658</b>	<b>1.014.401.658</b>		
		7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>424.953.987</b>	<b>590.027.790</b>	<b>590.027.790</b>		
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>424.953.987</b>	<b>590.027.790</b>	<b>590.027.790</b>		
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	424.953.987	590.027.790	590.027.790	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>102.376.788</b>	<b>85.583.868</b>	<b>424.373.868</b>		
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>102.376.788</b>	<b>85.583.868</b>	<b>424.373.868</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 unit	2 unit	Unit	47.919.500	35.459.500	374.249.500	Kecamatan Manguharjo	
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	54.457.288	50.124.368	50.124.368	Kecamatan Manguharjo	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>549.980.000</b>	<b>630.679.500</b>	<b>940.576.000</b>		
		7	01	02	2.0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>447.580.000</b>	<b>528.279.500</b>	<b>525.116.000</b>		
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	447.580.000	528.279.500	525.116.000	Kecamatan Manguharjo	
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>102.400.000</b>	<b>102.400.000</b>	<b>415.460.000</b>		
		7	01	03	2.0		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>102.400.000</b>	<b>102.400.000</b>	<b>415.460.000</b>		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	50.000.000	50.000.000	363.060.000	Kecamatan Manguharjo	
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	52.400.000	52.400.000	52.400.000	Kecamatan Manguharjo	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>553.101.600</b>	<b>612.208.941</b>	<b>971.688.230</b>			
		7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>376.301.600</b>	<b>517.708.941</b>	<b>517.448.249</b>			
		7	01	02	2.0 2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>376.301.600</b>	<b>517.708.941</b>	<b>517.448.249</b>		
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	376.301.600	517.708.941	517.448.249	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>176.800.000</b>	<b>94.500.000</b>	<b>454.239.981</b>		
		7	01	03	2.0 2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>176.800.000</b>	<b>94.500.000</b>	<b>454.239.981</b>		
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 Unit	2 Unit	Unit	101.800.000	19.500.000	379.239.981	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	Pokmas/Ormas	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kecamatan Manguharjo
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>948.028.212</b>	<b>1.044.417.024</b>	<b>1.131.514.604</b>			
		7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>472.146.352</b>	<b>568.535.164</b>	<b>568.535.164</b>		
		7	01	02	2.0 2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	90.50 skor	100 %	100 %	Skor	<b>472.146.352</b>	<b>568.535.164</b>	<b>568.535.164</b>		

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>												
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	472.146.352	568.535.164	568.535.164	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	100 %	100 %	100 %	%	<b>475.881.860</b>	<b>475.881.860</b>	<b>562.979.440</b>	
		7	01	03	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	<b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	100 %	100 %	100 %	%	<b>475.881.860</b>	<b>475.881.860</b>	<b>562.979.440</b>	
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 unit	2 unit	Unit	406.806.750	406.806.750	514.483.890	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	69.075.110	69.075.110	48.495.550	Kecamatan Manguharjo
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>665.881.444</b>	<b>761.523.519</b>	<b>1.089.023.519</b>	
		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>470.394.344</b>	<b>617.885.419</b>	<b>614.635.419</b>	
		7	01	02	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>470.394.344</b>	<b>617.885.419</b>	<b>614.635.419</b>	
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	470.394.344	617.885.419	614.635.419	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	100 %	100 %	100 %	%	<b>195.487.100</b>	<b>143.638.100</b>	<b>474.388.100</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								masyarakat diwilayah kecamatan	pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan									
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>195.487.100</b>	<b>143.638.100</b>	<b>474.388.100</b>		
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	120.487.100	68.638.100	396.138.100	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	Pokmas/O rmas	75.000.000	75.000.000	78.250.000	Kecamatan Manguharjo
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>										
		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>596.804.394</b>	<b>685.199.394</b>	<b>980.199.394</b>	
		7	01	02	2.0	2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>422.765.484</b>	<b>511.160.484</b>	<b>511.160.484</b>	
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lapora n	12 Laporan	12 Lapora n	Laporan	422.765.484	511.160.484	511.160.484	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>174.038.910</b>	<b>174.038.910</b>	<b>469.038.910</b>	
		7	01	03	2.0	2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>174.038.910</b>	<b>174.038.910</b>	<b>469.038.910</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	99.251.000	99.251.000	394.251.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	74.787.910	74.787.910	74.787.910	Kecamatan Manguharjo
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>831.758.000</b>	<b>955.509.000</b>	<b>1.432.831.860</b>	
		7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>725.758.000</b>	<b>849.509.000</b>	<b>849.509.000</b>	
		7	01	02	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>725.758.000</b>	<b>849.509.000</b>	<b>849.509.000</b>	
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	725.758.000	849.509.000	849.509.000	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>106.000.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>583.322.860</b>	
		7	01	03	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>106.000.000</b>	<b>106.000.000</b>	<b>583.322.860</b>	
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	31.000.000	31.000.000	508.322.860	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kecamatan Manguharjo
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>1.004.781.931</b>	<b>702.855.381</b>	<b>1.090.355.381</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 skor	90.50 Skor	90.50 Skor	Skor	<b>438.671.431</b>	<b>566.872.381</b>	<b>566.872.381</b>	
		7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>438.671.431</b>	<b>566.872.381</b>	<b>566.872.381</b>	
		7	01	02	2.0 03 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	438.671.431	566.872.381	566.872.381	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>566.110.500</b>	<b>135.983.000</b>	<b>523.483.000</b>	
		7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>566.110.500</b>	<b>135.983.000</b>	<b>523.483.000</b>	
		7	01	03	2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	497.200.000	67.072.500	454.572.500	Kecamatan Manguharjo
		7	01	03	2.0 03 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	68.910.500	68.910.500	68.910.500	Kecamatan Manguharjo
														<b>20.332.653.598</b>	<b>21.352.021.292</b>	<b>24.635.491.273</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>		7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.76 Skor	80.76 Skor	80.76 Skor	Skor	<b>13.573.184.392</b>	<b>13.691.519.073</b>	<b>13.482.569.804</b>	
		7	01	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>10.086.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	Dokumen	10.086.000	2.380.000	2.380.000	Kecamatan Taman
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>12.381.426.184</b>	<b>12.359.960.603</b>	<b>11.464.224.855</b>	
		7	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	Orang/bulan	12.381.426.184	12.359.960.603	11.464.224.855	Kecamatan Taman
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>14.854.000</b>	<b>87.271.000</b>	<b>198.271.000</b>	
		7	01	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Orang	14.854.000	87.271.000	198.271.000	Kecamatan Taman
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>98.572.000</b>	<b>98.572.000</b>	<b>106.446.859</b>	
		7	01	01	2.0	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Laporan	98.572.000	98.572.000	106.446.859	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0	09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.832.000</b>	<b>64.800.000</b>	<b>230.276.240</b>	
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>7</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	342	-	-	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1.490.000	64.800.000	230.276.240	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0	10	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>876.420.108</b>	<b>888.191.370</b>	<b>939.430.450</b>	
		<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>8</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	876.420.108	888.191.370	939.430.450	Kecamatan Taman



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		7	01	01	2.0 8	03	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	%	<b>189.994.100</b>	<b>190.344.100</b>	<b>541.540.400</b>	
		7	01	01	2.0 9		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit	16 Unit	16 Unit	Unit	52.522.300	52.522.300	52.522.300	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0 9	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	100.000.000	100.350.000	451.546.300	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Unit	37.471.800	37.471.800	37.471.800	Kecamatan Taman
		7	01	01	2.0 9	10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>21.998.400</b>	<b>21.998.400</b>	<b>21.998.400</b>	
		7	1	2			<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>21.998.400</b>	<b>21.998.400</b>	<b>21.998.400</b>	
		7	01	02	2.0 3		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	21.998.400	21.998.400	21.998.400	Kecamatan Taman
		7	01	02	2.0 3	01	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>343.215.750</b>	<b>337.670.075</b>	<b>461.562.333</b>	
		7	1	3			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>305.620.750</b>	<b>301.213.725</b>	<b>317.197.725</b>	
		7	01	03	2.0 2		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	Lembaga	305.620.750	301.213.725	317.197.725	Kecamatan Taman

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		7	01	03	2.0 2	01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	<b>37.595.000</b>	<b>36.456.350</b>	<b>144.364.608</b>	
		7	01	03	2.0 3		Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	37.595.000	36.456.350	144.364.608	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0 3	04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>338.399.400</b>	<b>557.907.400</b>	<b>1.030.309.220</b>	
		7	1	4			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>138.376.000</b>	<b>416.725.000</b>	<b>547.671.370</b>	
		7	01	04	2.0 1		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	138.376.000	416.725.000	547.671.370	Kecamatan Taman
		7	01	04	2.0 1	02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	%	<b>200.023.400</b>	<b>141.182.400</b>	<b>482.637.850</b>	
		7	01	04	2.0 2		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Laporan	200.023.400	141.182.400	482.637.850	Kecamatan Taman
		7	01	04	2.0 2	01	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	100 %	100 %	%	<b>108.919.600</b>	<b>102.064.100</b>	<b>102.064.100</b>	
		7	1	5			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	Persentase himbauan Kepala	100 %	100 %	100 %	%	<b>108.919.600</b>	<b>102.064.100</b>	<b>102.064.100</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					<b>Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		daerah yang ditindaklanjuti									
		7	01	05	2.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Orang	35.140.000	36.448.000	36.448.000	Kecamatan Taman
		7	01	05	2.0 01	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan	52.594.400	44.648.400	44.648.400	Kecamatan Taman
		7	01	05	2.0 05	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	21.185.200	20.967.700	20.967.700	Kecamatan Taman
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
														<b>665.756.765</b>	<b>787.246.065</b>	<b>1.076.852.365</b>	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>546.493.765</b>	<b>667.983.065</b>	<b>675.994.765</b>	
		7	01	02	2.0 2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>546.493.765</b>	<b>667.983.065</b>	<b>675.994.765</b>	
		7	01	02	2.0 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	546.493.765	667.983.065	675.994.765	Kecamatan Taman

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	1	3				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		7	01	03	2.0		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>119.263.000</b>	<b>119.263.000</b>	<b>400.857.600</b>	
		7	01	03	2.0	2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>119.263.000</b>	<b>119.263.000</b>	<b>400.857.600</b>	
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	40.000.000	40.000.000	322.984.000	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	Pokma/Ormas	79.263.000	79.263.000	77.873.600	Kecamatan Taman
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>635.476.272</b>	<b>720.574.272</b>	<b>1.107.193.072</b>	
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>514.902.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>612.398.800</b>	
		7	01	02	2.0	2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>514.902.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>612.398.800</b>	
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	514.902.000	600.000.000	612.398.800	Kecamatan Taman
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>120.574.272</b>	<b>120.574.272</b>	<b>494.794.272</b>	
		7	01	03	2.0	2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>120.574.272</b>	<b>120.574.272</b>	<b>494.794.272</b>	



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					<b>KECAMATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>442.941.932</b>	<b>465.257.020</b>	<b>944.130.520</b>		
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>321.833.320</b>	<b>446.737.020</b>	<b>446.737.020</b>	
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>321.833.320</b>	<b>446.737.020</b>	<b>446.737.020</b>	
		7	01	02	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	321.833.320	446.737.020	446.737.020	Kecamatan Taman
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>121.108.612</b>	<b>18.520.000</b>	<b>497.393.500</b>	
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>121.108.612</b>	<b>18.520.000</b>	<b>497.393.500</b>	
		7	01	03	2.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	109.588.612	7.000.000	485.873.500	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	Pokma/Ormas	11.520.000	11.520.000	11.520.000	Kecamatan Taman
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>716.116.804</b>	<b>923.511.804</b>	<b>1.725.848.442</b>	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>673.116.804</b>	<b>813.356.404</b>	<b>822.821.604</b>	
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>673.116.804</b>	<b>813.356.404</b>	<b>822.821.604</b>	
		7	01	02	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	673.116.804	813.356.404	822.821.604	Kecamatan Taman

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	43.000.000	110.155.400	903.026.838	
		7	01	03	2.0	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	43.000.000	110.155.400	903.026.838	
		7	01	03	2.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	6.500.000	37.250.000	836.596.638	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	Pokma/Ormas	36.500.000	72.905.400	66.430.200	Kecamatan Taman
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							606.316.226	725.895.067	1.124.195.067	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KECAMATAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat			88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	551.971.326	640.447.557	640.447.557	
		7	01	02	2.0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	100 %	100 %	%	551.971.326	640.447.557	640.447.557	
		7	01	02	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	551.971.326	640.447.557	640.447.557	Kecamatan Taman
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 %	100 %	%	54.344.900	85.447.510	483.747.510	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>54.344.900</b>	<b>85.447.510</b>	<b>483.747.510</b>	
		7	01	03	2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Kegiatan Pembedayaan Kelurahan</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	3 Unit	3 Unit	Unit	3.047.200	34.149.810	432.449.810	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0 03		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit							
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	Pokma/Or mas	51.297.700	51.297.700	51.297.700	Kecamatan Taman
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>							<b>753.233.297</b>	<b>903.413.947</b>	<b>1.631.003.726</b>	
		7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>491.145.017</b>	<b>641.325.667</b>	<b>657.329.758</b>	
		7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>491.145.017</b>	<b>641.325.667</b>	<b>657.329.758</b>	
		7	01	02	2.0 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	491.145.017	641.325.667	657.329.758	Kecamatan Taman
		7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>262.088.280</b>	<b>262.088.280</b>	<b>973.673.968</b>	
		7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	<b>Kegiatan Pembedayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>262.088.280</b>	<b>262.088.280</b>	<b>973.673.968</b>	



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	217.187.240	217.187.240	928.772.928	Kecamatan Taman	
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	44.901.040	44.901.040	44.901.040	Kecamatan Taman	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>603.734.296</b>	<b>672.858.196</b>	<b>1.321.910.096</b>		
		7	01	02	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>523.445.596</b>	<b>592.569.496</b>	<b>604.046.896</b>		
		7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	523.445.596	592.569.496	604.046.896	Kecamatan Taman	
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	<b>80.288.700</b>	<b>80.288.700</b>	<b>717.863.200</b>		
		7	01	03	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	<b>80.288.700</b>	<b>80.288.700</b>	<b>717.863.200</b>		
		7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	25.150.000	25.150.000	663.224.500	Kecamatan Taman	
		7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	55.138.700	55.138.700	54.638.700	Kecamatan Taman	
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>											
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>842.017.097</b>	<b>734.861.814</b>	<b>938.761.054</b>		
		7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	88.78 Indeks	88.78 Indeks	Indeks	<b>605.582.116</b>	<b>654.329.414</b>	<b>654.329.414</b>		

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	01	02	2.0	<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	605.582.116	654.329.414	654.329.414	
		7	01	02	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	605.582.116	654.329.414	654.329.414	Kecamatan Taman
		7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %	%	236.434.981	80.532.400	284.431.640	
		7	01	03	2.0		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	236.434.981	80.532.400	284.431.640	
		7	01	03	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Unit	190.171.781	34.269.200	238.168.440	Kecamatan Taman
		7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	Pokmas/Ormas	46.263.200	46.263.200	46.263.200	Kecamatan Taman
													20.318.550.952	21.444.643.698	26.327.926.664		
													286.539.949.623	331.812.995.970	326.929.726.373		
													<b>Pagu Anggaran Prioritas III : Peningatan Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi</b>				

**PRIORITAS IV : Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan**

No.	URUSAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET				PAGU			PERANGKAT DAERAH			
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SATUAN	RKPD 2023	PENJABARAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023				
1	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN</b>	1	03	01													
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor		13.714.687.105	12.228.959.426	12.558.476.926	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>PENATAAN RUANG</b>					<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		1	03	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
		1	03	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	<b>7.792.677.420</b>	<b>7.317.344.030</b>	<b>7.317.344.030</b>	
		1	03	01	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/bulan	51 orang/bulan	51 orang/bulan	orang/bulan	7.792.677.420	7.317.344.030	7.317.344.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>250.000.000</b>	<b>521.573.036</b>	<b>521.573.036</b>	
		1	03	01	2.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	Laporan	250.000.000	521.573.036	521.573.036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>993.470.000</b>	<b>15.575.000</b>	<b>15.575.000</b>	
		1	03	01	2.007	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	2 Unit	2 Unit	unit	987.270.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 buah	3 buah	unit	6.200.000	15.575.000	15.575.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>3.791.796.347</b>	<b>3.487.324.022</b>	<b>3.569.911.522</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	03	01	2.0038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 laporan	10 Laporan	10 Laporan	laporan	3.791.796.347	3.487.324.022	3.569.911.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>836.743.338</b>	<b>837.143.338</b>	<b>1.084.073.338</b>	
		1	03	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 unit	59 unit	59 unit	unit	370.280.838	370.280.838	370.280.838	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	01	2.0109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	466.462.500	466.862.500	713.792.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	100 %	100 %	%	<b>12.574.216.000</b>	<b>7.300.920.000</b>	<b>7.384.071.500</b>	
		1	03	02	2.0011	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	<b>12.574.216.000</b>	<b>7.300.920.000</b>	<b>7.384.071.500</b>	
		1	03	02	2.00281	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	235.100.000	235.100.000	235.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	02	2.00381	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	3.165.339.960	2.123.400.000	2.123.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	02	2.00461	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0.5 KM	0.5 KM	KM	8.075.086.040	3.843.740.000	3.927.242.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	02	2.00551	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1.098.690.000	1.098.680.000	1.098.329.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	3	3		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	100 %	100 %	%	21.869.000	21.269.000	21.269.000	
		1	03	03	2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	100 %	100 %	%	21.869.000	21.269.000	21.269.000	
		1	03	03	2.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	21.869.000	21.269.000	21.269.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	80.09 %	80.09 %	%	22.188.093.000	16.455.030.000	16.872.319.750	
		1	03	06	2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	80.09 %	80.09 %	%	22.188.093.000	16.455.030.000	16.872.319.750	
		1	03	06	2.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Dokumen	934.450.000	934.450.000	934.450.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	06	2.005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 M	100 M	100 M	M	19.195.397.000	13.257.920.000	13.295.841.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	06	2.009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	100 M	100 M	M	2.058.246.000	2.262.660.000	2.642.028.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	08		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	38.642.900.000	46.450.147.000	46.306.881.500	
		1	03	08	2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	38.642.900.000	46.450.147.000	46.306.881.500	
		1	03	08	2.001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Dokumen	242.900.000	242.900.000	242.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								Penataan Ruang
		1	03	08	2.0021	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	Dokumen	38.400.000.000	46.207.247.000	46.063.981.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	09		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>18.964.000.895</b>	<b>14.491.428.000</b>	<b>12.877.487.200</b>	
		1	03	09	2.001	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	<b>18.964.000.895</b>	<b>14.491.428.000</b>	<b>12.877.487.200</b>	
		1	03	09	2.0031	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27 Kawasan	27 Kawasan	27 Kawasan	Kawasan	18.371.066.895	13.898.494.000	12.197.807.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	09	2.0041	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27 Kawasan	27 Kawasan	27 Kawasan	Kawasan	592.934.000	592.934.000	679.679.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	95.5 %	95.5 %	%	<b>41.965.000.000</b>	<b>37.269.800.000</b>	<b>34.139.050.650</b>	
		1	03	10	2.001	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	95.5 %	95.5 %	%	<b>41.965.000.000</b>	<b>37.269.800.000</b>	<b>34.139.050.650</b>	
		1	03	10	2.0011	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	258.292.800	258.292.800	341.114.450	Dinas Pekerjaan Umum dan

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian								Penataan Ruang
		1	03	10	2.0021	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1500 M <sup>2</sup>	1500 M <sup>2</sup>	1500 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	3.015.100.000	3.015.100.000	316.258.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0041	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	dokumen	408.600.000	408.600.000	408.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0051	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	1.5 KM	1.5 KM	1.5 KM	KM	1.652.330.000	1.859.830.000	1.726.277.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0071	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 KM	2 KM	2 KM	KM	13.976.210.000	12.716.210.000	12.366.408.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0101	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.5 KM	1.5 KM	1.5 KM	KM	14.379.050.000	14.379.050.000	13.419.746.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0111	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6 KM	6 KM	6 KM	KM	5.852.247.200	3.295.297.200	4.059.337.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0121	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M2	10 M2	10 M2	M2	2.195.180.000	1.109.430.000	1.063.670.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	10	2.0191	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 M <sup>2</sup>	10 M <sup>2</sup>	10 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	227.990.000	227.990.000	437.640.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	3	11		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	77.98 %	77.98 %	%	<b>679.650.000</b>	<b>453.469.000</b>	<b>986.419.000</b>	
		1	03	11	2.001	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	100 orang	100 orang	orang	<b>491.250.000</b>	<b>207.669.000</b>	<b>207.669.000</b>	
		1	03	11	2.0041	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Orang	491.250.000	207.669.000	207.669.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	03	11	2.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	yang Mengikuti Pelatihan Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	yang Mengikuti Pelatihan Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	95 %	95 %	95 %	%	<b>188.400.000</b>	<b>245.800.000</b>	<b>778.750.000</b>	
		1	03	11	2.033	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	Orang	188.400.000	245.800.000	778.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	3	12		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.075.860.000</b>	
		1	03	12	2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	<b>950.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>732.000.000</b>	
		1	03	12	2.001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	200.000.000	200.000.000	177.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	12	2.002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	300.000.000	300.000.000	555.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	12	2.003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	250.000.000	250.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	12	2.004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	200.000.000	200.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	03	12	2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	
		1	03	12	2.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	100.000.000	100.000.000	140.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	03	12	2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	200.000.000	200.000.000	203.860.000	
		1	03	12	2.0024	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	200.000.000	200.000.000	203.860.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														150.000.416.000	135.921.022.426	132.221.835.526	
1	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1	04	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	80.20 skor	80.20 skor	Skor	11.865.404.195	10.243.843.705	10.285.243.705	
		1	04	01	2.001	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	18.673.400	18.673.400	18.673.400	
		1	04	01	2.0061	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	20 laporan	20 laporan	Laporan	18.673.400	18.673.400	18.673.400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.002	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	7.288.329.160	5.671.968.670	5.648.468.285	
		1	04	01	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	34 orang/bulan	34 orang/bulan	Orang/Bulan	7.227.329.160	5.610.968.670	5.610.968.670	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.0072	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	Dokumen	61.000.000	61.000.000	37.499.615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		1	04	01	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	%	142.950.000	142.950.000	139.600.000	
		1	04	01	2.0025	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Paket	132.950.000	132.950.000	129.600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.00510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	34 orang	34 orang	34 orang	Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.006	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	100 %	%	183.880.000	183.880.000	233.880.000	
		1	04	01	2.0096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Laporan	183.880.000	183.880.000	233.880.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.007	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %		10.301.785	5.101.785	223.610.017	
		1	04	01	2.0017	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	5.200.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.00710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 buah	1 buah	Unit	5.101.785	5.101.785	223.610.017	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.008	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	%	2.200.700.000	2.200.700.000	2.094.091.613	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	04	01	2.0038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Laporan	2.200.700.000	2.200.700.000	2.094.091.613	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.020.569.850</b>	<b>2.020.569.850</b>	<b>1.926.920.390</b>	
		1	04	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	65 unit	65 unit	65 unit	Unit	1.500.324.850	1.500.324.850	1.434.008.090	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.0099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 unit	1 unit	1 unit	Unit	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	01	2.0109	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	106 unit	106 unit	106 unit	Unit	420.245.000	420.245.000	342.912.300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	4	2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.477.810.500</b>	<b>2.477.810.500</b>	<b>2.477.810.500</b>	
		1	04	02	2.001	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	<b>86.150.000</b>	<b>86.150.000</b>	<b>86.150.000</b>	
		1	04	02	2.0061	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	86.150.000	86.150.000	86.150.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	02	2.003	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Lokasi	<b>2.295.210.500</b>	<b>2.295.210.500</b>	<b>2.295.210.500</b>	
		1	04	02	2.0063	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 unit rumah	3 unit rumah	3 unit rumah	Rumah	2.295.210.500	2.295.210.500	2.295.210.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	04	02	2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Operasional dan Pemeliharaan Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Operasional dan Pemeliharaan Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	100 %	100 %	%	<b>96.450.000</b>	<b>96.450.000</b>	<b>96.450.000</b>	
		1	04	02	2.0015	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	96.450.000	96.450.000	96.450.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	4	3		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99,5 %	99,5 %	99,5 %	%	<b>5.723.441.600</b>	<b>5.723.441.600</b>	<b>5.901.801.600</b>	
		1	04	03	2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	0.5 %	0.5 %	%	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	
		1	04	03	2.0012	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	95.000.000	95.000.000	95.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	03	2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	0.5 %	0.5 %	%	<b>5.628.441.600</b>	<b>5.628.441.600</b>	<b>5.806.801.600</b>	
		1	04	03	2.0013	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	38.736.000	38.736.000	236.996.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	03	2.0023	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 unit	160 unit	160 unit	Unit	2.222.940.600	2.222.940.600	2.222.940.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	03	2.0063	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	16.41 ha	16.41 ha	16.41 ha	Ha	3.366.765.000	3.366.765.000	3.346.865.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1	04	05		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	100 %	100 %	%	<b>19.677.447.900</b>	<b>22.957.447.900</b>	<b>22.957.447.900</b>	
		1	04	05	2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Prosentase penyelenggaraan PSU	Persentase penyelenggaraan	100 %	100 %	100 %	%	<b>19.677.447.900</b>	<b>22.957.447.900</b>	<b>22.957.447.900</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	04	05	2.002	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Lokasi	19.677.447.900	22.957.447.900	22.957.447.900	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
														<b>39.744.104.195</b>	<b>41.402.543.705</b>	<b>41.622.303.705</b>		
<b>BIDANG 2</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	100 %	100 %	%	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>02</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase pemberian izin lokasi	Persentase pemberian izin lokasi	100 %	100 %	100 %	%	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
		2	10	02	2.001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %	%	<b>36.200.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>36.200.000</b>	
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %	%	<b>36.200.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>36.200.000</b>	
		2	10	04	2.001	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	36.200.000	36.200.000	36.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Prosentase Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	100 %	100 %	100 %	%	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>263.400.000</b>	
		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	100 %	100 %	%	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>263.400.000</b>	
		2	10	10	2.001	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 laporan	10 laporan	10 laporan	Laporan	80.000.000	80.000.000	263.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
															<b>131.200.000</b>	<b>131.200.000</b>	<b>314.600.000</b>	
															<b>39.875.304.195</b>	<b>41.533.743.705</b>	<b>41.936.903.705</b>	
<b>BIDANG 1</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	A Skor	Skor	<b>18.197.299.571</b>	<b>18.135.488.946</b>	<b>17.941.018.760</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		2	11	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>67.000.100</b>	<b>67.000.100</b>	<b>67.660.100</b>	
		2	11	01	2.061	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	67.000.100	67.000.100	67.660.100	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>10.148.268.592</b>	<b>10.214.676.488</b>	<b>9.759.198.388</b>	
		2	11	01	2.012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 orang/bulan	89 orang/bulan	89 orang/bulan	Orang/bulan	10.148.268.592	10.214.676.488	9.759.198.388	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>304.355.825</b>	<b>234.695.400</b>	<b>270.427.400</b>	
		2	11	01	2.025	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	3 paket	3 paket	paket	154.049.325	121.878.600	157.200.600	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.055	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 orang	230 orang	230 orang	orang	150.306.500	112.816.800	113.226.800	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>245.712.000</b>	<b>245.712.000</b>	<b>390.508.000</b>	
		2	11	01	2.096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	245.712.000	245.712.000	390.508.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	11	01	2.0117	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	unit	5.550.000	5.550.000	5.550.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.008	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>5.849.159.932</b>	<b>5.827.964.436</b>	<b>5.693.060.712</b>	
		2	11	01	2.0038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	laporan	696.295.004	675.099.508	680.284.208	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.0048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	5.152.864.928	5.152.864.928	5.012.776.504	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.009	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>1.577.253.122</b>	<b>1.539.890.522</b>	<b>1.754.614.160</b>	
		2	11	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	15 unit	unit	1.318.205.722	1.318.205.722	1.320.115.722	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.0069	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	unit	189.050.800	189.050.800	190.260.800	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	2.0099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	unit	69.996.600	32.634.000	244.237.638	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen	79,49 persen	79,49 persen	persen	<b>315.429.000</b>	<b>293.565.000</b>	<b>299.284.000</b>	
		2	11	02	2.001	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	<b>152.694.000</b>	<b>130.830.000</b>	<b>123.700.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	11	02	2.001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	152.694.000	130.830.000	123.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	02	2.002	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	<b>162.735.000</b>	<b>162.735.000</b>	<b>175.584.000</b>	
		2	11	02	2.002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	162.735.000	162.735.000	175.584.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	50 persen	50 persen	persen	<b>923.491.779</b>	<b>923.965.520</b>	<b>1.034.768.770</b>	
		2	11	03	2.001	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	78 kegiatan/usaha	78 kegiatan/usaha	78 kegiatan/usaha	Kegiatan/usaha	<b>663.400.063</b>	<b>506.344.924</b>	<b>607.704.574</b>	
		2	11	03	2.001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	276.787.919	194.732.780	231.912.780	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	03	2.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	386.612.144	311.612.144	375.791.794	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	03	2.002	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	17 usaha/kegiatan	17 usaha/kegiatan	17 usaha/kegiatan	Usaha/kegiatan	<b>260.091.716</b>	<b>417.620.596</b>	<b>427.064.196</b>	
		2	11	03	2.002	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	laporan	135.091.916	292.387.796	301.831.396	Dinas Lingkungan Hidup



1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	11	03	2.003 2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 titik	2 titik	2 titik	titik	124.999.800	125.232.800	125.232.800	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>76.700.000</b>	<b>76.700.000</b>	<b>76.700.000</b>	
		2	11	04	2.001	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	342 spesies	342 spesies	342 spesies	spesies	<b>76.700.000</b>	<b>76.700.000</b>	<b>76.700.000</b>	
		2	11	04	2.001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	76.700.000	76.700.000	76.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	75 persen	75 persen	75 persen	persen	<b>75.000.000</b>	<b>50.025.000</b>	<b>51.985.000</b>	
		2	11	05	2.001	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	17 lokasi	17 lokasi	17 lokasi	lokasi	<b>75.000.000</b>	<b>50.025.000</b>	<b>51.985.000</b>	
		2	11	05	2.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	dokumen	75.000.000	50.025.000	51.985.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	6		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	76,47 persen	76,47 persen	persen	<b>342.740.000</b>	<b>323.629.200</b>	<b>323.629.200</b>	
		2	11	06	2.001	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	17 perusahaan	17 perusahaan	17 perusahaan	perusahaan	<b>342.740.000</b>	<b>323.629.200</b>	<b>323.629.200</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Daerah Kabupaten/Kota									
		2	11	06	2.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	197.740.000	178.629.200	177.829.200	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	06	2.003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	10 laporan	10 laporan	10 laporan	laporan	145.000.000	145.000.000	145.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	8		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>614.764.500</b>	<b>662.194.000</b>	<b>672.265.000</b>	
		2	11	08	2.001	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	kegiatan	<b>614.764.500</b>	<b>662.194.000</b>	<b>672.265.000</b>	
		2	11	08	2.002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	614.764.500	662.194.000	672.265.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	10		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	100 persen	persen	<b>100.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	
		2	11	10	2.001	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 kasus	5 kasus	5 kasus	kasus	<b>100.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	11	10	2.001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	10	2.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	55.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	72 persen	72 persen	persen	4.304.290.776	6.088.500.000	6.184.615.336	
		2	11	11	2.001	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah sampah yang dikelola	43780 ton	43780 ton	43780 ton	ton	4.204.290.776	5.988.500.000	6.084.615.336	
		2	11	11	2.002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	lokasi	250.000.000	250.000.000	201.015.336	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11	2.003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32280 ton	32280 ton	32280 ton	ton	2.239.000.000	2.239.000.000	2.130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11	2.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	Kelompok	147.659.200	89.500.000	92.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11	2.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	3 unit	3 unit	3 unit	unit	1.567.631.576	3.410.000.000	3.661.600.000	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan, Pengumpulan, Pengkangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengkangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								
		2	11	11	2.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	kelompok	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
		2	11	11	2.0023	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 unit	3 unit	3 unit	unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
														24.949.715.626	26.699.067.666	26.729.266.066	
<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>		2	15	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	80.4 skor	80.4 skor	Skor	11.429.468.520	10.745.078.790	10.564.529.014	
		2	15	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	%	97.600.000	97.600.000	93.740.000	
		2	15	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Dokumen	97.600.000	97.600.000	93.740.000	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.002	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	%	7.072.466.452	6.730.176.722	6.399.332.086	
		2	15	01	2.0012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	Orang/Bulan	7.072.466.452	6.730.176.722	6.399.332.086	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.005	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	100 %	%	406.290.000	406.290.000	370.744.166	
		2	15	01	2.0025	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	132 Orang	132 Orang	Orang	204.240.000	204.240.000	204.235.166	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.0105	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134 Orang	134 Orang	134 Orang	Orang	202.050.000	202.050.000	166.509.000	Dinas Perhubungan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	15	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>210.043.000</b>	<b>210.043.000</b>	<b>276.645.000</b>	
		2	15	01	2.0096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	60 laporan	Laporan	210.043.000	210.043.000	276.645.000	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan peralatan kantor	Persentase pemenuhan peralatan kantor	100 %	100 %	100 %	%	<b>452.528.373</b>	<b>110.428.373</b>	<b>110.428.373</b>	
		2	15	01	2.0027	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	Unit	342.100.000	-	-	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.0107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Unit	110.428.373	110.428.373	110.428.373	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	%	<b>2.206.150.695</b>	<b>2.206.150.695</b>	<b>2.057.999.389</b>	
		2	15	01	2.0038	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23 Paket	23 Paket	Paket	2.206.150.695	2.206.150.695	2.057.999.389	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>984.390.000</b>	<b>984.390.000</b>	<b>1.255.640.000</b>	
		2	15	01	2.0019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	57 Unit	57 Unit	Unit	626.065.000	626.065.000	626.065.000	Dinas Perhubungan
		2	15	01	2.0099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	222.250.000	222.250.000	493.500.000	Dinas Perhubungan

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	15	01	2.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Unit	136.075.000	136.075.000	136.075.000	Dinas Perhubungan
		2	15	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	92 %	92 %	%	<b>7.110.085.176</b>	<b>7.110.085.176</b>	<b>7.739.534.952</b>	
		2	15	02	2.022	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	85 %	85 %	85 %	%	<b>2.852.340.520</b>	<b>2.852.340.520</b>	<b>3.296.725.427</b>	
		2	15	02	2.021	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	52.350.000	52.350.000	120.350.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.022	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	200 Unit	200 Unit	Unit	1.042.174.800	1.042.174.800	1.092.124.400	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.024	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Unit	1.757.815.720	1.757.815.720	2.084.251.027	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.023	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Persentase terminal berfungsi baik	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	100 %	100 %	%	<b>189.200.000</b>	<b>189.200.000</b>	<b>189.200.000</b>	
		2	15	02	2.024	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	Unit	189.200.000	189.200.000	189.200.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.024	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir	Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.026.708.000</b>	<b>1.026.708.000</b>	<b>1.026.708.000</b>	
		2	15	02	2.024	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1.026.708.000	1.026.708.000	1.026.708.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.025	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase kendaraan lulus uji	Persentase kendaraan lulus uji	100 %	100 %	100 %	%	<b>627.634.800</b>	<b>627.634.800</b>	<b>652.225.800</b>	

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	15	02	2.0015	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Unit	232.486.000	232.486.000	257.077.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.0075	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Unit	395.148.800	395.148.800	395.148.800	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.006	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	100 %	100 %	%	<b>59.304.000</b>	<b>59.304.000</b>	<b>56.304.000</b>	
		2	15	02	2.0016	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	59.304.000	59.304.000	56.304.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.007	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengurusan rekomendasi analalin	Persentase pengurusan rekomendasi analalin	100 %	100 %	100 %	%	<b>359.616.000</b>	<b>359.616.000</b>	<b>231.316.000</b>	
		2	15	02	2.0047	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	359.616.000	359.616.000	231.316.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.008	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Persentase terlaksananya kebijakan	Persentase terlaksananya kebijakan	100 %	100 %	100 %	%	<b>946.667.000</b>	<b>946.667.000</b>	<b>944.622.525</b>	
		2	15	02	2.0018	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	4 Orang	4 Orang	Orang	51.300.000	51.300.000	51.300.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.0028	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	775.103.000	775.103.000	782.858.525	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.0048	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	120.264.000	120.264.000	110.464.000	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.009	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang</b>	Persentase ketersediaan angkutan umum	Persentase ketersediaan angkutan umum	100 %	100 %	100 %	%	<b>1.048.614.856</b>	<b>1.048.614.856</b>	<b>1.342.433.200</b>	

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<b>dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										
		2	15	02	2.001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 Unit	41 Unit	41 Unit	Unit	1.048.614.856	1.048.614.856	1.342.433.200	Dinas Perhubungan
														<b>18.539.553.696</b>	<b>17.855.163.966</b>	<b>18.304.063.966</b>	
		<b>Pagu Anggaran Prioritas IV : Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan</b>											<b>233.364.989.517</b>	<b>222.008.997.763</b>	<b>219.192.069.263</b>		

Sumber : Bappeda Kota Madiun, data diolah, 2023



**Tabel 5. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Target RPJMD	Target RKPD Perubahan	Keterangan
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	4,73	3,08-5,75	5,70	Indikator makro
2	PDRB Per Kapita	juta	74,65	74,65	65,34	80,43	Indikator makro
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87	6,87	6,42	6,89	Indikator Tujuan Kota
4	Tumbuhan ekonomi	Indeks	0,345	0,398	0,36	0,329	Indikator Tujuan Kota
5	Angka Kemiskinan	%	5,09	4,76	4,65	4,48	Indikator sasaran kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,25	82,01	82,15	82,47	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>						
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	91,07%	94,33%	93%	93%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	94,33%	94%	99,66%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	-	91%	91%	91%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	21,31%	20%	20%	Indikator Sasaran PD
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	58%	58%	58%	Indikator Program PD
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	94,33%	91%	99,66%	Indikator Program PD
9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 layanan	3	3	3	Lppd
16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1512 orang	1564	830	1512	Lppd
17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 tim	4 (PPT PPPA, SLRT, PKSAI dan LK3)	2 (PPT, SLRT)	2	Lppd
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1512 orang	1564	830	1512	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8
		19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4 unit	5	4	4	Lppd
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1512 orang	1564	165	830	Lppd
		21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2 unit	2	2	2	Lppd
		22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	245 orang	278	55	245	Lppd
		23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	1 orang	10	12	12	Lppd
		24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18 peralatan	18	9	18	Lppd
		25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1 paket	1	1	1	Lppd
		26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	51 orang	278	170	170	Lppd
		27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1 orang	1	1	1	Lppd
		28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	177 orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	Lppd
		29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang	120 orang	367	65	122	Lppd
		30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	2 kegiatan	3	2	2	Lppd
		31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	6 orang	3	5	5	Lppd
		32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	107 orang	278	109	109	Lppd
		33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	245 orang	278	224	224	Lppd
		34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	245 orang	278	17	224	Lppd
		35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	10 orang	20	64	64	Lppd
		36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	5734 orang	17	3.300	3300	Lppd
		37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	0	17	1.000	3.300	Lppd
		38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	-	0	0	Lppd
		39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		5734 paket	17	0	3300	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		4 orang	17	300	300	Lppd
	41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		177 orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	Lppd
	42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		107,53%	100	97	97	Spm
	43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		137,42%	737	465	465	Spm
	44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		204,44%	213	139	139	Spm
	45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100%	72	94	94	Spm
	46	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		173,76%	17	36	36	Spm
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,42	94,57	94,49	94,57	Indikator tujuan kota
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,18	78,03	77,20	78,03	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	7,83%	13%	13%	13%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	%	-	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase keluarga yang berkualitas	%	3%	8%	12%	12%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	-	0,0002	0,002 nilai	0,002	Indikator Sasaran PD
	10	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	14,25%	11,15%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	5%	15,7%	20%	20%	Indikator Program PD
	12	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
	13	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		-	0,0002	0,003	0,003	Indikator Program PD
	15	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	-	12,50%	22,43%	22,43%	Indikator Program PD
	16	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	-	0,0002	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
	17	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,25%	11%	20%	20%	Lppd
	18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,00%	0,0216%	0,00%	0,03	Lppd
	19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		8,74%	6,80%	0,00%	0,00%	Lppd
	20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		36 lembaga	36	65	65	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		34 program	34	123	123	Lppd
	22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		2 media massa	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
	23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		15 lembaga	15	15	15	Lppd
	24	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		15 lembaga		15	15	Lppd
	26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		14 lembaga	15 lembaga	15	15	Lppd
	27	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1 organisasi	14 lembaga	25	25	Lppd
	28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		45 orang	45	45	45	Lppd
	29	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		1 lembaga	1	15	15	Lppd
	30	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		20 lembaga	20	20	20	Lppd
	31	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		3 kebijakan	3	2	2	Lppd
	32	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		1 lembaga	1	1	1	Lppd
	33	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
c		Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
	<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>						
	2	Jumlah prestasi pemuda	Prestasi	171 prestasi	205	17 prestasi	171	Indikator Tujuan PD
	4	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Pemuda/ group	-	80	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Kualitas Sarpras	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	-	111%	25%	25%	Indikator Program PD
	8	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	-	63%	15%	15%	Indikator Program PD
	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	43,10%	44,47%	40,81%	43,10%	Lppd
	10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,19%	47,43%	45,49%	47,19%	Lppd
	11	Peningkatan prestasi olahraga	medali	97	108	35	70	Lppd
	12	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	135 orang	156	100	135	Lppd
	13	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	135 orang	156	0	135	Lppd
	14	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	100 orang	156	100	100	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	15	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5 orang	5	5 orang	5 orang	Lppd
	16	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158 orang	158	158	158	Lppd
	17	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	2 event	6	3	3	Lppd
	18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	orang	6 orang	80	7	7	Indikator Lama
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>						
	2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	-	32 objek	65	65	65	Indikator Tujuan PD
	4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang/group	27 group/ 510 orang	231 orang / group	44 orang/ group	44 orang /group	Indikator Sasaran PD
	5	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		5 objek	6	6	6	Indikator Sasaran PD
	6	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	6,80%	200%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	25%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	9	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	Lppd
	11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32 obyek	366	366	366	Lppd
	12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32 obyek	366	366	366	Lppd
	13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32 obyek	366	366	366	Lppd
	14	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	65 orang	231	100	100	Lppd
	15	Register cagar budaya (pendaftaran, pengasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148 cagar budaya	148	148	148	Lppd
	16	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	Lppd
	17	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data		0 cagar budaya	0	0	0	Lppd
	18	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2 cagar budaya	2	2	2	Lppd
	19	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	Lppd
	20	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	Lppd
	21	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	Lppd
	22	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	Lppd
	23	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	0	5	6	6	Lppd
	24	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota		11 tim	11	0	11	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	25	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0	0	0	Lppd
	26	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman		0	0	0	0	Lppd
	27	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		0	0	0	0	Lppd
	28	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	Lppd
	29	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	Lppd
<b>II</b>		<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
a		Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib						
<b>1</b>		<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>						
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>						
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,67	11,16	11,67	Indikator sasaran kota
	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,43	14,42	14,43	Indikator sasaran kota
	3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	65%	68%	66%	66%	Indikator Tujuan PD
	4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	5	APM Paud, SD, dan SMP	%	130%	105,48%	100%	98,00%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	%	65%	68%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	85%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	65%	68%	25%	65	Indikator Program PD
	12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		2.483	3.030	4.000	4.000	Lppd
	13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		13.908	17.041	16.500	16.500	Lppd
	14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		5.977	9.282	7.500	7.500	Lppd
	15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		176	273	180	180	Lppd
	16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	100	92	16	99	Lppd
	17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	130	130	50	130	Lppd
	18	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	130	130	90	130	Lppd
	19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:15	01:10	01.13	1,15	Lppd
	20	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	543	511	465	550	Lppd
	21	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	482	482	460	482	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	22	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	30	30	10	30	Lppd
	23	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	70	70	70	70	Lppd
	24	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.767	2646	2.658	2980	Lppd
	25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.886	2.787	3.284	3.284	Lppd
	26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	13.336	13.531	11.000	13.336	Lppd
	27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	9.648	8.896	10.000	10.000	Lppd
	28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01:19	01.22	01.22	Lppd
	29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01:16	01.27	01.27	Lppd
	30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1208	1225	715	1208	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	813	733	538	813	Lppd
	32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	0,0840277 78	01:74	01.04	01:04	Lppd
	33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:39	01:57	01.05	01:39	Lppd
	34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	332	298	165	332	Lppd
	35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	119	183	72	119	Lppd
	36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1233	1152	658	1233	Lppd
	37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	723	701	681	723	Lppd
	38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	67	73	73	73	Lppd
	39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	22	23	23	23	Lppd
	40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	148	148	170	170	Lppd
	41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	128	123	75	128	Lppd
	42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	3	1	3	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	0	Lppd
	44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	0	Lppd
	45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:04	01:12	01.29	01.29	Lppd
	46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	43	44	35	43	Lppd
	47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	43	39	35	43	Lppd
	48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	67	73	73	73	Lppd
	49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	7	6	7	Lppd
	50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	94,04%	30.270	26.311	26.311	spm
	51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	12,74%	273	225	26.311	spm
	52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	96,17%	3.030	4.000	26.311	spm
	53	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	%	-	1,96	1	1	spm
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>						
	1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,83	73,13	72,83	73,13	Indikator sasaran kota
	2	Persentase Keluarga Sehat	%	52%	55%	54%	54%	Indikator tujuan PD
	5	Persentase rumah tangga sehat	%	69,43%	64,88%	71,00%	71,00%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase rumah sehat	%	94,41%	88,33%	89,00%	89,00%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	59,67%	80,67%	62,50%	62,50%	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Keluarga Sehat	%	0,51 indek	0,55	0,54	0,54	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	%	85,00%	90,00%	91,00%	91,00%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	84,32%	85,76%	84,80%	84,80%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	85,00%	75,00%	76,00%	87,00%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	93,63%	98,73%	99,00%	99,00%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se- Kota Madiun	%	84,92%	86,02%	86,40%	86,40%	Indikator Sasaran PD
	14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	86,63%	97,71%	87,53%	87,53%	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	58,33%	91,67%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
	16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	85%	95%	91%	91%	Indikator Program PD



1	2	3	4	5	6	7	8	
	17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	87,88%	91%	88%	88%	Indikator Program PD
	18	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	59,67%	80,67%	62,50%	62,50%	Indikator Program PD
	19	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	skor	0,48%	4,92	0.48%	0.48%	Lppd
	20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	100%	Lppd
	26	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,33%	100%	100%	100%	Lppd
	28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54,99%	100%	100%	100%	Lppd
	29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	31	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	100%	100%	100%	Lppd
	32	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	33	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	tempat	8	8	8	8	Lppd
	34	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	tempat	8	8	8	8	Lppd
	35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
	36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	347	479	330	347	Lppd
	37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	305	454	291	305	Lppd
	39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
	40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	305	422	289	305	Lppd
	41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9 jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
	42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1068	1253	571	1068	Lppd
	43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	2 jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	380	1043	371	380	Lppd
	45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	590	652	578	590	Lppd
	47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1050	1178	1286	1286	Lppd
	49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	164	193	156	164	Lppd
	51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	178	207	169	178	Lppd
	53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	22	30	30	Lppd
	55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
	56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300	300	748	748	Lppd
	57	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	58	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	377	367	376	377	Lppd
	59	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	Spm
	60	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,29%	100,13%	100%	100%	Spm
	61	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	101,19%	100,53%	100%	100%	Spm
	62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100,62%	100%	100%	Spm
	63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	100%	Spm
	64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	110,81%	100%	100%	Spm
	65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	99,33%	102,03%	100%	100%	Spm
	66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	54,99%	56,23%	100%	100%	Spm
	67	Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	121,45%	100%	100%	Spm
	68	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	115,09%	106,19%	100%	100%	Spm
	69	Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	126,41%	100%	100%	Spm
	70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	102,10%	118,49%	100%	100%	Spm

1	2	3	4	5	6	7	8
III	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
1	Indeks Ketentraman	Indeks	78,74	81,25	77,15	81,25	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
2	Indeks Rasa Aman	Indeks	81	82,18	76,27	82,18	Lanjutan Indikator sasaran kota
4	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	72,45	82	76,2	76,2	Indikator Tujuan PD
5	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,57%	97%	97%	97%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	97%	97%	97%	Indikator Program PD
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	97%	97%	97%	Lppd
10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
13	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		2.876	2.051	2.000	2.000	Lppd
14	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.348 orang	1.348	1.300 orang	1300	Lppd
15	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		93 perda dan perwal	76	76	76	Lppd
16	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
17	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
18	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5 layanan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd
20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	Ada	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
21	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Ada	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd
22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		1 pos	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		11 sarpras	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	22 orang	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	21 orang	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	2 kegiatan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	27	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	Spm
	28	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Spm
	30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,84 indeks	108,85 indeks	113 indeks	113 indeks	Indikator Tujuan PD
	32	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	33	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	34	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	35	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	4 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
	39	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	40	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	100%	0%	0%	0%	Indikator Program PD
	41	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	2.575 orang	153.367	845 orang	3.420 orang	Lppd
	42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.101 orang	2.395	50 orang	1151 orang	Lppd
	43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	12 orang	156 orang	400 orang	400 orang	Lppd
	44	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100%	100%	100%	Lppd
	45	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	46	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0%	100%	100%	Lppd
	47	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0%	0%	0%	Lppd
	48	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	44,50%	67,34%	5%	50%	Lppd
	49	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	42,76%	58,67%	5%	47%	Lppd
	50	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	51	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	Lppd
	52	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	Lppd
	53	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	54	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	55	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	56	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	Spm
	57	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	100%	Spm
	58	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	Spm
<b>2</b>		<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>						
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>						
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	8,15	6,39	5,12	6,15	Lanjutan Indikator sasaran kota
	2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	79,15%	92%	30%	30%	Indikator Tujuan PD
	3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	40%	48,90%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
	8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	10%	70,91%	20%	20%	Indikator Sasaran PD
	9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	10%	18,85%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	20%	78,10%	30%	30%	Indikator Program PD
	15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	10%	97,6%	15%	15%	Indikator Program PD
	16	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	16%	30%	16%	16%	Indikator Program PD
	17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,62%	69,23%	76,92%	84,62%	Lppd
	18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,17%	69,03%	68%	69,17%	Lppd
	19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10.748.101.000	10,748,101,000	12.750.000.000	12.750.000.000	Lppd
	20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100%	100%	72,50%	90%	Lppd
	21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,61%	91,76%	52%	71,61%	Lppd
	22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	Ada	1	1	Lppd
	23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		0	0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.		0	0	12	12	Lppd
25	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	44%	70%	30%	44%	Lppd
26	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100%	59%	30%	64%	Lppd
27	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	100%	10%	50%	90%	Lppd
28	Persentase LPK yang terakreditasi	%	36%	34%	40%	40%	Lppd
29	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	92,86%	41%	100%	100%	Lppd
30	Jumlah penganggur yang dilatih	%	90 orang	137 orang	230	230	Lppd
31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
32	Persentase penyerapan lulusan	%	100%	83%	20%	90%	Lppd
33	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	44,44%	73%	20%	44,50%	Lppd
34	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0%	0%	25%	25%	Lppd
35	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0%	0%	25%	25%	Lppd
36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	0%	1,50%	1,50%	Lppd
37	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	tidak ada	64%	64%	Lppd
38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	20,25%	25%	27%	27%	Lppd
39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	61,90%	62%	30%	62%	Lppd
40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		21 SP/SB	21 SP/SB	23	23	Lppd
41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	8,96%	11%	100%	100%	Lppd
42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100%	100%	73%	100%	Lppd
43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,52%	2%	4%	4%	Lppd
44	Jumlah mogok kerja		0	0	4	4	Lppd
45	Jumlah penutupan perusahaan		3 perusahaan	0	9	9	Lppd
46	Jumlah perselisihan kepentingan		0	0	14	14	Lppd
47	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0	1	1	Lppd
48	Jumlah perselisihan PHK		8	13	14	8	Lppd
49	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		14 orang	34 orang	50	14	Lppd
50	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	13	50	50	Lppd
51	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		tidak ada	tidak ada	1	1	Lppd
52	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100%	100%	70%	90%	Lppd
53	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		173	188	120	173	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,84	85,32	80,94	80,94	Indikator Tujuan PD
2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95,8 indeks	97,1	95,7	95,7	Indikator Sasaran PD
3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	102,90%	97	100	100	Indikator Program PD
4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	94%	98,3	80	80	Indikator Program PD
5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	-		25%	25%	Indikator Program PD
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	181,01%	80	100	100	Lppd
7	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	Ada		tidak	Ada/ 1	Lppd
8	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	Lppd
11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	Ada	0	1	1	Lppd
12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	Lppd
13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	Lppd
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	69,80%	73,32%	63,00%	63,00%	Indikator Sasaran PD
3	Menurunnya Unmet Need	%	< 8 %	6,74%	7,50%	7,50%	Indikator Program PD
4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	70%	86,16%	82,00%	82,00%	Indikator Program PD
5	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	4 SSK	11 SSK	8 SSK	8 SSK	Indikator Program PD
6	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	3 KAMPUNG KB	7 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	Indikator Program PD
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,84%	73,32%	72,79%	72,79%	Lppd
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,90%	6,74%	<7.8%	7,50%	Lppd
9	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		tidak	-	-	-	Lppd
10	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		27 tahun	26-30 th	Wanita >21 tahun	24,8	Lppd
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	0,75	3,79	0,52	1,15	Lppd
12	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	100%	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	8	
	13	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	24	27	16	24	Lppd
	14	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	97,73%	45	97,78%	97,78%	Lppd
	15	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,13%	<b>32,73%</b>	52,00%	52,00%	Lppd
	16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		56 KKBPK	63	56	56	Lppd
	17	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	48,46%	77,90%	45,02%	48,48%	Lppd
	18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	69,84%	<b>11,11%</b>	64,96%	18,51%	Lppd
	19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>						
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06	2,86	2,87 (BAIK)	2,87	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,95	3,37	2,95	2,95	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,3	2,18	1,97	2,23	Indikator Tujuan PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	97,33	99,25	92	92	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	83%	89%	80%	83%	Indikator Program PD
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100%	74%	100%	Lppd
	11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	81,71%	81,71%	81,92%	81,92%	Lppd
	12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd



1		2		3	4	5	6	7	8
	<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>						
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	20	1	1	Indikator Program PD
		3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		4	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	1 survey	7	1	1	Lppd
		6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	1 kompilasi	7	1	1	Lppd
		7	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	1 survey	20	1	1	Lppd
		8	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	100%	Lppd
		9	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	100%	Lppd
	<b>VII</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>						
		1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	83,57%	96,74	68%	83.57%	Lppd
		4	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		0%	0	0	0	Lppd
		5	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		6	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100%	100%	80%	100%	Lppd
		7	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100%	100%	89,00%	100%	Lppd
	<b>VIII</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>						
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,6	2,7	2,44	2,6	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	10,61	18,44	90	90	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	6%	16,97%	5,95%	6%	Indikator Program PD
		4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	37%	51,19%	37%	37%	Indikator Program PD
		5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		379,01%	(678962/151491) = 4,48%	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,70%	(7139/151491) = 4,71%	4,60%	4,70%	Lppd
7	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0,37%	(567/151491) = 0,37%	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	51,93%	-	58%	58%	Lppd
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	56 naskah kuno	86	10 eksemplar	0	Lppd
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		56 naskah kuno	NIHIL	NIHIL	0	Lppd
11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	168	NIHIL	NIHIL	Lppd
<b>IX</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>						
1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	59	79,06	58	59	Indikator Tujuan PD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Skor	100 skor	91,5 skor	88%	100 skor	Indikator Program PD
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	83,33%	8,8 skor	8,6	8,6	Indikator Program PD
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	100%	9%	100%	Lppd
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	100%	9%	100%	Lppd
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100%	100%	6%	100%	Lppd
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		belum dilaksanakan pemusnahan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	belum dilaksanakan pemusnahan	1	1 kali	1 kali	Lppd
10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	22 arsip	28	31 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1 arsip	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	1 arsip	19	27 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	Lppd
13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	1 arsip	3	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		1 arsip	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd	
<b>3</b>		<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>							
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>							
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD	
	2	persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	%	-	20%	20%	20%	Indikator Program PD	
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	Lppd	
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	Lppd	
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	Lppd	
<b>4</b>		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>							
<b>I</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>							
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	65,55%	B (69.26)	(B) 69	(B) 69,26	Lanjutan Indikator Tujuan Kota	
	2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	70,97	BB (77.15)	BB (79)	BB (79)	Lanjutan indikator sasaran kota	
	3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	100%		100%	100%	Indikator Tujuan PD	
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi/Sangat Tinggi	Sedang (3,3805)	Sedang (2,98)	Tinggi	Tinggi (3,41)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota	
	5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,456 (baik)	86,964	85 (baik)	86,964	Lanjutan Indikator Sasaran Kota	
	6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	B	34.73 Istimewa	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan	
	7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD	
	8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	72%	78,57%	74%	74%	Indikator Tujuan PD	
	9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD	
	10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD	
	12	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%		100%	100%	Indikator Program PD	
	14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD	

1			2	3	4	5	6	7	8
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,71%	13,63%	14,00%	14,00%	Lppd
		17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	32,66%	29,93%	30,00%	30,00%	Lppd
	<b>II</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>						
		2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90,297	90.299	85	85	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase Tertib Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	90,297	90.299	81	85	Indikator Program PD
	<b>5</b>		<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						
	<b>III</b>		<b>Perencanaan</b>						
		2	Indeks Perencanaan	Indeks	34	34	35	35	Indikator Tujuan PD
		5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	35	34	34	36	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	35	33	34	36	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	100%	94%	93%	96%	Indikator Sasaran PD
		8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	23,65	24	25	25	Indikator Sasaran PD
		9	persentase program penangan covid-19 yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
		10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%	92%	100%	93%	93%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	<b>IV</b>		<b>Kuangan</b>						
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
		3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	58,30%	99%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017	%	39,76%	36,26%	33%	35%	Indikator Sasaran PD
2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	23,07%	16,1%	15%	20%	Indikator Program PD
<b>VI</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2693 (52,99)	2086	1925	58,4	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks	35	36,6	35	35	Indikator Sasaran PD
3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%	80%	85%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%	5%	95%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>						
<b>VII</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>						
2	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	3.46	85,35	83,5	83,5	Indikator Tujuan PD
5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	89 indeks	89,4	90 indeks	90 indeks	Indikator Sasaran PD
7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	Nilai	4.17	4,36	4.2	4.2	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
17	Persentase rekomendasi hasil revidu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	100%	65%	65%	Indikator Sasaran PD



1	2	3	4	5	6	7	8	
	18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	83,10	75 nilai	75 nilai	Indikator Sasaran PD
	19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	84,22	79,01	79,01	Indikator Sasaran PD
	20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-		2.50	2.50	Indikator Sasaran PD
	21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	3.0	3	2.50	3,6	Indikator Sasaran PD
	22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	3 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
	23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	94,36%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
	24	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
	25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	3,51	3.75	3.75	Indikator Sasaran PD
	26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	74%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	-	100%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	28	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	30%	100%	40%	40%	Indikator Program PD
	29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	3	3	3	3	Lppd
	31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	2+	3	3	3	Lppd
<b>7</b>		<b>Unsur Kewilayahan</b>						
<b>VIII</b>		<b>Kecamatan</b>						
	2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	44%	100%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	33%	89%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	11%	100%	44%	44%	Indikator Sasaran PD
	5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	3,08	3,76	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
	6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	2,9	3,45	2,96	2,96	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	3,25	3,27	3,5	3,5	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	
	10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%		100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100%		100%	100%	Indikator Program
	15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	90,490 skor	90,54	90,03	90.50	Indikator Program
	16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,7 skor	87,82	87,8	87.8	Indikator Program
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88,117 skor	88,28	88,78	88.78	Indikator Program
	18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	19	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	20	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	22	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	23	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
<b>8</b>		<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>						
<b>IX</b>		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>						
	1	Indeks Kerukunan	Indeks	74,36	B (74,40) (Harmonis)	B (74,46) (Harmonis)	B (74,46) (Harmonis)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	persentase konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	organisasi	68,80%	2 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	Indikator Sasaran PD
	5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	Kejadian/konflik	-10	1	(-) 10	(-) 10	Indikator Sasaran PD
	6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	69%	68%	68%	68%	Indikator Program PD
	9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>III</b>		<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						

1		2	3	4	5	6	7	8
A		<b>Kemampuan Ekonomi</b>						
I		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
	3	persentase Usaha Mikro yang beromset naik	%	0,05%	20,00%	0,09%	0,09%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	80%	85%	85%	85%	Indikator Tujuan PD
	7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	3%	5%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	2,50%	3,60%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	%	15%	25%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	%	10%	20%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7%	20,18%	7,33%	7,33%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	75,00%	98,59%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
	16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,50%	4,00%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD
	17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	83,33%	84,62%	80,65%	80,65%	Lppd
	18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	12%	0,44%	0,44%	Lppd
	19	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0,64%	6%	80%	80%	Lppd
	20	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	0	0	0	Lppd
	21	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,23%	23,72%	16,13%	16,13%	Lppd
	22	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25,64%	23,72%	19,35%	19,35%	Lppd
	23	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	96,15%	71,79%	96,77%	96,77%	Lppd
	24	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	2,80%	1,29%	2,35%	2,35%	Lppd
	25	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	22,44%	1,29%	22,58%	22,58%	Lppd
	26	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	Lppd
	27	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	80,77%	85,26%	81,29%	81,29%	Lppd
	28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	83,33%	74,36	80,65%	80,65%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	29	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29	1,29%	1,29%	Lppd
	30	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	89,74%	74,36%	78,71%	78,17%	Lppd
	31	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29%	1,29%	1,29%	
	32	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,34%	0,59%	0,42%	0,42%	Lppd
	33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,16%	0,15	0,14%	0,15%)	Lppd
	35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,02%	0,05%	0,06%	0,06%	Lppd
	36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,14%	0,06%	0,28%	0,28%	Lppd
	37	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,76%	0,38%	0,84%	0,84%	Lppd
	38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,19%	0,14%	0,12%	0,14%)	Lppd
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>						
	1	ICOR	Poin	0,42		4,58	4,58	Indikator Tujuan PD
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	202 M	214 M	194 M	194 M	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	99,86%	100%	82%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan Wali Kota yang terkait dengan investasi	rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	19%	33%	32%	32%	Indikator Program PD
	8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	99,86%	99,69%	90%	90%	Indikator Program PD
	9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	100 perusahaan	110	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
	10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	-38,30%	111,00%	0,52%	0,52%	Lppd
	12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	tidak ada insentif	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	tidak ada insentif	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	0	0	0	0	Lppd
	15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	0	0	1 kali	1 kali	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	0	10 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	206 konsultasi	63 konsultasi	280	280	Lppd
	19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	2861	6554	1700	3000	Lppd
	20	Laporan realisasi penanaman modal	M	202.144.392.038,81	214,4	194 M	194 M	Lppd
	21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	21 aparatur	14 Aparatur	15 orang	21	Lppd
	22	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Peusahaan	498 perusahaan	520 perusahaan	100 perusahaan	300 perusahaan	Lppd
	23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang tujuan dan sasaran</b>						
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,43%	1,25	1,3	1,3	Indikator Sasaran PD
	2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	277 ton	281	285	285	Indikator Program PD
	3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	16,1 kg/kapita/tahun	16,92	15,8	16,1	Indikator Program PD
	4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	-	93	89	89	Indikator Program PD
	5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	367 ton	374	375	375	Lppd
	6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
	7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	180	245	250	250	Lppd
	10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	450314 ekor	334.325 ekor	517.400 ekor	517.400 ekor	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>						
	2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	351.554 orang	543.207	425.000	425.000	Indikator Tujuan PD
	3	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Destinasi	34 destinasi	35	25 destinasi	34	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	%	107%	111,8%	10%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	%	1600%	175%	25%	100%	Indikator Program PD
	8	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	%	50%	111,8%	15%	100%	Indikator Program PD
	10	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	18,68%	11,29%	19,50%	19,50%	Indikator Program PD
	11	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,01%	3475%	2%	2%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	12	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,23%	54,96%	9%	9%	Lppd
	13	Tingkat hunian akomodasi	%	69,42%	63,58%	100%	100%	Lppd
	14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	16,39%		5,10%	16,39%	Lppd
	15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	265,90%	10,57%	266%	266%	Lppd
	16	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		34 sarpras	34	0	34	Lppd
	17	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		738 TDUP	870	704	738	Lppd
	18	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	21 orang	3475	925	925	Lppd
	19	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	6 kegiatan	41	5	6	Lppd
	20	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	Lppd
	21	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		0	67	2 kali	2 kali	Lppd
	22	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	19,32%	21,50%	19,50%	19,50%	Lppd
	23	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tempat	34 lokasi	34	3	34	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>						
	2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,40%	1,4	1,216	1,216	Indikator Sasaran PD
	3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,05	1,115	1,14	1,14	Indikator Sasaran PD
	4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	50%	55	60	60	Indikator Program PD
	5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	50%	50	75	75	Indikator Program PD
		persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10%	10	10	10	Indikator Program PD
	8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	89,50%	72	74	74	Indikator Program PD
	9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	10	12	12	Indikator Program PD
		persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	15%	20	20	20	Indikator Program PD
	11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		17.776	6,95	-	6,95	Lppd
	12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	1	2	2	2	Lppd
	13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	1 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
	14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	1	2	2	Lppd
	15	Persentase prasarana yang digunakan	%	66,70%		75	75	Lppd
	16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-		50	50	Lppd
	17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	70,29%		50	50	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>						
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,16	7,98	2,91	10,16	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	11,32	21,57	0,84	21,57	Indikator Sasaran Kota
	5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		25,25	26,64	24,05	26,64	Indikator Tujuan PD
	6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	1,30%	2,01	0,7	0,7	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	
	7	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi		-	102%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat		-	23,69%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	114%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100%	101,6%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100%	1005%	100%	100%	Indikator Program PD
	16	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	23,89%	26,46%	100%	100%	Lppd
	17	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	53,09%	42,29%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	116,94%	101,6%	100%	100%	Lppd
	19	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :						
		a. Pusat perbelanjaan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
		b. Toko swalayan	%	75%	100%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase penerbitan TDG	%	33,33%	60%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	56,33%	61,72%	100%	100%	Lppd
	22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	100%	100%	Lppd
	24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	100%	50%	100%	Lppd
	26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	%	79,44%	42,29%	100%	100%	Lppd
	38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VII</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>						
	2	persentase IKM yang berstandarisasi	%	40%	82%	44%	44%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	70%	81,61%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	90%	100,00%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	100%	100,00%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	9%	16,67%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	12,83%	15,14%	10,00%	10,00%	Indikator Program PD
	11	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	2,50%	9,38%	5%	5%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	8	
	12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	3,85%	2,72%	0,02%	0,02%	Lppd
	13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	Lppd
	14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100%	25%	25%	Lppd
	15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	810%	416	45%	45%	Lppd
	18	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	19	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	75%	75%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	14,29%	100%	50%	50%	Lppd
	21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	tidak ada	0%	0%	Lppd
	22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	2,47%	6,49%	1,20%	1,20%	Lppd
<b>B</b>		<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>						
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	89,40	90,33	88,60	90,33	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,99	98,27	98,42	98,42	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	80,70%	81,74%	81,58%	81,58%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
	4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	94,03%	95,03%	95,50%	95,50%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	94,50%	95,03%	95,50%	95,50%	Indikator Program PD
	8	Persentase rawan banjir/genangan	%	19,30%	18,26	18,47	18,47	Indikator Program PD



1	2	3	4	5	6	7	8	
	9	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95%	62,83%	77,98%	77.98%	Indikator Program PD
	10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	98,14%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,03%	81,04%	80,09%	80,09%	Indikator Program PD
	12	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100%	100%	79.47%	80.09 %	Lppd
	15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	0	Lppd
	16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0	0	0	0	Lppd
	17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,14%	100,00%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,02%	99,72%	99%	99%	Lppd
	19	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	99,52%	100%	72,69	72,69	Lppd
	20	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	99,06%	95,03%	94,06%	95.5 %	Lppd
	21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95%	95%	67.8%	77.98 %	Lppd
	22	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	6,7	6,07	3,3Km	6.12	Lppd
	23	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72.776	72,776	19.334 M	58.290	Lppd
	24	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		0	0	0	0	Lppd
	25	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		0	0	0	0	Lppd
	26	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ [oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	27	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	28	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		ada 6 pintu air, 4 pompa banjir, 9 kolam retensi	62	0	0	Lppd
	29	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0	0	0	0	Lppd
	30	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0	0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	31	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0	0	0	Lppd
	32	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	33	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	34	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		1 BUMD	1	1	1	Lppd
	35	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		0	0	0	0	Lppd
	36	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		0	0	0	0	Lppd
	37	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		0	0	0	0	Lppd
	38	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		0	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		0	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	Lppd
	41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	Lppd
	42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		0	0	0	0	Lppd
	43	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	98,02	100	100	100	Lppd
	44	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		0	0	0	0	Lppd
	45	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		0	0	0	0	Lppd
	46	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		0	0	0	0	Lppd
	47	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		0	0	0	0	Lppd
	48	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	Lppd
	49	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		0	0	0	0	Lppd
	50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	Lppd
	51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	19,13%	100%	98%	98%	Lppd
	52	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	171	234	420	420	Lppd
	53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	54	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 unit	20	20 Unit	20 Unit	Lppd
	56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 unit	20	20 Unit	20 Unit	Lppd
	57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	23 unit	38	5 Unit	26	Lppd
59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485 Km	433,485	433,095 Km	433.095	Lppd
60	Panjang jalan yang dibangun	km	1,888 Km	4.6km	0,45 km	0.45	Lppd
61	Panjang jembatan yang dibangun	m	31,8 m	43 m	20 m	20	Lppd
62	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	2,391 km	5.2 km	3,5 km	3,5 km	Lppd
63	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan		0	10 m	0	0	Lppd
64	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	8,563 km	13.27km	5 km	5	Lppd
65	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	0	0	0	Lppd
66	Panjang jalan yang dipelihara	km	51 km	52 km	40 km	40	Lppd
67	Panjang jembatan yang dipelihara	Km	3,9 km	3,95 km	3,8 km	3.8	Lppd
68	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Kali	2 orang	0	3	3	Lppd
69	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	495 orang	236	125	125	Lppd
70	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	236 orang	236	30	30	Lppd
71	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
72	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
73	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
74	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Lppd
75	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
76	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	data	1	Ada	1	1	Lppd
77	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Lppd
78	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	79	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	80	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	81	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Lppd
	82	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Lppd
	83	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	ada	Tidak	Ada	Ada	Lppd
	84	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Lppd
	85	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		165 badan usaha	100	100	100	Lppd
	86	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	0	0	0	Lppd
	87	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		80 badan usaha	60	50	50	Lppd
	88	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		165 badan usaha	100	100	100	Lppd
	89	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	0	30	30	Lppd
	90	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0	50	50	Lppd
	91	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0	0	0	Lppd
	92	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	0	0	100	100	Lppd
	93	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	98,13%	98,17%	100	100	SPM
	94	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,02%	99,72%	90	90	SPM
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
	1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	89,22	90,55	91,17	91,17	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,74%	99,77	99,80	99,80	Lanjutan Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	76,47%	79,27	80,62	80,62	Lanjutan Indikator Sasaran PD
	4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	99,39%	99,49%	99,50%	99,50%	Indikator Program PD
	6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	0	0	lppd
	8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kk	65	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
	9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	68,32%	98,59%	74,55%	74,55%	lppd
	10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	133	64 unit	100 unit	100	lppd
	11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	41	45	45	lppd
	12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	0	0	0	lppd
	13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	0	0	0	lppd
	14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	lppd
	15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	lppd
	16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	lppd
	17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	lppd
	18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	0	0	lppd
	19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0	0	0	lppd
	20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	lppd
	21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	lppd
	22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	lppd
	23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	65 rumah tangga	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
	24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	lppd
	25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	0	0	0	lppd

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	64,49 Ha	0,91 ha	16,41 ha	16,41 ha	lppd
27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	133 unit	64 unit	100 unit	100	lppd
28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	31,98 Ha	19,52 ha	12,08 ha	12,08	lppd
29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	41.409 rumah	44.831	42.429	42.429	lppd
30	Jumlah unit PK RTLH	unit	133 rumah	64	100 unit	100	lppd
31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	133 rumah	190	140 unit	140 unit	lppd
32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	lppd
33	Rasio rumah dan KK	%	125,98%	119,08%	170%	170%	lppd
34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	120 rumah	145 rumah	50	50	lppd
35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	41 rumah	41 perumahan	45	45	lppd
36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	lppd
37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	lppd
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	lppd
39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	unit	41 pengembang	41 perumahan	5948 unit	5948 unit	lppd
40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948 unit	lppd
41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	lppd
42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	lppd
43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	lppd
44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	0	0	0	Spm
45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	0	0	0	spm
<b>III</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>						
1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
3	persentase Penatagunaan Tanah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52	30,52	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		100%	0	0	0	Lppd
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	Lppd
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	Lppd
9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	1	5	1	1	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	10	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	100	0	1	1	Lppd
	11	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek		tidak ada	0	0	0	Lppd
	12	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		tidak ada	0	0	0	Lppd
	13	Dokumen Izin membuka tanah		tidak ada	0	0	0	Lppd
	14	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		tidak ada	0	0	0	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>						
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99%	58,13	57,85	58,13	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,61	50	51,31	51,31	Indikator sasaran PD
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,78	84,17	83,09	83,09	Indikator sasaran PD
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)			23,94	22,41	22,41	
	4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	98,04%	99,00%	99,00%	99,00%	Indikator sasaran PD
	5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	69,23%	71,79%	79,49%	79,49%	Indikator Program PD
	6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	55,90%	49,23%	50%	50%	Indikator Program PD
	7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	94,32%	96,59%	97,20%	97,20%	Indikator Program PD
	8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	72,50%	74%	75%	75%	Indikator Program PD
	9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	54,65%	64,70%	76,47%	76,47%	Indikator Program PD
	10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	90%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	140%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73,98%	72,98%	72%	72%	Indikator Program PD
	13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98,04%	99,00%	99,00%	99,00%	Lppd
	14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	100%	100%	100%	Lppd
	15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		ada	ada	ada	Ada	Lppd
	16	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,576	1,603	1,603	1,603	Lppd
	17	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	5,99	6,25	5,982	5,982	Lppd
	18	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan		belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	
	19	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00%	100%	76,47%	100%	Lppd
	20	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		tidak ada	ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
	21	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	22	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	23	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	24	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>						
	1	Kinerja ruas jalan	%	0,34	0,34	0,41	0,41	Indikator Tujuan PD
	2	Kecepatan lalu lintas	Km/jam	38,05 kam/ jam	39 km/jam	40 km/jam	40 km/jam	Indikator Sasaran PD
	3	Kinerja Angkutan Umum	%	40%	70%	42%	42%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	84%	100%	92%	92%	Indikator Program PD
	5	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0		-	-	Lppd
	6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,34%	0,34	0,41	0,41	Lppd
	7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	106,63%	115,13%	100%	100%	Lppd
	9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100%	100%	100%	Lppd



## **BAB VI PENUTUP**

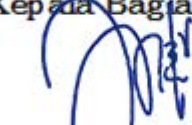
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2023 Kota Madiun disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. RKPD-P merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD-P Kota Madiun Tahun 2023 memuat perubahan pendapatan dan belanja pada masing-masing urusan, yang terangkum dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya.

Penyusunan RKPD-P ditujukan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sehingga diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rancangan RKPD-P Kota Madiun Tahun 2023 yang telah tersusun ini digunakan sebagai pedoman untuk:

1. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2023 agar tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Madiun Tahun 2023;
3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun 2023;
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun Tahun 2023 secara berkala.

RKPD-P Kota Madiun 2023 dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

**WALI KOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**